



Pemerintah
Kabupaten Pasuruan



RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2026





BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menyelaraskan arah kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. bahwa tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dijabarkan berupa program, kegiatan, dan subkegiatan, sehingga memerlukan perencanaan pembangunan jangka pendek atau periode 1 (satu) tahun atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk mewujudkan visi Kabupaten Pasuruan yang maju, sejahtera, dan berkeadilan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum maka diperlukan landasan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun dalam suatu peraturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 349).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Pasuruan
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 terdiri atas :
 - a. narasi RKPD Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. matriks Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- c. matriks Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. matriks Penyelarasan dan Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Nasional, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Sistematika narasi RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- a. bab I (satu) memuat mengenai pendahuluan;
 - b. bab II (dua) memuat mengenai gambaran umum kondisi daerah;
 - c. bab III (tiga) memuat mengenai kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
 - d. bab IV (empat) memuat mengenai sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. bab V (lima) memuat mengenai rencana kerja dan pendanaan daerah;
 - f. bab VI (enam) memuat mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
 - g. bab VII (tujuh) memuat mengenai penutup.

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 digunakan sebagai pedoman oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 18-7-2025
BUPATI PASURUAN,


MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 18-7-2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,



YUSHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 32

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR GAMBAR.....	3
DAFTAR TABEL.....	9
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-8
1.4 Maksud dan Tujuan	I-9
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I-10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-53
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-85
2.1.4 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan....	II-138
2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah	II-141
2.1.6 Kerja Sama Daerah	II-172
2.1.7 BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda	II-173
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	II-174
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-180
2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.....	II-180
2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	II-182
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1 Telaah Arah Kebijakan Ekonomi Nasional	III-1
3.1.2 Telaah Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur	III-5
3.1.3 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Tahun 2026	III-7
3.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Pasuruan	III-14

3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-17
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-17
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-24
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-27
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026	IV-12
4.2.1	Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2026	IV-12
4.2.2	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026	IV-15
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
6.1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV-1
6.2	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	IV-3
BAB VII	PENUTUP.....	VII-1
7.1	Kesimpulan Penting	VII-1
7.2	Kaidah Pelaksanaan	VII-2
7.3	Pengendalian dan Evaluasi.....	VII-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan	I-2
Gambar 1.2	Pendekatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan	I-2
Gambar 1.3	Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-9
Gambar 2.1	Peta Wilayah Kabupaten Pasuruan	II-2
Gambar 2.2	Kondisi Topografi Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Ketinggian.....	II-4
Gambar 2.3	Iklim Kabupaten Pasuruan	II-18
Gambar 2.4	Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan ...	II-18
Gambar 2.5	Peta Sebaran Geosite di Kabupaten Pasuruan.....	II-18
Gambar 2.6	Daya Dukung Air Tahun 2024	II-19
Gambar 2.7	Grafik Daya Dukung Pangan Tahun 2024 dan Tahun 2029	II-20
Gambar 2.8	Jumlah Konsumsi Listrik Perkapita di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-22
Gambar 2.9	Indeks Ketahanan Air di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-24
Gambar 2.10	Rasio Kebutuhan dan Ketersediaan Air Baku Kabupaten Pasuruan Tahun 2023-2024	II-25
Gambar 2.11	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024.....	II-2
Gambar 2.12	Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-28
Gambar 2.13	Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-28
Gambar 2.14	Indeks Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.....	II-29
Gambar 2.15	Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-31
Gambar 2.16	Persentase Pengurangan Sampah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-31

Gambar 2.17	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-33
Gambar 2.18	Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-35
Gambar 2.19	Potensi Penurunan GRK di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-36
Gambar 2.20	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk	II-36
Gambar 2.21	Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2024	II-37
Gambar 2.22	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024	II-39
Gambar 2.23	Indeks Gini Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024	II-48
Gambar 2.24	Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024	II-49
Gambar 2.25	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024	II-51
Gambar 2.26	PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Perkapita	II-52
Gambar 2.27	PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Jawa Timur	II-53
Gambar 2.28	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 (Metode Baru Hasil Long Form SP2020)	II-54
Gambar 2.29	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-56
Gambar 2.30	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024.....	II-57
Gambar 2.31	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024.....	II-57
Gambar 2.32	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2024.....	II-58

Gambar 2.33	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-59
Gambar 2.34	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-61
Gambar 2.35	Angka Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis (Treatment Coverage) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024	II-63
Gambar 2.36	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (Treatment Success Rate) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024	II-65
Gambar 2.37	Jumlah Kasus HIV di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-66
Gambar 2.38	Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-67
Gambar 2.39	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024	II-67
Gambar 2.40	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024	II-70
Gambar 2.41	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024.....	II-70
Gambar 2.42	Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2024	II-71
Gambar 2.43	Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024	II-73
Gambar 2.44	Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024	II-76
Gambar 2.45	Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-77
Gambar 2.46	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasuruan Tahun 2023-2024	II-78
Gambar 2.47	Indeks SPBE di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-79
Gambar 2.48	Perhitungan Indeks Integritas	II-80
Gambar 2.49	Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024.....	II-81
Gambar 2.50	Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pasuruan	

	Tahun 2020-2024 (Metode Baru Hasil Long Form SP2020	II-82
Gambar 2.51	Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-82
Gambar 2.52	Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-83
Gambar 2.53	Angka Ketergantungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-84
Gambar 2.54	Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-85
Gambar 2.55	Jumlah Wisatawan di Hotel Berbintang Tahun 2020- 2024	II-86
Gambar 2.56	Proporsi Jumlah Industri Menengah dan Industri Besar di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024.....	II-87
Gambar 2.57	Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023	II-88
Gambar 2.58	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-94
Gambar 2.59	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024.....	II-95
Gambar 2.60	Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-96
Gambar 2.61	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB ADHB di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024.....	II-97
Gambar 2.62	Return On Asset BUMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-98
Gambar 2.63	Proporsi Pengeluaran PMTB terhadap PDRB ADHK di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024.....	II-99
Gambar 2.64	Kontribusi PDRB Kabupaten Pasuruan terhadap Jawa Timur Tahun 2020-2024.....	II-100
Gambar 2.65	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Tingkat Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2024..	II-101
Gambar 2.66	ICOR (Incremental Capital Out Ratio) Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-102

Gambar 2.67	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-103
Gambar 2.68	Persentase Desa Mandiri Kab.Pasuruan Tahun 2020-2024	II-111
Gambar 2.69	Indeks Aksesibilitas Wilayah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-111
Gambar 2.70	Rasio Pajak terhadap PDRB di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-114
Gambar 2.71	Tingkat Inflasi Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-123
Gambar 2.72	Realisasi Investasi (Triliun Rupiah) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-124
Gambar 3.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara ..	III-2
Gambar 3.2	Distribusi dan Pertumbuhan PDRB Jawa Timur 2024.....	III-5
Gambar 3.3	Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Timur, dan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	III-8
Gambar 3.4	Laju Inflasi Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	III-9
Gambar 3.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020 – 2024.....	III-10
Gambar 3.6	Angka Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020 – 2024	III-11
Gambar 3.7	Indeks Gini Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024.....	III-12
Gambar 3.1	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2027	III-15
Gambar 3.2	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2027	III-18
Gambar 3.3	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2027	III-22
Gambar 4.2	1 Visi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan 2025-2029	IV-2
Gambar 4.3	Misi RPJMD Kabupaten Pasuruan 2025-2029.....	IV-4

Gambar 4.4	Tujuan 1 RPJMD Kabupaten Pasuruan 2025-2029 .IV-6
Gambar 4.5	Tujuan 2 RPJMD Kabupaten Pasuruan 2025-2029 .IV-7
Gambar 4.6	Tujuan 3 RPJMD Kabupaten Pasuruan 2025-2029 .IV-8
Gambar 4.7	Tujuan 4 RPJMD Kabupaten Pasuruan 2025-2029 .IV-8
Gambar 4.8	Penahapan RPKMD Kabupatren Pasuruan Tahun 2025-2029IV-9
Gambar 4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten PasuruanIV-10
Gambar 4.9	Strategi Jangka Pendek Menuju Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomu yang Produktif dan Inklusif IV-13
Gambar 4.10	Target Indikator Kinerja Utama Jawa Timur 2026 .IV-19
Gambar 4.11	Perumusan Tema RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026IV-21
Gambar 4.12	Keselarasan Tema RKPD Kabupaten Pasuruan dengan Tema RKP dan Tema RKPD Provinsi Jawa Timur...IV-22
Gambar 4.13	Grand Design Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026IV-24

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Kecamatan di Kabupaten Pasuruan dan Luas Wilayahnya.....	II-1
Tabel 2.2	Kondisi Ketinggian Topografi Berdasarkan Klasifikasinya	II-4
Tabel 2.3	Jenis Batuan di Wilayah Kabupaten Pasuruan	II-7
Tabel 2.4	Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan	II-12
Tabel 2.5	Kondisi Daya Dukung Air Kabupaten Pasuruan Tahun 2024	II-19
Tabel 2.6	Daya Dukung Pangan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024	II-20
Tabel 2.7	Sungai-Sungai di Kabupaten Pasuruan.....	II-23
Tabel 2.8	Jumlah Sumber Air Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pasuruan	II-24
Tabel 2.9	Kondisi Daya Dukung Air Kabupaten Pasuruan Tahun 2024	II-25
Tabel 2.10	Timbulan Sampah terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024.	II-32
Tabel 2.11	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan sampah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-38
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024	II-40
Tabel 2.13	Persebaran Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024 (Jiwa)	II-41
Tabel 2.14	Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024 (Jiwa/Km ²)	II-42
Tabel 2.15	Rasio Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024	II-43
Tabel 2.16	Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024	II-43
Tabel 2.17	Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024 (Jiwa)	II-45

Tabel 2.18	Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024	II-45
Tabel 2.19	Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan yang dianut di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024	II-46
Tabel 2.20	Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029	II-47
Tabel 2.21	Proyeksi Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 (dalam ribu jiwa)	II-48
Tabel 2.22	Proyeksi Penduduk Usia Produktif, Penduduk Usia Lanjut, Angka Ketergantungan dan Bonus demografi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029	II-51
Tabel 2.23	Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-55
Tabel 2.24	Perkembangan IPM dan Komponen IPM di Kabupaten Pasuruan Tahun 2017-2021 (Metode Lama SP2010)	II-55
Tabel 2.25	Perkembangan IPM dan Komponen IPM di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2024 (Metode Baru Hasil Long Form SP2020)	II-60
Tabel 2.26	Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-68
Tabel 2.27	Angka Literasi dan Numerasi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024	II-73
Tabel 2.28	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024 ...	II-75
Tabel 2.27	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024	II-89
Tabel 2.28	Nilai Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2023	II-90
Tabel 2.29	Pengukuran Indeks Kebudayaan Daerah	II-91
Tabel 2.30	Indeks Kebudayaan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dan 2024	II-91
Tabel 2.31	Capaian Pembangunan Perlindungan Anak Kabupaten Pasuruan	II-92

Tabel 2.32	Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2024	II-93
Tabel 2.33	Indeks Integritas Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024	II-99
Tabel 2.34	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2024	II-99
Tabel 2.35	Perkembangan Penanganan Pelanggaran Perda dan Gangguan Trantibum di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-104
Tabel 2.36	Realisasi IKK Outcome Tahun 2020-2024	II-104
Tabel 2.34	Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2024	II-112
Tabel 2.35	Indeks Integritas Kabupaten Pasuruan Tahun 2021- 2024	II-113
Tabel 2.36	Realisasi IKK Outcome Tahun 2020-2024	II-115
Tabel 2.37	Luasan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024	II-116
Tabel 2.38	Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2024	II-126
Tabel 2.39	Jumlah Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022	II-126
Tabel 2.40	Daftar Jenis Perlengkapan Jalan dan Prasarana Jalan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2024	II-134
Tabel 2.41	Nilai PMA dan PMDN di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-135
Tabel 2.42	Jumlah Kelompok Seni Budaya di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024	II-137
Tabel 2.43	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-141
Tabel 2.44	Luasan dan Sebaran LP2B di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022	II-147
Tabel 2.45	Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Tahun 2020- 2024	II-150
Tabel 2.46	Dimensi Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024	II-151

Tabel 2.47	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tahun 2020-2024	II-153
Tabel 2.48	Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2020-2024	II-154
Tabel 2.49	Ketercapaian TPB Kabupaten Pasuruan.....	II-156
Tabel 2.50	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024	II-160
Tabel 2.51	Nilai Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2023	II-166
Tabel 2.52	Pengukuran Indeks Ekonomi Berkelanjutan	II-168
Tabel 2.53	Indeks Ekonomi Keberlanjutan Tahun 2023-2024 ...	II-14
Tabel 2.54	Perhitungan Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Pasuruan	II-16
Tabel 2.55	Hasil Perhitungan Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023-2024	II-23
Tabel 2.56	Kondisi Jalan di Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023	II-29
Tabel 2.57	Standar Pelayanan Minimal Bidang Jalan di Indonesia.....	II-1
Tabel 2.58	Nilai PMA dan PMDN di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	II-3
Tabel 2.59	Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2022-2024	II-1
Tabel 2.60	Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Produk Unggulan Daerah (PUD)	II-1
Tabel 2.61	Rekapitulasi Status Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	II-1
Tabel 2.62	Permasalahan Strategis Daerah Menurut Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026	II-1
Tabel 2.63	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan	II-1
Tabel 3.1	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2027	III-1

Tabel 3.2	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2027	III-1
Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2027	III-1
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pasuruan	III-1
Tabel 4.2	Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026	III-1
Tabel 4.3	Langkah Strategis Arah Kebijakan Jawa Timur Tahun 2026	III-1
Tabel 4.4	Standar Pelayanan Minimal Bidang Jalan di Indonesia.....	III-1
Tabel 4.3.1	Penelaahan Pokok Pikiran DPRD untuk RKPD Tahun 2026	III-1
Tabel 6.1	Capaian, Proyeksi, dan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 – 2026.....	III-1
Tabel 6.2	Capaian, Proyeksi, dan Target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024 – 2026.....	III-1

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2026

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sedangkan perencanaan pembangunan daerah merupakan proses menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

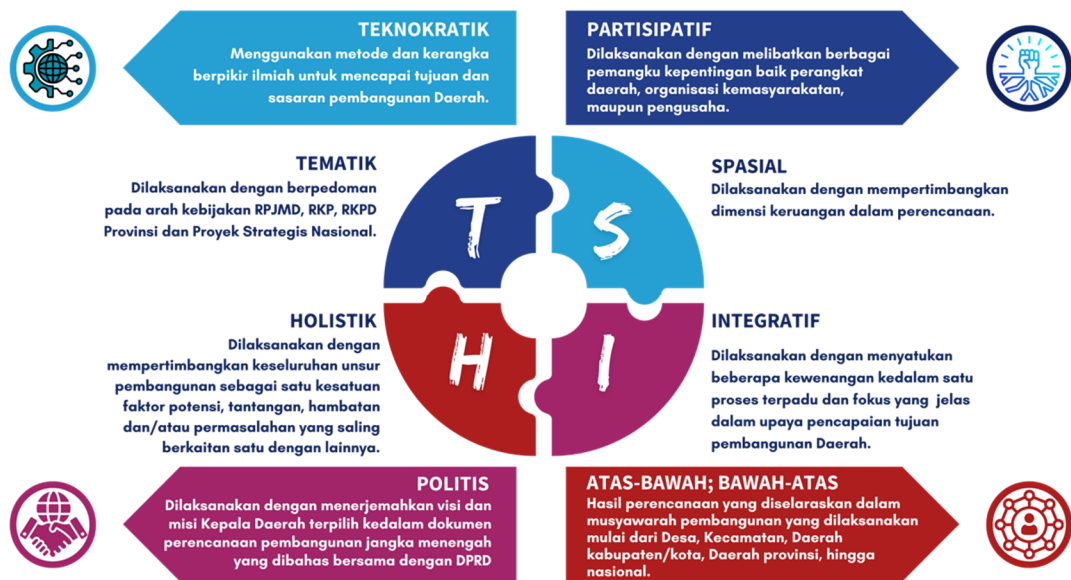
Sebagai upaya mencapai kesinambungan dan tujuan pembangunan, maka Pemerintah Daerah perlu menyusun perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya baik secara vertikal maupun horizontal. Dokumen rencana pembangunan daerah disusun secara berjenjang berdasarkan periodisasi waktu perencanaannya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, serta merupakan landasan dalam penyusunan RAPBD.



Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan
Sumber: Pasal 73-107, Permendagri 86 tahun 2017.

RKPD disusun dengan diawali pembentukan dan orientasi tim penyusun bulan November 2 (dua) tahun sebelum rencana yang dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD pada minggu pertama bulan Desember. Rancangan RKPD merupakan penyempurnaan ranwal RKPD berdasarkan telaah atas dokumen perencanaan lainnya dan kesepakatan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April. Sebelum Rancangan akhir ditetapkan, terlebih dahulu dilaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka menyepakati permasalahan dan isu strategis pembangunan serta prioritas pembangunan pada tahun 2026.



Gambar 1.2 Pendekatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan
Sumber: Pasal 7-10, Permendagri 86 tahun 2017.

Pendekatan penyusunan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 secara proses dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan. Kelima pendekatan tersebut adalah: (1) pendekatan politik, (2) pendekatan teknokratik, (3) pendekatan partisipatif, (4) pendekatan *bottom-up*, serta (5) pendekatan *top-down*. Sedangkan secara substansi RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2026 disusun dengan menggunakan pendekatan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan tersebut dilakukan dalam rangka menjaga keselarasan perencanaan, berbasis potensi daerah, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2026 merupakan penjabaran dari arah kebijakan rencana pembangunan tahun pertama RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 sehingga prioritas dan tema pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2026 berpedoman pada strategi penahapan RPJMD di tahun berkenaan. Selain itu RKPD Tahun 2026 juga disusun dengan memperhatikan kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 serta saran, masukan, dan telaah pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan sebagai hasil reses penjangkaran aspirasi masyarakat

Dalam upaya menjaga kesinambungan RKPD Kabupaten Pasuruan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029, maka tema pembangunan pada tahun 2026 adalah 'hilirisasi dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah melalui integrasi dan kolaborasi lintas sektoral untuk mewujudkan kemandirian pangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif'. Hilirisasi potensi unggulan daerah dilakukan dengan memperkuat *supporting system* hulu-hilir produk unggulan daerah dengan mendorong peran usaha mikro kecil dalam meningkatkan produktivitasnya melalui dukungan semua pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan di Kabupaten Pasuruan. Kebijakan ini akan mendorong peningkatan nilai tambah (*Value Added*) pada produk unggulan di tingkat masyarakat dan usaha mikro kecil melalui peningkatan kompetensi dan daya saing SDM tenaga kerja, peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas bahan baku,

pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif, peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital.

Selanjutnya, RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2026 akan menjadi acuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan APBD tahun 2026.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

- Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

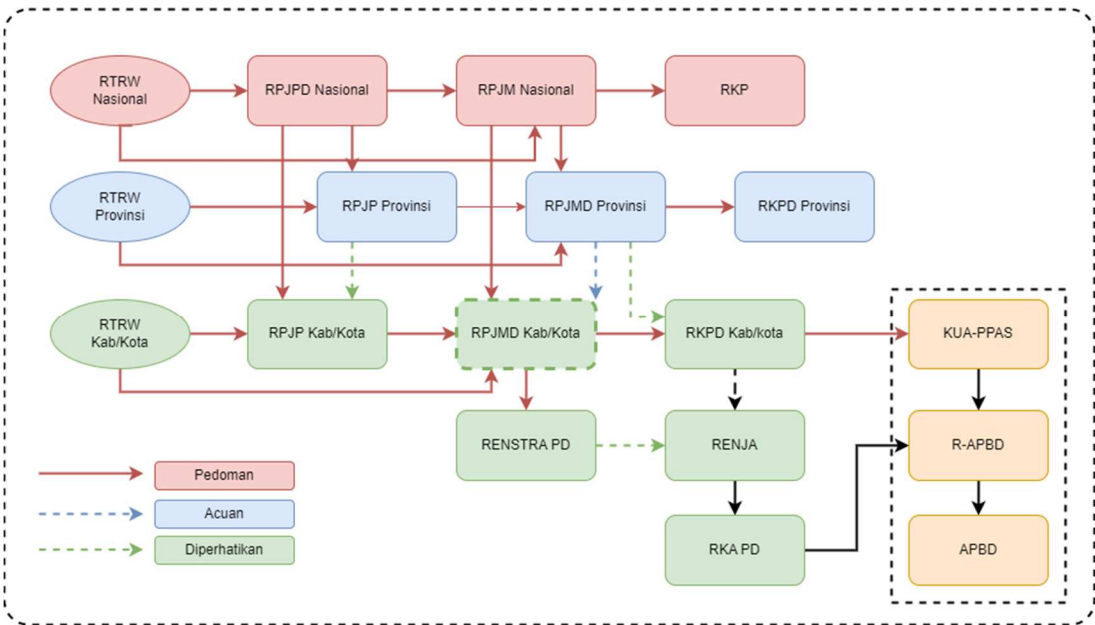
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 667);
26. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024

- tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 509 Seri D);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
 31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 18 Seri E);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 349);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 352).

1.3 Hubungan antar Dokumen.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen perencanaan pembangunan daerah (kabupaten) disusun dengan

mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, serta rencana tata ruang wilayah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan daerah yang terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun daerah.



Gambar 1.3 Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
 Sumber: Permendagri Nomor 86 tahun 2017, diolah.

RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2026 disusun dengan berpedoman dan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur. Selain itu, penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan juga disusun dengan memperhatikan arah kebijakan kewilayahan dan program strategis nasional. Keterkaitan dan keselarasan antar dokumen ini sangat penting bagi penyusunan kebijakan daerah yang konsisten demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2026 adalah untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2026 adalah:

1. Menjabarkan prioritas pembangunan daerah dalam satu tahun guna mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pasuruan;
2. Mengintegrasikan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pembangunan;
3. Memastikan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran guna mendukung optimalisasi penggunaan sumber daya daerah;
4. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026;
5. Menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2026.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada subbab ini tercantum peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Mengemukakan kondisi daerah menurut aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum. Selain itu juga menyajikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan permasalahan pembangunan daerah.

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis. Sub bab ini memuat beberapa bahasan di bawah ini:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana, serta kondisi demografi wilayah.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.2. *Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD (Triwulan IV Tahun 2024).*

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

2.3. *Permasalahan Pembangunan Daerah*

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan sasaran pembangunan daerah dan permasalahan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

2.3.1. *Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.*

Menyajikan permasalahan berdasarkan sasaran pembangunan daerah berdasarkan RPJMD tahun 2025-2029.

2.3.2. *Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah*

Menyajikan permasalahan berdasarkan urusan pemerintahan daerah (wajib dan pilihan), beserta unsur pendukung, penunjang, pengawasan, kewilayahan, dan pemerintahan umum.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. *Arah Kebijakan Ekonomi Daerah*

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota.

3.2. *Arah Kebijakan Keuangan Daerah*

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. *Tujuan dan Sasaran Pembangunan*

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

4.3. Penelaahan Pokok Pikiran DPRD

Ringkasan usulan pokok pikiran DPRD yang disampaikan melalui aplikasi SIPD.

4.4. Subkegiatan Prioritas Pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Identifikasi subkegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program, kegiatan, dan subkegiatan berserta target kinerja dan pagu pendanaan indikatif.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VII PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan penting, kaidah pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

1) Posisi dan Peran Strategis Daerah

Secara geografis, Kabupaten Pasuruan terletak pada koordinat 7° 32'42.14" - 7° 57'24.32" Lintang Selatan dan 112° 34'29.31"- 113° 6'0.29" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Pasuruan sebesar 1.474,02 km2 dengan batas administrasi Kabupaten Pasuruan meliputi:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, dan Selat Madura
- Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Malang
- Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu

Wilayah Kabupaten Pasuruan terbagi dalam wilayah administratif sebanyak 24 kecamatan, 24 kelurahan dan 341 desa, secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1.

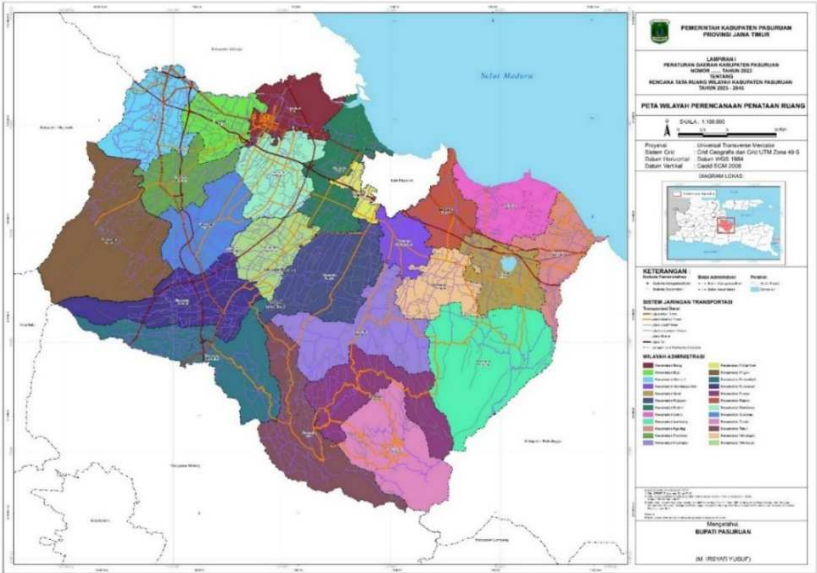
Tabel 2.1
Daftar Kecamatan di Kabupaten Pasuruan dan Luas Wilayahnya

No.	Nama Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km2)	Persentase (%)
		Desa	Kelurahan		
1	Purwodadi	13	-	102,46	6,95
2	Tutur	12	-	86,30	5,85
3	Puspo	7	-	58,35	3,96
4	Lumbang	12	-	125,55	8,52
5	Pasrepan	17	-	89,95	6,10
6	Kejayan	24	1	79,15	5,37
7	Wonorejo	15	-	47,30	3,21
8	Purwosari	14	1	59,87	4,06
9	Sukorejo	19	-	58,18	3,95
10	Prigen	9	-	121,90	8,27
11	Pandaan	14	4	43,27	2,94
12	Gempol	15	-	64,92	4,40
13	Beji	12	2	39,90	2,71
14	Bangil	4	11	44,60	3,03
15	Rembang	17	-	42,52	2,88

No.	Nama Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km2)	Persentase (%)
		Desa	Kelurahan		
16	Kraton	25	-	50,75	3,44
17	Pohjentrek	11	3	11,88	0,81
18	Gondangwetan	19	1	26,25	1,78
19	Winongan	18	-	45,97	3,12
20	Grati	14	1	50,78	3,45
21	Nguling	15	-	42,60	2,89
22	Lekok	11	-	46,57	3,16
23	Rejoso	16	-	37,00	2,51
24	Tosari	8	-	98,00	6,65
	Total			1.474,02	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Letak wilayah daerah Kabupaten Pasuruan, dilihat dari segi ekonomi sangat strategis, karena terletak pada segitiga jalur ekonomi Surabaya - Jember / Banyuwangi / Bali, Surabaya - Malang dan Malang - Jember / Banyuwangi / Bali, dilintasi Jalur Angkutan Kereta Penumpang dan Barang Surabaya - Bangil - Banyuwangi serta Surabaya - Bangil - Malang. Terlebih lagi dengan pembangunan Jalan Tol Porong - Gempol, Gempol - Pandaan, Pandaan - Malang, Gempol - Pasuruan, dan Pasuruan - Probolinggo semakin membuat Kabupaten Pasuruan menjadi pilihan yang tepat bagi pengembangan industri, dengan semakin pendeknya waktu tempuh ke Surabaya. Peta wilayah Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Pasuruan
 Sumber : Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
 Kabupaten Pasuruan, 2024

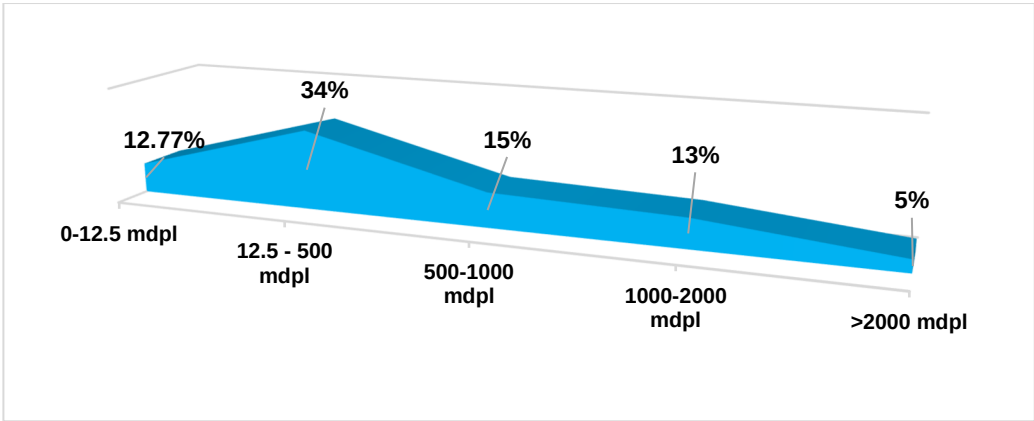
2) Potensi Sumber Daya Daerah

A. Topografi

Kabupaten Pasuruan memiliki ketinggian antara 0 – 3.313 mdpl yang dirinci per wilayah administrasi kecamatan. Dataran rendah terdapat di bagian utara, tepatnya di Pesisir Selat Madura, dengan ketinggian 0 - 290 mdpl. Kawasan tersebut memiliki ancaman bencana banjir. Dataran tinggi berada pada bagian tenggara (Kawasan Gunung Bromo) dan bagian barat daya (Kawasan Gunung Welirang). Kawasan pegunungan di Kabupaten Pasuruan, sebagian memiliki kelerengan yang terjal atau curam, sehingga memiliki potensi bencana longsor. Berdasarkan tingkat kelerengan, Wilayah Kabupaten Pasuruan dapat dibagi menjadi tujuh (7) yaitu:

1. Kelerengan 0 – 2%: antara lain seluruh Kecamatan Bangil, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kraton, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Rejosro dan Kecamatan Lekok, sebagian Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Winongan, Kecamatan Grati dan Kecamatan Nguling.
2. Kelerengan 2 – 5%: antara lain sebagian Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Winongan, Kecamatan Grati dan Kecamatan Nguling.
3. Kelerengan 5 – 8%: antara lain sebagian Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tukur, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Winongan dan Kecamatan Lekok.
4. Kelerengan 8 – 15%: antara lain sebagian Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tukur, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Gempol, Kecamatan Winongan dan Kecamatan Grati.

- Kelereng 15 – 25%: antara lain adalah sebagian Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tuter, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Gempol dan Kecamatan Beji.
- Kelereng 25 – 45%: antara lain sebagian Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tuter, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen dan Kecamatan Gempol.
- Kelereng > 45%: antara lain adalah sebagian Kecamatan Tuter, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, dan Kecamatan Prigen.



Gambar 2.2 Kondisi Topografi Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Ketinggian

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Wilayah Kabupaten Pasuruan diklasifikasikan menjadi 5 (lima) jenis wilayah sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Kondisi Ketinggian Topografi Berdasarkan Klasifikasinya

N o	Jenis Wilayah	Ketinggian (mdpl)	Luas (Ha)	Fungsional Wilayah	Persebaran Wilayah
1	Wilayah Pesisir	0 - 12,5	18.819,04	Kawasan pengembang an usaha perikanan dan pertambakan	Pada sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Bangil, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kraton, Kecamatan Pohjentrek,

N o	Jenis Wilayah	Ketinggian (mdpl)	Luas (Ha)	Fungsional Wilayah	Persebaran Wilayah
					Kecamatan Gondangwetan , Kecamatan Rejos, Winongan, Kecamatan Grati, Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling
2	Wilayah dataran	12,5 – 500	50.384,02 ha.	Kawasan pengembangan pertanian, permukiman, perindustrian	Pada sebagian wilayah kecamatan – kecamatan di Kabupaten Pasuruan kecuali Kecamatan Tosari
3	Wilayah Perbukitan	500 – 1000	21.877,17 ha	Kawasan untuk tanaman keras/tahunan dan sebagai penyangga bagi kawasan perlindungan tanah dan air serta untuk lahan pertanian tanaman pangan dengan sistem terasiring	Sebagian kawasan Kecamatan Lumbang, Kecamatan Gempol, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tukur, Kecamatan Tosari, Pasrepan, Kecamatan Puspo, Kecamatan Purwosari, dan Kecamatan Prigen
4	Wilayah Pegunungan	1.000-2.000 mdpl	18.615,08 ha	Kawasan penyangga untuk perlindungan tanah dan air	Sebagian kawasan Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tukur, Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Puspo, Kecamatan Purwosari dan Kecamatan Prigen
5	Kawasan perguruan tinggi	> 2000 mdpl	7.920,77	Kawasan hutan lindung yang berfungsi	Sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi,

N o	Jenis Wilayah	Ketinggian (mdpl)	Luas (Ha)	Fungsional Wilayah	Persebaran Wilayah
				untuk melindungi kawasan bawahannya	Kecamatan Tukur, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Puspo, Purwosari, dan Kecamatan Prigen

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

B. Geologi dan Jenis Tanah

Secara geologi, Bagian selatan Kabupaten Pasuruan, termasuk dalam Pegunungan Malang Selatan dan didominasi oleh batuan vulkanik. Batuan ini terbentuk dari aktivitas gunung berapi di masa lalu dan mencakup berbagai jenis seperti andesit, basalt, dan batuan piroklastik. Gunung-gunung berapi seperti Gunung Arjuno, Gunung Welirang adalah contoh dari sumber batuan vulkanik di wilayah ini.

Bagian utara dan timur Kabupaten Pasuruan terdiri dari batuan sedimen. Batuan-batuan ini termasuk endapan sungai, delta, dan sedimen laut yang terbentuk dari proses-proses geologis seperti pengendapan, sedimentasi, dan tektonik. Sungai-sungai yang melintasi Kabupaten Pasuruan membawa material endapan dari pegunungan dan perbukitan di sekitarnya. Di dataran rendah, terdapat endapan alluvial yang subur dan kaya akan bahan organik, menjadi dasar bagi pertanian yang makmur.

Wilayah Kabupaten Pasuruan terletak di zona yang aktif secara tektonik, dengan adanya patahan-patahan dan rekahan geologi yang berpotensi menyebabkan gempa bumi. Aktivitas tektonik ini juga berkontribusi terhadap pembentukan relief dan pola drainase di wilayah ini. Beberapa bagian Kabupaten Pasuruan juga mengandung batu gamping (batu kapur), yang sering kali terbentuk dari endapan laut dan menjadi sumber daya penting untuk industri konstruksi dan bahan bangunan.

Dilihat dari struktur geologi, Kabupaten Pasuruan terbagi atas dua kelompok besar yaitu gunung api kuarter muda (*young quarternary*) seluas 52,43% dan kuarter tua (*old quarternary*) seluas 34,95%. Kondisi Geologi wilayah Kabupaten Pasuruan terdiri dari dua

belas (12) satuan batuan yaitu Satuan Alluvium (Qa), Satuan Tuff Rabano (Qvtr), Satuan batuan gunung api kuarter atas penanggungan (Qvn), Satuan batuan gunung api arjuno welirang (Qvaw), Satuan batuan gunung api kuarter tengah ringgit (Qvr), Satuan gunung api kuarter tengger tua (Qpvtr).

Jenis batuan di wilayah Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok besar yaitu: batuan permukaan, batuan sedimen dan batuan gunung api. Penjelasan masing-masing jenis batuan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jenis Batuan di Wilayah Kabupaten Pasuruan

Jenis Batuan	Karakteristik dan Persebaran
Endapan Permukaan	
Batuan Alluvium	• Terdiri dari bahan kerakal, kerikil, pasir, lempung dan lumpur • Terdiri dari endapan sungai Rejoso dan endapan pantai sepanjang Selat Madura
Batuan Sedimen	
Formasi Kabuh	• Terdiri dari bahan batu pasir tufan, batu lempung tufan, batu pasir gampingan, konglomerat, lempung dan tuf vulkan • Sebarannya tidak luas, terdapat disekitar Desa Raci dan di Beji
Formasi Jombang	• Terdiri dari bahan breksi, batu pasir tufan, batu lempung tufan, lempung, batu gamping dan tufan • Sebarannya terdapat di sekitar Raci, sebelah selatan Bangil, Beji dan Gondangwetan
Formasi Welang	• Terdiri Terdiri dari bahan batu pasir tufan, batupasir, lempung, konglomerat dan tuf vulkan • Sebarannya tidak luas di Sungai Welang
Batuan Gunung Api	
Batuan Gunung Api Quarter Bawah (Gendis)	• Terdiri dari bahan breksi gunung api, tuf breksi, lava, tuf dan aglomerat
Batuan Gunung Api Quarter Tengah (Ringgit)	• Terdiri dari batuan gunung api ringgit, batuan gunung api tengger tua
Batuan Gunung Api Arjuna – Welirang	• Terdiri dari breksi gunung api, lava, breksi tufan dan tuf
Batuan Gunung Api Tengger	• Terdiri dari tuf pasiran, tuf batu apung, tuf abu dan aglomerat
Tuf Rabano	• Terdiri dari tuf pasiran, tuf batu apung, breksituf dan tuf halus
Batuan Gunung Api Kuarter Atas Penanggungan	• Terdiri dari breksi gunung api, lava tuf, breksi tufan, aglomerat dan lahar

Jenis Batuan	Karakteristik dan Persebaran
Batuan Gunung Api Bromo	• Terdiri dari breksi gunung api, lava, tuf, tuf breksi, dan lahar • Batuan ini merupakan endapan hasil kegiatan erupsi dari kelompok Gunung Bromo.
Pasir Gunung Api Tengger	• Terdiri dari pasir gunung api, bom gunung api dan batu apung • Pasir gunung api ini merupakan endapan piroklastika muda yang terendapkan dalam kawah tengger, berbentuk tapal kuda yang mengelilingi kelompok G. Bromo

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Proses geologi yang kompleks di Kabupaten Pasuruan membentuk banyak rekaman peristiwa geologi menarik yang perlu dijadikan sebagai Warisan Geologi, agar tetap terjaga kelestariannya dan dapat dijadikan sebagai Warisan Geologi, baik tingkat Nasional maupun tingkat Internasional.

Selanjutnya terkait jenis tanah di Kabupaten Pasuruan secara garis besar dikelompokkan dalam 6 (enam) kelompok besar yaitu:

1. Alluvial
 - a. Sifat dan Corak
 - Warna kelabu, tekstur liat, keasaman aneka, dengan kandungan zat organik lemah dan tingkat kejenuhan sedang hingga tinggi
 - Permeabilitas: rendah, Kepekaan erosi: tinggi tetapi karena daerahnya datar tidak sampai lanjut tingkatnya
 - b. Pemakaian: padi sawah, palawija dan perikanan
2. Regosol
 - a. Sifat dan Corak
 - Warna: kelabu hingga kuning, Tekstur: pasir, Kadar liat: <40%, Keasaman: aneka, Zat organik: kadar rendah, Kejenuhan: aneka, Permeabilitas: tinggi, Kepekaan erosi: tinggi
 - b. Pemakaian: padi sawah, palawija, tebu dan sayuran
3. Andosol
 - a. Sifat dan Corak

- Warna: hitam hingga kuning, Tekstur: lempung hingga debu dan liat menurun, Keasaman: agak masam hingga netral, Zat organik: lemah, Kejenuhan: basa, Permeabilitas: sedang, Kepekaan erosi: besar
- b. Pemakaian: sayuran, bunga-bunga, teh, kopi dan hutan pinus
- 4. Grumusol
 - a. Sifat dan Corak
 - Warna: kelabu hingga hitam, Tekstur: liat makin ke bawah makin meningkat, Keasaman: sedikit asam hingga alkalin, Zat organik: kadar rendah, Kejenuhan: basa tinggi, Permeabilitas: rendah, Kepekaan erosi: besar
 - b. Pemakaian: padi sawah, jagung, kedelai, tebu, kapas dan hutan jati
- 5. Mediteran
 - a. Sifat dan Corak
 - Warna: kuning hingga merah, Tekstur: lempung liat, Keasaman: agak masam hingga netral, zat organik: rendah, Kejenuhan: basa tinggi, Permeabilitas: sedang, Kepekaan erosi: besar hingga sedang
 - b. Pemakaian: padi sawah, tegalan dan rumput ternak
- 6. Latosol
 - a. Sifat dan Corak
 - Warna: merah hingga kuning, Tekstur: liat tetap dari atas hingga ke bawah, Keasaman: masam hingga agak masam, Zat organik: kadar rendah hingga agak sedang di lapisan atas dan menurun ke bawah, Kejenuhan: basa rendah hingga sedang, Permeabilitas: tinggi, Kepekaan erosi: kecil
 - b. Pemakaian: padi sawah, jagung, umbian, kelapa, coklat, cengkeh, kopi maupun hutan tropika.

C. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Pasuruan pada umumnya beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh tiupan angin Muson. Angin Muson mempengaruhi pola iklim dan mengakibatkan terjadinya musim hujan (angin Muson Timur) dan musim kemarau (angin Muson Barat).

Kondisi iklim yang ada di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Iklim Kabupaten Pasuruan
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

D. Penggunaan Lahan

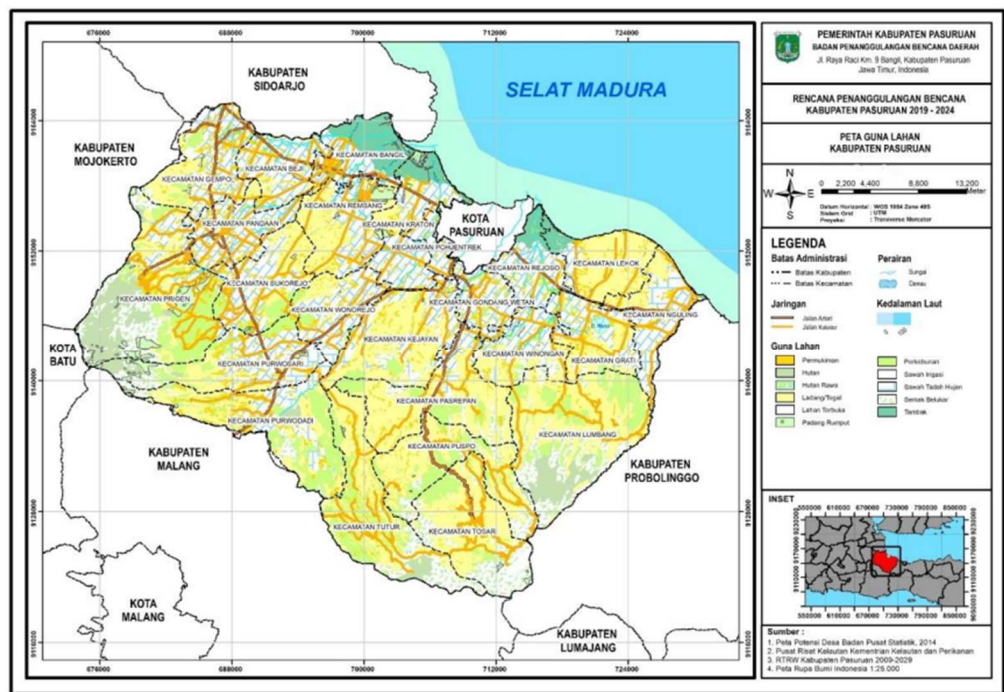
Pemanfaatan penggunaan lahan merujuk pada cara dan tujuan lahan tersebut digunakan untuk berbagai aktivitas, seperti pertanian, perumahan, industri, dan ruang terbuka hijau. Hal ini mencakup perencanaan dan pengelolaan lahan agar sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimilikinya, serta mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Pemanfaatan penggunaan lahan yang baik sangat penting, karena berhubungan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Berikut alasan pentingnya penggunaan lahan antara lain:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam: Lahan adalah sumber daya yang terbatas. Pemanfaatan yang tepat membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan bahwa sumber daya alam, seperti tanah, air, dan keanekaragaman hayati, dikelola secara berkelanjutan.
2. Perencanaan Tata Ruang: Pemanfaatan lahan yang baik mendukung perencanaan tata ruang yang efektif, yang penting untuk menghindari penggunaan lahan yang tidak terencana dan

- berpotensi menimbulkan masalah, seperti kemacetan, polusi, dan konflik penggunaan lahan.
- 3. **Peningkatan Kualitas Hidup:** Dengan pemanfaatan lahan yang baik, masyarakat dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan ruang terbuka hijau, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup.
 - 4. **Pengembangan Ekonomi:** Pemanfaatan lahan yang efisien dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor seperti pertanian, industri, dan pariwisata, yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - 5. **Mitigasi Risiko Bencana:** Dengan perencanaan penggunaan lahan yang baik, risiko bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor, dapat diminimalkan. Misalnya, lahan yang rawan bencana dapat dialokasikan untuk ruang terbuka hijau atau infrastruktur yang dapat mengurangi dampak bencana.

Penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Pasuruan untuk sawah irigasi, dengan total luasan 38.391,34 Ha, luas lahan terbangun adalah 17.301, 60 Ha sebagaimana pada tabel 2.28. Secara lebih detail, penggunaan lahan di Kabupaten Pasuruan dirincikan dalam tabel 2.4.



Gambar 2.4 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024

Tabel 2.4
Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan

No	Penggunaan	Persentase terhadap Lahan Keseluruhan (%)
1	Aneka Industri	0,994%
2	Industri Kecil	0,023%
3	Jasa Permukiman	10,169%
4	Peternakan Unggas	0,021%
5	Tambak	1,696%
6	Sawah Irigasi	26,187%
7	Sawah Tadah Hujan	1,536%
8	Buah-Buahan	0,006%
9	Kebun Campuran	3,242%
10	Perkebunan	2,805%
11	Tegalan/Ladang	36,051%
12	Hutan Sejenis	11,878%
13	Padang Rumput	0,707%
14	Semak	2,708%
15	Kolam Air Tawar	0,001%
16	Lapangan Olahraga	0,215%
17	Tanah Kosong yang Diperuntukkan	0,033%
18	Tanah Terbuka	1,224%
19	Sungai	0,217%
20	Danau/Situ/Telaga	0,127%
21	Jalan Aspal	0,081%
22	Pemukaman	0,081%
	Jumlah	100%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024

E. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Pasuruan secara ekonomis memiliki beberapa keunggulan potensi daerah, apabila dapat dimanfaatkan dengan baik dapat meningkatkan perekonomian daerah.

1. Ketersediaan infrastruktur

Infrastruktur atau juga disebut sebagai prasarana wilayah adalah fasilitas (baik berupa fisik maupun sistem) yang dipergunakan untuk memfasilitasi suatu sarana sehingga dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya. Secara umum infrastruktur terdiri dari komponen utama jalan, jembatan, perumahan atau permukiman, air bersih, pengolahan sampah dan limbah, jaringan irigasi, jaringan drainase, energi, telepon dan komunikasi. Dengan adanya infrastruktur jalan yang telah menghubungkan hampir seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan, sangat mendukung bagi perkembangan ekonomi, pariwisata, pertanian, industri, transportasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain adanya prasarana jalan, sistem transportasi

barang dan jasa juga didukung dengan adanya jalur kereta api yang melintasi wilayah Kabupaten Pasuruan. Jalur kereta api yang ada melayani 2 (dua) jurusan yaitu Surabaya - Bangil - Malang - Blitar dan Surabaya - Pasuruan - Jember - Banyuwangi. Sebagai daerah yang berbasis pada sektor pertanian dan industri di Kabupaten Pasuruan telah tersedia sistem jaringan irigasi yang mendukung produksi pertanian serta kawasan industri. Sistem jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Pasuruan akan mampu mengairi lahan pertanian secara memadai melalui peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif. Sementara Kawasan Industri lengkap dengan infrastruktur pengelolaan limbah dan fasilitas lainnya serta terkoneksi langsung dengan tol ke arah Surabaya - Malang - Banyuwangi/Bali. Beberapa komponen infrastruktur yang lain seperti air bersih, energi listrik, pipa gas, dan telekomunikasi juga telah tersedia dalam jumlah yang cukup memadai, sehingga dengan adanya infrastruktur yang telah terbangun akan sangat menunjang bagi perkembangan ekonomi dan wilayah.

2. Potensi Wisata dan Ekonomi Kreatif

Kabupaten Pasuruan memiliki potensi wisata yang beragam, mulai dari wisata alam, wisata budaya dan religi, wisata buatan, wisata agro dan wisata minat khusus, berupa destinasi wisata yang menarik kunjungan wisatawan, baik domestik maupun manca negara. Salah satu destinasi wisata unggulan yang termasuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional adalah wisata Sunrise Puncak Penanjakan Gunung Bromo di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Kawasan TNBTS selain sebagai lokasi wisata juga merupakan kawasan konservasi yang harus dijaga keberlanjutannya.

Wisata alam yang terdapat di Kabupaten Pasuruan lainnya: Air Terjun Kakek Bodho, Pemandian Alam Banyu Biru, Danau Ranu Grati, Sumber Air Umbulan, Air Terjun Coban Cemoro Gading, Air Terjun Sumber Nyonya, Air Terjun Putuk Truno, Air Terjun Coban Baung, Air Terjun Coban Jala, Air Terjun Rambut Moyo, Air Terjun Coban Waru, Pantai Pasir Panjang Kecamatan Lekok, Hutan Mangrove di Pantai Penunggul Kecamatan Nguling dan Hutan Mangrove di Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Kraton. Wisata alam dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Dengan adanya wisatawan, ada insentif untuk melindungi

dan merawat area alami. Wisata alam sering kali mencakup program pendidikan yang mengajarkan pengunjung tentang ekosistem, flora, dan fauna setempat. Ini membantu meningkatkan kesadaran akan isu-isu lingkungan dan pentingnya pelestarian alam.

Selain wisata alam, wisata Budaya dan Religi juga terdapat di Kabupaten Pasuruan. Wisata budaya dan religi mencakup perjalanan ke tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan spiritual bagi masyarakat. Destinasi ini sering kali meliputi situs-situs keagamaan, festival budaya, dan tradisi lokal yang memberikan wawasan mendalam tentang kepercayaan dan praktik masyarakat setempat. Wisata budaya dan religi yang terdapat di Kabupaten Pasuruan antara lain Candi Laras, Candi Satrio Manggung, Candi Kebo Ireng, Candi Gununggangsir, Candi Belahan, Candi Sepilar, Candi Makutoromo, Candi Jawi, Goa Jepang/Inna Tretes, Makam Ki Ageng Penanggungan, Makam Sakerah, Dewa Wisata Situs Purbakala Tambak Sari, Makam Mbah Bangil, Makam Mbah Ratu Ayu, Makam Mbah Semendhi, Makam Mbah Segoropuro, Pertapaan Abiyoso, dan Pertapaan Indrokilo.

Meningkatnya mobilitas masyarakat dan pertumbuhan kelas menengah, mengakibatkan permintaan yang lebih besar untuk pengalaman rekreasi dan hiburan sehingga muncul wisata buatan. Wisata buatan menawarkan alternatif yang menarik bagi wisatawan yang mencari pengalaman baru. Wisata Buatan yang terdapat di Kabupaten Pasuruan antara lain Saygon Water Park dan Taman Dayu Water Park. Sedangkan Wisata Agro antara lain Agrowisata Apel di Kecamatan Tuter, Agro Kopi di Kecamatan Tuter dan Kecamatan Prigen, Agro Bunga Krisan dan Paprika di Kecamatan Tuter, Peternakan Sapi Perah di Kecamatan Tuter dan Kecamatan Grati, Agro Jamur di Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Purwodadi, Agro Durian di Kecamatan Lumbang, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tuter dan Kecamatan Puspo, Agro Wisata Bhakti Alam di Kecamatan Tuter, Agro PG Kedawung di Kecamatan Grati, Agro Mangga di Kecamatan Rembang dan Kecamatan Sukorejo, Kebun Pak Budi di Kecamatan Purwosari, Kebun Bunga Sedap Malam di Kecamatan Rembang dan Kecamatan Bangil.

Wisatawan modern cenderung mencari pengalaman yang berbeda dan autentik. Mereka ingin terlibat dalam kegiatan yang sesuai dengan minat dan hobi mereka, sehingga wisata minat khusus menjadi pilihan yang menarik. Wisata Minat Khusus yang terdapat di Kabupaten Pasuruan antara lain Taman Safari Indonesia II, Taman Dayu, Finna Golf & Country Club, Kaliandra, Bukit Flora dan Baung Camp serta Desa Wisata yang tersebar di Kecamatan Tosari, Kecamatan Tuttur, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Grati, Kecamatan Gempol, Kecamatan Prigen dan Kecamatan Winongan yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), Desa-Desa Wisata dan kelompok-kelompok Sadar Wisata inilah yang akan terus berkembang dengan melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat sehingga berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja di pedesaan yang diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan secara bertahap akan mengembangkan branding wisata halal yang tidak hanya terkonsentrasi pada infrastruktur saja tetapi juga pengembangan kuliner, destinasi wisata, akomodasi, dan lainnya.

Selain potensi Pariwisata Kabupaten Pasuruan juga memiliki potensi ekonomi kreatif yang mempunyai peluang untuk dikembangkan. Potensi ekonomi kreatif tersebut tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan. Data sebaran potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

No	Sektor Ekonomi Kreatif	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah
1	Periklanan	Beji	Sidowayah	1
		Pandaan	Pandaan	1
		Purwosari	Purwosari	1
		Rembang	Oro-Oro ombo Wetan	1
		Sukorejo	Suwayuwo	1
2	Arsitektur	Beji	Gunung Gangsir	1
		Pandaan	Pandaan	4
		Winongan	Winongan	1
		Bangil	Kalirejo	1
3	Pasar Barang Seni	-		
4	Kriya (kerajinan	Bangil	Kersikan, Dermo, Kolursari, pogar	9

No	Sektor Ekonomi Kreatif	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah
	logam, gerabah, kerajinan kipas, boneka, kaligrafi, kerajinan kayu, batik, tenun, rajut, ukir, anyaman bambu, kulit,)	Beji	Gununggangsir, Cangkringmalang, Sidowayah, Glanggang, Dermo, Keudngboto, Baujeng	17
		Pohjentrek	Legowok,Sugiwetan, Parasrejo, Sukorejo, Sugikulan	28
		Kraton	Plinggisan, Kraton, Tambakrejo, Asem kandang, Mulyorejo, Rejosari, Bendungan, Tambaksari, Kebotohan, Dhomp, Ngempit	73
		Gempol	Wonosari, Kepulungan, Randupitu, Kejapanan, Legok, Jeruk Purut,	13
		Tutur	Wonosari	4
		Gondang Wetan	Gondangwetan, Pekangkungan, Gondangrejo, Kersikan, Kalirejo, Wonojati, Tenggilis Rejo, Gayam, Grogol, Pateguhan, Kebon Candi, Wonojati	63
		Grati	Sumber Agung, Kedawung Kulon, Kedawung Wetan, Kebonrejo, Grati Tunon, Rebalas, Trewung	18
		Kejayan	Benerwojo, Pacar Keling, Randu Gong, Klintar, Tundosoro, Patebon	13
		Lekok	Semedusari	1
		Lumbang	Kronto, Watulumbung, Karang Asem	5
		Nguling	Randuati, Watuprapat	7
		Pandaan	Banjarsari, Petungsari, Karangjati, Sumbergedang	10
		Pasrepan	Poh Gading, Cengkrong	12
		Prigen	Pakel, Kesiman Candi, Dayurejo, WatuAgung, Bulukandang	16
		Purwodadi	Gajahrejo, Sentul	18
		Purwosari	Sumberejo, Cendono, Karangrejo Tengah, Sengon Agung, Karangrejo, Sumber Suko	73
		Puspo	Puspo, Kemiri	7
		Rembang	Pekoren, Mojoparon, Sumberejo	22
		Winongan	Mendalan, Gading, Prodo, Penataan, Umbulan, Bandaran, Gading, Kurban, Lebak, Mendalan	46
		Wonorejo	Suberejo, Gading	6
5	Desain (desain web)	Bangil	Kersikan	1
		Pandaan	Karangjati, Jogosari	2
		Prigen	Pecalukan	1
		Purwosari	Purwosari	1
6	Fashion (bordir kopyah, mukenah,	Bangil	Kolursari, Kalirejo, Kersikan, Manaruwi, Pogar, Kiduldalem, Bendo Mungal, Gempeng, Ledok	97

No	Sektor Ekonomi Kreatif	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah
	busana muslim, Bruci, konveksi, tas, dompet, sepatu)	Beji	Kedungboto, Gajahbendo, Beji, Gununggangsir, Kedung Ringin, Ngembe, Kenep	33
		Gempol	Randupitu, Ds. Winong, Legok, Winong, Carat	34
		Gondang Wetan	Gayam	1
		Pandaan	Pandaan, Jogosari	3
		Prigen	Pakel, Kesiman Candi	2
		Rembang	Oro-oro ombo wetan, Rombo Beran, Krajan	13
7	Video, Film dan Fotografi	Bangil	Bangil	3
		Pohjentrek	Pohjentrek	1
8	Permainan Interaktif (Interactive Games)	-	-	-
9	Musik (Orkes Melayu, Rock Dangdut, Band, Electone, Orkes Keroncongan, Oldies, Albanjari, Samroh, Qosidah, Gambus, Karawitan, Campursari)	Bangil	-	9
		Beji	-	14
		Gempol	-	45
		Gondang Wetan	-	5
		Grati	-	1
		Kejayan	-	4
		Kraton	-	3
		Lumbang	-	1
		Pandaan	-	50
		Pasrepan	-	9
		Pohjentrek	-	3
		Prigen	-	34
		Purwodadi	-	25
		Purwosari	-	23
		Puspo	-	5
		Rejoso	-	1
		Rembang	-	11
		Tutur	-	4
		Winongan	-	5
		Wonorejo	-	12
		Sukorejo	-	25
		Tosari	-	1
10	Seni Pertunjukan (Macapat, Seni Musik Teater, Seni Tradisional, Musik Kontemporer, Tosan Aji (Pusaka), Seni Lukis & Seni Rupa, Drum Band, Sulap Dan Akrobatik)	Prigen	-	6
		Purwosari	-	1
		Sukorejo	-	1
		Beji	-	1
11	Penerbitan dan Percetakan	Bangil	Kalirejo, bangil	2
		Beji	Cangkring Malang, Gunung Gangsir, Sidowayah, Gajah Bendo	4

No	Sektor Ekonomi Kreatif	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah
		Purwosari	Cendono	1
		Gempol	Legok	1
		Gondang Wetan	Wonosari	1
		Grati	Grati Tunon, Sumber Dawesari	2
		Pandaan	Kebon Waris, Sumber Rejo	2
		Pohjentrek	Pleret	1
		Purwodadi	Purwodadi	1
		Rembang	Oro-Oro ombo Wetan	1
		Tutur	Wonosari	2
		Wonorejo	Sambisari	1
		Sukorejo	Pakukerto, Suwayuwo	2
12	Layanan Komputer dan Piranti Lunak	Bangil	Bangil, Kidul dalem, Kolursari, Kersikan	7
		Beji	Pagak	1
		Pandaan	Kasri, Kutorejo	4
		Purwodadi	Parerejo	1
		Purwosari	Karangrejo, Purwosari	2
		Rejoso	Kawisrejo	1
		Rembang	Oroombo Wetan	1
13	Televisi dan Radio	Prigen	Tretes	1
		Pandaan	Petungsari, Gunung gangsir	2
14	Riset dan Pengembangan	Purwodadi	Kebun raya purwodadi	1
		Tutur	Bhakti Alam	1
15	Kuliner (krupuk, kripik, minuman, pokak, kue, ikan asin, ikan asap, tape, gethuk)	Bangil	Pogar, Kiduldalem, Kauman, Masangan, Manaruwi, Latek, Gempeng, Kauman	17
		Beji	Gununggangsir, Kedung Ringin, Gunungsari, Kedungboto, Beji	9
		Gempol	Winong, Legok, Kejapanan, Randupitu, Kejapanan	11
		Gondang wetan	Pekangkungan, Bajangan, Karangsentul, Tebas	7
		Grati	Ranuklindungan, Kebonrejo, Grati Tunon	14
		Kejayan	Sladi, Pacar Keling	3
		Gerongan	Gerongan	17
		Lekok	Jatirejo, Alas Tlogo	3
		Nguling	Penunggul, Dandanggendis, Wates Tani	5
		Pandaan	Durensewu, Jogosari, Sebani, Plintahan,	14
		Prigen	Watu Agung, Gambiran	6
		Purwodadi	Semut, Gerbo, Gajah Rejo, Parerejo, Cowek, Capang	12
		Purwosari	Pucangsari, Sukodermo, Kertosari, Kayoman, Bakalan	12
		Rejoso	Rejosolor	1
		Tutur	Wonosari, Sugro Nongkojajar	7
		Winongan	Winongan lor	1
		Wonorejo	Wonorejo, Pakijangan	4
		Tosari	Baledono	1

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan, 2024

3. Potensi Industri

Potensi industri di Kabupaten Pasuruan meliputi industri besar, menengah, dan kecil. Industri besar sebagian besar berlokasi di Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Rembang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Bangil dan Kecamatan Kejayan. Industri kecil dan menengah berkembang di perdesaan, antara lain bergerak dalam bidang : makanan dan minuman, bordir, Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), Konveksi, Meubel kayu, dan Logam.

Salah satu industri kecil menengah yang menjadi unggulan adalah kerajinan bordir, konveksi dan batik. Kerajinan bordir di Kecamatan Bangil telah dikenal memiliki keunggulan desain dan kualitas sehingga pesanan melebihi kapasitas yang ada, solusinya pengerjaan pesanan tersebut disebar ke kecamatan-kecamatan lain seperti Kecamatan Beji, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Rembang, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Winongan. Produk kerajinan bordir disamping untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal juga mampu menembus pasaran ekspor (Brunei, Malaysia, Singapura dan Timur Tengah). Sedangkan industri konveksi paling banyak di Kecamatan Gempol dengan produk utamanya celana jeans, kaos dan celana sport. Sementara industri batik warna alam telah menunjukkan jati dirinya dan dikagumi oleh konsumen dalam dan luar negeri seperti Korea, Malaysia dan Australia. Sentra industri kayu, antara lain di Desa Sentul Kecamatan Purwodadi, Desa Tambaksari Kecamatan Kraton, Desa Wonorejo Kecamatan Wonorejo, Desa Sungikulon dan Desa Sungiwetan Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Winongan, Kecamatan Rejoso serta Kecamatan Kraton. Pengrajin kayu menghasilkan mainan anak-anak, setir mobil, kotak tissue, handle perseneling, dashboard, catur dan lain-lain. Selain kerajinan kayu di wilayah Kabupaten Pasuruan juga berkembang industri meubel.

Pemasaran kerajinan kayu dan meubel tersebut mencakup wilayah lokal dan luar negeri. Kerajinan perak dihasilkan dari sentra-sentra industri kerajinan perak meliputi Kecamatan Bangil dan Kecamatan Gempol. Produk-produk yang dihasilkan telah menembus pasar luar negeri, antara lain Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Sementara Industri Kecil spare part kendaraan bermotor telah

berkembang di Kecamatan Winongan dengan pasar terbesarnya ke Malang dan Surabaya.

Selain itu di Kabupaten Pasuruan terdapat kawasan industri yaitu Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), suatu kawasan berikat yang menjadi tempat potensial untuk berinvestasi yang aman dan menjanjikan. Di luar kawasan industri PIER masih terdapat kawasan peruntukan industri yang memungkinkan pengembangan kawasan industri baru. Industri kecil makanan minuman yang rata-rata berbahan baku lokal tumbuh pesat di seluruh kecamatan. Sentra pia di Kecamatan Gempol terus tumbuh dan berkembang dan mampu menyerap banyak tenaga kerja karena bersifat padat karya. Pia telah dipasarkan ke luar daerah utamanya Malang dan Surabaya. Industri olahan apel, kopi dan susu tumbuh di Kecamatan Tukur. Industri aneka keripik di Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Prigen, Kecamatan Tosari dan Kecamatan Purwodadi. Industri olahan ikan berkembang di Kecamatan Rejos, Kecamatan Lekok, Kecamatan Grati, Kecamatan Bangil dan Kecamatan Beji. Industri minuman pokok di Kecamatan Winongan dan sirup serta dodol salak di Kecamatan Gondangwetan.

Berkembangnya sentra-sentra industri potensial memberikan harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi sektor riil di daerah yang diharapkan akan mengentaskan kemiskinan. Berkembangnya industri kecil menengah ditopang oleh berkembangnya tempat-tempat pemasaran produk seperti Kawasan Masjid Cheng Hoo dan Pasar Buah Pandaan, Sentra Produk Unggulan di Bangil, Taman Dayu serta Sentra Kulakan produk UMKM/IKM di Kecamatan Gempol.

4. Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan

Wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki potensi pertanian yang cukup besar sehingga mampu menghasilkan produk-produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang berkualitas antara lain padi, jagung, kedelai, kentang, cabai, bawang merah, paprika, wortel, mangga, durian, apel, bunga sedap malam dan krisan. Sedangkan potensi hasil perkebunan yang menjadi komoditas unggulan dan dapat terus dikembangkan meliputi tebu dan kopi, Sentra tananam tebu tersebar di Kecamatan Grati, Kecamatan Winongan, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Nguling dan Kecamatan Kejayan, Sentra

tanaman Kopi di Kecamatan Tukur, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Puspo, dan Kecamatan Tosari.

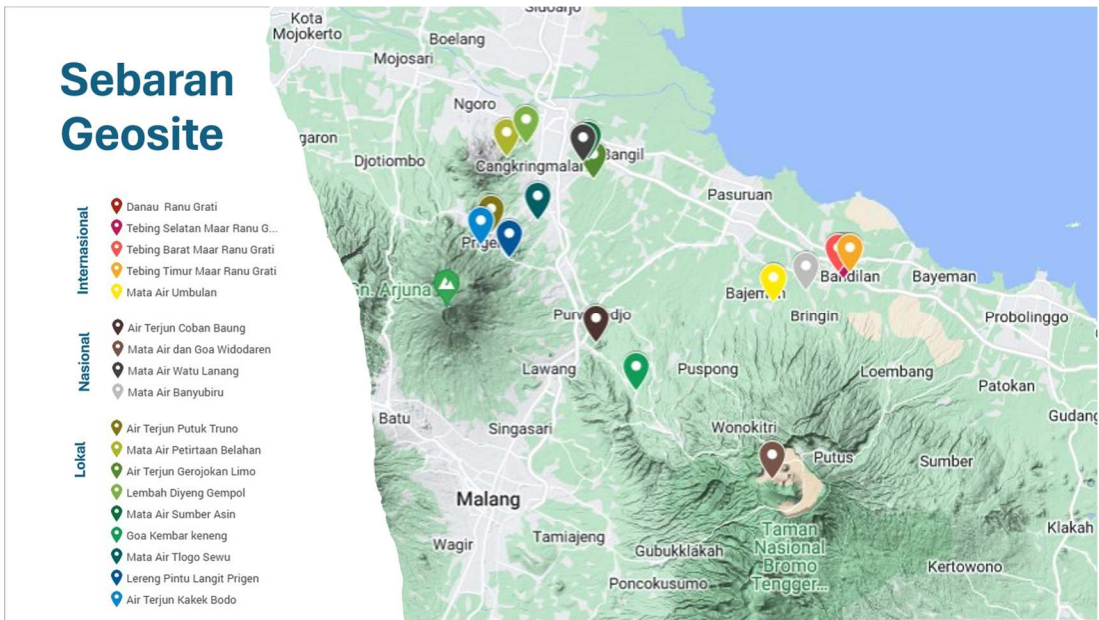
Potensi lain yang dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan adalah perikanan. Komoditas perikanan di Kabupaten Pasuruan meliputi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Potensi perikanan budidaya antara lain : udang, bandeng, patin, tombro, nila, gurami dan lele. Sedangkan potensi perikanan tangkap antara lain : tongkol, teri nasi, cumi-cumi, kakap dan lain-lain. Selanjutnya inovasi teknologi budidaya perikanan harus terus ditingkatkan dengan mengedepankan kemampuan sumberdaya alam, daya dukung dan daya tampung. Potensi hasil peternakan yang menjadi unggulan Kabupaten Pasuruan adalah sapi perah, sapi potong, kambing, domba dan unggas, Hasil produksi sapi perah adalah susu segar yang ditampung oleh koperasi dan selanjutnya dikirim ke industri pengolahan susu antara lain PT. Nestle Kejayan Pasuruan, PT. Indolakto di Purwosari dan PT. Frisian Flag Indonesia. Disamping itu tumbuh dan berkembang Usaha Mikro Kecil Menengah olahan produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan seperti pia, kopi bubuk, kerupuk susu, susu pasteurisasi aneka rasa, dendeng daging, nugget ikan, bakso ikan, ikan crispy, telur asin dan aneka jenis olahan pangan lainnya. Salah satu komoditas unggulan adalah telur asin dari itik yang diproduksi di Kecamatan Grati dan Kecamatan Gempol.

5. Potensi Keragaman Geologi

Keragaman geologi (Geodiversity) mencerminkan keberadaan, keadaan, dan penyebaran berbagai komponen geologi yang ada di suatu daerah. Komponen-komponen ini meliputi mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam. Keseluruhan unsur keragaman geologi tersebut menggambarkan proses evolusi geologi daerah tersebut dalam ruang dan waktu tertentu. Keragaman geologi ini menjadi kekayaan hakiki yang dimiliki oleh suatu daerah.

Berdasarkan hasil kajian Geoheritage (warisan geologi) Tahun 2024 teridentifikasi beberapa keragaman geologi. Adapun hasil geodiversity tersebut yaitu: 5 (lima) Geoheritage internasional (Mata Air Artesis Umbulan, Danau Maar Ranu Grati, Tebing Barat Maar Ranu

Grati, Tebing Timur Maar Ranu Grati, Tebing Selatan Maar Ranu Grati), 4 (empat) Geoheritage Nasional (Mata Air Artesis Banyubiru, Air Terjun Coban Baung, Mata Air Watulanag, Mata Air dan Goa Widodaren), dan 9 (sembilan) Geoheritage Lokal (Mata Air Petirtaan Belahan, Air Terjun Gerojokan Limo, Mata Air Artesis Telogo Sewu, Air Terjun Kakek Bodo, Air Terjun Putuk Truno, Lereng Pintu Langit Prigen, Mata Air Sumberasin, Goa Kembar Kaneng, Brown Canyon Gempol).



Gambar 2.5 Peta Sebaran Geosite di Kabupaten Pasuruan
 Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

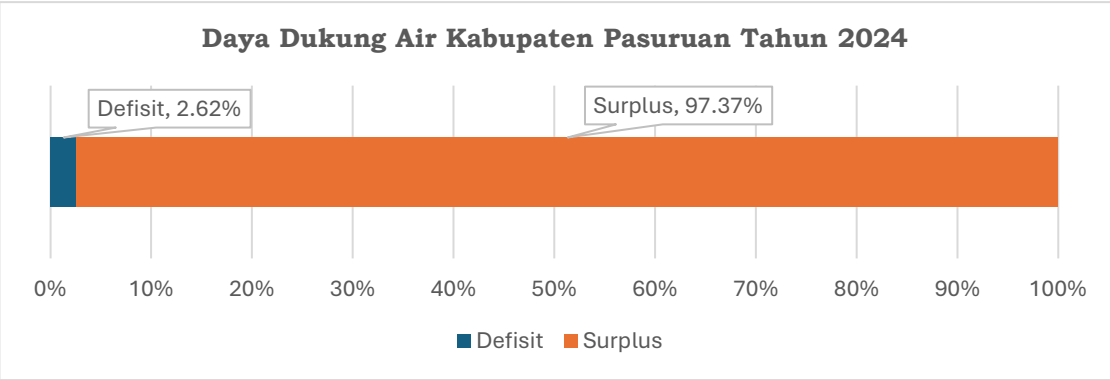
3) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya sedangkan daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

A. Daya Dukung Air

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 kondisi daya dukung air tanah Kabupaten Pasuruan dilakukan secara spasial dengan menggunakan *system grid*. Sistem grid adalah pendekatan spasial yang membagi suatu wilayah geografis ke dalam unit-unit kecil

berbentuk persegi (grid cell) yang memiliki ukuran tetap dan memuat informasi tertentu seperti jenis penggunaan lahan serta ketersediaan air. Gambar berikut menunjukkan kondisi ketersediaan air berdasarkan proporsi surplus dan defisit. Pada tahun 2024, mayoritas kebutuhan air masih dapat terpenuhi dengan baik yang ditunjukkan oleh 97,37% berada dalam kondisi surplus. Namun, terdapat sedikit kekurangan yang perlu diperhatikan yakni 2,62% dalam kondisi defisit sebagaimana pada gambar 2.6.



Gambar 2.6 Daya Dukung Air Tahun 2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

Sedangkan daya dukung air pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5
Kondisi Daya Dukung Air Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024

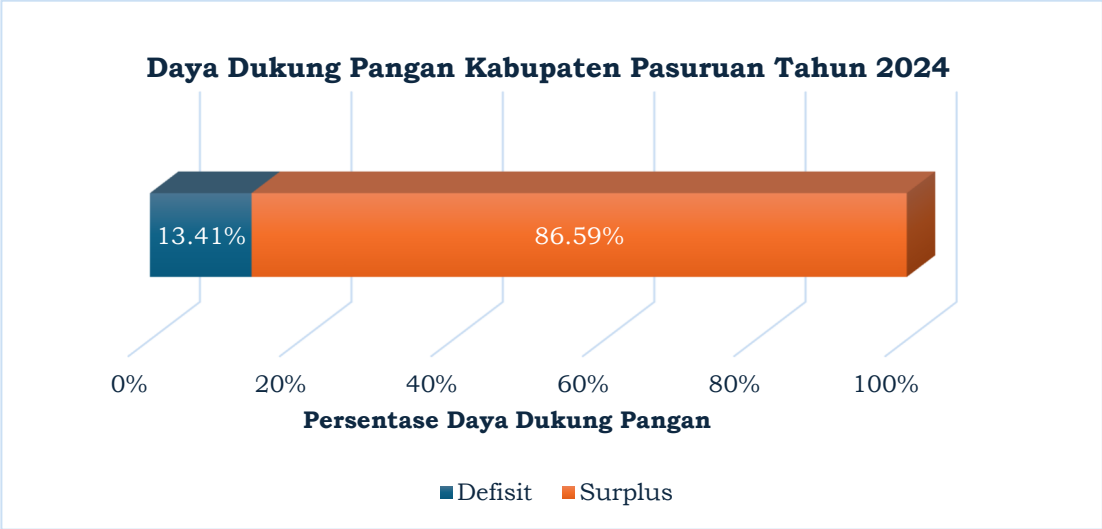
Kecamatan	DD Air 2024 (Ha)		
	Defisit	Surplus	Total
Kecamatan Bangil	94,18	4318,66	4412,84
Kecamatan Beji	97,26	3830,04	3927,30
Kecamatan Gempol	25,55	6268,70	6294,25
Kecamatan Gondangwetan	18,78	2684,38	2703,16
Kecamatan Grati	31,12	4644,38	4675,51
Kecamatan Kejayan	333,67	7629,89	7963,56
Kecamatan Kraton	58,23	5866,30	5924,53
Kecamatan Lekok	561,22	4332,70	4893,92
Kecamatan Lumbang	560,17	11721,06	12281,23
Kecamatan Nguling	640,18	3885,68	4525,86
Kecamatan Pandaan	0,32	4340,23	4340,55
Kecamatan Pasrepan	278,58	8285,69	8564,27
Kecamatan Pohjentrek	43,83	1197,23	1241,06
Kecamatan Prigen	0,00	13059,97	13059,97
Kecamatan Purwodadi	221,14	8561,24	8782,38
Kecamatan Purwosari	181,41	7754,05	7935,46
Kecamatan Puspo	81,76	7085,23	7166,99
Kecamatan Rejoso	80,26	3445,04	3525,30

Kecamatan	DD Air 2024 (Ha)		
	Defisit	Surplus	Total
Kecamatan Rembang	18,95	5628,60	5647,55
Kecamatan Sukorejo	0,00	5747,31	5747,32
Kecamatan Tosari	160,77	8079,51	8240,28
Kecamatan Tukur	378,56	8356,33	8734,89
Kecamatan Winongan	55,26	4223,56	4278,82
Kecamatan Wonorejo	5,37	4459,98	4465,35
Total	3926,56	145405,77	149332,33

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan 2025-2029, 2024

B. Daya Dukung Pangan

Pangan merupakan salah satu sektor yang penting dalam pembangunan berkelanjutan. Kebutuhan pangan berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Pasuruan di tahun 2024 terdiri atas 86,59% surplus yang yang berarti pasokan pangan lebih besar daripada kebutuhan. Hanya 13,41% yang mengalami defisit, menunjukkan sebagian kecil wilayah atau kelompok yang tidak terpenuhi kebutuhan pangannya sebagaimana pada gambar 2.7.



Gambar 2.7 Grafik Daya Dukung Pangan Tahun 2024
 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

Sedangkan daya dukung pangan pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6
 Daya Dukung Pangan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

Kecamatan	DD Pangan 2024 (Ha)		
	Defisit	Surplus	Total
Kecamatan Bangil	781,18	3571,99	4353,17

Kecamatan	DD Pangan 2024 (Ha)		
	Defisit	Surplus	Total
Kecamatan Beji	1308,89	2618,41	3927,30
Kecamatan Gempol	2427,36	3866,90	6294,25
Kecamatan Gondangwetan	518,56	2184,60	2703,16
Kecamatan Grati	820,71	3854,80	4675,51
Kecamatan Kejayan	907,57	7055,99	7963,56
Kecamatan Kraton	882,20	4938,75	5820,95
Kecamatan Lekok	690,34	4203,58	4893,92
Kecamatan Lumbang	286,20	11995,03	12281,23
Kecamatan Nguling	736,44	3789,60	4526,04
Kecamatan Pandaan	1367,64	2972,92	4340,55
Kecamatan Pasrepan	518,45	8045,82	8564,27
Kecamatan Pohjentrek	269,56	971,49	1241,06
Kecamatan Prigen	1266,35	11793,62	13059,97
Kecamatan Purwodadi	1021,74	7760,64	8782,38
Kecamatan Purwosari	1290,14	6645,32	7935,46
Kecamatan Puspo	373,93	6793,05	7166,99
Kecamatan Rejoso	443,12	3078,78	3521,91
Kecamatan Rembang	917,12	4730,43	5647,55
Kecamatan Sukorejo	1105,67	4641,65	5747,32
Kecamatan Tosari	128,32	8111,96	8240,28
Kecamatan Tutar	861,24	7873,65	8734,89
Kecamatan Winongan	397,04	3881,77	4278,82
Kecamatan Wonorejo	676,21	3789,15	4465,35
Grand Total	19995,98	129169,89	149165,87

Sumber: Dinas Lingkungan Kabupaten Pasuruan, 2024

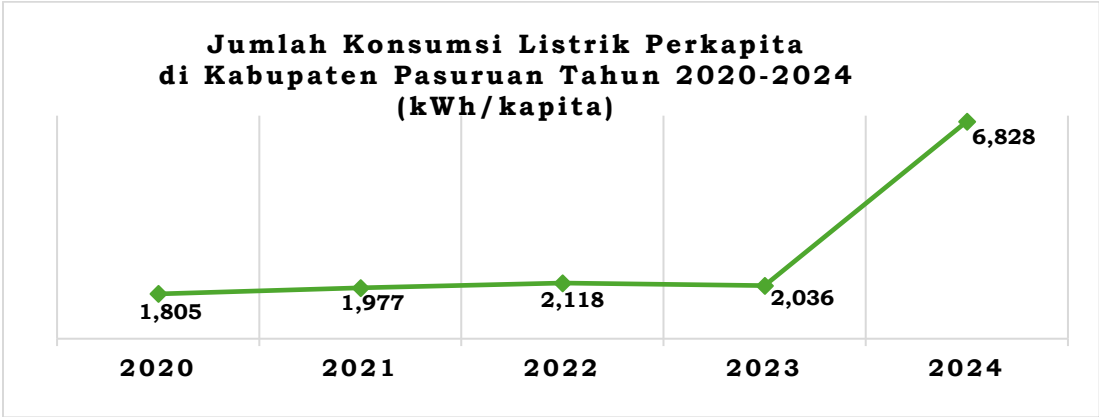
4) Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

A. Ketahanan Energi

Konsumsi Listrik per Kapita

Data demografi kependudukan Kabupaten Pasuruan juga digunakan untuk melihat kebutuhan ketahanan energi, salah satunya direpresentasikan oleh konsumsi listrik per kapita (kWh/kapita). Konsumsi listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung dari sumber energi, berdasarkan data PLN diperoleh konsumsi listrik perkapita (kWh/kapita) tahun 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan sebagaimana pada gambar 2.8. Lonjakan drastis di tahun 2024, mengindikasikan adanya percepatan aktivitas ekonomi dan industrialisasi (sektor usaha baru bertambah). Fenomena ini

mendorong kebutuhan untuk memperkuat: 1) infrastruktur energi melalui perluasan jaringan listrik, pembangunan gardu induk baru, dan peningkatan kapasitas pembangkit listrik; 2) memperluas diversifikasi sumber energi dengan mengembangkan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada listrik berbasis fosil, serta 3) meningkatkan efisiensi pemakaian listrik guna memastikan ketersediaan energi yang andal dan berkelanjutan di masa depan.



Gambar 2.8 Jumlah Konsumsi Listrik Perkapita di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pasuruan, 2025

B. Ketahanan Air

Kabupaten Pasuruan memiliki sumber daya air yang melimpah, termasuk air permukaan dan air tanah. Selain sistem aliran sungai yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan, terdapat juga danau atau waduk alami yang cukup besar, serta beberapa mata air. Potensi air tanah akan dijelaskan melalui gambaran kondisi hidrogeologi. Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Pasuruan dapat diuraikan sebagai berikut:

Air Permukaan

Di wilayah Kabupaten Pasuruan, selain 7 (tujuh) sungai besar yang telah disebutkan sebelumnya, juga terdapat beberapa sungai-sungai kecil. Sungai-sungai (air permukaan) tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan air untuk pertanian dan perikanan, serta kebutuhan hidup lainnya. Selain potensi sungai, terdapat juga danau dan sejumlah mata air. Secara umum sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Pasuruan merupakan sungai yang tidak terlalu panjang, di bagian hulunya memiliki kemiringan dasar sungai yang terjadi, dan ada beberapa sungai yang merupakan sungai musiman

sehingga pada musim kemarau debit air tidak teratur. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7
Sungai-Sungai di Kabupaten Pasuruan

No	Nama Sungai	Panjang (Km)
1	Sungai Kambeng	7,22
2	Sungai Kedunglarangan	13,99
3	Sungai Masangan	5,95
4	Sungai Raci	6,87
5	Sungai Gerongan	6.22
6	Sungai Pilang	9,82
7	Sungai Welang	40,09
8	Sungai Gembong	8,57
9	Sungai Petung	14,34
10	Sungai Rejoso	15,72
11	Sungai Lawean	30,71
12	Sungai Kramat	13,61
13	Sungai Pakelan	45,60
14	Sungai Rondoningo	24,16
15	Sungai Pancarglagas	16,06

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2020

Danau

Danau yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan adalah Danau Ranu Grati. Secara geografis, Danau Ranu Grati berada di Kecamatan Grati yang merupakan danau di dataran rendah Jawa Timur dengan volume efektif sebesar 5.013 m³ dan volume maksimum sebesar 5.217 m³, serta mampu mengeluarkan debit maksimum 980 l/det dan debit minimum 463 l/det. Danau Ranu Grati merupakan danau alami yang terbentuk karena aktivitas vulkanik gunung berapi. Bentuk menyerupai corong dengan dasar danau yang dalam dan mengandung sedimen mineral jadi bukti penguat status Danau Ranu Grati sebagai danau vulkanik. Selain rekreasi, danau ini juga banyak untuk keperluan irigasi.

Sumber Air

Sumber air terbesar adalah Sumber Air Umbulan di Kecamatan Winongan dengan debit maximumnya sekitar 4.000 l/det dan Sumber Air Banyu Biru yang terletak di Kecamatan Winongan dengan debit

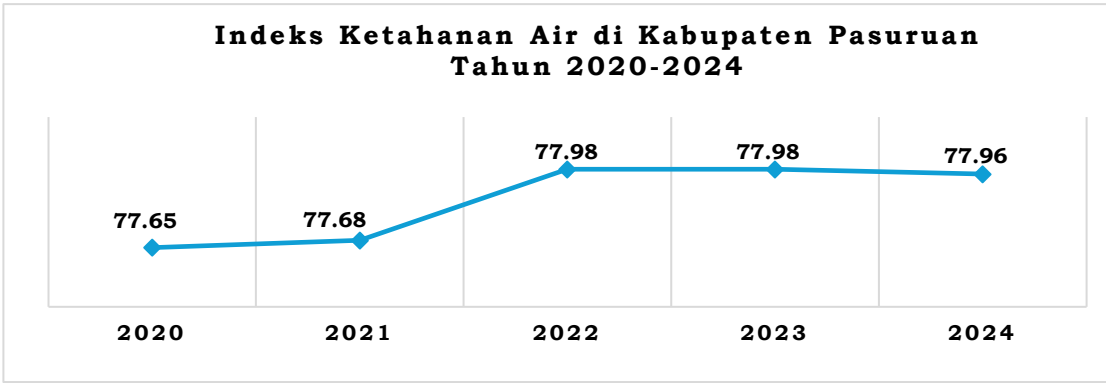
maximumnya 225 l/det. Jumlah sumber air di Kabupaten Pasuruan disajikan pada Tabel 2.8

Tabel 2.8
Jumlah Sumber Air Berdasarkan Kecamatan
di Kabupaten Pasuruan

No	Kecamatan	Jumlah Sumber Air
1	Prigen	59
2	Pandaan	10
3	Gempol	12
4	Beji	22
5	Bangil	3
6	Rembang	14
7	Sukorejo	13
8	Purwoasri	24
9	Purwodadi	29
10	Kraton	1
11	Tutur	7
	Jumlah	194

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

Guna mencapai kebutuhan air yang berkelanjutan, dibutuhkan kondisi ketahanan air dengan terpenuhinya kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air. Ketahanan air sangat penting karena kondisi air yang aman bermanfaat untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.



Gambar 2.9 Indeks Ketahanan Air di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas SDA, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Pasuruan, 2024

Berdasarkan gambar 2.9 dapat diketahui capaian Indeks Ketahanan Air Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2024 secara umum mengalami peningkatan, namun ada sedikit penurunan di tahun 2024

yaitu menjadi 77,96. Kondisi penurunan ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Berikut data debit sumber air dari 23 sumber air dan 2 sumur bor untuk air minum yang dikelola PDAM:

Tabel 2.9
Data Debit Sumber Air PDAM Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020 - 2024

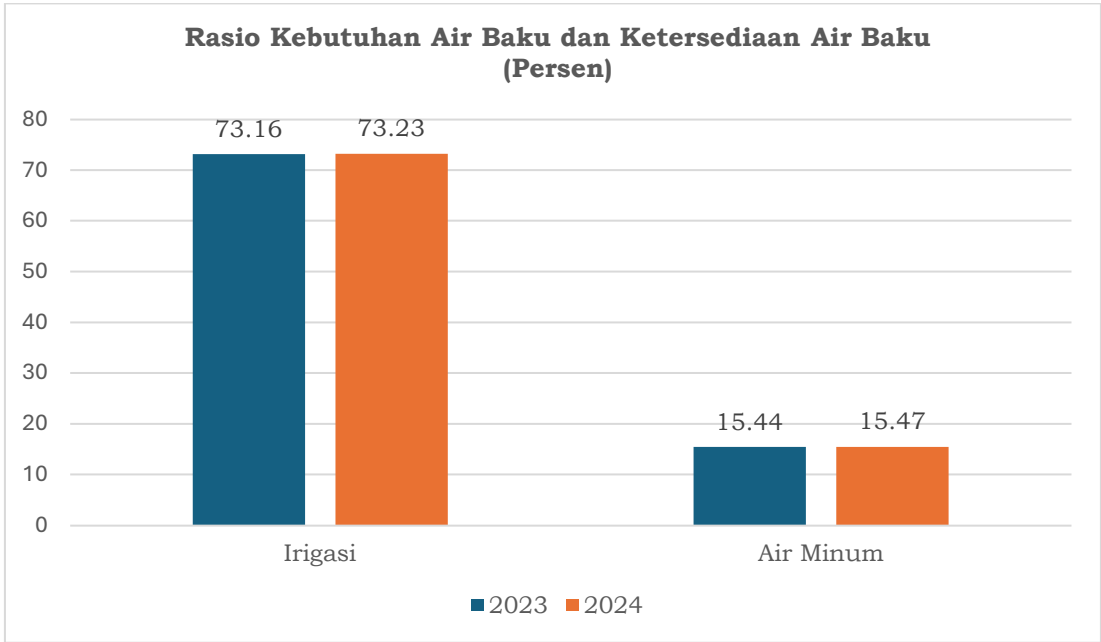
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
339 ltr/dtk	330 ltr/dtk	369,2 ltr/dtk	361,7 ltr/dtk	354,2 ltr/dtk

Sumber : PDAM Giri Nawa Tirta Kabupaten Pasuruan, 2025

Kondisi tersebut akan terus diperbaiki dengan cara menambah volume ketersediaan air terutama tampungan air, membangun embung-embung berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, serta memperbaiki kondisi mata air yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui upaya konservasi dan rehabilitasi.

Rasio Kebutuhan Air Baku dan Ketersediaan Air Baku

Air baku terbagi menjadi dua peruntukan yaitu irigasi dan air minum. Rasio kebutuhan air baku dan ketersediaan air baku untuk irigasi dan air minum tahun 2023-2024 mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa air baku di Kabupaten Pasuruan dalam kondisi surplus (ketersediaan lebih besar dari pada kebutuhan).



Gambar 2.10 Rasio Kebutuhan dan Ketersediaan Air Baku
Kabupaten Pasuruan Tahun 2023-2024
Sumber: Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, 2025

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

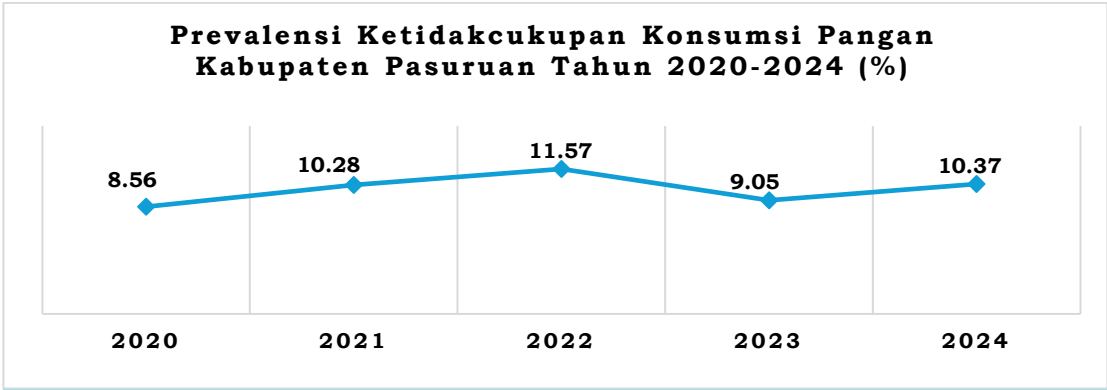
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di wilayah perkotaan (terlayani oleh PDAM) yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan;
2. Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (*on premises*);
3. Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan
4. Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.

Persentase jumlah rumah tangga perkotaan yang mendapatkan akses terhadap air siap minum perpipaan tahun 2023 sebesar 7,10% (dari 425.662 rumah tangga perkotaan) dan tahun 2024 sebesar 7,53% (dari 429.303 rumah tangga perkotaan) atau mengalami peningkatan.

C. Kemandirian Pangan

Sesuai arahan kewilayahan RPJMN 2025-2029, Kabupaten Pasuruan termasuk dalam wilayah Tapal Kuda yang mendukung swasembada pangan, air dan energi. Berdasarkan potensi tersebut diharapkan Kabupaten Pasuruan dapat mewujudkan tujuan ke 2 SDGs yaitu Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*) yakni untuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Salah satu indikator yang menjadi tolak ukur ketercapaian tujuan tersebut adalah prevalensi ketidakcukupan pangan atau *Prevalence of Undernourishment (PoU)*. Ketidakcukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang, secara regular, mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat yang dinyatakan dalam persentase. Adapun Kondisi prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada gambar 2.11.



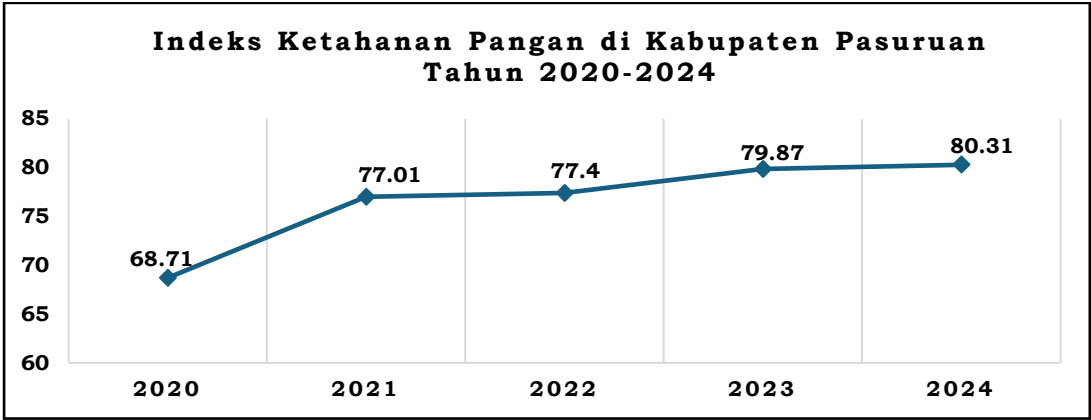
Gambar 2.11 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Informasi tentang prevalensi ketidakcukupan pangan bermanfaat untuk pemerintah. Yakni dalam merancang intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan akses dan ketersediaan pangan, serta meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi suatu negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan secara umum menunjukkan tren peningkatan pada periode tahun 2020 sampai tahun 2024. Keberhasilan Kabupaten Pasuruan dalam penyediaan pangan (beras, jagung, daging, telur dan ikan) sudah diatas nilai kebutuhan. Produksi bahan pangan lebih besar dari peningkatan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pasuruan, yang menunjukkan bahwa program dan kegiatan sudah terlaksana dengan baik.



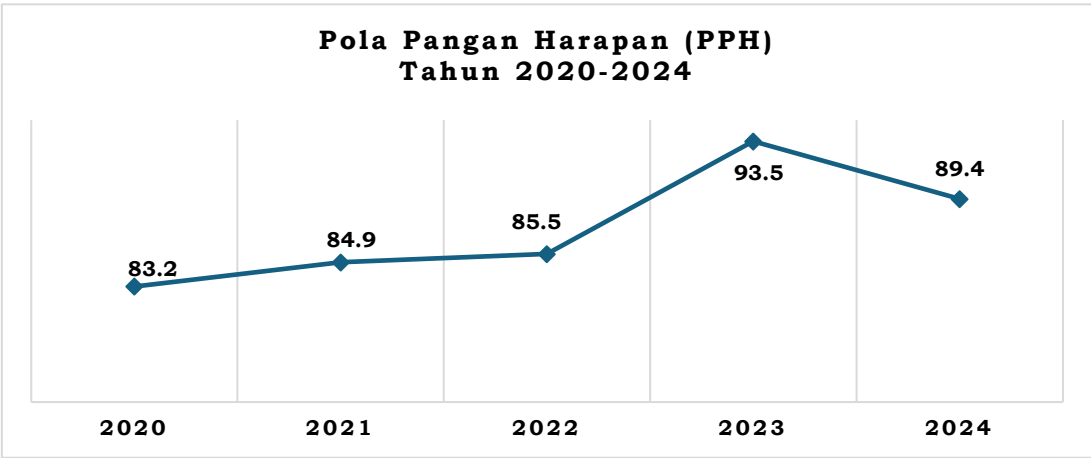
Gambar 2.12 Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, 2025

Beberapa masalah yang perlu diantisipasi untuk meningkatkan ketahanan pangan termasuk alih fungsi lahan pertanian yang berdampak pada produksi pertanian secara keseluruhan, serta anomali iklim yang mempengaruhi produksi komoditas pertanian. Pada masa mendatang, diperlukan upaya untuk mendorong kemandirian pangan

Pola Pangan Harapan

Pola pangan harapan mencerminkan keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan gizi baik dari segi jumlah maupun mutu. Capaian Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 2.13 Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

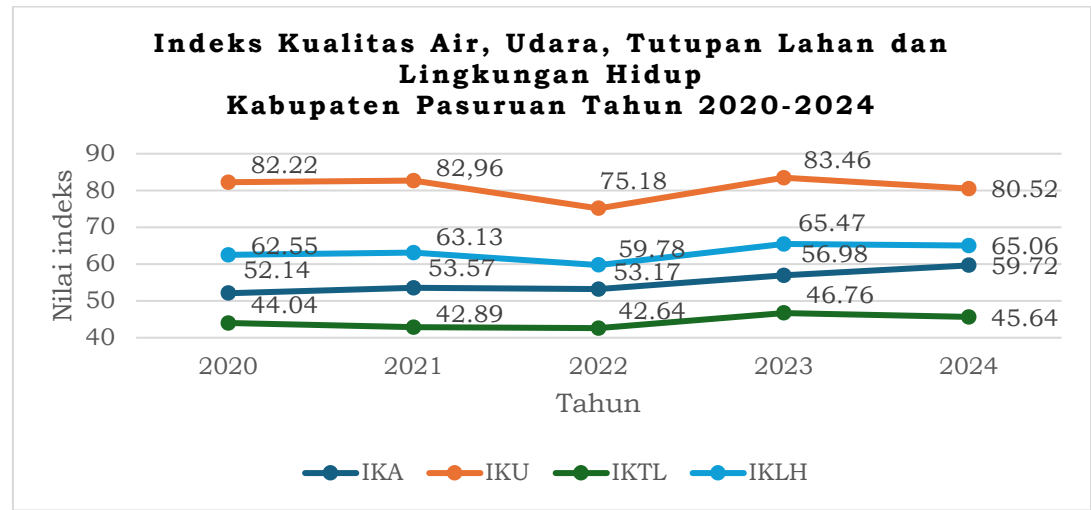
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan gambar 2.13, capaian Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Pasuruan mengalami fluktuatif namun cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir. Mulai tahun 2023, nilai Pola Pangan Harapan masuk dalam kategori “tinggi” (skor>85). Kondisi ini menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA). Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap hal ini adalah pelaksanaan pelatihan pengolahan pangan non beras dan non terigu (pengolahan pangan alternatif) melalui Bimtek Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

5) Lingkungan Hidup Berkualitas

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Penggunaan lahan di suatu daerah memiliki dampak signifikan terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Deforestasi, urbanisasi dan pertanian intensif dapat mengurangi tutupan vegetasi, menyebabkan polusi dan degradasi tanah, serta mengurangi keanekaragaman hayati, yang semuanya menurunkan kualitas lingkungan. Sebaliknya, praktik penggunaan lahan yang berkelanjutan seperti pertanian organik dan rehabilitasi lahan terdegradasi dapat meningkatkan IKLH dengan menjaga kesuburan tanah, melindungi sumber daya air, dan meningkatkan keanekaragaman hayati, karena IKLH adalah nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.



Gambar 2.14 Indeks Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan Gambar 2.11 capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023.

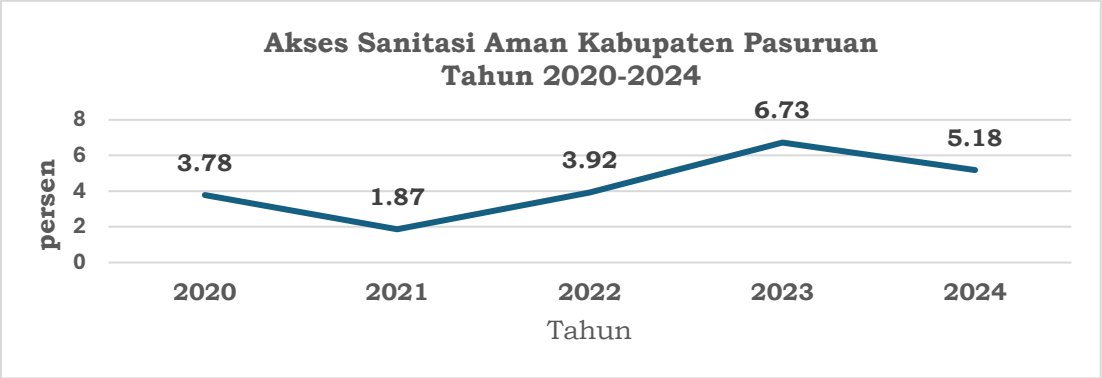
Terjadi penurunan Indeks Kualitas Udara (IKU) dari tahun 2023 ke tahun 2024, hal ini disebabkan karena adanya penurunan kualitas udara pada daerah padat transportasi dengan sumber pencemar tertinggi dari kendaraan bermotor dan kurangnya tegakan pohon (titik sampling exit tol Grati, jalur lalu lintas Pasuruan Probolinggo, Jalur lalu lintas Pasuruan Malang, Jalur lalu lintas Pasuruan Surabaya) sehingga selanjutnya perlu dilakukan upaya berupa penanaman pohon diarea jalur padat transportasi dan kebijakan pemenuhan kualitas emisi kendaraan bermotor.

Terjadi penurunan indeks kualitas tutupan lahan dari tahun 2023 ke tahun 2024 dikarenakan terdapat kesalahan teknis penetapan deliniasi tutupan vegetasi yang diajukan pada aplikasi IKLH Kementerian Lingkungan Hidup, dimana pada verifikasi tahun 2023 deliniasi tutupan lahan telah diverifikasi dan termasuk dalam perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2023, yang menunjukkan peningkatan signifikan nilai IKTL dibandingkan tahun 2022. Tetapi pada tahun 2024 saat dilakukan verifikasi ulang, sebagian deliniasi direject oleh verifikator dikarenakan terdapat tumpang tindih delineasi dan titik kordinat dalam satu wilayah, sehingga luasan tutupan vegetasi berkurang dan IKTL tahun 2024 mengalami penurunan akibat penyesuaian data deliniasi dimaksud. Selanjutnya perlu adanya upaya peningkatan akurasi dalam inventerisasi dan deliniasi tutupan lahan.

B. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses Sanitasi Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Gambar 2.15 menunjukkan capaian akses sanitasi aman di Kabupaten Pasuruan mengalami fluktuasi, dengan penurunan tajam pada tahun

2021. Capaian angka capaian sanitasi aman Kabupaten Pasuruan masih sangat rendah sehingga menjadi prioritas dalam pembangunan sanitasi dan pengelolaan air limbah domestik. Pemerintah daerah perlu mempercepat penyediaan IPLT, pendataan terintegrasi, serta penguatan regulasi sanitasi berkelanjutan.



Gambar 2.15 Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2025

C. Timbulan Sampah terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Produksi sampah di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana pada tabel 2.10, dibuktikan dengan semakin meningkatnya timbulan sampah hingga membentuk seperti gunung, oleh karena itu perlu pengolahan sampah lebih awal sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Rata-rata sampah yang tertangani merupakan sampah anorganik, karena sampah organik telah terpilah-pilah. Untuk mengatasi masalah persampahan, tahun 2020 Kabupaten Pasuruan memiliki 45 tempat pengelolaan sampah *reduce, reuse, recycle* (TPS3R) yang tersebar di seluruh kecamatan, bahkan pada tahun menambah 18 TPS lagi.

Tabel 2.10
Timbulan Sampah terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian Kinerja				
	2020	2021	2022	2023	2024
Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	19,68	19,96	20,73	15	14,89
Jumlah sampah terolah (Ton/Tahun)	83.548,331	85.542,024	85.560,963	63.399	63.855
Jumlah timbulan sampah (Ton/Tahun)	424.534,201	428.567,256	412.739,810	425.790	428.850,107

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2025

D. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Salah satu upaya pengolahan sampah melalui pengolahan tingkat rumah tangga, dilakukan dengan mendorong warga terlibat dalam pemilahan sampah rumah tangga maupun Pembangunan TPS3R di sejumlah desa maupun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di kecamatan. Keberhasilan upaya ini dapat dilihat dari nilai proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah yang mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai tahun 2022, tetapi tahun 2023 hingga 2024 mengalami penurunan pada rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah sebagaimana pada tabel 2.11.

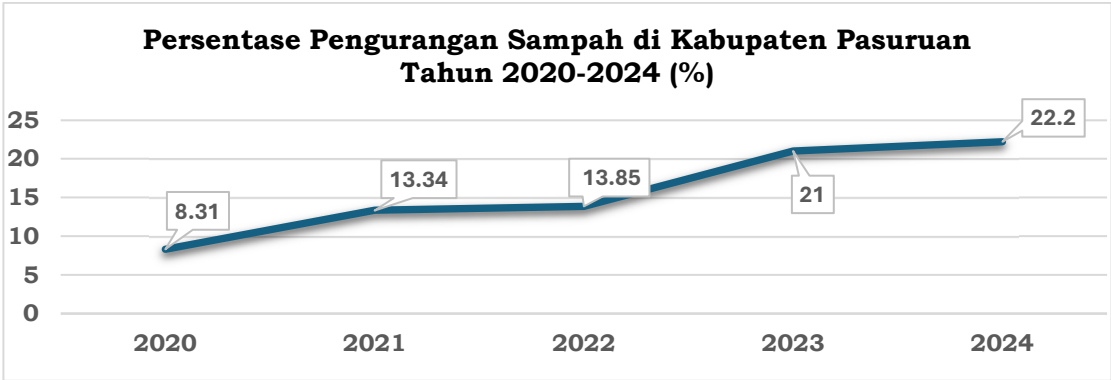
Tabel 2.11
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan
sampah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian Kinerja				
	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%)	19,68	19,96	20,73	15	11
Jumlah rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah (Rumah Tangga)	81.750	83.700	83.719	79.409	45.141
Jumlah rumah tangga (Rumah Tangga)	415.395	419.341	403.855	529.399	419.500

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2025

E. Persentase Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk melalui program membatasi timbulan sampah, memanfaatkan kembali sampah dan mendaur ulang sampah. Komitmen pemerintah dalam mengurangi sampah dilihat melalui indikator persentase pengurangan sampah. Indikator ini merupakan hasil perbandingan jumlah sampah yang dikurangi dengan jumlah sampah. Dari gambar di bawah menunjukan selama tahun 2020 sampai dengan 2024. Persentase Pengurangan Sampah di Kabupaten Pasuruan terus mengalami peningkatan setiap tahun sebagaimana pada gambar 2.16.



Gambar 2.16 Persentase Pengurangan Sampah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2025

6) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kawasan rawan bencana adalah wilayah atau area yang memiliki tingkat risiko yang tinggi untuk mengalami berbagai jenis bencana alam atau bencana yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geofisik wilayah Kabupaten Pasuruan yang memiliki keberadaan gunung berapi, adanya dataran rendah dan kondisi dataran tinggi yang mulai terdegradasi menjadikan Kabupaten Pasuruan memiliki beberapa potensi bencana alam yaitu:

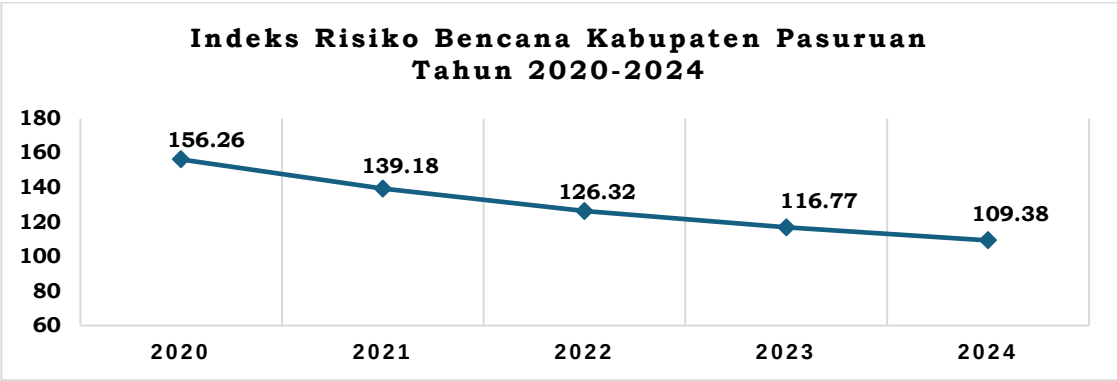
1. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi
Kawasan Gunung Bromo seluas 1.320 ha dan daerah waspada seluas 751 Ha yang berada di Desa Ngadirejo, Mororejo, Wonokitri dan Desa Kedawung di Kecamatan Tosari dan Gunung Welirang, sedangkan kawasan rawan bencana gunung berapi di Gunung Welirang seluas 1.368 Ha dan waspada seluas 809 Ha yang meliputi sebagian dari Desa Lumbangrejo dan Kelurahan Pecalukan di Kecamatan Prigen, Desa Cendono, Desa Sumberejo dan Desa Tambaksari di Kecamatan Purwosari.
2. Kawasan rawan longsor/kerawanan gerakan tanah
Potensi kawasan longsor di Kabupaten Pasuruan teridentifikasi seluas 37.626,4 ha, yaitu di wilayah dengan kelerengn > 40%. Wilayah tersebut berada di Kecamatan Tukur, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang dan Kecamatan Prigen.
3. Kawasan rawan banjir
Potensi kawasan rawan banjir di Kabupaten Pasuruan teridentifikasi seluas 11.948,15 ha, berada di Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bangil, Kecamatan Kraton, Kecamatan Grati, Kecamatan Pohjentrek,

Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Winongan, karena merupakan daerah hilir yang dipengaruhi adanya daerah aliran sungai. Kondisi banjir ini diakibatkan adanya hujan di hulu sungai cukup tinggi, sehingga mengakibatkan air meluap, serta beberapa kecamatan lagi yaitu Kecamatan Lekok dan Kecamatan Kraton merupakan daerah rawan banjir yang biasanya disebabkan adanya rob.

4. Kawasan rawan bahaya angin puyuh/puting beliung
Berpotensi di Kecamatan Gempol, Pandaan dan Sukorejo, serta kemungkinan beberapa kecamatan lain mengingat terjadinya anomali iklim pada beberapa tahun terakhir.
5. Kawasan rawan bencana kebakaran hutan
Berpotensi terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Pasuruan yang merupakan kawasan hutan dan semak belukar diantaranya beberapa yang merupakan Kawasan Hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi pengelolanya adalah Perhutani, Kawasan Cagar Alam (CA) Gunung Baung, CA Gunung Abang, TWA Tretes, Kawasan Hutan/Pegunungan di R.Soeryo, Kawasan Pegunungan Arjuna Welirang dan Penanggungan (Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Gempol).
6. Kekeringan
Ancaman kekeringan yang terjadi di Kabupaten Pasuruan terbagi atas 3 tingkatan, yaitu : a. Ancaman kekeringan tinggi, berpotensi terjadi di beberapa desa berikut ini : Kecamatan Lumbang (Desa Kronto, Desa Pancur, Desa Karang Asem, Desa Cukurguling, Desa Lumbang, Desa Bulukandang, Desa Karangjati, dan Desa Watulumbung), Kecamatan Kejayan (Desa AmbalAmbil, Desa Klangrong, Desa Oro-Oro Pule, Desa Lorokan, Desa Kedungpengaron, dan Desa Benerwojo), Kecamatan Lekok (Desa Pasinan, Desa Wates, Desa Semedusari, dan Desa Branang), Kecamatan Winongan (Desa Kedungrejo, Desa Umbulan, Desa Jeladri, Desa Sumberejo, dan Desa Sruwi), Kecamatan Puspo (Desa Palangsari, Desa Puspo, dan Desa Jimbaran), Kecamatan Gempol (Desa Bulusari), Kecamatan Grati (Desa Karanglo). b. Ancaman kekeringan sedang terjadi di Kecamatan Pasrepan (Desa

Sapulante, Desa Mangguan, Desa Petung, Desa Sibon, Desa Lemahbang, Desa Tambakrejo). c. Ancaman kekeringan rendah terjadi di Kecamatan Lumbang (Desa Banjarimbo dan Desa Welulang), dan Kecamatan Winongan (Desa Minggir).

Adanya potensi kebencanaan sebagaimana disebutkan di atas dipotret melalui Indeks Risiko Bencana (IRB) yang digunakan untuk menilai kemungkinan dampak yang diperkirakan akan terjadi apabila suatu ancaman menjadi bencana di Kabupaten Pasuruan. IRB adalah gabungan nilai indeks ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Hasil dari pengkajian resiko bencana digunakan sebagai dasar untuk upaya pengurangan resiko bencana melalui pengurangan aspek bahaya dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Tren capaian nilai IRB Kabupaten Pasuruan disajikan dalam gambar 2.17.

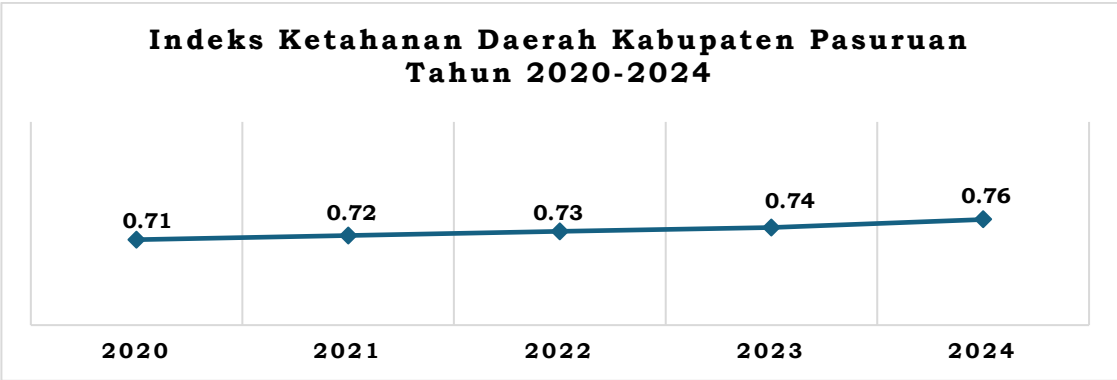


Gambar 2.17 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024

Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pasuruan selalu mengalami penurunan disetiap tahunnya dari tahun 2020 hingga tahun 2024 yang telah masuk kategori sedang. Hal ini salah satunya didorong oleh adanya perkembangan jumlah desa tangguh bencana di Kabupaten Pasuruan tahun 2020 sebanyak 10 desa/kelurahan, tahun 2021 sebanyak 14 desa/kelurahan, tahun 2022 sebanyak 18 desa/kelurahan, tahun 2023 sebanyak 20 desa/kelurahan dan tahun 2024 sebanyak 30 desa/kelurahan.

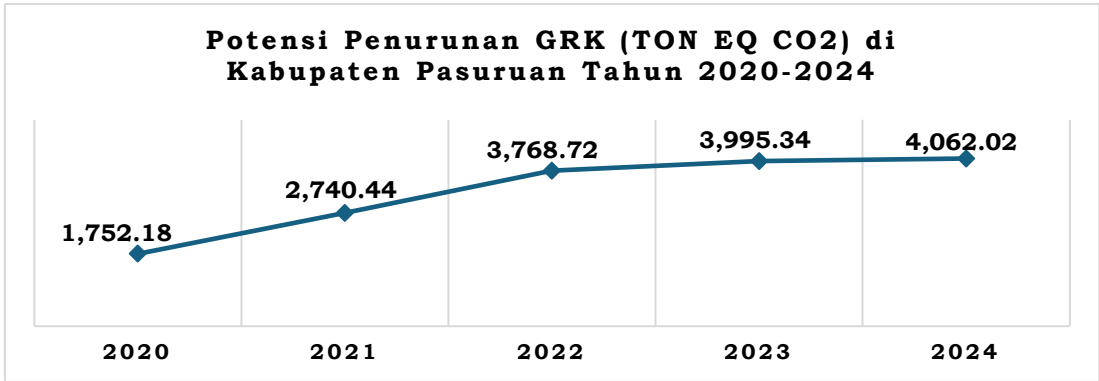
Penurunan nilai IRB selaras dengan terjadinya peningkatan kapasitas pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mengelola bencana yang diiringi komponen kelembagaan, peringatan dini, pendidikan, mitigasi, dan kesiapsiagaan yang direpresentasikan oleh kenaikan nilai Indeks Ketahanan Daerah sebagaimana disajikan dalam gambar 2.18.



Gambar 2.18 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024

Bencana alam yang terjadi selain pada daerah rawan bencana dapat disebabkan dari dampak negatif perubahan iklim. Perubahan iklim ini akan berdampak terhadap sektor ekonomi, Kesehatan manusia dan kestabilan ekosistem. Dampak perubahan iklim yang mengancam secara langsung adalah kenaikan muka air laut dan peningkatan kejadian cuaca ekstrim. Mitigasi perubahan iklim dilakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap kehidupan. Kegiatan inventarisasi GRK merupakan salah satu upaya mitigasi perubahan iklim. Untuk mengurangi dampak negative dari perubahan iklim, perlu mengurangi emisi gas rumah kaca. Intensitas emisi GRK dapat dilihat dari potensi penurunan GRK dengan satuan TON EQ CO₂. Potensi penurunan GRK Kabupaten Pasuruan, yang dapat dilihat dari website AKSARA yang diunduh pada 30 Mei 2024 menunjukkan kenaikan yang signifikan dari tahun 2020. Kenaikan potensi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah mengurangi emisi Gas Rumah Kaca sebagaimana pada gambar 2.19.



Gambar 2.19 Potensi Penurunan GRK di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

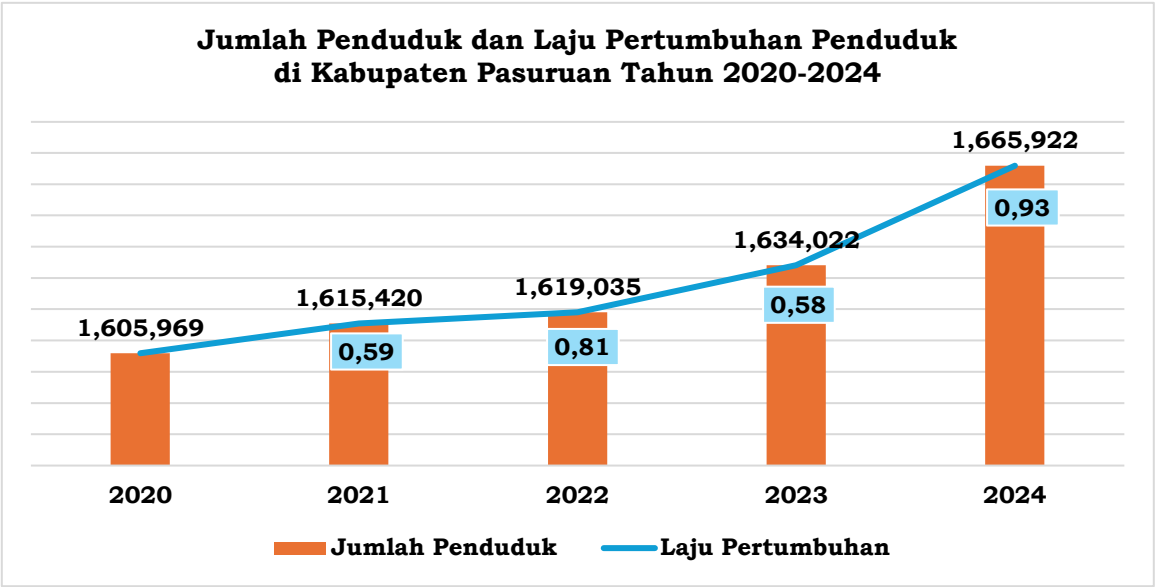
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024 (AKSARA, 30 Mei 2024)

7) **Demografi**

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Kondisi penduduk tidak hanya diperhatikan pada aspek kuantitas namun juga aspek kualitas. Jumlah penduduk yang besar tanpa didukung dengan kualitas akan menimbulkan permasalahan dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan.

A. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Selama kurun waktu lima tahun (2020-2024) berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan dengan laju pertumbuhan penduduk yang mengalami peningkatan paling tinggi tahun 2024 sebagaimana pada gambar 2.20. Data ini penting untuk perencanaan pembangunan dan kebijakan sosial di daerah, karena dengan tersedianya penduduk yang besar menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk berbagai lapangan usaha di sektor ekonomi, seperti pertanian, industri, dan jasa. Pertumbuhan penduduk yang sehat dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tersedia.



Gambar 2.20 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pasuruan dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, perlambatan di tahun 2023 dan percepatan di tahun 2022 dan 2024. Hal ini mengindikasikan keberhasilan program pengendalian penduduk di Kabupaten Pasuruan.

B. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut kelompok umur adalah faktor kunci dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan publik, ekonomi, dan sosial. Dengan memahami komposisi ini, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merancang program dan kebijakan yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur di
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

Kelompok Umur	Laki-Laki (Ribuan Jiwa)	Perempuan (Ribuan Jiwa)	Jumlah (Ribuan Jiwa)
0-4	56.368	53.125	109.493
5-9	68.274	64.265	132.539
10-14	69.017	63.829	132.846
15-19	56.037	53.250	109.287
20-24	65.200	62.932	128.132
25-29	65.440	61.660	127.100
30-34	61.188	59.399	120.587
35-39	60.187	60.282	120.469
40-44	64.422	66.562	130.984
45-49	58.813	64.015	122.828
50-54	56.437	59.406	115.843
55-59	49.169	54.314	103.483
60-64	39.426	42.340	81.766
65-69	28.007	29.118	57.125
70-74	18.166	18.164	36.330
75+	14.954	22.156	37.110
Jumlah	831.105	834.817	1.665.922

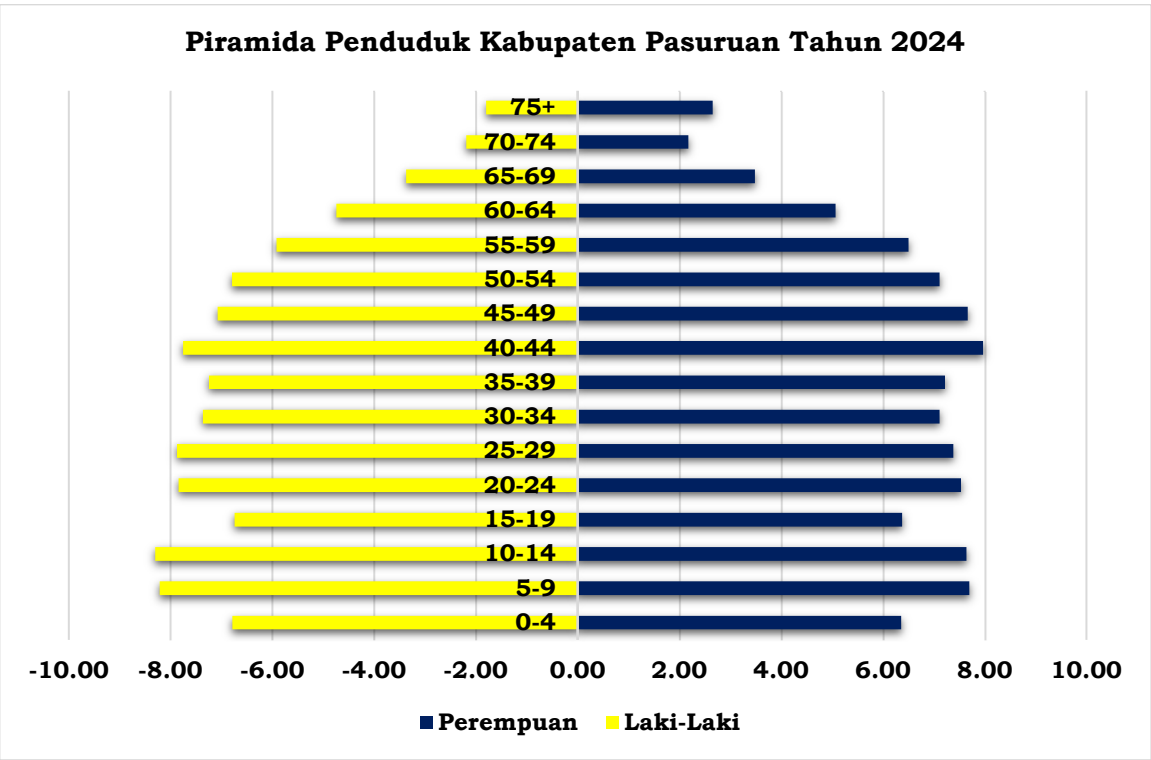
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan tabel 2.12 diketahui jika jumlah penduduk pada tahun 2024 dengan pengelompokan umur tertinggi adalah pada kelompok umur 10-14 tahun, sehingga pemerintah perlu meningkatkan fasilitas pendidikan dan program pengembangan anak. Sedangkan jumlah penduduk dengan pengelompokan umur terendah adalah pada kelompok umur 70-74 tahun. Angka yang rendah pada kelompok umur 70-74 tahun dapat menunjukkan bahwa ada tingkat mortalitas yang lebih tinggi di kelompok usia lanjut, yang mungkin

disebabkan oleh faktor kesehatan, akses terhadap layanan kesehatan, atau kondisi sosial ekonomi.

Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat menggambarkan piramida penduduk. Piramida penduduk Kabupaten Pasuruan tahun 2024 sebagaimana gambar 2.21. Piramida penduduk Kabupaten Pasuruan tahun 2024 merupakan jenis ekspansif. Piramida ekspansif menunjukkan penduduk di suatu wilayah berada dalam keadaan bertumbuh. Karakteristik piramida penduduk ekspansif yaitu:

- 1. Sebagian besar berada pada kelompok penduduk usia muda;
- 2. Kelompok usia tua jumlahnya sedikit;
- 3. Tingkat kelahiran bayi tinggi;
- 4. Pertumbuhan penduduk tinggi.



Gambar 2.21 Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

C. Persebaran, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah. Persebaran penduduk Kabupaten Pasuruan dari tahun 2020 sampai 2024 pada 24 kecamatan menunjukkan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Gempol. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Tosari karena hanya 1,2 persen seluruh

penduduk di Kabupaten Pasuruan tinggal di Kecamatan Tosari pada tahun 2024 sebagaimana pada tabel 2.13.

Tabel 2.13
Persebaran Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
(Jiwa)

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Purwodadi	70.015	70.438	70.601	71.345	72.781
2	Tutur	53.743	53.887	53.830	55.107	56.187
3	Puspo	27.722	27.771	27.778	28.164	28.762
4	Tosari	18.799	18.818	18.837	18.550	18.925
5	Lumbang	35.174	35.385	35.464	35.879	36.681
6	Pasrepan	52.396	52.594	52.596	53.259	54.556
7	Kejayan	65.374	65.603	65.589	67.235	68.733
8	Wonorejo	59.864	60.186	60.286	61.112	62.326
9	Purwosari	84.137	84.706	84.962	86.266	88.051
10	Prigen	87.227	87.649	87.745	88.671	90.372
11	Sukorejo	87.477	88.069	88.336	88.839	90.568
12	Pandaan	111.062	111.563	111.651	112.299	114.237
13	Gempol	129.990	130.596	130.719	130.809	133.197
14	Beji	87.022	87.864	88.385	89.930	91.405
15	Bangil	83.307	83.671	83.724	84.241	85.504
16	Rembang	66.711	67.294	67.631	68.840	70.810
17	Kraton	88.525	88.912	88.969	88.535	90.315
18	Pohjentrek	31.296	31.581	31.751	31.436	31.900
19	Gondangwetan	56.264	56.589	56.705	57.339	58.533
20	Rejoso	46.766	47.036	47.132	48.366	49.070
21	Winongan	44.287	44.569	44.686	45.565	46.331
22	Grati	78.930	79.368	79.512	80.858	82.186
23	Lekok	77.514	78.176	78.551	78.286	80.139
24	Nguling	62.367	63.095	63.595	63.091	64.353
	Kab. Pasuruan	1.605.969	1.615.420	1.619.035	1.634.022	1.665.922

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Kepadatan penduduk idealnya adalah satu kilometer persegi dihuni oleh 500 orang. Artinya, semakin besar angka kepadatan penduduk, maka semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan tahun 2024, kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Pohjentrek sebesar 2.685,19 jiwa/km2 yang artinya padat dan tidak ideal, sedangkan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Tosari

sebesar 193,11 jiwa/km² dan masih ideal. Secara keseluruhan, hanya terdapat tiga wilayah kecamatan yang berada dalam kondisi kepadatan wilayah ideal yaitu Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, dan Kecamatan Puspo. Tabel 2.14 memberikan data secara lengkap kepadatan penduduk per kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Tabel 2.14
Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021-2024 (Jiwa/Km²)

No	Kecamatan	Tahun			
		2021 ¹	2022	2023	2024
1	Purwodadi	687,47	689,06	696,32	710,34
2	Tutur	624,41	623,75	638,55	651,07
3	Puspo	475,94	476,06	482,67	492,92
4	Tosari	192,02	192,21	189,29	193,11
5	Lumbang	281,84	282,47	285,77	292,16
6	Pasrepan	584,70	584,72	592,10	606,51
7	Kejayan	828,84	828,67	849,46	868,39
8	Wonorejo	1.272,43	1.274,55	1.292,01	1.317,67
9	Purwosari	1.414,83	1.419,11	1.440,89	1.470,70
10	Prigen	719,02	719,81	728,79	741,36
11	Sukorejo	1.513,73	1.518,32	1.524,08	1.556,69
12	Pandaan	2.578,30	2.580,33	2.595,31	2.640,10
13	Gempol	2.011,65	2.013,54	2.014,93	2.051,71
14	Beji	2.202,11	2.215,16	2.253,88	2.290,85
15	Bangil	1.876,03	1.877,22	1.888,81	1.917,13
16	Rembang	1.582,64	1.590,57	1.619,00	1.665,33
17	Kraton	1.751,96	1.753,08	1.744,53	1.779,61
18	Pohjentrek	2.658,33	2.672,64	2.646,13	2.685,19
19	Gondangwetan	2.155,77	2.160,19	2.184,34	2.229,83
20	Rejoso	1.271,24	1.273,84	1.307,19	1.326,22
21	Winongan	969,52	972,07	991,19	1.007,85
22	Grati	1.562,98	1.565,81	1.592,32	1.618,47
23	Lekok	1.678,68	1.686,73	1.681,04	1.720,83
24	Nguling	1.481,10	1.492,84	1.481,01	1.510,63
	Kabupaten Pasuruan	1.095,93	1.098,38	1.108,55	1.130,19

Catatan: 1 Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni)
Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka, 2025

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah atau negara pada suatu waktu tertentu yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk

perempuan. Berdasarkan tabel 2.14 dapat diketahui bahwa dari tahun 2021 dan 2022 jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Akan tetapi pada tahun 2023 dan 2024, jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Jumlah penduduk perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki dapat menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi. Secara ekonomi, peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dapat mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kesetaraan pendapatan, sementara secara sosial, hal ini dapat mengubah dinamika keluarga dan peran masyarakat, sehingga berpotensi mengarah pada peningkatan kesetaraan dan pemberdayaan gender.

Tabel 2.15
Rasio Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021-2024

No	Kecamatan	Tahun			
		2021 ¹	2022	2023	2024
1	Purwodadi	103,00	103,10	101,09	101,62
2	Tutur	101,78	101,72	100,76	101,09
3	Puspo	99,06	99,10	98,51	99,49
4	Tosari	99,47	99,29	99,36	99,78
5	Lumbang	98,90	98,90	98,07	98,35
6	Pasrepan	97,32	97,35	96,82	96,89
7	Kejayan	96,96	97,15	96,52	96,62
8	Wonorejo	97,77	97,87	97,28	97,32
9	Purwosari	101,45	101,47	100,93	100,88
10	Prigen	102,20	102,14	101,73	101,78
11	Sukorejo	99,43	99,32	99,23	99,55
12	Pandaan	100,28	100,32	100,30	100,29
13	Gempol	101,41	101,30	101,20	101,11
14	Beji	101,09	101,07	100,38	100,55
15	Bangil	99,80	99,63	99,38	99,32
16	Rembang	97,23	97,20	96,54	96,75
17	Kraton	103,06	102,88	100,09	100,08
18	Pohjentrek	102,27	102,25	101,49	101,26
19	Gondangwetan	102,31	102,62	100,91	100,89
20	Rejoso	101,89	101,83	101,63	101,65
21	Winongan	99,40	99,30	99,47	99,30
22	Grati	99,09	98,99	97,98	98,02
23	Lekok	98,37	98,49	97,80	98,24

No	Kecamatan	Tahun			
		2021 ¹	2022	2023	2024
24	Nguling	96,40	96,33	96,42	96,40
	Kabupaten Pasuruan	100,13	100,11	99,45	99,56

Catatan: 1 Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni)
 Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka, 2025

D. Komposisi Penduduk berdasarkan Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai 2024. Sedangkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja selalu mengalami penurunan. Penduduk yang berusia 15 tahun ke atas mengalami penurunan pada tahun 2023, akan tetapi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai 2024. Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2024 dikarenakan jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan sedangkan jumlah penduduk yang menganggur menurun sebagaimana pada tabel 2.16.

Tabel 2.16
 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

No	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	Angkatan Kerja	Jiwa	893.726	916.175	915.507	978.581
	➤ Bekerja	Jiwa	839.861	862.062	865.336	929.468
	➤ Pengangguran	Jiwa	53.865	54.113	50.171	49.113
2	Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	401.053	389.023	370.123	320.809
	➤ Sekolah	Jiwa	80.310	70.415	82.044	78.547
	➤ Mengurus Rumah Tangga	Jiwa	247.535	258.013	237.580	201.369
	➤ Lainnya	Jiwa	73.208	60.595	50.499	40.893
3	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	Jiwa	1.294.779	1.305.198	1.285.630	1.299.390
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,03	70,19	71,21	71,31
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,03	5,91	5,48	5,02

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Tabel 2.17
 Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024 (Jiwa)

No	Pekerjaan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Belum/Tidak Bekerja	366.672	378.282	391.685	397.661
2	Mengurus Rumah Tangga	230.025	238.608	246.299	249.523
3	Pelajar/Mahasiswa	235.356	224.234	213.833	208.582

No	Pekerjaan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
4	PNS/TNI/Polri/Pensiunan	16.834	16.664	16.565	16.465
5	Petani/Peternak/Nelayan	189.977	189.391	189.410	189.490
6	Buruh Tani/Ternak/Nelayan	20.114	20.111	21.479	21.818
7	Perdagangan/Industri/Ko ntruksi/Transportasi	1.862	1.814	1.844	1.839
8	Buruh Harian Lepas	8.948	9.122	11.640	12.448
9	Karyawan Swasta/BUMN/BUMD/Ho norer	351.171	357.574	359.011	359.929
10	Guru/Dosen	11.896	12.306	12.524	12.693
11	Pembantu Rumah Tangga	638	622	625	626
12	Tukang Batu/Kayu	2.149	2.184	2.650	2.730
13	Pedagang/Wiraswasta	157.972	159.497	154.107	161.038
14	Kepala/Perangkat Desa	1.186	1.152	1.106	1.089
15	Lainnya	7.123	4.629	11.244	4.807

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025
(Data diolah)

Berdasarkan tabel 2.17 dapat diketahui bahwa komposisi penduduk di Kabupaten Pasuruan selama tahun 2021-2024 jika dilihat dari pekerjaan, paling banyak bekerja sebagai Karyawan Swasta/BUMN/BUMD/Honoror. Hal tersebut dipengaruhi banyaknya perusahaan di Kabupaten Pasuruan sehingga sebagian besar penduduknya memilih untuk bekerja sebagai karyawan swasta. Sedangkan jenis pekerjaan yang paling sedikit dilakukan oleh Penduduk di Kabupaten Pasuruan adalah pembantu rumah tangga.

E. Komposisi Penduduk berdasarkan Pendidikan

Komposisi penduduk di Kabupaten Pasuruan selama tahun 2021-2024 jika dilihat dari tingkat pendidikan paling banyak yang masih Tamat SD/ sederajat sedangkan yang paling sedikit adalah S2/S3. Jika dilihat dari kontribusinya, penduduk yang belum tamat SD/ sederajat, tamat SD/ sederajat dan tamat SLTP/ sederajat mengalami penurunan sedangkan penduduk yang tidak/ belum sekolah, penduduk yang tamat SLTA/ sederajat, D1/D2/D3, D4/S1 dan S2/S3 mengalami peningkatan. Komposisi penduduk di Kabupaten Pasuruan menurut pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.18 berikut.

Tabel 2.18
Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021-2024

No	Pendidikan	2021		2022		2023		2024	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1	Tidak/belum sekolah	324.914	20,28	341.313	21,12	357.417	21,87	364.634	22,22
2	Belum tamat SD/ sederajat	244.233	15,25	235.317	14,56	229.615	14,05	226.048	13,78
3	Tamat SD/ sederajat	505.584	31,56	501.397	31,02	498.965	30,54	497.614	30,33
4	Tamat SLTP/ sederajat	217.145	13,55	216.089	13,37	216.327	13,24	217.241	13,24
5	Tamat SLTA/ sederajat	260.185	16,24	269.151	16,65	276.243	16,91	278.598	16,98
6	D1/D2/D3	9.614	0,60	9.871	0,61	10.118	0,62	10.237	0,62
7	D4/S1	38.552	2,41	41.085	2,54	43.275	2,65	44.244	2,70
8	S2/S3	1.825	0,11	1.967	0,12	2.062	0,13	2.122	0,13
	Total	1.602.052	100	1.616.190	100	1.634.022	100	1.640.738	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025, diolah

F. Komposisi Penduduk berdasarkan Agama dan Kepercayaan yang Dianut

Komposisi penduduk di Kabupaten Pasuruan tahun 2021-2024 jika dilihat dari agama yang dianut sebagian besar menganut agama Islam sedangkan yang paling sedikit menganut agama Konghuchu. Komposisi penduduk di Kabupaten Pasuruan berdasarkan agama dan kepercayaan dapat dilihat pada tabel 2.19.

Tabel 2.19
Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan yang dianut di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

No	Agama dan Kepercayaan	2021		2022		2023		2024	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1	Islam	1.580.238	98,455	1.591.629	98,480	1.609.458	98,497	1.616.155	98,501
2	Kristen	6.974	0,435	6.883	0,426	6.885	0,421	6.863	0,418
3	Katholik	2.430	0,151	2.402	0,149	2.377	0,145	2.362	0,144
4	Hindu	14.991	0,934	14.891	0,921	14.937	0,914	14.999	0,914
5	Budha	367	0,023	351	0,022	326	0,020	319	0,019
6	Konghuchu	11	0,001	11	0,001	15	0,001	17	0,001
7	Kepercayaan	26	0,002	23	0,001	24	0,001	23	0,001
	Total	1.605.037	100	1.616.190	100	1.634.022	100	1.640.738	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025 (Data diolah)

G. **Proyeksi Demografi**

Proyeksi penduduk merupakan perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Data proyeksi penduduk lima tahun ke depan sangat bermanfaat dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Pasuruan karena membantu pemerintah dalam merencanakan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, listrik, dan air bersih, serta layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan serta memungkinkan penentuan kebutuhan perumahan, penciptaan lapangan kerja, dan perancangan kebijakan ekonomi yang efektif. Selain itu, data ini penting untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan kesiapsiagaan bencana. Dengan demikian, proyeksi penduduk memastikan bahwa pembangunan berjalan secara berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa depan.

1. **Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Pasuruan**

Proyeksi jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 2.20. Hasil proyeksi menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan terus meningkat setiap tahunnya dengan jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Tabel 2.20
Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2025-2029

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Penduduk (Ribuk Jiwa)	1.669,40	1.681,02	1.692,08	1.702,57	1.712,51
Laki-Laki (Ribuk Jiwa)	834,72	840,21	845,38	850,23	854,76
Perempuan (Ribuk Jiwa)	834,68	840,82	846,7	852,34	857,74
Laju Pertumbuhan (%)	0,73	0,70	0,66	0,62	0,58
Rasio Jenis Kelamin (%)	100,00	99,93	99,84	99,75	99,65
Kepadatan (Jiwa/Km2)	1.132,55	1.140,43	1.147,94	1.155,05	1.161,80

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

2. Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Pasuruan

Proyeksi penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 2.21.

Tabel 2.21
Proyeksi Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 (dalam ribu jiwa)

Kelompok Umur	Tahun				
	2025	2026	2027	2028	2029
0-4	116,68	115,51	114,41	113,36	112,38
5-9	119,32	118,11	116,66	115,32	114,72
10-14	122,46	122,97	123,41	123,47	122,45
15-19	119,49	119,84	120,33	120,87	121,41
20-24	120,88	119,94	119,22	118,74	118,53
25-29	126,64	125,25	123,77	122,29	120,93
30-34	130,29	129,64	128,85	127,91	126,82
35-39	129,71	130,16	130,27	130,09	129,71
40-44	123,59	124,11	125,14	126,43	127,64
45-49	123,63	123,93	123,51	122,74	122,13
50-54	111,75	113,70	115,96	118,23	120,08
55-59	101,45	103,18	104,50	105,61	106,83
60-64	83,06	85,88	88,77	91,61	94,16
65-69	63,40	66,17	68,73	71,14	73,57
70-74	40,34	43,18	46,14	49,14	52,04
75+	36,72	39,47	42,44	45,64	49,12
Jumlah	1.669,40	1.681,02	1.692,08	1.702,57	1.712,51

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

3. Proyeksi Penduduk Usia Produktif, Penduduk Usia Lanjut, Angka Ketergantungan dan Bonus demografi di Kabupaten Pasuruan

Proyeksi Penduduk Usia Produktif, Penduduk Usia Lanjut, Angka Ketergantungan dan Bonus demografi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 2.22. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk dalam lima tahun ke depan penduduk Kabupaten Pasuruan diprediksi akan menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 0,66%.

Tabel 2.22
 Proyeksi Penduduk Usia Produktif, Penduduk Usia Lanjut, Angka Ketergantungan dan Bonus demografi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029

Umur	2025	2026	2027	2028	2029
0-14 Tahun	21,47%	21,21%	21,54%	20,68%	20,41%
15-64 Tahun	70,11%	69,93%	71,71%	69,57%	69,39%
65 tahun ke atas	8,41%	8,85%	6,75%	9,75%	10,20%
Angka Ketergantungan	42,62	42,99	39,45	43,74	44,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025 (Data diolah)

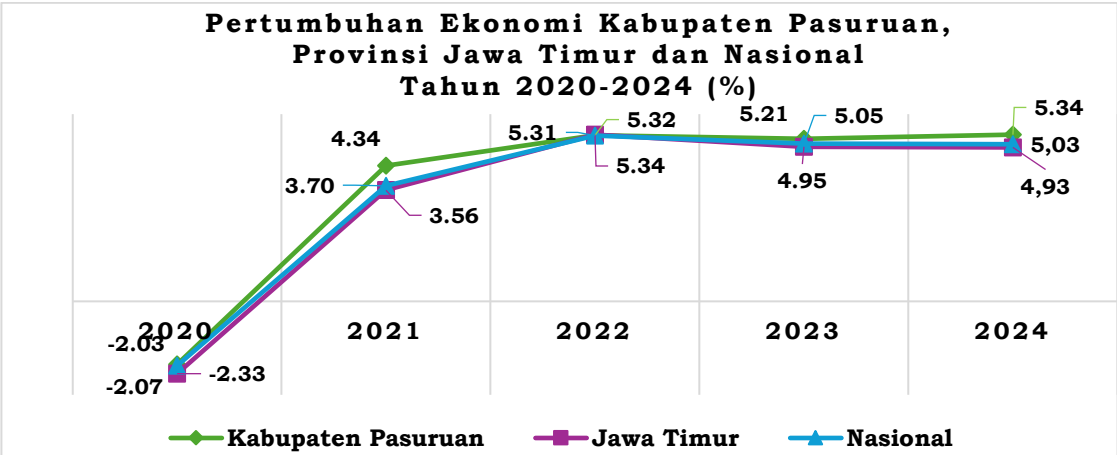
Berdasarkan hasil proyeksi penduduk table 2.22, dapat dilihat bahwa dalam lima tahun ke depan angka ketergantungan penduduk Kabupaten Pasuruan diprediksi akan menunjukkan tren peningkatan yang menggambarkan beban penduduk usia produktif semakin bertambah.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1) Kesejahteraan Ekonomi

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan pertumbuhan PDRB, dalam hal ini adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB menunjukkan nilai produksi barang dan jasa di suatu wilayah, terdiri dari 17 lapangan usaha. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2024 beserta perbandingan dengan angka Jawa Timur dan Nasional sebagaimana gambar 2.22.



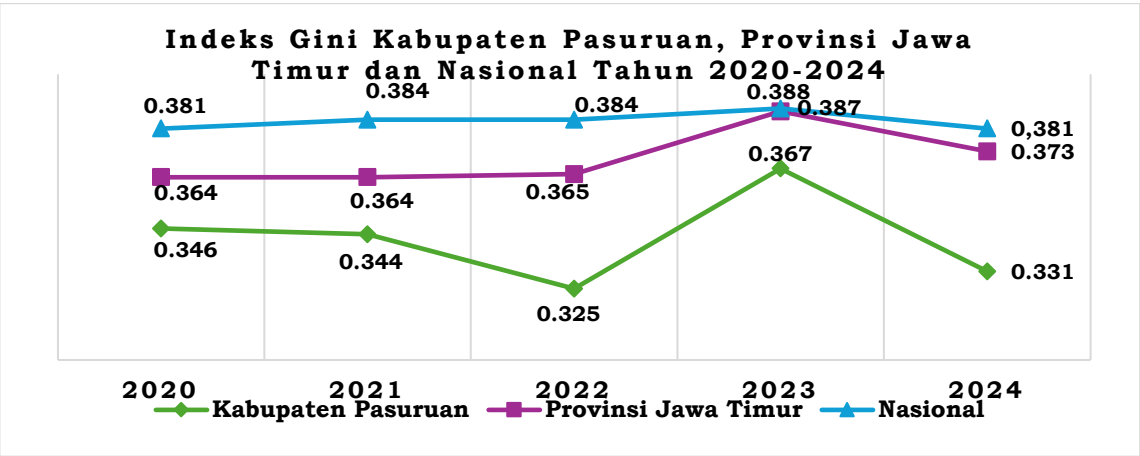
Gambar 2.22 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan dalam lima tahun terakhir selalu di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional sebagaimana pada gambar 2.22. Jika pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur dan nasional, ini menunjukkan bahwa Kabupten Pasuruan memiliki potensi ekonomi yang kuat dan mampu menarik investasi. Pemerintah harus fokus pada pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan dukungan terhadap sektor-sektor unggulan untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan tersebut.

B. Indeks/Rasio Gini

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan masyarakat suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Tidak ada "nilai ideal" yang berlaku untuk semua kabupaten atau kota, tetapi secara umum, semakin rendah nilai Indeks Gini, semakin merata distribusi pendapatan. Kabupaten atau kota dengan nilai Indeks Gini mendekati 0 cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah, yang sering dianggap sebagai indikator kesejahteraan sosial yang lebih baik. Namun, nilai Indeks Gini yang sangat rendah juga bisa mencerminkan adanya kesulitan dalam mengukur pendapatan secara akurat di daerah tersebut.



Gambar 2.23 Indeks Gini Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

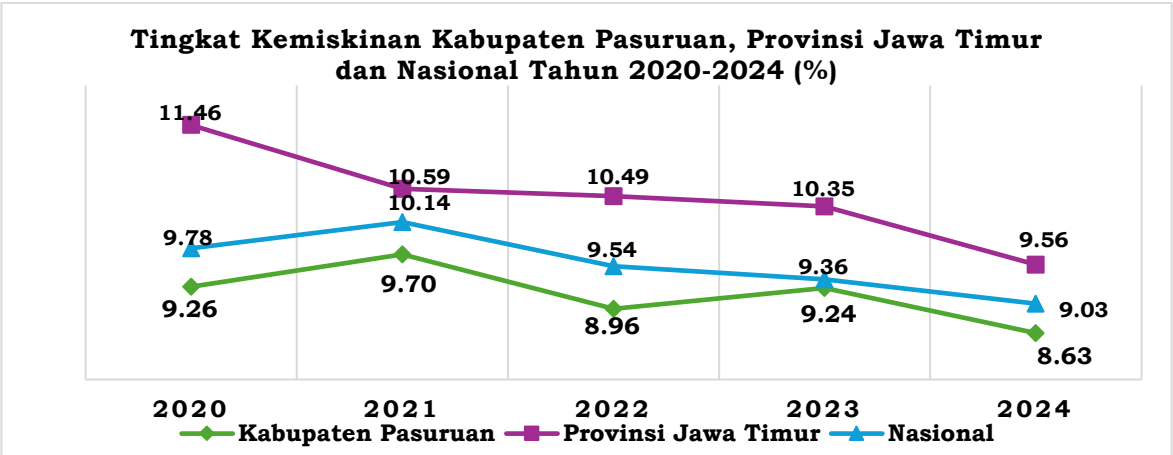
Berdasarkan gambar 2.23, secara umum indeks gini Kabupaten Pasuruan dalam periode tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dan

termasuk dalam kategori moderat/sedang (berada pada interval 0,3 – 0,5). Paruh periode pertama mengalami kenaikan, namun paruh periode berikutnya menunjukkan penurunan atau kondisi yang lebih baik. Dalam konteks kewilayahan, indeks gini Kabupaten Pasuruan berada di bawah atau lebih baik dari pada angka Jawa Timur dan Nasional.

C. Angka Kemiskinan

Upaya pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, penghapusan kemiskinan (*no poverty*) merupakan Tujuan/Goals I dalam SDG's "Pengentasan Kemiskinan menjadi salah satu agenda utama demi mengakhiri segala bentuk jenis kemiskinan." Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.



Gambar 2.24 Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tingkat Kemiskinan direpresentasikan oleh capaian Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasuruan beserta perbandingannya dengan angka Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Secara umum kondisi kemiskinan di Kabupaten Pasuruan berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional sebagaimana pada gambar 2.24. Penurunan indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan, bersamaan dengan penurunan persentase kemiskinan, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat semakin membaik. Namun, peningkatan garis kemiskinan dapat mengindikasikan bahwa meskipun ada perbaikan, standar hidup yang lebih tinggi juga diperlukan untuk mengatasi tantangan kemiskinan yang tersisa.

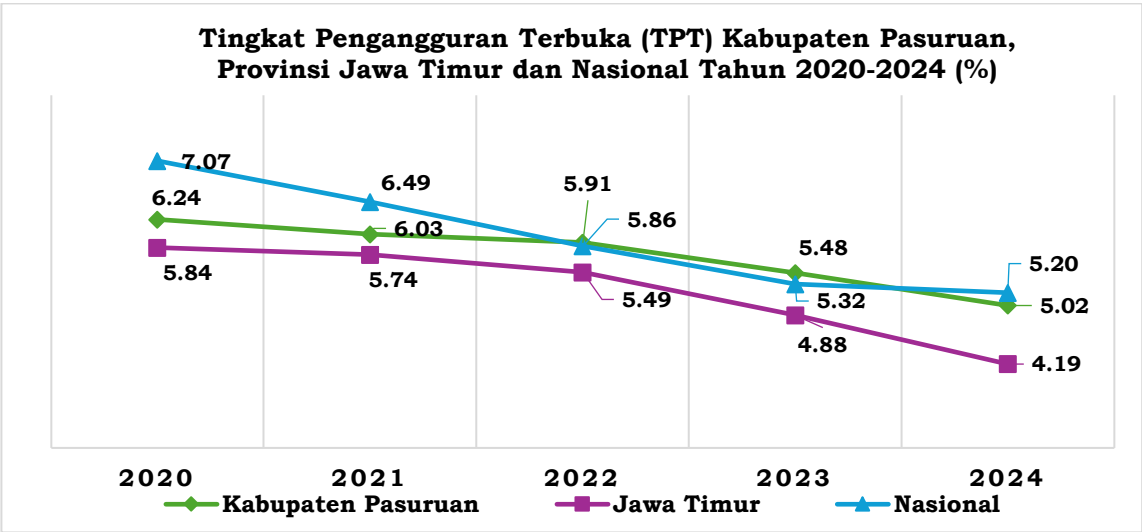
Tabel 2.23
Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	151,43	159,78	148,62	154,09	144,84
Persentase Penduduk Miskin (%)	9,26	9,7	8,96	9,24	8,63
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	355.299	368.686	394.016	429.624	450.088
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,15	1,17	1,29	1,22	1,09
Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0,23	0,24	0,29	0,26	0,21

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan proporsi jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding mengakibatkan timbulnya pengangguran. TPT Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2024 beserta perbandingannya dengan angka Provinsi Jawa Timur dan Nasional dapat dilihat pada gambar 2.25.



Gambar 2.25 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

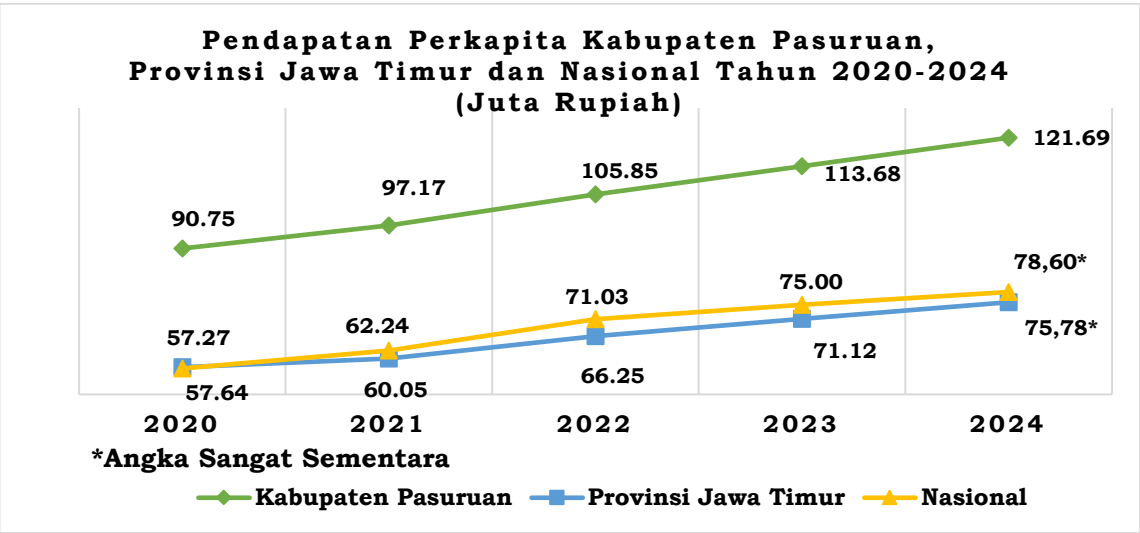
Penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Pasuruan menunjukkan adanya perbaikan dalam pasar kerja, meskipun masih ada tantangan karena tingkat pengangguran di Kabupaten Pasuruan lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Daerah perlu fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan menciptakan lapangan kerja baru untuk mengatasi masalah ini. Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat sebagai strategi penurunan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan.

E. PDRB Perkapita

PDRB perkapita atau Produk Domestik Regional Bruto per kapita, adalah ukuran ekonomi yang digunakan untuk mengukur pendapatan rata-rata yang dihasilkan oleh penduduk suatu wilayah atau negara dalam suatu periode waktu tertentu. PDRB adalah nilai total semua

barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah atau negara, sedangkan perkapita berarti per orang, Oleh karena itu, PDRB perkapita mengukur seberapa banyak pendapatan rata-rata yang diterima oleh setiap individu dalam suatu wilayah atau negara.

PDRB perkapita adalah indikator yang penting dalam analisis ekonomi karena dapat memberikan gambaran tentang tingkat kemakmuran atau kesejahteraan rata-rata penduduk suatu wilayah. Semakin tinggi PDRB perkapita, semakin besar pendapatan rata-rata penduduknya, yang dapat mengindikasikan tingkat hidup yang lebih baik. Namun, PDRB perkapita hanya memberikan gambaran umum tentang distribusi pendapatan dan tidak mencerminkan kesenjangan yang mungkin ada dalam distribusi pendapatan di dalam wilayah tersebut, berikut merupakan gambaran PDRB Perkapita Kabupaten Pasuruan.

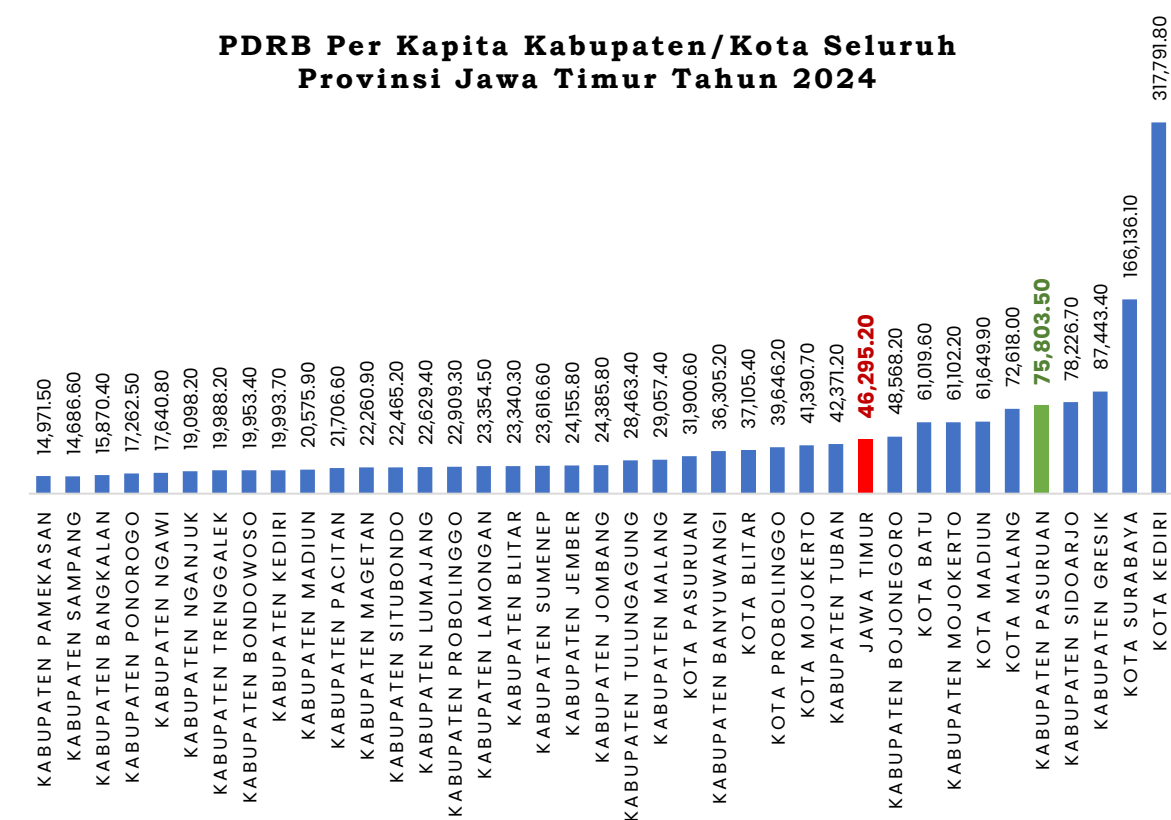


Gambar 2.26 PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Perkapita
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Gambar 2.26 menunjukkan PDRB Perkapita mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Selain itu capaian PDRB Perkapita Kabupaten Pasuruan selama 5 (lima) tahun terakhir selalu lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Terlebih Kabupaten Pasuruan kontribusi PDRB-nya 60% atau mayoritas adalah industri pengolahan dengan tipologi industri padat modal. Dengan demikian perputaran angka PDRB tersebut tidak secara langsung merata dimasyarakat Kabupaten Pasuruan.

Posisi PDRB Per Kapita Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 berada pada peringkat ke 5 dengan PDRB tertinggi di Provinsi Jawa Timur berada di bawah Kota Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten

Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. PDRB Perkapita Kabupaten Pasuruan berada diatas rata-rata kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Timur. Hal ini artinya rata-rata pendapatan per orang di Kabupaten Pasuruan secara umum lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Beberapa hal yang perlu dipahami adalah PDRB Perkapita tidak serta merta betul-betul merepresentasikan bahwa pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Pasuruan diangka tersebut. PDRB perkapita adalah rata-rata dan bisa jadi ada perbedaan pendapatan antar wilayah atau kelompok masyarakat di dalam Kabupaten Pasuruan sendiri, *rata-rata* tidak selalu mencerminkan keadaan semua orang, bisa saja hanya sebagian kecil wilayah atau kelompok kaya yang sangat tinggi pendapatannya, sehingga menarik naik rata-rata keseluruhan, sementara wilayah lain masih tertinggal. Walaupun angka PDRB per kapita terlihat bagus, pemerintah tetap perlu fokus pada pemerataan pembangunan, supaya seluruh wilayah dan semua kelompok masyarakat bisa menikmati pertumbuhan ekonomi, bukan hanya segelintir saja.



Gambar 2.27 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2025

F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Besaran IPM Kabupaten Pasuruan didukung atas pencapaian komponen IPM di dalamnya, yaitu harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Kondisi capaian masing-masing komponen IPM Kabupaten Pasuruan menggunakan metode lama Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 2.24 berikut.

Tabel 2.24
Perkembangan IPM dan Komponen IPM
di Kabupaten Pasuruan Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
IPM	66,69	67,41	68,29	68,60	70,54
Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,90	70,17	70,17	70,23	70,25
Angka Harapan Sekolah (Tahun)	12,05	12,30	12,31	12,41	12,58
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,82	6,38	7,11	7,40	7,41
Pengeluaran Per Kapita (Ribuan Rupiah)	-	-	10.381,00	10.164,00	10.297

Catatan : Menggunakan Metode SP2010
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

Angka melek huruf Tahun 2024 berdasarkan data BPS di Kabupaten Pasuruan adalah 94,85%. Sedangkan angka Provinsi Jawa Timur adalah 93,9%. Jika dibandingkan dengan angka Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan memiliki angka yang lebih tinggi. Beberapa faktor yang mempengaruhi angka melek huruf di Kabupaten Pasuruan antara lain kemiskinan, akses pendidikan, dan faktor budaya. Kemiskinan dapat menyebabkan anak-anak putus sekolah dan tidak memiliki akses ke pendidikan yang memadai, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk membaca dan menulis. Selain itu, faktor budaya, seperti anggapan bahwa pendidikan tidak penting, terutama untuk anak perempuan, juga dapat berkontribusi pada rendahnya angka melek huruf.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 adalah 12,78 tahun (Hasil Long Form SP2020). Ini berarti, anak-anak usia 7 tahun di Kabupaten Pasuruan diperkirakan akan menempuh pendidikan selama 12,78 tahun di masa depan. Sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 adalah 14,03 tahun. Angka Kabupaten Pasuruan masih dibawah angka Provinsi Jawa Timur. Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi kedepan. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Pasuruan, seperti halnya di daerah lain, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan. Beberapa faktor utama yang mempengaruhinya antara lain adalah: tingkat kemiskinan, kualitas pendidikan, aksesibilitas pendidikan, kondisi sosial budaya, dan kebijakan pemerintah.

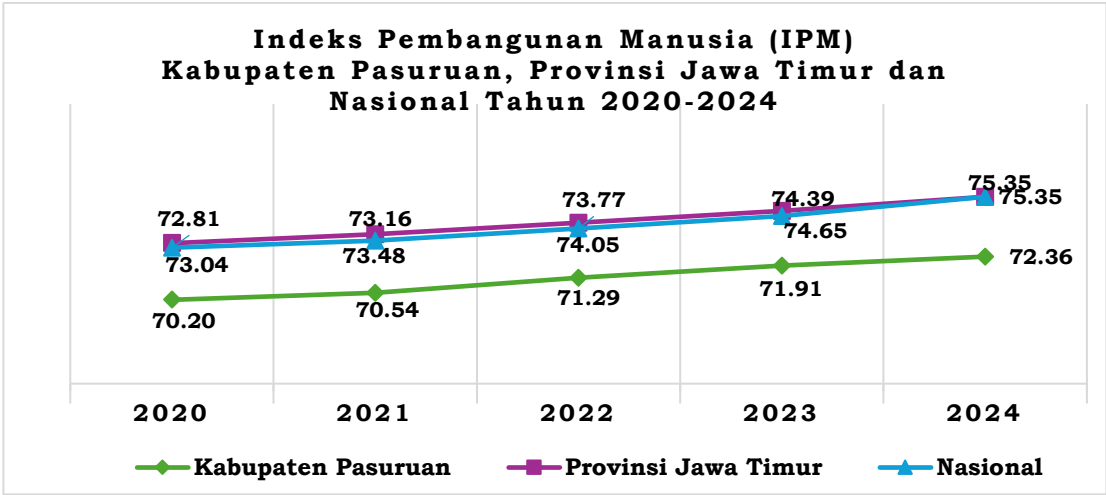
Dengan dilaksanakannya Survei Penduduk pada tahun 2020, perhitungan IPM pada tahun 2022-2024 menggunakan metode baru berbasis perhitungan Hasil Long Form SP2020, dimana menghasilkan perhitungan Angka Harapan Hidup yang cenderung meningkat sebagaimana tabel 2.25 berikut.

Tabel 2.25
Perkembangan IPM dan Komponen IPM di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
IPM	71,29	71,91	72,36
Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,15	74,41	74,61
Angka Harapan Sekolah (Tahun)	12,76	12,77	12,78
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,42	7,44	7,46
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rup iah)	10.726	11.239	11.617

Catatan : Menggunakan Metode Hasil Long Form SP2020
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

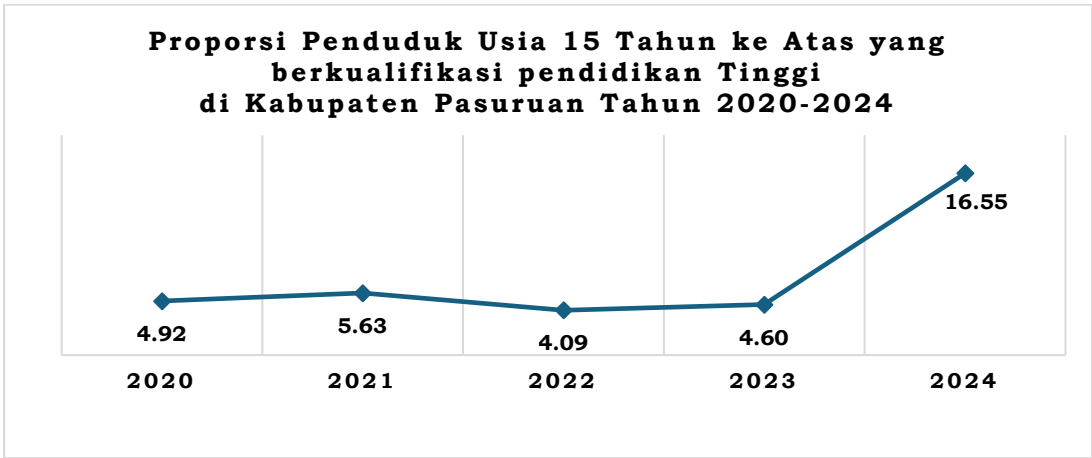
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 2017-2021 maupun 2022-2024 mengalami kenaikan meskipun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Jawa Timur dan Nasional sebagaimana pada gambar 2.28. Nilai IPM Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 sudah masuk dalam kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$).



Gambar 2.28 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 (Metode Hasil Long Form SP2020)
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

G. Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di provinsi tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). Jenjang pendidikan tinggi mencakup: Diploma I-IV, S1, S2, S2 Terapan, S3. Adapun data proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut.

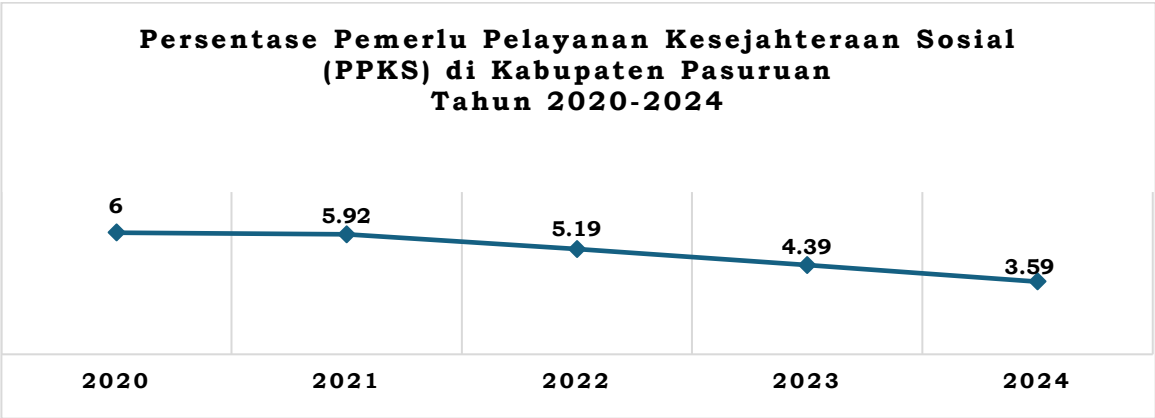


Gambar 2.29 Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan gambar 2.29 angka proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi mengalami peningkatan pada tahun 2024 meskipun masih tergolong rendah. Hal ini menjadi atensi untuk meningkatkan angka proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan yang dapat ditamatkan oleh seseorang bisa mencerminkan tingkat intelektualitas orang tersebut dan juga dapat meningkatkan status sosial dimasyarakat. Oleh karenanya makin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh seseorang maka kemampuan, wawasan, cara berfikir akan lebih luas dan maju.

H. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Persentase PPKS dalam periode tahun 2020-2024 menunjukkan tren penurunan yang menunjukkan semakin berkurangnya jumlah Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Pasuruan sebagaimana pada gambar 2.30.



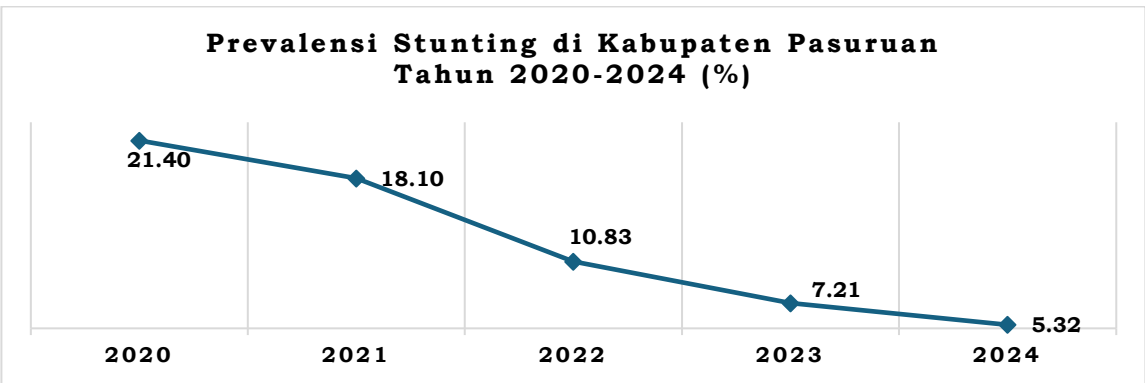
Gambar 2.30 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, 2025

Guna meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), telah dibentuk Tim Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) yang dikhususkan untuk penanganan PPKS/PMKS pada kategori anak. Kedepannya untuk PKSAI, Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan kewenangan dan layanan sehingga mampu memberikan dampak positif bagi penurunan PPKS. Adanya stimulan berupa sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) diharapkan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada PPKS.

2) Kesehatan untuk Semua

A. Prevalensi Stunting pada Balita (Pendek dan Sangat Pendek)

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak stunting juga memiliki resiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya.



Gambar 2.31 Prevalensi Stunting di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

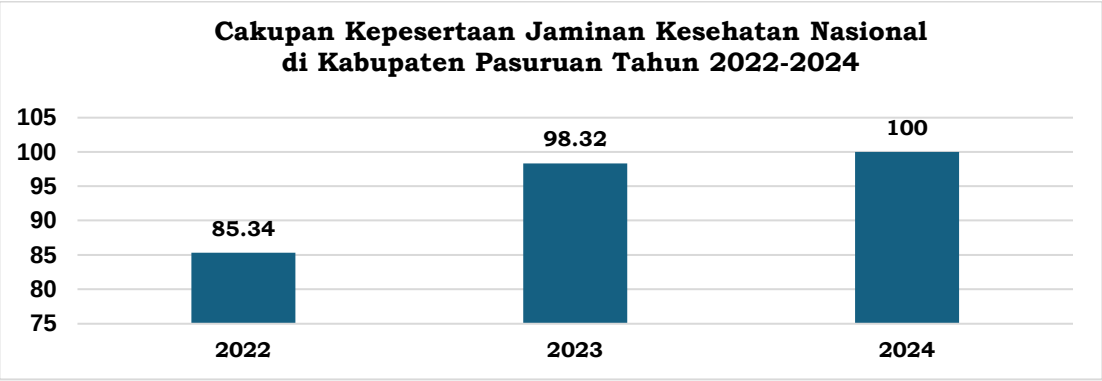
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Prevalensi stunting di Kabupaten Pasuruan telah menunjukkan penurunan yang signifikan pada tahun 2024 sebagaimana pada gambar 2.31. Adanya komitmen stakeholder terkait penurunan prevalensi stunting setiap tahunnya didukung dengan program, kegiatan, sub kegiatan serta anggaran baik dalam bentuk intervensi spesifik maupun intervensi sensitif. Posyandu Tematik Stunting (POSTING) mulai dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai komitmen dan intervensi spesifik dalam percepatan penurunan stunting melalui inovasi Kasih Bersanding Mesra “Keluarga Bersih Bersama Sadari Stunting Menuju Masyarakat Sejahtera” untuk mencapai target Nasional yaitu menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada Tahun 2024.

B. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah salah satu wujud pemenuhan hak konstitusi negara kepada rakyat Indonesia yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 mengatur mengenai hak terhadap jaminan sosial. Program ini dikelola selama enam tahun

oleh dua Lembaga baru non pemerintahan yakni BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).



Gambar 2.32 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan gambar 2.32 dapat dilihat bahwa cakupan kepesertaan JKN Kabupaten Pasuruan selama 3 (dua) tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan ini mengartikan bahwa pelaksanaan jaminan kesehatan di Kabupaten Pasuruan baik Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Manfaat program ini diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) termasuk obat dan bahan medis dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya (*managed care*).

C. Persentase Balita Gizi Buruk

Cakupan balita dengan gizi buruk merupakan gambaran kasus gizi buruk pada balita di waktu tertentu, dihitung berdasarkan tanda-tanda fisik dan klinis yang mengarah pada diagnosa gizi buruk. Indikator ini diperoleh dengan mengukur persentase jumlah balita dengan gizi buruk terhadap jumlah balita yang ada di Kabupaten Pasuruan. Cakupan persentase balita dengan gizi buruk di Kabupaten Pasuruan mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berfluktuasi dan menurun di tahun 2024 sebagaimana pada tabel 2.26. Akan tetapi

jumlah balita yang menderita gizi buruk, terus mengalami penurunan selama 5 (lima) periode terakhir dan disertai juga dengan penurunan jumlah balita pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

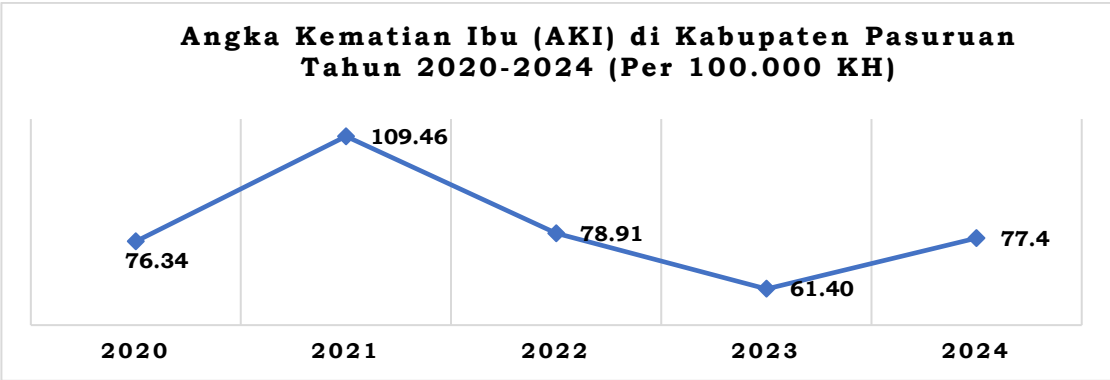
Tabel 2.26
Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian Kinerja				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Balita Gizi Buruk (Orang)	34	31	30	28	27
Jumlah Balita (Orang)	117.832	118.395	117.907	75.653	86.439
Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0,028	0,026	0,034	0,037	0,031

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

D. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu melahirkan digunakan untuk mengetahui keselamatan ibu pada proses persalinan. Indikator ini diperoleh dengan perhitungan jumlah kematian ibu dalam satu tahun dibanding dengan jumlah kelahiran hidup dikalikan 100.000. Angka pengukuran resiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan. Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Target Angka kematian ibu (AKI) berdasarkan SDGs (*Suistenable Development Goals*) harus di bawah 70 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2030.



Gambar 2.33 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2024

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pasuruan selama kurun waktu tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuatif sebagaimana pada gambar 2.33. Pada tahun 2021, AKI mengalami kenaikan yang sangat signifikan karena adanya Pandemi *Covid-19*, selanjutnya tahun 2022-2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2024 angka kematian ibu kembali meningkat sehingga perlu upaya yang telah dilakukan dan akan terus ditingkatkan yakni:

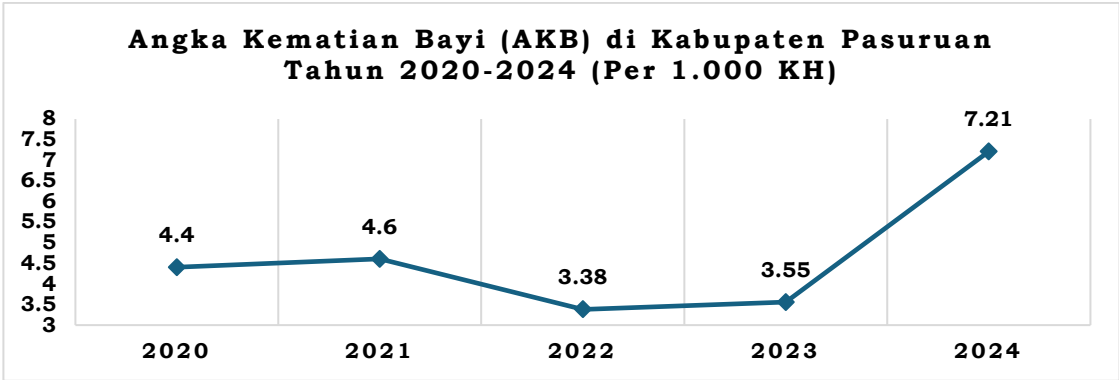
1. Meningkatkan kualitas pemeriksaan kehamilan (ANC/ *Ante Natal Care*) pada ibu hamil secara kontinyu yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (Bidan);
2. Meningkatkan koordinasi melalui peningkatan sistem jejaring tenaga medis, sehingga pertolongan pada ibu hamil yang resiko tinggi dapat dilakukan sejak awal;
3. Membuat SIP (sistem informasi posyandu);
4. Meningkatkan pola rujukan kasus dan rujukan berjenjang sehingga tidak terjadi keterlambatan penanganan dan keterlambatan mengirim pasien;
5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi yakni:
 - a) Gerakan Ibu Hamil sadar Posyandu
 - b) Pembinaan Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) oleh Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)
 - c) Pertemuan kader KIBBLA
 - d) Audit Maternal Perinatal
 - e) Pengembangan P4K di desa masalahat

- f) Penelusuran Pemantauan Wilayah Setempat KIA (P-PWS KIA) ibu dan anak
- g) Supervisi fasilitatif
- h) Pelatihan APN
- i) Pelatihan Kelas ibu hamil
- j) Kemitraan Bidan dan dukun bayi – kader (melalui PERDA nomor 2 tahun 2009 tentang KIBBLA)
- k) Peningkatan pemeriksaan ibu hamil melalui revitalisasi posyandu
- l) Drill emergency kegawatdaruratan Maternal disetiap Puskesmas
- m) Meningkatkan kerkjasama sistem rujukan kesehatan
- n) Menambah fasilitas RS Rujukan (RSUD Grati) di Wilayah Timur

E. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB.

Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolak ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Target dari Pemerintah yang juga menjadi target SDGs (*Sustainable Development Goals*) harus di bawah 12 per 1.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2030. Indikator Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup digunakan untuk mengukur jumlah bayi (usia kurang dari satu tahun) yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup dalam tahun yang sama, sehingga indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah bayi (usia kurang dari satu tahun) yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup dibagi jumlah kelahiran hidup dikalikan seribu. Perkembangan angka kematian bayi selama lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif sebagaimana pada gambar 2.34.



Gambar 2.34 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Kematian bayi terbanyak karena Infeksi disebabkan Ibu Bersalin banyak yang mengalami KPD (Ketuban Pecah Dini). Asfiksia disebabkan bayi tidak mendapatkan penanganan Asfiksia oleh Bidan dengan baik sesuai dengan kompetensi, dan BBLR disebabkan karena Ibu Hamil KEK dan PEB. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kompetensi pada Bidan dan juga komunikasi secara intens dengan dokter spesialis anak yang keberadaannya pada RSUD Bangil dan RSUD Grati. Tujuan adanya jejaring antara Puskesmas, Polindes dan Bidan Praktek dengan RSUD Bangil dan RSUD Grati agar bayi Infeksi, Asfiksia bisa tertangani dengan baik sebelum dirujuk ke RSUD Bangil atau RSUD Grati. Kasus BBLR bisa terpantau dan ditingkatkan berat badan bayi apabila pemeriksaan kehamilan dilakukan secara rutin dan berkualitas, serta ibu hamil selalu mendapatkan penyuluhan.

Bila dilihat dari cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebanyak 100%, maka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan kualitas pertolongan persalinan tersebut serta penanganan gawat darurat bayi oleh Bidan dan sistem rujukan yang baik dengan Puskesmas, Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) dan RSUD. Namun demikian ternyata bayi yang mengalami kematian tersebut telah mengalami proses rujukan ke Rumah Sakit. Upaya yang dilakukan untuk menekan angka kematian bayi di Kabupaten Pasuruan diantaranya adalah pelaksanaan Penelusuran Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (P-PWS KIA), Audit Maternal Perinatal, Supervisi Fasilitatif, Peningkatan pemeriksaan ibu hamil melalui revitalisasi posyandu serta penyelenggaraan pelatihan untuk tenaga

medis meliputi Pelatihan Asuhan Persalinan Normal, Pelatihan Kelas Ibu Hamil, Pelatihan Kelas Ibu Balita, Sarasehan dalam rangka upaya penurunan Angka Kematian Bayi.

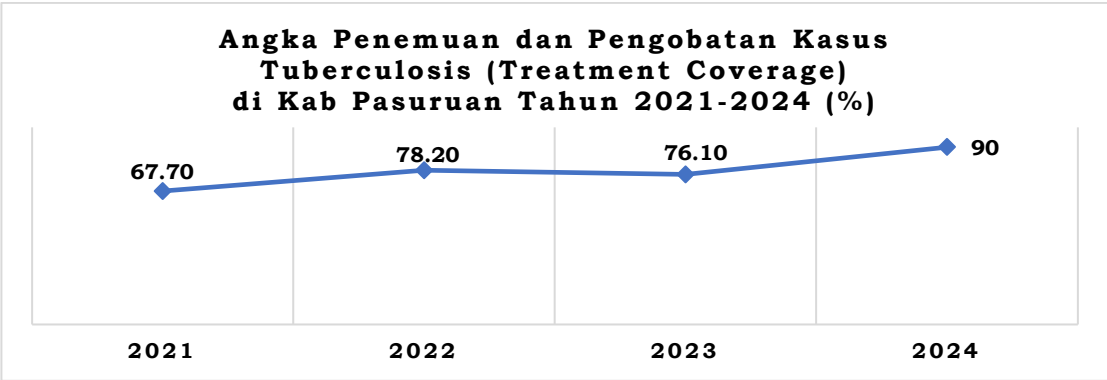
F. Insidensi Tuberkulosis

Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah kesehatan masyarakat dan menjadi tantangan global. TBC merupakan salah satu 10 penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia dan penyebab utama kematian dari agen infeksius. Secara global diperkirakan 10.6 juta (range 9,8-11,3 juta) orang sakit TBC; 1,4 juta (range 1,3-1,5 juta) kematian akibat TBC termasuk HIV-negatif dan 187.000 kematian (range 158.000–218.000) termasuk HIV-positif.

Sumber penularan di masa akan datang selain faktor lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat turut mempengaruhi penularan TBC. Sehingga diperlukan sinergitas, komitmen dan dukungan lintas sektor mulai tingkat pusat, propinsi dan Kabupaten/Kota.

a. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis (Treatment Coverage)

Berdasarkan Surat Direktur P2PM No. PM.01.01/C.III/4406/2023 tentang pemberitahuan perubahan definisi indikator cakupan penemuan kasus tuberkulosis, cakupan penemuan kasus tuberkulosis (treatment coverage) adalah jumlah kasus tuberkulosis yang ditemukan di antara perkiraan kasus tuberkulosis. Sejak tahun 2021 capaian *treatment coverage* telah menggunakan definisi indikator *treatment coverage* terbaru. *Treatment Coverage* menggambarkan seberapa banyak kasus tuberkulosis yang ditemukan dapat terjangkau oleh program Pengendalian Tuberkulosis. Adapun data treatment coverage di Kabupaten Pasuruan adalah sebagaimana gambar 2.35

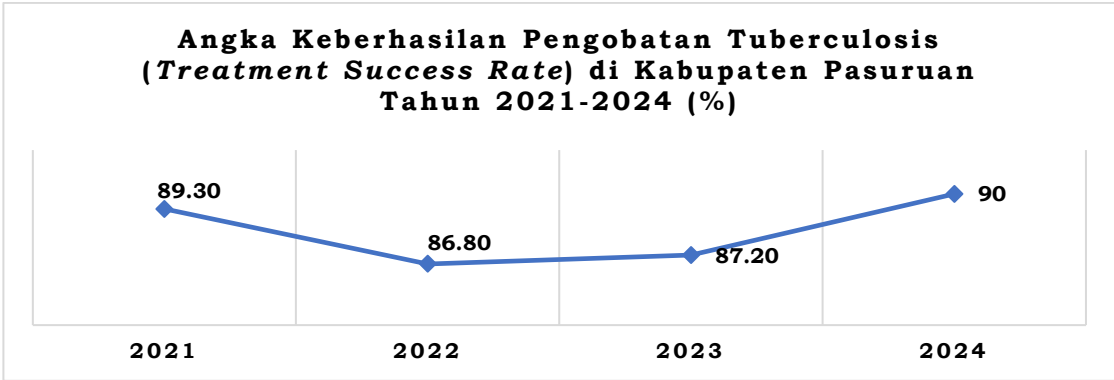


Gambar 2.35 Angka Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis (*Treatment Coverage*) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan pada tahun 2024. Capaian ini telah melampaui target nasional yaitu sebesar >70%. Peningkatan ini perlu didukung dengan perilaku pencegahan dan pengendalian TB. Perilaku pencegahan dan pengendalian TB paru merupakan salah satu perilaku kesehatan (Notoatmodjo, 2018). Perilaku kesehatan merupakan tindakan individu maupun kelompok terkait kesehatan untuk peningkatan kualitas hidup yang didalamnya dipengaruhi oleh keyakinan, nilai, persepsi, sikap, dan lainnya (Pakpahan et al., 2021).

G. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (Treatment Success Rate)

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis atau *Treatment Success Rate* adalah jumlah semua kasus tuberkulosis yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan, dengan demikian angka ini merupakan penjumlahan dari penjumlahan angka kesembuhan semua kasus dan angka pengobatan lengkap semua kasus. Angka ini menggambarkan kualitas pengobatan tuberkulosis. Angka keberhasilan pengobatan semua kasus tuberkulosis minimal 90%.

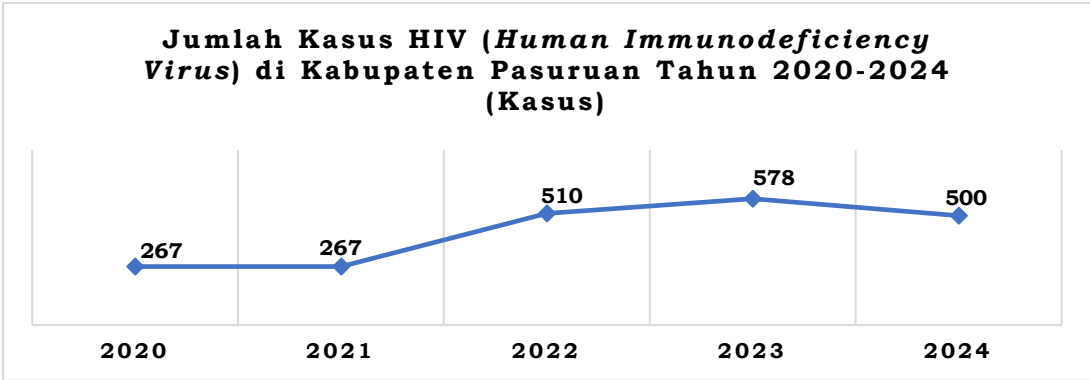


Gambar 2.36 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis
(Treatment Success Rate) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui angka keberhasilan pengobatan Tuberculosis (*Treatment Success Rate*) di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan. Capaian *Treatment Success Rate* mengalami penurunan pada tahun 2022, akan tetapi pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mengalami kenaikan, sudah memenuhi angka keberhasilan pengobatan semua kasus tuberkulosis minimal (90%).

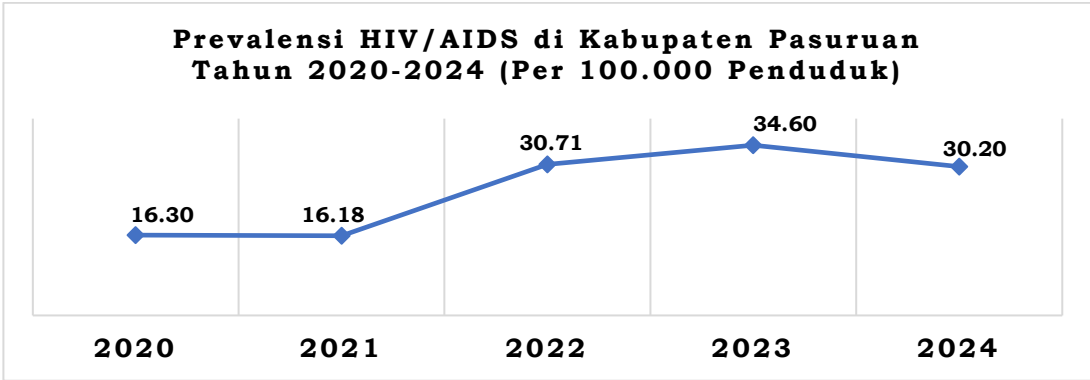
H. HIV

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan patogen yang menyerang sistem imun manusia, terutama semua sel yang memiliki penanda CD 4+ dipermukaannya seperti makrofag dan limfosit-T. HIV merupakan virus yang menyebabkan kondisi AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*) dimana kondisi immunosupresif yang berkaitan erat dengan berbagai infeksi oportunistik, neoplasma sekunder, serta manifestasi neurologic tertentu akibat infeksi HIV (Kapita Selekt, 2014). HIV terdapat di dalam cairan tubuh seseorang yang telah terinfeksi seperti didalam darah, Air Mani (Cairan Sperma) atau Cairan Vagina dan Air Susu Ibu. Sebelum HIV berubah menjadi AIDS, penderitanya akan tampak sehat dalam kurun waktu kira-kira 5 sampai 10 tahun. Walaupun tampak sehat, mereka dapat menularkan HIV pada orang lain melalui hubungan seks yang tidak aman, transfusi darah atau pemakaian jarum suntik secara bergantian. Jumlah kasus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 2.37.



Gambar 2.37 Jumlah Kasus HIV di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Jumlah Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 2.38.



Gambar 2.38 Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Dari gambar di atas prevalensi HIV/AIDS pada tahun 2020-2024 mengalami tren kenaikan. Peningkatan Prevalensi HIV/AIDS menunjukkan adanya kenaikan jumlah kasus HIV/AIDS pada tahun 2022 dan 2023. Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar di Kabupaten Pasuruan mencapai 105,5% artinya telah ada upaya yang optimal dalam meminimalkan jumlah kasus HIV. Berdasarkan kelompok umur penderita HIV paling banyak ditempati kelompok umur 25-49 tahun. Fakta tersebut menunjukkan bahwa penderita HIV didominasi kelompok usia produktif, tentu hal ini berdampak pada produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, perlu diupayakan penanganan dan pengendalian HIV/AIDS yang adekuat (memadai). Upaya penanganan tersebut dibuktikan melalui persentase ODHIV baru mendapatkan pengobatan sebesar 48%. Capaian tersebut diharapkan dapat

meningkat setiap tahunnya melalui manajemen pengendalian penyakit yang terstruktur dan kontinyu.

3) Pendidikan Berkualitas yang Merata

A. Angka Literasi dan Numerasi

Angka literasi dan numerasi adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan baca-tulis dan hitung masyarakat di suatu wilayah. Secara definisi angka literasi mengukur persentase penduduk yang mampu membaca dan menulis dengan pemahaman. Sementara angka numerasi mengukur persentase penduduk yang memiliki kemampuan dasar dalam berhitung dan memahami konsep matematika sederhana.

Kemampuan literasi merupakan kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sementara itu kemampuan numerasi adalah kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Adapun cara mengukur kemampuan ini pada dasarnya adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Adapun data kemampuan literasi dan numerasi Kabupaten Pasuruan tingkat SD/MI dan SMP/MTs adalah sebagai berikut :

Tabel 2.27
Angka Literasi dan Numerasi di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021-2024

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
Persentase satuan Pendidikan dasar yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen untuk literasi membaca					
SD/MI	%	64,39	71,32	77,35	80
SMP/MTs	%	59,73	66,81	75,31	79,50

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
Persentase satuan Pendidikan dasar yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen untuk numerasi					
SD/MI	%	45,11	59,27	74,40	77
SMP/MTs	%	42,71	47,77	72,09	78,09

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan tabel 2.27 diatas dapat dilihat bahwa indeks literasi dan indeks numerasai Kabupaten Pasuruan di tingkat SD/MI dan SMP/MTs mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut mengartikan kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks dan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.

B. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun.

Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun di Kabupaten Pasuruan dalam periode tahun 2020-2024 sebagaimana tabel di bawah. Indikator ini berbeda dengan rata-rata lama sekolah sebagai pembentuk IPM yang mengukur penduduk usia di atas 25 tahun. Secara umum rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun mengalami peningkatan dengan capaian tahun 2024 sebesar 7,94 tahun atau sampai dengan kelas 8 SMP.

Tabel 2.28
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

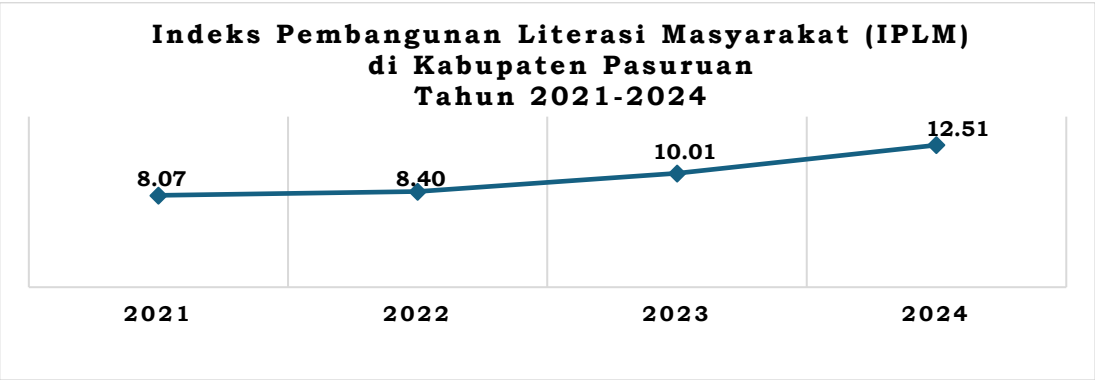
Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	7,97	7,61	7,53	7,84	7,94

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2025

C. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat literasi masyarakat dan pengembangan literasi secara keseluruhan di wilayah. Indeks ini membantu dalam mengidentifikasi sejauh mana masyarakat memiliki

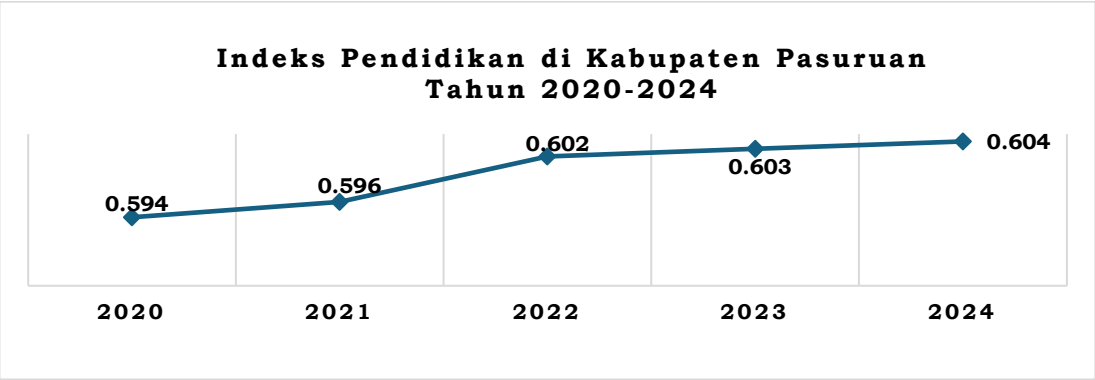
akses, keterampilan, dan kebiasaan yang mendukung literasi. Pengukuran IPLM dilakukan dengan menggunakan 7 unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, dan angka perpustakaan. Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021-2024 selalu mengalami peningkatan sebagaimana pada gambar 2.39.



Gambar 2.39 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, 2025

D. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang variabelnya terdiri dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun Indeks Pendidikan Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2024 sebagaimana gambar 2.40.



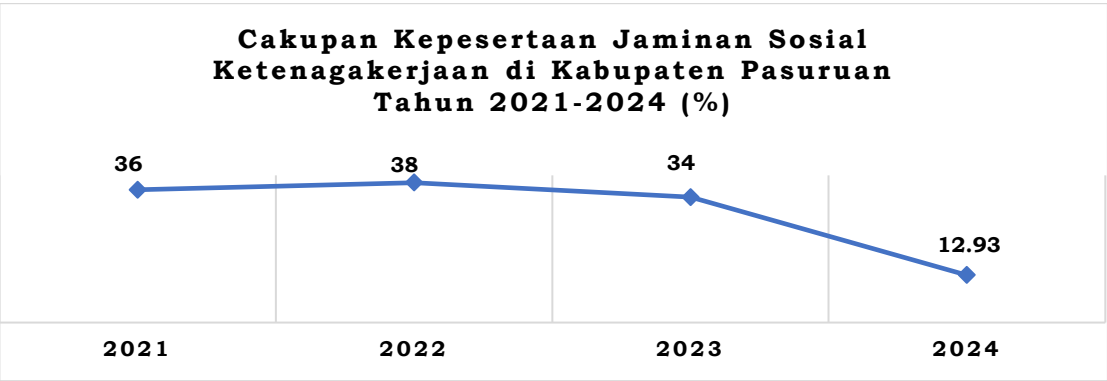
Gambar 2.40 Indeks Pendidikan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2025

Gambar 2.40 menunjukkan bahwa capaian Indeks Pendidikan di Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2024 mengalami tren peningkatan. Peningkatan ini menggambarkan semakin membaiknya kualitas pendidikan di Kabupaten Pasuruan karena semakin tinggi nilai Indeks Pendidikan, maka semakin besar kontribusinya terhadap nilai Indeks Pembangunan Manusia.

4) Perlindungan Sosial yang Adaptif

A. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak termasuk kebutuhan akan kesehatan. Undang-undang No. 24 Tahun 2011 menetapkan Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek (RI, 2011). Dalam beberapa tahun terakhir, negara berusaha untuk mewujudkan jaminan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia (Universal Coverage). Namun, dengan kondisi penduduk Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah dalam kondisi disparitas yang sangat tinggi, diperlukan pemetaan komprehensif yang mencakup berbagai aspek untuk menghasilkan pemikiran dan keputusan strategik pada level lokal maupun nasional (Irwandy, 2016). Data dan informasi kepesertaan jaminan sosial berikut memberikan gambaran karakteristik tenaga kerja yang menjadi peserta jaminan sosial, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan.



Gambar 2.41 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan gambar 2.41 di atas dapat dilihat bahwa cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan mengalami

fluktuatif. Jaminan sosial tenaga kerja memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, baik sektor formal maupun informal. Jumlah tenaga kerja sektor informal jauh lebih banyak dari sektor formal. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan jaminan sosial tenaga kerja sesuai amanat UU Nomor 3 tahun 1992. Beberapa kendala dihadapi dalam mengimplementasikan program jaminan sosial tenaga kerja. Terbatasnya akses informasi dan rendahnya pengetahuan tenaga kerja terkait program jaminan sosial menjadi kendala tersendiri dalam meningkatkan kepesertaan pada pekerja informal. Mereka belum menyadari pentingnya ikut serta dalam program Jamsostek (Madya & Nurwahyuni, 2019). Selain itu, besarnya iuran yang harus dibayar setiap bulan menjadi pertimbangan bagi pekerja informal untuk ikut program Jamsostek (Adillah & Anik, 2015). Berbeda dengan pekerja formal, besarnya penghasilan pekerja informal tidak menentu tergantung kondisi usaha. Pekerjaan sektor informal dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang banyak menampung pekerja informal memiliki keterbatasan seperti modal, bahan baku, akses pasar dan sebagainya, yang pada akhirnya berpengaruh pada upah pekerjaannya. Dengan demikian diperlukan upaya sinergis dengan melibatkan beberapa sektor untuk meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan nasional agar tenaga kerja mendapatkan perlindungan kesehatan untuk meningkatkan pendapatannya.

B. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di sektor Formal.

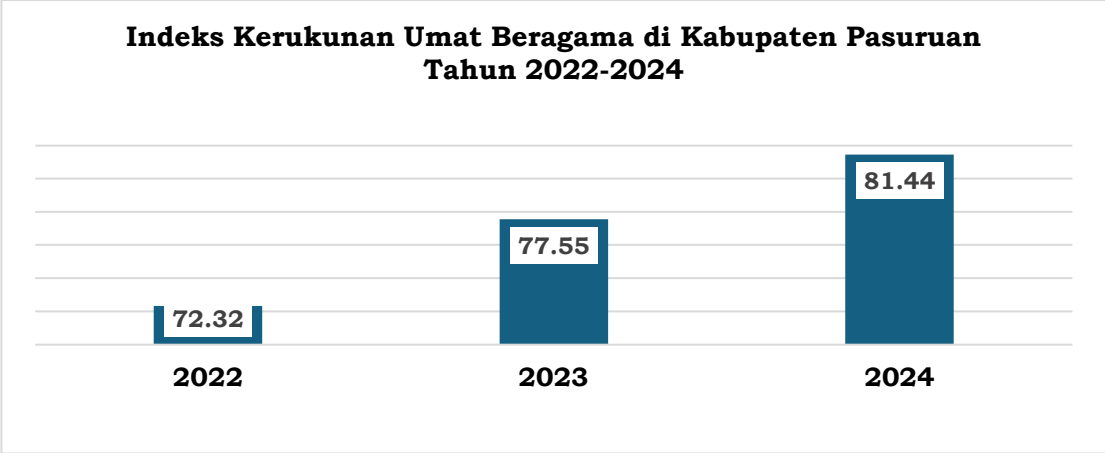
Indikator ini ingin menggambarkan keberpihakan kepada kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas dalam memberikan kesempatan berkarya di sektor lapangan pekerjaan formal. Berdasarkan data yang tersedia di tahun 2023, penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal tercatat masih relatif rendah yaitu sebesar 37%.

5) Beragama, Maslahat, dan Berkebudayaan Maju

A. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama menggambarkan suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam

menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya, kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan. Berdasarkan gambar 2.42 di bawah dapat dilihat bahwa capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebagaimana pada gambar 2.40.



Gambar 2.42 Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2024
Sumber: Kantor kementerian Agama Kabupaten pasuruan, 2025

B. Indeks Kebudayaan Daerah

Indeks Kebudayaan Daerah merupakan indikator yang diukur secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sebagai pengganti/pendekatan terhadap Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) karena hasil penilaian IPK tidak tersedia untuk level kabupaten/kota. Sebagaimana IPK, Indeks Kebudayaan Daerah diukur berdasarkan ketersediaan data yang terbagi dalam dimensi dan indikator sebagaimana tabel 2.29.

Tabel 2.29
Pengukuran Indeks Kebudayaan Daerah

No.	Dimensi / Indikator	Bobot Dimensi	Nilai	
			Max	Min
1	Dimensi Ekonomi Budaya	0,1		
1.1	Persentase penduduk usia 7 tahun ke atas sebagai pelaku/penggiat seni		0	100
2	Dimensi Pendidikan	0,2		
2.1	Rata-rata Lama Sekolah (MYS) penduduk usia 25 tahun ke atas		0	15
2.2	Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas		0	18
2.3	Angka Kesiapan Sekolah (AKS)		0	100
2.4	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian		0	45
2.5	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah		0	100
2.6	Persentase penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang bersekolah		0	100
3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	0,2		
3.1	Kerukunan Umat Beragama		0	100
4	Dimensi Warisan Budaya	0,25		
4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran		0	55
4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan		0	55
4.3	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya (museum dan candi)		0	35
5	Dimensi Ekspresi Budaya	0,1		
5.1	Persentase pelaku/penggiat seni yang melakukan pertunjukan seni		0	100
6	Dimensi Budaya Literasi	0,1		
6.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir		0	85
6.2	Tingkat Kegemaran Membaca		0	100
7	Dimensi Gender	0,05		
7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki		0	100
7.2	Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat		0	100
7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki		0	100

Sumber: BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2024, data diolah

Pengukuran indeks kebudayaan daerah dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu:

- 1. Interval 0 - 20 = sangat rendah
- 2. Interval 20,01 - 40 = rendah
- 3. Interval 40,01 - 60,00 = sedang
- 4. Interval 60,01 - 80,00 = tinggi
- 5. Interval 80,01 - 100 = sangat tinggi

Hasil perhitungan Indeks Kebudayaan Daerah Kabupaten:

Tabel 2.30
Indeks Kebudayaan Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2023 dan 2024

Uraian	2023	2024*
Indeks Kebudayaan Daerah	55,48 (sedang)	55,12 (sedang)
Indeks Dimensi Ekonomi Budaya	0,34	0,43
Indeks Dimensi Pendidikan	100,78	100,81
Indeks Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	77,55	81,44
Indeks Dimensi Warisan Budaya	23,44	6,91
Indeks Dimensi Ekspresi Budaya	42,66	64,11
Indeks Dimensi Budaya Literasi	68,11	73,98
Indeks Dimensi Gender	56,88	61,71

Catatan : tahun 2024, data sementara
Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2025, data diolah

Berdasarkan perhitungan tersebut indeks kebudayaan daerah mengalami penurunan namun masih tetap dalam kategori ‘Sedang’. Penurunan signifikan terjadi pada dimensi warisan budaya, hal ini disebabkan adanya validasi dan perubahan database yang disesuaikan dengan aplikasi Data Pokok Kebudayaan di Pemerintah Pusat.

6) Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

A. Indeks Perlindungan Anak.

Indeks Perlindungan Anak (IPA) disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak yaitu 4 kluster pemenuhan hak anak dan 1 kluster perlindungan khusus anak. Realisasi IPA di Kabupaten Pasuruan dirincikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.31
Capaian Pembangunan Perlindungan Anak Kabupaten Pasuruan

Tahun	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Klaster V Perlindung- an Khusus	IPA
2021	41,41	79,02	78	27,71	73,88	60,93
2022	47,79	71,13	81,39	30,88	80,61	63,15
2023	46,74	78,42	79,73	34,71	74,75	63,64

Sumber: KemenPPPA, 2024

Berdasarkan data di atas, capaian indeks klaster penyusunan IPA menunjukkan peningkatan dan penurunan pada tahun 2023 pada setiap klaster dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi pada klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Penurunan terjadi pada klaster I Hak Sipil dan Kebebasan, klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, dan klaster V Perlindungan Khusus (penurunan tertinggi, 5,86%).

Capaian IPA Kabupaten Pasuruan tahun 2023 berada di bawah capaian IPA Provinsi Jawa Timur dan wilayah sekitarnya yaitu Kota Pasuruan, Kota Malang, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Mojokerto. Namun di atas capaian IPA Kabupaten Malang.

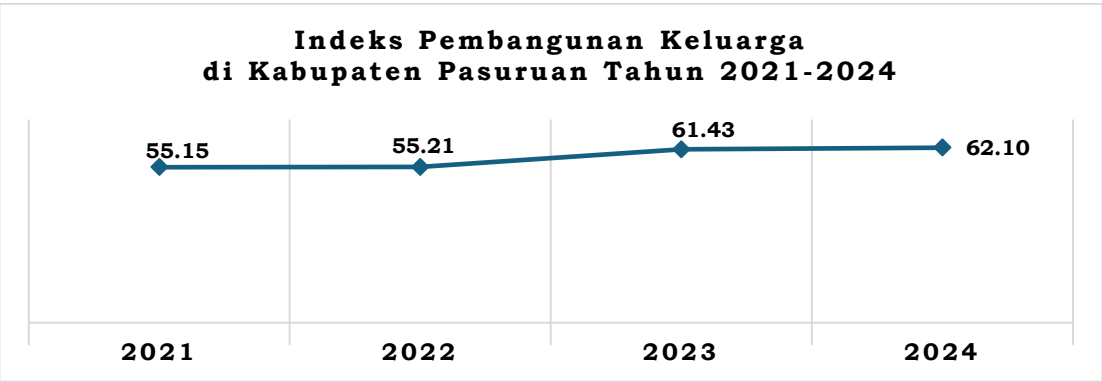
B. Indeks Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga. Dengan demikian, indikator pembangunan keluarga terdiri atas 3 (tiga) dimensi yaitu kemandirian, ketenteraman dan kebahagiaan keluarga. Indeks Pembangunan Keluarga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. Nilai Indeks Pembangunan Keluarga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Keluarga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40;
2. Indeks Pembangunan Keluarga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 – 70;

3. Indeks Pembangunan Keluarga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Indeks Pembangunan Keluarga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) baru diperkenalkan oleh BKKBN tahun 2020, sehingga perhitungan baru dimulai tahun 2021. Capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Pasuruan tahun 2021-2024 memiliki tren capaian yang terus meningkat sebagaimana pada gambar 2.43. Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Pasuruan mempunyai kategori yang cukup baik atau berkembang.

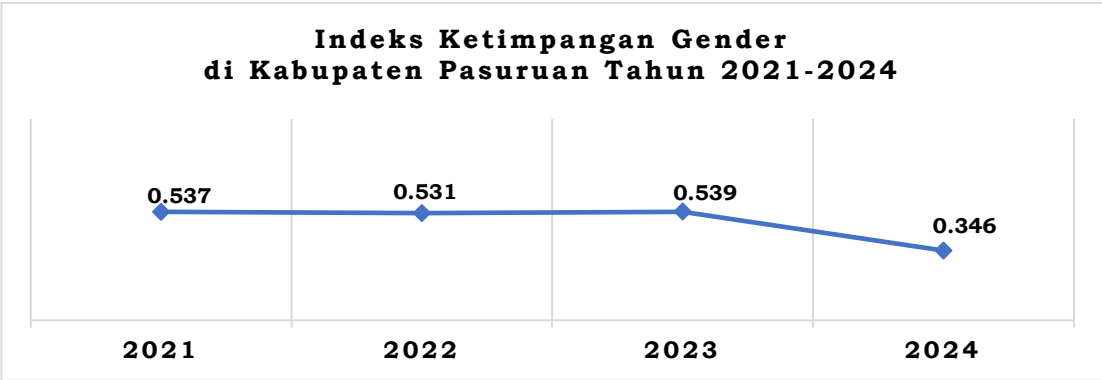


Gambar 2.43 Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2025

C. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan. IKG menggambarkan kerugian/kegagalan (*loss*) dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja.



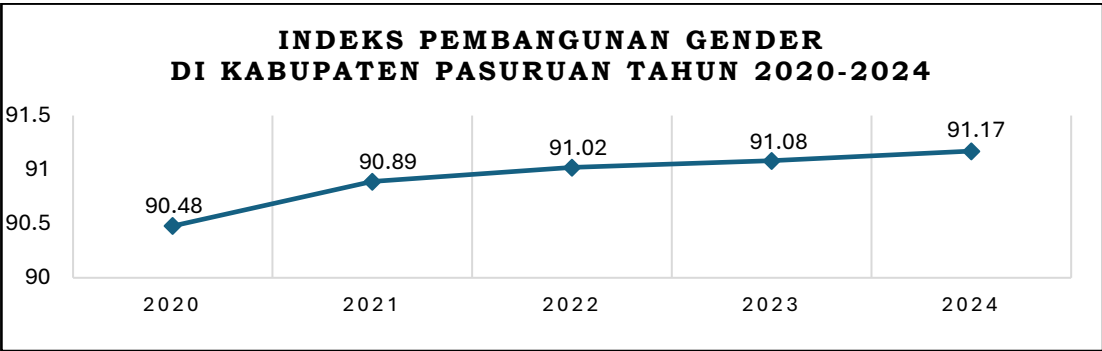
Gambar 2.44 Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Pasuruan tahun 2021-2023 memiliki capaian yang fluktuatif sebagaimana pada gambar 2.44. Fluktuasi dalam indeks ketimpangan gender mencerminkan dinamika kompleks dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi kesetaraan gender dalam masyarakat. Sedangkan tahun 2024 mengalami penurunan atau kondisi yang lebih baik, yaitu perbaikan kesetaraan gender dalam aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan kesempatan kerja.

D. Indeks Pembangunan Gender

Tingkat keberhasilan pembangunan yang telah mengakomodasi persoalan gender dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Gender. Indikator tersebut diartikan sebagai ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit khususnya berkaitan dengan gender atau perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dan IPM Laki-laki. Dari hal tersebut dapat menjelaskan berbagai program pembangunan yang mengakomodasi dari kesetaraan dan keadilan gender.



Gambar 2.45 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Gambar 2.45 menunjukkan bahwa capaian dari Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Pasuruan mengalami tren peningkatan pada periode tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan manusia khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

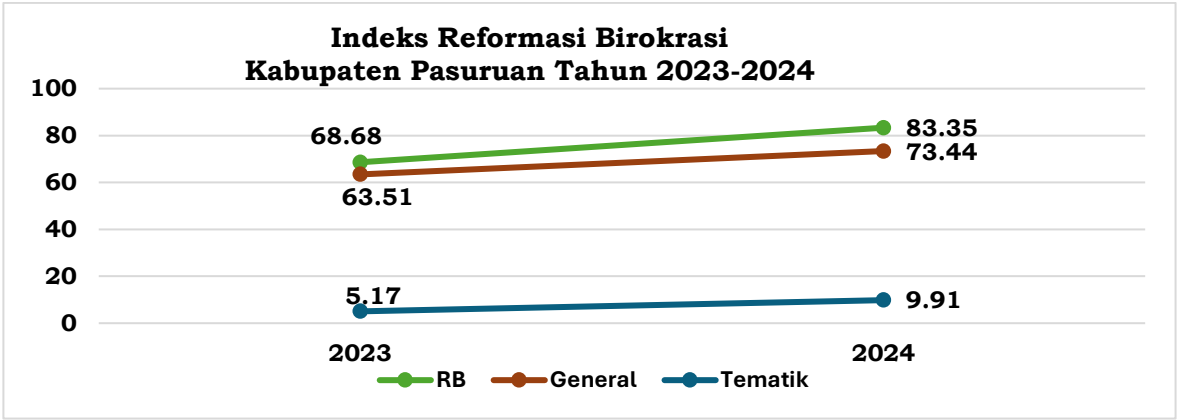
1) Tata Kelola Berintegritas dan Adapatif

A. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasuruan

Indeks Reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah menghadapi sejumlah permasalahan yang kompleks. Beberapa di antaranya adalah struktur organisasi yang tidak efisien, partisipasi masyarakat yang rendah, kurangnya transparansi, serta mekanisme kerja yang belum optimal. Selain itu, adaptasi terhadap perubahan, pelatihan berkelanjutan, dan budaya birokrasi yang kaku juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan reformasi.

Indeks Reformasi Birokrasi terdiri dari RB general (bobot 100) dan RB tematik (bobot 20). Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan oleh KemenPAN-RB berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan KepmenPAN-RB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Penilaian tahun 2023 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak dapat diperbandingkan.

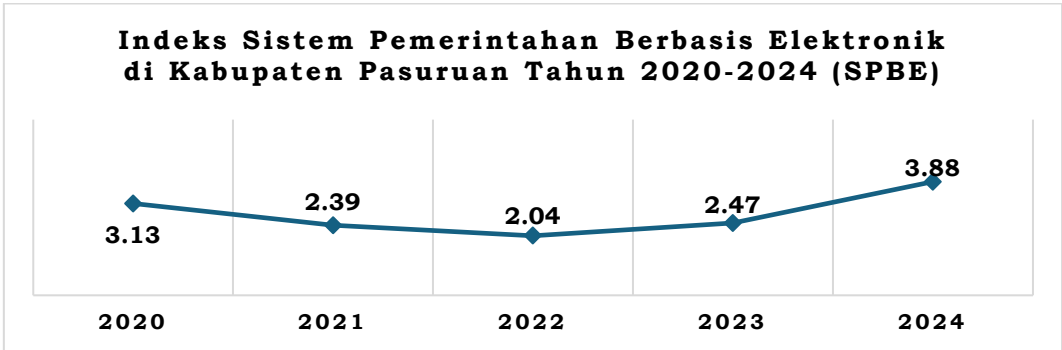
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah 83,35 naik dari tahun 2023 dengan nilai 68,68. Nilai IRB Kabupaten Pasuruan Tahun 2023-2024 masih dibawah Indeks Reformasi Birokrasi untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang pada tahun 2024 adalah 93,82.



Gambar 2.46 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasuruan Tahun 2023-2024
Sumber: KemenPAN-RB, 2025

B. Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.



Gambar 2.47 Indeks SPBE Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan gambar 2.47 capaian Indeks SPBE di Kabupaten Pasuruan fluktuatif. Indeks SPBE mengalami kenaikan di tahun 2024 setelah setelah mengalami penurunan pada tahun 2023. Hal ini terjadi karena sinergi antara perangkat daerah dan masyarakat sekitar dalam memanfaatkan internet sebagai sarana berinteraksi dan melakukan

aktivitas sehari-hari. Selain itu, kurangnya kolaborasi antara beberapa pemangku kepentingan, termasuk antar instansi pemerintahan, menyebabkan target tidak tercapai pada tahun tersebut.

C. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Layanan Publik mengevaluasi kualitas, aksesibilitas, dan efisiensi layanan publik yang disediakan oleh kota atau kabupaten. Indeks ini menilai berbagai layanan yang sangat penting bagi kesejahteraan penduduk, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, keselamatan publik, dan layanan sosial. Indeks ini mengukur faktor-faktor seperti cakupan layanan, daya tanggap, kualitas infrastruktur, dan kepuasan pengguna untuk menentukan seberapa baik layanan publik memenuhi kebutuhan penduduk.

Indeks Layanan Publik penting untuk tolok ukur dan perbandingan, membantu kota dan kabupaten mengidentifikasi area yang memiliki kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Para pembuat kebijakan menggunakan indeks ini untuk merancang intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan penyediaan layanan, memastikan akses yang adil, dan meningkatkan infrastruktur. Indeks ini juga menginformasikan keputusan alokasi sumber daya dan investasi dalam layanan publik, mendorong penyediaan layanan yang lebih efektif dan efisien. Hasil pengukuran indeks pelayanan publik yang dikeluarkan oleh KemenPAN-RB dalam periode tahun 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan dengan rincian sebagai dapat dilihat pada tabel 2.32. Peningkatan IPP mencerminkan bahwa masyarakat merasakan perbaikan dalam kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk mempertahankan dan meningkatkan IPP, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah seperti meningkatkan pelatihan aparatur, melibatkan masyarakat dalam evaluasi layanan, dan menerapkan standar pelayanan yang jelas.

Tabel 2.32
Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2024

Indeks Pelayanan Publik	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai	3,81	3,87	4,23	4,21	4,25	4,52
Kategori	B	B	A-	A-	A-	A

Sumber: KemenPAN-RB/Bagian Organisasi, 2025

D. Indeks Integritas

Penghitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian dari tiga dimensi utama: internal, eksternal, dan ahli. Penilaian internal didasarkan pada penilaian pegawai di setiap lokasi survei terkait integritas organisasi. Penilaian eksternal berasal dari penilaian pengguna layanan publik di lokasi survei. Penilaian ahli didasarkan pada penilaian dari beberapa narasumber atau ahli yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam mengenai integritas dan korupsi pada instansi tertentu.

Penghitungan ini juga mencakup faktor koreksi yang berfungsi sebagai penyeimbang indeks yang dihasilkan dari penilaian internal, eksternal, dan ahli sesuai dengan kondisi riil integritas instansi tersebut. Faktor koreksi digunakan sebagai pengurang indeks dengan data sekunder seperti laporan pengaduan masyarakat yang diverifikasi oleh KPK, jumlah kasus dan tersangka korupsi dari Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) online dari seluruh penegak hukum, kejadian pengarahannya sebelum survei, dan hasil observasi survei. Bobot untuk setiap perspektif, dimensi, dan variabel dalam survei dihitung menggunakan metode *Principal Component Analysis* (PCA) yang ditetapkan pada 2021, setelah dibandingkan dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

Tabel 2.33
Indeks Integritas Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

Indeks Integritas Kabupaten Pasuruan	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Nilai	77,68	73,62	77,15	69,34
Kategori	Waspada	waspada	Waspada	Rentan

Sumber: KPK/Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan, 2025

Hasil penilaian indeks integritas di Kabupaten Pasuruan selama periode tahun 2020-2024 berdasarkan hasil survey yang dilakukan KPK mengalami penurunan yang cukup signifikan khususnya pada tahun 2024 sebagaimana pada tabel 2.33.

E. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran survei kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik, yang melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan. Faktor yang

diukur dalam survei kepuasan masyarakat antara lain kemudahan prosedur, kejelasan persyaratan, kemampuan petugas, kesopanan dan keramahan, serta ketepatan waktu. IKM terhadap pelayanan publik tahun 2022-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.34
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Pasuruan
Tahun 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat	90,29	91,74	93,41

Sumber : Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, 2025

IKM dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang mengindikasikan kualitas pelayanan publik semakin baik. IKM dalam periode tahun 2022-2024 berada dalam interval 88,31 – 100,00 atau kategori “sangat baik.”

F. Indeks Kualitas Kebijakan

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas proses pembuatan kebijakan publik, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Kabupaten Pasuruan mulai menerapkan IKK sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Penerapan IKK di Kabupaten Pasuruan sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Hasil pengukuran IKK oleh LAN-RI untuk Kabupaten Pasuruan tahun 2024 sebesar 56,55 (kategori cukup).

2) Stabilitas dan Trantibum-Linmas

A. Persentase Pelanggaran Perda dan Gangguan Trantibum yang Diselesaikan

Iklim investasi diantaranya dipengaruhi oleh kondisi keamanan dan ketertiban umum di suatu wilayah. Kondisi tersebut dapat diketahui dengan gambaran tentang penanganan perda dan gangguan trantibum. Perkembangannya disajikan pada tabel 2.35.

Tabel 2.35
Perkembangan Penanganan Pelanggaran Perda dan Gangguan
Trantibum di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pelanggaran perda dan gangguan trantibum yang diselesaikan (%)	93,17	97,62	100	100	100
Jumlah kasus pelanggaran perda dan gangguan trantibum yang diselesaikan (Kasus)	859	1.641	546	610	202
Pelanggaran Perda (Kasus)	738	544	420	397	20
Gangguan trantibum (Kasus)	121	1097	126	213	182

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh pelanggaran perda dan gangguan trantibum yang terjadi di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 dan 2023 telah berhasil diselesaikan. Meskipun terjadi penurunan, akan tetapi jumlah kasus pelanggaran perda dan gangguan trantibum masih cukup tinggi setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan masih rendahnya kesadaran dari masyarakat atas ketenteraman dan ketertiban yang dibuktikan dengan berkurangnya kegiatan siskamling (sistem keamanan lingkungan) di Kabupaten Pasuruan.

Pada urusan trantibumlinmas capaian penurunan gangguan tahun 2024 adalah 49,12% naik dari tahun 2023 5,48%. Beberapa hal yang mempengaruhi adalah Kapasitas SDM aparatur Satpol PP yang tidak merata. Strategi kedepannya adalah dengan mengoptimalkan Ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki serta melakukan peremajaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasonal melalui pemeliharaan maupun pengadaan. Kemudian akan lebih meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala.

Pada sub urusan kebakaran, kinerja pemadam kebakaran sudah baik. Capaian Persentase penanganan kejadian kebakaran dalam waktu tanggap (response time) sudah 100% dengan waktu tanggap 9,15 menit/7,5 km. Strategi kedepannya adalah dengan mengoptimalkan Ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki serta mengupayakan penambahan pos layanan damkar beserta sarana prasana dan Sumber Daya Aparatur Damkar. Kemudian optimalisasi

Relawan Kebakaran (Redkar) yang telah di kukuhkan dan dibina untuk membantu petugas damkar dalam penanganan kebakaran di wilayah Kabupaten Pasuruan serta diberikan sarana prasarana.

Pada Tahun 2024 untuk urusan SPM Trantibumlinmas pada sub urusan trantibum capaian indikatornya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM) mencapai 99,09%. Ini turun dari capaian sebelumnya yang mencapai 100%. Yang menjadi catatan adalah Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada dari target 198 hanya terlayani 195 unit. Kemudian Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM yang semestinya memiliki target 31 orang hanya terlaksana 23 orang saja. Kedepan strategi yang akan dilakukan adalah poptimalisasi pendataan sebagai target dalam SPM sehingga akan dapat mencapai 100%.

Sedangkan pada sub urusan Pemadam Kebakaran (Damkar) capaian pada tahun 2024 indikator Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) adalah 97.22 %. Ini turun dari capaian sebelumnya yang mencapai 100%. Yang menjadi catatan adalah mutu Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia yang capaiannya hanya 16,67% sehingga kedepannya harus dioptimalkan lagi mulai dari pendataan dan penetapan target.

3) Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah menggunakan indikator kinerja kunci (IKK-outcome) yang diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Realisasi IKK-outcome dalam periode tahun 2020-2024 disajikan berdasarkan bidang urusan pemerintahan sebagai berikut:

Tabel 2.36
Realisasi IKK Outcome Tahun 2020-2024

No	IKK outcome	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pendidikan						
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	106,85	52,37	114,79	77,16	81,83
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	85,52	73,17	97,60	95,41	98,75
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	65,52	47,50	92,26	88,98	97,39
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	2,30	1,41	3,85	53,44	35,47
B	Kesehatan						
5	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Persen	0,0669	0,07	0,07	0,07	0,0773
6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100
7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	93,54	100	100,30	100	86,66
8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	98,60	100	100,23	100	94,11
9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	98,25	100	103,15	100	97,49
10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	86,46	97,81	100,50	100	100
11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	90,67	99,54	99,99	100	100
12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	73,69	87,26	100,07	100	98,24
13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	99,90	100	94,24	100	97,96
14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	68,77	77,79	90,16	100	100
15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	92,81	107,23	109,12	100	100

No	IKK outcome	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	101,17	98,18	103,56	100	100
17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	92,10	62,05	103	100	100
18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	94,52	108,77	101	100	100
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
19	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	72,10	72,85	73,43	74,20	100
20	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	-	87,08	86,72	74,05	73,83
21	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	-	83,28	81,81	70,35	69,48
22	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Persen	100	100	30,93	30,06	68,85
23	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	81,23	84,73	79,88	79,89	75,19
24	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	-	-	35	33,59	34,88
25	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	100	100	100
D	Perumahan dan Kawasan Permukiman						
26	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100
27	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	7,67	13,70	14,75	17,64	18,39
28	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	6,50	6,08	5,55	5,40	2,57
29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak	Persen	0	0	0	0	0

No	IKK outcome	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	relokasi program pemerintah kab/kota						
30	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100	100	100	100	29,73
E	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
31	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	122,62	100
32	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	73,01	68,75
33	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	-	-	3.160	4.160	65.732
34	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	-	-	-	-	2.365
35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	-	111.417	67.200	115.364	103.100
36	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	97,22
37	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	9,15
F	Sosial						
38	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	67,80	100	77,84
39	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Persen	100	100	100	100	77,69
G	Ketenagakerjaan						
43	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	41,38	68,75	70,55	70,59	77
44	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	75	80	93,36	93,46	23,34
45	Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	126.856.300	126.627.800	128.152.480	128.152.480	137.856.913
46	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	80	100	100	9,23	9,70

No	IKK outcome	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
47	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	43,44	41,06	40,47	40,67	44,27
H	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
48	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	18,31	18,60	23,05	23,05	23,18
49	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	96,30	100	100	100	100
50	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	Rasio	6,83	3,24	9,75	9,50	6,02
I	Pangan						
51	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Persen	258	268	270	100,27	49,30
J	Pertanahan						
52	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	0	0	100	86,12	100
53	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	100	0	100	100	100
54	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Ha	0	0	0	0	48,79
55	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	0	0	100	0	0
56	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	0	0	0	0	0
57	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	0	0	0	0	100
K	Lingkungan Hidup						
58	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	62,55	63,13	59,78	65,47	65,06
59	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	-	73,06	22,74	22,08	17,36
60	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	-	53,33	50	55,56	20
L	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						

No	IKK outcome	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
61	Perekaman KTP elektronik	Persen	84,94	99,14	98,65	98,39	100
62	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	8,53	21,64	24,19	31,83	45,63
63	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	87,02	95,48	80,63	88,64	91,72
64	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	0	3,57	7,27	7,14	6,45
M	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
65	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	0	0	0	0	100
66	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	1,61	5,16	22,37	4,82	1,72
N	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
67	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	1,84	1,95	2,04	1,92	1,88
68	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	75,14	74,91	73,99	79,95	76,72
69	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	11,16	10,58	11,71	4,24	3,38
O	Perhubungan						
70	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Persen	46,15	57,58	39	39	48,48
71	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Rasio	0,32	0,37	0,36	0,37	0,37
P	Komunikasi dan Informatika						
72	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	55,22	56,92	58,2	100	100
73	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	12,66	26,92	38,51	93,94	11,36
74	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	55,22	56,92	58	17,13	250,16
Q	Kopertasi. Usaha Kecil dan Menengah						
75	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	25,74	16,99	21,05	25,48	100
76	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	2,98	2,93	3,59	0,12	66,27
R	Urusan Penanaman Modal						
77	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	-42,82	-19,51	51,81	31,51	5,30

No	IKK outcome	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
S	Urusan Pemuda dan Olahraga						
78	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	9,05	0,03	0	0,0096	0,66
79	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	9,05	8,31	8,83	8,826	23,14
80	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	0	15	15	94	96
T	Urusan Statistik						
81	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	60	59,70	100	100
82	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	60	61,54	100	100
U	Urusan Persandian						
83	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	40,08	40,08	48,37	49,92	49,92
V	Urusan Kebudayaan						
84	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100	100	100	2,18	100
W	Urusan Perpustakaan						
85	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	-	-	57,70	62,50	74,33
86	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	-	8,07	8	10,01	59,56
X	Urusan Kearsipan						
87	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	89,56	75	75	75	100
88	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	30,92	0	0,17	16,67	45,53
Y	Urusan Perikanan dan Kelautan						
89	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	42.216,06	43.998,27	44.041,87	47.431,23	47.666,34
Z	Urusan Pariwisata						

No	IKK outcome	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
90	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	-65,93	25,62	17	16,08	69,09
91	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Persen	-53,61	8,98	17	-2,11	13,01
92	Tingkat hunian akomodasi	Persen	-	-	-	2,73	0,64
93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	-	-	-	16,62	16,61
94	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	-	-	-	3,61	1,80
AA	Urusan Pertanian						
95	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	-	625,03	626,02	621,74	621,65
96	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	-	-	49	-81,24	-8,50
BB	Perdagangan						
97	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	-	1,56	0,82	0,60	0,43
98	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	-	48,67	41,89	64,60	64,73
99	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	75,31	101,01	128,14	87,57	100
CC	Perindustrian						
100	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persen	10,74	2,06	9,88	22,05	95,83
101	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)	Persen	-	30	30	30	100
102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100	100	100
103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah	Persen	100	100	100	100	100

No	IKK outcome	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait						
104	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	100	100	100	100	100
DD	Pengadaan						
105	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	0	0	0
106	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	7,65	6,01	13,44	189,94	98,23
107	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	83,72	11,5	43,18	60	22,54
108	Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Persen	0	12,63	567,38	12	-10,40
EE	Kepegawaian						
109	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)						
	a. Pendidikan Tinggi	Persen	98,46	182,27	66,35	54,98	56,06
	b. Menengah	Persen	-	-	29,37	39,70	39,26
	c. Dasar	Persen	-	-	4,28	5,32	4,72
110	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	6,69	6,35	13,11	13,95	14,87
111	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	100	100	43,69	50,14	58,16
FF	Manajemen Keuangan						
112	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	84,32	6,26	-5,35	-4,58	-7,17
113	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	95,75	5,43	9,75	21,26	17,25
114	Manajemen Aset :		4	4	3	4	4
(1)	Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
(2)	Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
(3)	Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
(4)	Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)		Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya

No	IKK outcome	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
115	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	8,18	8,18	9,87	5,30	5,36
GG	Perencanaan dan Keuangan						
116	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	-	Level 3 (3,110)	Level 3 (3,102)	Level 3 (3,147)	Level 3 (3,244)
117	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-	-	-	Level 2 (2,61)	Level 3 (3,00)	Level 3 (3,00)
118	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	7,02	36,94	8,36	6,06	6,64
119	Rasio PAD	Persen	0,48	0,48	22,41	22,56	23,84
120	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	58,68	81,51	86,82	77,30	67,92
121	Opini Laporan Keuangan	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
HH	Transparansi dan Partisipasi Publik						
122	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	-	104,85	100	100	65,12
123	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	-	100	100	100	100
HH	Tambahan						
124	Persentase realisasi belanja urusan pelayanan dasar	Persen	91,20	93,73	92,42	93,88	92,70
125	Persentase penurunan SILPA	Persen	-7,04	32,40	-26,24	-27,17	25,29
126	Pertambahan nilai asset tetap	Persen	7,68	6,59	11,55	3,98	4,80

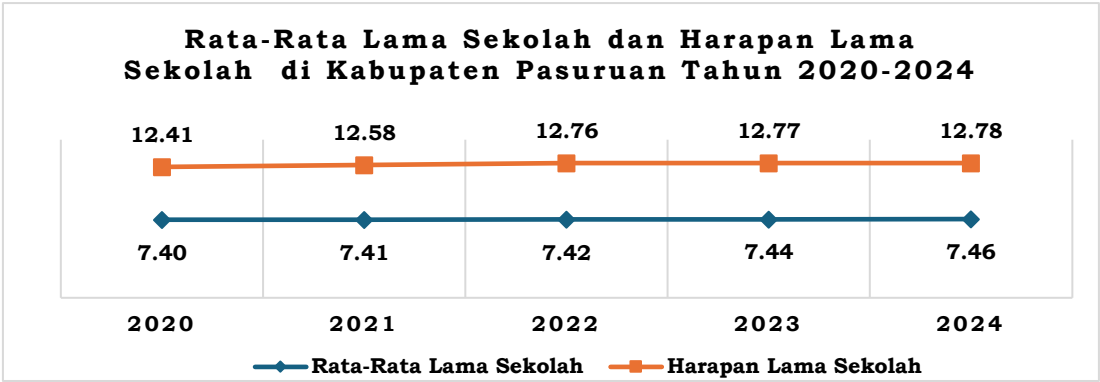
Sumber: Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, 2025

Adapun uraian dari masing-masing urusan pemerintahan sebagai berikut:

A. Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam membangun suatu daerah. Melalui pendidikan yang berkualitas, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berkontribusi pada perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya. Pendidikan juga memiliki peran kunci dalam menciptakan warga negara yang lebih kompeten dan berdaya saing. Dengan penyelenggaraan pendidikan yang baik, suatu daerah dapat memastikan generasi mendatangnya memiliki kapasitas untuk menghadapi tantangan masa depan dan berperan dalam memajukan masyarakat dan bangsa.

Angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Dalam lima tahun terakhir hanya mengalami peningkatan 0,06 tahun sedangkan harapan lama sekolah mengalami peningkatan 0,37 tahun. Rata-rata lama sekolah yang menggambarkan jumlah tahun yang telah ditempuh untuk pendidikan oleh masyarakat pada usia 25 tahun ke atas, sedangkan harapan lama sekolah menggambarkan perkiraan tahun yang akan ditempuh masyarakat pada usia 7 tahun untuk pendidikan.



Gambar 2.48 Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kondisi tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain : (1) Pemulihan ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil; (2) Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang masih rendah terutama pada penduduk usai 18 tahun ke atas yang tidak bersedia memulai atau melanjutkan pendidikan lewat jalur kesetaraan, (3) Data kependudukan yang belum update turut memberikan bagian dari rendahnya data pendidikan penduduk Kabupaten Pasuruan.

Rendahnya rata-rata lama sekolah antara lain dipengaruhi oleh masih adanya anak tidak sekolah. Jumlah anak tidak sekolah tahun 2024 di Kabupaten Pasuruan berjumlah 6.730 anak. Jumlah tersebut didominasi lulus SD/SMP/Sederajat tidak melanjutkan 74,23% dan drop out SD/SMP/Sederajat 25,77%. Secara kewilayahan jumlah anak tidak sekolah tersebar di semua kecamatan, tertinggi di Kecamatan Kraton sebesar 19,52% dan terendah di Kecamatan Prigen sebesar 1,10%. Masih adanya jumlah anak tidak sekolah tersebut

menunjukkan belum tuntasnya program wajib belajar 9 (sembilan) tahun yaitu SD dan SMP. Secara rinci distribusi anak tidak sekolah (putus sekolah/DO dan tidak melanjutkan) disajikan sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Drop Out/Putus Sekolah		Jumlah Lulus Tidak Melanjutkan		Total	Distribusi
		SD / Sederajat	SMP / Sederajat	SD / Sederajat	SMP / Sederajat		
1	KRATON	83	51	685	495	1.314	19,52%
2	LEKOK	48	44	230	230	552	8,20%
3	KEJAYAN	95	67	289	35	486	7,22%
4	LUMBANG	29	44	172	178	423	6,29%
5	NGULING	18	64	171	123	376	5,59%
6	GRATI	40	37	190	87	354	5,26%
7	SUKOREJO	39	32	136	78	285	4,23%
8	PURWODADI	21	57	54	128	260	3,86%
9	WONOREJO	57	26	98	77	258	3,83%
10	REMBANG	19	138	61	33	251	3,73%
11	WINONGAN	28	35	127	52	242	3,60%
12	PASREPAN	34	17	102	69	222	3,30%
13	PUSPO	21	51	70	67	209	3,11%
14	GONDANGWETAN	23	20	73	52	168	2,50%
15	REJOSO	33	22	82	22	159	2,36%
16	TUTUR	19	59	25	62	165	2,45%
17	GEMPOL	24	19	40	53	136	2,02%
18	BANGIL	28	20	53	55	156	2,32%
19	POHJENTREK	34	18	50	54	156	2,32%
20	TOSARI	6	42	16	87	151	2,24%
21	PURWOSARI	27	20	26	44	117	1,74%
22	BEJI	37	14	35	38	124	1,84%
23	PANDAAN	17	28	16	31	92	1,37%
24	PRIGEN	17	12	10	35	74	1,10%
	KAB. PASURUAN	797	937	2.811	2.185	6.730	100,00%
	KONTRIBUSI	11,84%	13,92%	41,77%	32,47%	100,00%	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

Pendidikan (formal dan non formal) bisa berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efesiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan bagi masyarakat miskin dengan ketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka (Lincolin, 1999). Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas seseorang. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang lebih tinggi, sehingga perusahaan akan bersedia memberikan upah/gaji yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang dapat diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya.

Berikut capaian indikator SPM bidang pendidikan:

No	Indikator	2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1	Anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%)	60	66,2	100	87,58
2	Anak Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	SD=100 SMP=100	SD=95,75 SMP=97,77	100	82,49
3	Anak Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (%)	50	49,55	100	57,33
4	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	58,77	71,32	80	77,35
5	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	45,41	59,27	77	71,31
6	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	67,60	66,81	75	44,53
7	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	66,96	47,77	75	43,52
8	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	74,62	74,59	75,94	53,21
9	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	70,84	76,5	77,63	80,58
10	Iklim keamanan SD (%)	74,82	71,28	73,71	73,31
11	Iklim keamanan SMP (%)	72,03	67,15	68,06	68,68
12	Iklim kebinekaan SD (%)	66,18	69,76	79,79	73,51
13	Iklim kebinekaan SMP (%)	64	67,09	73,2	72,04
14	Iklim inklusivitas SD (%)	66,18	69,76	61,56	55,75
15	Iklim inklusivitas SMP (%)	64	67,09	60,63	55,28

Sumber: Dirjen Bangda Kemendagri, 2025

Capaian SPM Pendidikan pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dari tahun 2023. Peningkatan pencapaian SPM bidang pendidikan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan kualitas guru, peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan, serta peningkatan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, penerapan kebijakan seperti Merdeka Belajar,

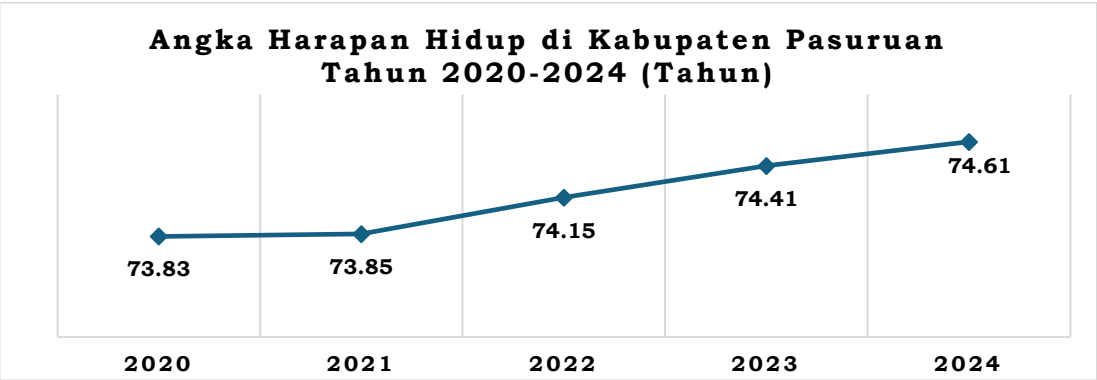
program sekolah penggerak, dan asesmen nasional juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

B. Kesehatan

Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan.

Kondisi umum kesehatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu pelayanan kesehatan terdiri dari beberapa komponen antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu Puskesmas yang diperkuat dengan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling, telah didirikan di hampir seluruh wilayah, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala.

Salah satu ukuran tingkat kesehatan masyarakat adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pasuruan berdasarkan Hasil Long Form SP2020 dalam periode tahun 2020-2024 mengalami peningkatan.



Gambar 2.49 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Meningkatnya Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pasuruan menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024, rata-rata umur harapan hidup

tumbuh sebesar 0,26% per tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup dapat diartikan jumlah penduduk lanjut usia cenderung meningkat sebagai dampak peningkatan kualitas hidup dengan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan di Kabupaten Pasuruan.

Berikut capaian indikator SPM bidang Kesehatan:

No	Indikator	2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%)	100	100	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (%)	100	100	100	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%)	100	100	100	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita (%)	100	100	100	100
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan (%)	100	100	100	100
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (%)	100	100	100	100
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (%)	100	100	100	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%)	100	100	100	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%)	100	100	100	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (%)	100	100	100	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%)	100	100	100	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risikon Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) (%)	100	100	100	100

Sumber : Dirjen Bangda Kemendagri, 2025

Pencapaian SPM bidang kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal meliputi ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia (tenaga kesehatan), ketersediaan sarana dan prasarana (alat kesehatan, obat-obatan, fasilitas), serta efektivitas manajemen dan kepemimpinan. Faktor eksternal mencakup kebijakan pemerintah daerah, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pasuruan merupakan sektor dalam pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan infrastruktur publik serta pengaturan tata ruang wilayah. Bidang ini mencakup perencanaan umum dan detail mengenai pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang merupakan bagian dari jalan, drainase serta fasilitas umum lainnya (jaringan air minum perpipaan/SPAM, instalasi pengelolaan air limbah domestik/IPALD), serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk memastikan fungsinya tetap optimal. Tahun 2024 tingkat kemantapan jalan mengalami penurunan, faktor penyebab penurunan kemantapan ini adalah ketidaksesuaian kelas jalan yang dibangun dengan beban kendaraan, serta belum terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti cakupan drainase dalam kondisi baik masih rendah.

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga bertanggung jawab atas penataan ruang, yang meliputi penyusunan rencana tata ruang wilayah, pengaturan penggunaan lahan, dan pengendalian.

D. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan, yang memenuhi kriteria:

- a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan Masyarakat;
- b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.

Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini

dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:

- a. Ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat,
- b. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m²
- c. Memiliki akses air minum layak
- d. Memiliki akses sanitasi layak

Adapun yang menjadi penyebab capaian perumahan yang sudah dilengkapi PSU tahun 2024 mengalami penurunan dikarenakan terdapat perbedaan formula penghitungan, tahun 2023 yang dilaporkan adalah data jumlah perumahan yang sedang terbangun terfasilitasi PSU dibagi jumlah perumahan kabupaten sehingga capaian 100%, sedangkan tahun 2024 dilaporkan data jumlah unit rumah yang dibangun terfasilitasi PSU dan diserahkan ke Pemda dibagi dengan jumlah unit rumah di perumahan kabupaten, sehingga capaian 29,73%

Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

Penanganan kawasan kumuh oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dimulai sejak tahun 2019 hingga saat ini. Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pasuruan sesuai dengan SK Kumuh Nomor 663/844/HK/424.013/2021, daerah yang memiliki luasan Kawasan kumuh tertinggi di Kabupaten Pasuruan adalah Kraton sebagaimana tertuang dalam tabel 2.37. Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Pasuruan sampai dengan tahun 2024 mencapai 99,98% dari total 543,75 Ha kawasan kumuh di Kabupaten Pasuruan sebagaimana dalam tabel 2.38.

Tabel 2.37
Luasan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Luasan Total (Ha)	Luasan Kumuh (Ha)	Persentase
1	Rembang	5.717,62	34,48	0,60%
2	Lekok	4.802,69	34,69	0,72%
3	Nguling	4.547,36	14,77	0,32%
4	Kraton	5.597,96	87,06	1,56%
5	Pohjentrek	1.258,78	19,70	1,57%
6	Bangil	4.355,33	121,76	2,80%
7	Purwosari	7.879,98	62,40	0,79%
8	Beji	3.899,63	68,91	1,77%
	Total	38.059,35	443,73	10,13%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, 2025

Tabel 2.38
 Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
 di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2024

No.	Tahun	Penanganan Kumuh (Ha)	Akumulasi Capaian
1	2019	19,77	3,64%
2	2020	21,92	7,67%
3	2021	32,82	13,70%
4	2022	5,70	14,75%
5	2023	15,70	17,64%
6	2024	4,07	18,39%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, 2025

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pelaksana teknis.

Pada indikator Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara kabupaten/kota fluktuatif. Capaian tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2023. Capaian pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang sudah mencapai 100%. Sedangkan pada sub kebencanaan dan waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran telah berhasil mencapai 100% pada tahun 2024. Pada indikator waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran dihitung mulai dari terima laporan jika terjadi kebakaran kemudian berangkat sampai ke tempat tujuan kebakaran. Standar *response time* yang digunakan adalah minimal 15 menit untuk 7,5 Km jarak tempuh dari Kantor Pemadam sampai lokasi kejadian, sedangkan maksimal 30 menit untuk 15 Km Jarak tempuh dari Kantor Pemadam sampai lokasi kejadian.

F. Sosial

Urusan sosial merupakan bagian dari urusan wajib dasar yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang sosial.

Berdasarkan tabel di atas sebagaimana pada tabel 2.36-a menunjukkan bahwa masih ada indikator urusan sosial yang belum mencapai 100%. Pada tahun 2024, ada dua indikator yang menunjukkan tren penurunan, yaitu Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti serta Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. Penurunan ini dipengaruhi oleh belum optimalnya sarana dan prasarana shelter, yang di antaranya harus mencakup kamar mandi di dalam kamar shelter, minimal dua ruang kamar untuk pemisahan gender, ruangan dengan teralis untuk keamanan, SDM khusus 24 jam (1 hari 3 shift) penjaga dan perawat klien, ruang assesment klien yang terpisah, serta kamar mandi khusus disabilitas.

G. Tenaga Kerja

Berdasarkan tabel 2.36-a, dapat dilihat masing-masing capaian indikator yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi mengalami tren peningkatan yang relatif signifikan pada tahun 2024. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Perhitungan indikator ini menggunakan pendekatan pencari kerja yang mengikuti pelatihan dan lulus uji kompetensi.
- b. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan), mengalami peningkatan pada tahun 2024.
- c. Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota, menunjukkan tren peningkatan. Kondisi tersebut menunjukkan kurangnya tingkat daya saing pencari kerja sehingga belum dapat memenuhi kualifikasi lowongan kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.

Sedangkan beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan antara lain adalah:

- a. Adanya isu Pelemahan Ekonomi Global sehingga meskipun tidak sebanyak saat terjadi Covid 19, masih terdapat perusahaan yang melakukan penyesuaian jumlah tenaga kerja;
- b. Faktor kualitas pencari kerja yang masih belum sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan Perusahaan.

Meskipun terdapat beberapa kendala tersebut namun Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melakukan berbagai upaya untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut diantaranya:

- a. Optimalisasi penyebarluasan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, perantaraan kerja melalui kegiatan perluasan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja dan bursa kerja dan perlindungan pekerja migran Indonesia;
- b. Melaksanakan program pemerintah yang berbasis masyarakat seperti Program Peningkatan Kerja (penyebarluasan informasi pasar kerja) kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja dan kegiatan Pelatihan dan Produktivitas yang bertujuan untuk peningkatan skill, kompetensi yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan industri (link and match) serta sertifikasi pencari kerja.

H. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan tidak akan terlepas dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerahnya, dan membantu masyarakat untuk terbebas dari keterbelakangan atau kemiskinan. Sedangkan perlindungan anak mencakup pemberian jaminan secara menyeluruh terhadap hak-hak mereka dan upaya untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini diberikan

melalui kerangka hukum positif atau UU yang mengatur hak dan kesejahteraan anak-anak.

Berdasarkan pada tabel 2.36, pada tahun 2020 hingga pada tahun 2024, Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten/Kota mencapai 100%. Komitmen dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mengatasi kekerasan pada perempuan dan anak telah berhasil. Adapun jenis layanan yang diberikan kepada korban kekerasan tersebut terbanyak adalah layanan pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, pemulangan, pendampingan tokoh agama, dan reintegrasi sosial.

Kekerasan terhadap perempuan, juga dikenal sebagai kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual dan berbasis gender adalah tindakan kekerasan yang para korban utamanya adalah perempuan dan anak perempuan. Kekerasan semacam itu sering dianggap sebagai bentuk kejahatan kebencian, terutama karena kebanyakan korbannya adalah perempuan, dan tindakan ini memiliki bentuk yang beragam. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO, menunjukkan angka berfluktuasi hingga tahun 2022 mencapai sekitar 9 kejadian per 100.000 perempuan.

Sedangkan beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pasuruan antara lain adalah:

1. Rendahnya anggaran yang Responsif Gender (Dokumen PPRG);
2. Kurangnya tenaga terlatih Pengarusutamaan Gender (PUG);
3. Kurangnya komitmen anggota Pokja tentang sarana prasarana responsif gender;
4. Pembangunan Jembatan untuk UPTD. PPA Kabupaten Pasuruan tidak terealisasi dikarenakan pembangunan jembatan masuk dalam wilayah kerja Provinsi dan masih belum mengurus ijin dari Dinas SDA Provinsi Jatim dengan panduan GDPK yang baru.

Faktor lain yang juga bisa mempengaruhi adalah perlunya membangun masyarakat yang ramah gender yang bebas dari semua sisa diskriminasi dan ketidaksetaraan sehingga dapat memanfaatkan potensi penuh dari semua kelompok sosial dan mempromosikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang fundamental adalah tujuan

dari Tujuan Pembangunan Milenium tentang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Kemudian faktor keterwakilan perempuan di parlemen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat Indeks Pemberdayaan Gender sehingga akan menghasilkan kebijakan yang baik juga bagi perempuan.

Meskipun terdapat beberapa kendala tersebut namun Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melakukan berbagai upaya untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut yaitu antara lain:

1. Berupaya memberikan KIE dan Advokasi kepada Pemangku Jabatan yang ada di Lingkungan Pendidikan baik Pendidikan Formal dan Non-Formal untuk meningkatkan kualitas bagi peserta didik dalam hal ini perlu adanya kegiatan dalam bentuk Bimtek bagi para guru yang membidangi untuk menyamakan persepsi dalam Rencana Penyusunan pembelajaran;
2. Menyelenggarakan pelatihan PUG (yang menyelenggarakan pelatihan PUG adalah semua anggota Pokja PUG yang juga menyelenggarakan pelatihan PUG untuk pegawai dilingkungannya masing-masing).

I. Pangan

Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) dalam periode tahun 2020-2024 selalu berada di atas 100% yang berarti dalam kondisi surplus.

J. Pertanahan

Urusan Pertanahan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan harus diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Setiap tahunnya persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum mencapai 100%.

K. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, namun sangat penting dalam mendukung kualitas hidup masyarakat di Kabupaten

Pasuruan. Pengelolaan lingkungan hidup mencakup berbagai aspek seperti pengendalian pencemaran udara, air, dan lahan, serta pengendalian emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan efisien menjadi prioritas utama dalam pembangunan Kabupaten Pasuruan.

Dalam periode 2020-2024 pengelolaan sampah dan ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan masih kurang dan perlu upaya peningkatan yang lebih signifikan.

L. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah bertanggungjawab atas pendataan dan pemeliharaan data kependudukan suatu daerah. Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Pasuruan merupakan bagian dari tugas dan tanggungjawab dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Capaian kinerja urusan administrasi yang telah mencapai 100% pada indikator perekaman KTP elektronik, meskipun demikian indikator lainnya menunjukkan tren peningkatan. Khusus kepemilikan kartu identitas anak perlu ditingkatkan karena masih di bawah 50%.

M. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pasuruan. Urusan pemberdayaan masyarakat desa berfungsi untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Pasuruan serta memperkuat kelembagaan desa, mendorong partisipasi masyarakat, dan meningkatkan kesadaran serta akses terhadap hak-hak mereka, sehingga menciptakan desa yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

Upaya untuk mewujudkan desa mandiri selalu ditingkat sehingga sampai tahun 2024 sudah tidak ada desa tertinggal. Jumlah desa

mandiripun terus bertambah dengan pertumbuhan rata-rata 6% dalam 5 tahun terakhir.

N. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB) adalah program yang bertujuan untuk mengatur pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui pengendalian kelahiran dan perencanaan keluarga.

TFR di Kabupaten Pasuruan mulai dihitung sejak tahun 2019 menunjukkan tren yang cenderung meningkat dengan capaian tertinggi pada tahun 2022, artinya bahwa setiap artinya, setiap satu orang perempuan rata-rata melahirkan dua anak sepanjang masa reproduksinya. Sedangkan apabila dilihat dari Indikator Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) menunjukkan tren yang fluktuatif dengan capaian terbarunya pada tahun 2024. Meskipun angka ini sudah menurun dari tahun sebelumnya, namun capaian *Unmet Need* di Kabupaten Pasuruan ini masih tergolong tinggi.

Adapun beberapa kondisi yang menjadi penghambat penurunan *Unmet Need* di Kabupaten Pasuruan salah satu yang utama kebanyakan orang yang tidak ingin ber-KB adalah karena masyarakat memiliki ketakutan terkait dengan efek samping dari digunakannya kontrasepsi. Takut terhadap efek samping kontrasepsi adalah masalah yang sering dihadapi dalam program perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi. Beberapa kontrasepsi dapat memiliki efek samping, dan kekhawatiran ini bisa memengaruhi keputusan individu atau pasangan untuk menggunakan kontrasepsi. Selain itu juga hambatan juga muncul dari budaya masyarakat, dimana beberapa individu dan kelompok masyarakat mungkin memiliki pandangan bahwa penggunaan kontrasepsi bertentangan dengan nilai-nilai religi masyarakat.

Faktor tersebut dipengaruhi juga dengan rendahnya peran aktif dari masyarakat di Kampung KB dalam meningkatkan akses dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga di tingkat desa atau kampung sehingga pendidikan tentang perencanaan keluarga kepada masyarakat setempat termasuk juga mengenai informasi yang akurat dan jelas tentang jenis kontrasepsi yang tersedia, cara kerjanya, serta

potensi efek sampingnya belum tersampaikan dengan optimal. Pemberian edukasi yang baik dapat membantu individu membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan pemahaman yang lebih baik.

Permasalahan lain urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah masih tingginya jumlah pernikahan dini di Kabupaten Pasuruan. Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Akan tetapi di Kabupaten Pasuruan masih banyak penduduk yang sudah menikah meskipun usia mereka belum 19 tahun sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 3.39
Jumlah Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

Usia	Jenis Kelamin		Jumlah	Penyebab
	Laki-Laki	Perempuan		
<16 Tahun	0	20	20	Sudah Bertunangan
16 Tahun	0	224	224	Sudah Hamil
17 Tahun	1	470	471	Sudah Bertunangan
		Total	715	

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, 2023

O. Perhubungan

Kinerja pelaksanaan urusan perhubungan dinilai dengan beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

Rasio konektivitas mengukur tingkat keterhubungan antar wilayah dalam suatu daerah melalui jaringan transportasi. Indikator ini mencerminkan sejauh mana infrastruktur transportasi, seperti jalan dan angkutan umum, menghubungkan berbagai titik dalam wilayah tersebut, memfasilitasi mobilitas penduduk dan distribusi barang. Perhitungan rasio konektivitas diperoleh dari perbandingan antara jumlah kebutuhan trayek angkutan umum dengan jumlah tarayek angkutan umum eksisting. Rasio konektivitas menunjukkan peningkatan pada tahun 2024 dengan capaian 48,48% atau rencana kebutuhan trayek belum terealisasi 51,52%. Hal ini menunjukkan trayek angkutan masih sangat minim menjangkau wilayah Kabupaten Pasuruan. Adapun jumlah trayek aktif eksisting saat ini sebanyak 16

trayek, sedangkan kebutuhan trayek agar dapat menjangkau konektifitas lebih luas sebesar 33 trayek.

$$Rasio\ Konektivitas = \frac{Jumlah\ kebutuhan\ trayek}{Jumlah\ trayek\ eksisting} \times 100$$

Rincian trayek eksisting tahun 2024 sebagai berikut:

No.	KODE TRAYEK	JURUSAN	JUMLAH ARMADA
1	101	TERMINAL PANDAAN - PRIGEN - TRETES PP	9
2	102	PSR GEMPOL - GD LEGI - SUB TERM BANGIL PP	10
3	103	TERMINAL PANDAAN - BAUJENG- SUB TERMINAL BANGIL PP	5
4	111	TERM. PANDAAN - JETAK - DAYUREJO	20
5	113	SUB TERMINAL WONOREJO - WRATI- TUTUR PP	1
6	114	SUB TERMINAL BANGIL - PSR KALIANYAR PP	6
7	115	BANYU BIRU- NGOPAK- SAMBIREJO PP	1
8	121	PSR KRATON - SUB TERM BANGIL - PSR GEMPOL PP	17
9	122	PSR PASREPAN - WATESTANI - SUB TERM NGULING	9
10	124	LEKOK - GETUKJATI- NGOPAK- JARANGAN PP	10
11	125	TERMINAL PANDDAN - GOMOH - TAMAN SAFARI PP	1
12	127	PSR PASREPAN - TOSARI PP	1
13	128	PSR WARUNGOWO-SUB TERM WONOREJO- PURWODADI PP	1
14	131	PSR PURWODADI - TERM PANDAAN - GEMPOL PP	5
15	132	TERM PANDAAN - PRIGEN - LUMBANGREJO	8
16	133	TERM PANDAAN - SUKORENO - SEKARJOHO PP	3
JUMLAH			107

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan rekap data tersebut diketahui bahwa terdapat 107 angkutan yang beroperasi di 16 trayek berbeda, dari 33 total trayek yang direncanakan. Jika dihitung perwilayah maka diketahui bahwa terdapat 152 Desa yang telah terkoneksi angkutan umum

Indikator yang menggambarkan kondisi yang hampir sama adalah persentase wilayah yang terkoneksi sarana angkutan umum yang menunjukkan proporsi wilayah yang memiliki akses terhadap sarana angkutan umum. Perhitungan persentasi wilayah terkoneksi angkutan diperoleh dari jumlah wilaya (desa) yang telah terlayani oleh angkutan umum dengan total wilayah yang seharusnya terhubung. Indikator ini penting untuk menilai ketersediaan dan pemerataan layanan transportasi publik di suatu daerah, yang berdampak pada mobilitas penduduk dan pertumbuhan ekonomi lokal. Wilayah Kabupaten Pasuruan yang terkoneksi sarana angkutam umum menunjukkan tren sedikit kenaikan dengan capaian yang masih

rendah. Hal tersebut dikarenakan rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum akibat imbas maraknya pelayanan transportasi online yang memberikan kemudahan dan efisiensi dengan berbagai inovasi jenis pelayanan.

Kinerja lalu lintas diukur berdasarkan perbandingan volume dengan kapasitas lalu lintas. Capaian kinerja lalu lintas Kabupaten Pasuruan tahun 2024 dinilai 0,36 mengalami penurunan dari tahun 2023 dinilai 0,37, yang berarti arus lalu lintas masih jauh dari kapasitas. Apabila nilai ratio tersebut telah mencapai nilai 0,8-1 atau lebih besar, maka dapat dikategorikan arus telah mendekati kapasitas, sehingga perlu dilakukan tindakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Pasuruan adalah terkait saran dan prasarana tingginya resiko kecelakaan pada perlintasan sebidang kewenangan kabupaten yang tidak didukung fasilitas keselamatan yang memadai, selain itu masih banyaknya lampu penerangan jalan umum yang mati dan membutuhkan penanganan secara berkala. Pada tahun 2024 terdapat 24 JPL yang telah terbangun sedangkan masih ada 36 JPL belum terbangun. Berikut jenis perlengkapan dan prasarana jalan yang terdapat di Kabupaten Pasuruan yang berperan dalam peluang terjadinya resiko kecelakaan perlintasan sebidang.

Tabel 3.40
Data Pengadaan Perlengkapan Jalan dan Prasarana Jalan
di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2024

No	Jenis Perlengkapan Jalan dan Prasarana Jalan	2022	2023	2024	satuan
1	Marka Jalan	0	0	1235	m ²
2	Rambu Standar	40	143		unit
3	Rambu Papan Petunjuk	18	3	11	unit
4	Pos Jaga Perlintasan Sebidang	0	5	15	unit
5	Palang Pintu Perlintasan Sebidang KA	0	5	15	unit
6	Pagar Pengaman Jalan	116	276	24	m ²
7	PJU konvensional	743	671	208	unit
8	PJU TS	0	0	14	unit
	Cermin Tikungan	15	24	0	unit
	Deliniator	150	214	0	unit

No	Jenis Perlengkapan Jalan dan Prasarana Jalan	2022	2023	2024	satuan
	Rambu Elektronik	0	18	0	unit
	Warning Light	5	0	0	unit
	Paku Jalan	415	0	0	unit

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, 2025

P. Komunikasi dan Informatika

Sistem informasi telah menjadi elemen integral dalam kehidupan sehari-hari kita, TIK adalah singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. TIK mengacu pada penggunaan teknologi dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mentransmisikan informasi serta komunikasi antara orang dan perangkat, Teknologi informasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak, seperti komputer, jaringan, Internet, dan aplikasi digital. Sementara itu, teknologi komunikasi mencakup perangkat dan layanan seperti telepon, fax, e-mail, pesan instan, dan jejaring sosial.

Penggunaan TIK dalam kehidupan sehari-hari telah banyak berdampak pada cara orang berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja. TIK telah memungkinkan akses lebih mudah dan cepat ke informasi dan mempercepat proses bisnis dan produksi. Selain itu, TIK juga telah menciptakan banyak pekerjaan baru dalam bidang teknologi dan memberikan kemudahan untuk bekerja jarak jauh atau bekerja dari rumah.

Sampai dengan tahun 2024 semua Perangkat Daerah sudah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo. Sementara layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi masih 11,36%.

Q. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi dan usaha mikro di daerah merupakan mata rantai penggerak ekonomi masyarakat lokal khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah di Kabupaten Pasuruan. Namun demikian koperasi yang berkualitas sampai dengan tahun 2024 masih cukup rendah yaitu 24,46%, demikian juga usaha mikro yang menjadi wirausaha masih perlu dioptimalkan untuk ditingkatkan.

Koperasi yang berkualitas (berdasarkan RAT, volume usaha dan asset), menunjukkan angka yang fluktuatif dan ada kecenderungan

menurun, hal ini antara lain dipengaruhi jumlah koperasi melaksanakan RAT (rapat anggota tahunan), jumlah seluruh koperasi yang bersifat dinamis, baik ada penambahan koperasi baru atau koperasi yang sudah tidak aktif lagi.

Salah satu bentuk program Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip gotong royong dan kemandirian ekonomi adalah melalui Koperasi Merah Putih, sebuah gerakan ekonomi rakyat yang berbasis di desa atau kelurahan. Program ini diluncurkan secara nasional oleh pemerintah, khususnya melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, dengan target pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi pusat produksi dan distribusi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendirian Koperasi merah putih mempertimbangkan potensi desa masing-masing dan dapat mengelola berbagai jenis usaha sesuai dengan kebutuhan. Pada tahun 2025 Kabupaten Pasuruan telah membentuk koperasi merah putih desa dan kelurahan sebanyak 365 unit.

Adapun data terkait koperasi dan usaha mikro adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Tahun				Keterangan
			2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah koperasi	Unit usaha	1.140	1.140	1.154	1.046	Ada Penurunan Jumlah karena ada alih binaan Ke Provinsi dan nasional
2	Jumlah Koperasi yang Ber-RAT	Unit usaha	184	240	294	261	
3	Jumlah Koperasi sehat	Unit usaha	114	200	258	230	
4	Jumlah Koperasi aktif	Unit usaha	1.027	1.027	1.027	1.046	
5	Jumlah Koperasi bersertifikat NIK. (Nomer Induk Koperasi)	Unit usaha	378	346	356	360	
6	Jumlah Usaha mikro	Unit usaha	242.837	237.352	237.352	237.815	

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pasuruan, 2025

R. PENANAMAN MODAL

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Realisasi investasi pada tahun 2022-2024 tetap terjaga dengan pertumbuhan positif meskipun ada kecenderrungan perlambatan. Nilai realisasi investasi didapatkan dari komposit Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dapat dilihat, Nilai PMDN lebih banyak berkontribusi dalam realiasi investasi di Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan, hingga tahun 2023 terdapat jumlah perusahaan dari dalam negeri (PMDN) sebanyak 55.160 perusahaan dan PMA mencapai 456 perusahaan.

Tabel 3.41
Nilai PMA dan PMDN di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020-2024

Jenis Investasi	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
Nilai Penanaman Modal Asing (PMA)	5.370.738.859.347	4.297.931.600.062	3.545.171.761.421	5.503.245.000.000	7.537.090.500.000
Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	4.664.503.542.322	3.255.137.950.845	5.767.363.600.000	6.743.933.649.713	5.427.657.625.701

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan, 2025

Meski jumlah perusahaan PMDN jauh lebih banyak, nilai investasi PMDN sedikit unggul dari PMA selama 2020- 2024 namun selisih nilai investasi tidaklah terlalu signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa PMDN di Kabupaten Pasuran mencakup banyak usaha kecil dan menengah, sementara PMA terdiri dari perusahaan dengan investasi besar per perusahaan. PMDN berkontribusi pada diversifikasi dan ketahanan ekonomi lokal, sedangkan PMA membawa investasi besar

dan potensi global. Kombinasi keduanya memberikan keseimbangan dalam strategi pembangunan ekonomi di Kabupaten Pasuruan. Keduanya harus terus didukung untuk pertumbuhan ekonomi daerah yang kuat, modern, dan inklusif.

S. Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja pelayanan urusan kepemudaan dan olah raga diukur dengan IKK outcome, yaitu Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan, dan Peningkatan prestasi olahraga. Sesuai dengan regulasi pemuda adalah penduduk usia 16-30 tahun.

Tren tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri mengalami fluktuatif dalam rentang tahun 2020-2024. Penurunan terjadi karena dipengaruhi oleh semakin bertambahnya jumlah pemuda di Kabupaten Pasuruan setiap tahunnya sebagai variabel pembanding, tanpa diikuti kenaikan jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri. Selain itu juga belum optimalnya program tindak lanjut pemuda terampil sehingga diperlukan upaya peningkatan jiwa wirausaha di kalangan pemuda. Tren penurunan juga terjadi pada tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan. Berbanding terbalik dengan capaian prestasi olahraga yang diraih pemuda di Kabupaten Pasuruan meningkat pesat di tahun 2023 yang dipengaruhi oleh semakin meningkatnya frekuensi upaya peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana olahraga yang ada dan event perlombaan yang diikuti.

Pada Tahun 2021-2024 prestasi olahraga selalu mengalami peningkatan. Sementara itu partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri masih sangat rendah (tahun 2024 0,66%). Adapun data pendukung untuk urusan kepemudaan dan olahraga disajikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	2022	2023	2024
1	Jumlah atlet berprestasi (memperoleh Juara 1/2/3 dalam kejuaraan minimal tingkat Provinsi)	36	48	56

2	Jumlah wirausaha muda tingkat kabupaten/kota yang difasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda	0	0	2.304
3	Jumlah Pemuda yang aktif di Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah	77.984	100.673	80.890

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, 2025

T. Statistik

Urusan statistik berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, interpretasi dan penyajian data statistik. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2021 dan 2022 masih ada Perangkat Daerah yang tidak menggunakan data statistik. Namun tahun 2024 sudah mencapai 100%. Tantangan kedepan data statistik menjadi basis data yang akurat. Pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan informasi berbasis mahadata ke depan akan menjadi kunci bagi upaya mengatasi masalah yang timbul sehari sehari.

U. Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian berfungsi dalam lingkup perlindungan informasi penting dan mendukung keamanan serta kepercayaan dalam operasi pemerintah daerah. Kinerja urusan persandian di Kabupaten Pasuruan direpresentasikan oleh capaian indikator tingkat pengamanan informasi. Sampai dengan tahun 2024 masih di bawah 50%.

Penyelenggaraan Sistem Elektronik wajib menyediakan Sistem Pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian. Penerapan sistem manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi. Tingkat keamanan informasi pemerintah, dihitung dari jumlah nilai per area keamanan informasi dibandingkan dengan area penilaian. Capaian tingkat keamanan informasi pemerintah Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana gambar di atas. Meskipun secara tren terjadi peningkatan, penyelenggaran urusan Persandian di

Kabupaten Pasuruan masih belum optimal baik dari segi penerapan pengamanan sistem sandi dan keamanan informasi daerah.

V. Kebudayaan

Kinerja pelayanan urusan kebudayaan diukur dengan IKK outcome yaitu terlestariannya cagar budaya. Selain itu juga diukur dengan Nilai Pembangunan Kebudayaan dan jumlah kelompok kesenian tradisional. Capaian terlestarinya cagar budaya tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023. Pada tahun 2024 indikator terlestariannya cagar budaya di Kabupaten Pasuruan menunjukkan capaian sebesar 100%. Artinya, seluruh cagar budaya yang telah terdaftar dan ditetapkan telah mendapat perlindungan, perawatan, serta pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun capaian indikator sudah maksimal, upaya berkelanjutan tetap sangat diperlukan untuk menjaga kualitas pelestarian tersebut. Tanpa tindakan lanjut, risiko kerusakan, perubahan fungsi yang tidak sesuai, atau pengabaian terhadap nilai historis tetap bisa terjadi.

Nilai Pemajuan Kebudayaan mengalami peningkatan selama tahun 2020-2024. Namun keberhasilan tersebut masih menyisakan permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah masih terdapat banyak Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya yang masih membutuhkan pengelolaan secara maksimal termasuk perawatan dan pelestarian serta belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan dalam upaya pelestarian, pengembangan dan perlindungan objek pemajuan kebudayaan yang disebabkan keterbatasan anggaran dan kebijakan pimpinan.

Berkaitan dengan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan tersebut, beberapa Langkah yang telah ditempuh oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan adalah dengan melakukan evaluasi alokasi anggaran tahun 2023 untuk pemenuhan kebutuhan SDM dan pemeliharaan cagar budaya sehingga pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Pasuruan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, tetap menjalin kerjasama dengan Balapai Pelestarian Kebudayaan Wilayah (BPKW) juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Selain itu keberpihakan kebijakan ditingkat pimpinan terhadap peningkatan

tata kelola Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang cukup dan berimbang.

Pada tahun 2024 jumlah kelompok seni budaya di Kabupaten Pasuruan terdapat 209 kelompok dengan rincian tertera pada tabel 2.42. Dominasi musik Hip Hop, Dangdut, Orkes, dan Elektronik mencerminkan keberagaman identitas budaya dan dinamika sosial dalam masyarakat, yang menunjukkan musik berfungsi sebagai media ekspresi dan koneksi. Pemerintah harus mendukung bermacam seni budaya yang melalui pendanaan, program budaya, dan kebijakan yang mendorong pengembangan seni dan melestarikan warisan budaya.

Tabel 3.42
Jumlah Kelompok Seni Budaya di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024

No.	Kelompok Seni Budaya	Jumlah Kelompok
1	Pencak Silat	15
2	Bantengan	34
3	Jaranan	19
4	Kuda Lumping	3
5	Ludruk	5
6	Wayang Kulit	6
7	Pedalangan Wayang Kulit	2
8	Wayang Purwo	1
9	Karawitan	4
10	Seni Lukis	2
11	Seni Rupa	1
12	Seni Tari	13
13	Seni Reog	2
14	Seni Teater	1
15	Seni Sendra Tari	1
16	Seni Menganyam	1
17	Seni Dagelan	1
18	Campursari	5
19	Ketipung Slompret	1
20	Musik Tradisional	5
21	Musik Islam	27
22	Terbang Jibor	1
23	Musik Modern	59
TOTAL		209

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2025

W. Perpustakaan

Kinerja pelaksanaan urusan perpustakaan salah satunya diukur dengan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat. Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dihasilkan dari survey yang menggambarkan perilaku membaca masyarakat. Kegemaran membaca merupakan outcome dari pembangunan literasi masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Pada tahun 2024, Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat Kabupaten Pasuruan semakin membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun demikian masih terdapat beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan di Kabupaten Pasuruan yaitu antara lain:

1. Belum optimalnya kegiatan Layanan Perpustakaan yang disebabkan oleh kurangnya petugas layanan perpustakaan dan bahan pustaka
2. Minimnya Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Pasuruan yang berstandar Nasional Perpustakaan (Ber NSP)

Meskipun demikian, beberapa langkah strategis yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip selaku pemangku urusan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan layanan perpustakaan baik Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Keliling, mengembangkan desa literasi untuk kesejahteraan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial
2. Melakukan Pembinaan Perpustakaan Baik di pendidikan Formal Maupun Non formal

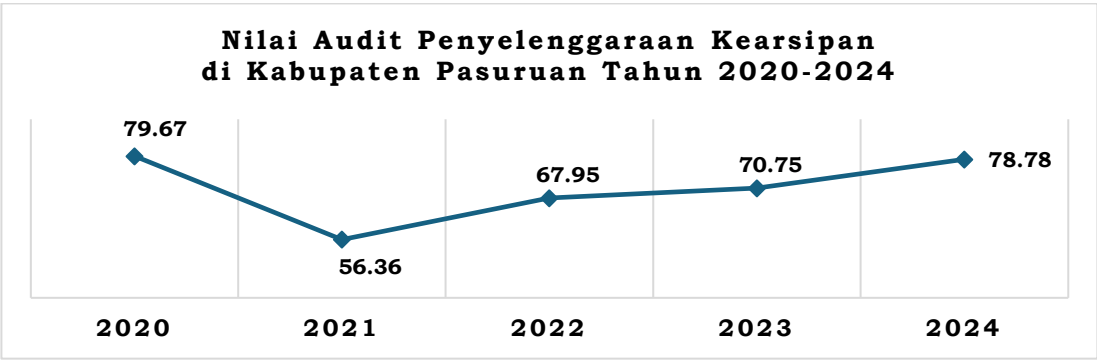
Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 berjumlah 1.218 unit dengan rincian sebagai berikut :

1. Perpustakaan yang mempunyai NPP sebanyak 468 unit
2. Perpustakaan Sekolah sebanyak 564 unit
3. Perpustakaan Umum sebanyak 8 unit
4. Perpustakaan Desa sebanyak 78 unit
5. Perpustakaan Pondok Pesantren sebanyak 100 unit

Sedangkan persentase ketercukupan koleksi perpustakaan sebesar 2,61% dan jumlah pustakawan sebanyak 4 orang.

X. Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan dilakukan evaluasi atau audit oleh ANRI. Perkembangan hasil audit tersebut disajikan pada gambar dibawah. Capaian kinerja Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan mengalami fluktuasi. Capaian tertinggi di tahun 2020 dan menurun di tahun 2021 namun kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2024 mencapai 78,78.



Gambar 2.50 Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, 2025

Di antara faktor yang mempengaruhi capaian penyelenggaraan urusan kearsipan di Kabupaten Pasuruan adalah:

1. Tempat penyimpanan dan pengelolaan arsip tidak sesuai dengan standar ketetapan Depo Arsip yang telah ditetapkan oleh ANRI (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan belum memiliki Depo Arsip)
2. Kurangnya sumber daya tenaga Ahli Fungsional terampil baik dari bidang perpustakaan maupun kearsipan, dan tenaga administrasi perkatoran (jumlah arsiparis tahun 2024 sebanyak 6 orang)

Namun demikian beberapa alternatif solusi yang dapat ditempuh guna mengatasi faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Pembangunan Desspo Arsip yang sesuai Perka ANRI No. 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Depot Arsip
2. Melakukan Rekrutmen Fungsional terampil baik dari bidang perpustakaan maupun kearsipan, dan tenaga administrasi perkatoran.

Y. Kelautan dan Perikanan

Sebagaimana Undang-undang 23 tahun 2014 kewenangan Kabupaten hanya untuk urusan Perikanan, sedangkan untuk urusan kelautan merupakan wewenang dari Provinsi dan Pusat. Kinerja

pelayanan urusan kelautan dan perikanan diukur dengan indikator kinerja kunci (IKK) outcome yaitu: Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota. Capaian lima tahun terakhir dijelaskan sebagai berikut.

- a. Capaian perkembangan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pasuruan meningkat dalam dua tahun terakhir 2023-2024). Faktor hambatan yang banyak ditemukan pada Menurunnya daya dukung sumberdaya perikanan tangkap dan masih tingginya penggunaan alat tangkap yang dilarang ditambah pengawasan sumberdaya perikanan yang berbasis masyarakat belum maksimal. Dari segi SDM, masih rendahnya kualitas dan pengetahuan SDM nelayan berpengaruh terhadap produktivitas tangkapan. Belum optimalnya pemanfaatan TPI juga menjadi permasalahan klasik yang ada sehingga kesejahteraan nelayan masih rendah.
- b. Capaian perkembangan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 dan 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024. Penurunan ini diakibatkan dari tingginya harga pakan, kurangnya ketrampilan pelaku usaha perikanan, dan lemahnya akses permodalan. Selain itu, belum adanya SOP budidaya yang baik, efisien dan efektif juga berpengaruh terhadap penurunan tersebut.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan tidak hanya berfokus pada aktivitas produksi perikanan, akan tetapi harus menyentuk tahapan pengolahan hasil perikanan. Faktor yang masih menjadi hambatan adalah terbatasnya informasi dan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang juga disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran pelaku usaha perikanan untuk pengurusan legalitas usaha dan sertifikasi produk olahan perikanan sehingga diversifikasi produk olahan hasil perikanan belum beragam.

Z. Pariwisata

Secara umum capaian indikator kinerja menunjukkan tren peningkatan atau kondisi yang lebih baik. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya daya tarik destinasi wisata, sehingga dapat

meningkatkan kunjungan wisatawan, yang pada akhirnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Terjadi peningkatan pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara maupun Nusantara yang datang ke Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024. Penurunan pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2023 disebabkan oleh adanya daya tarik wisata dan akomodasi wisata yang mengalami kondisi penurunan sehingga mengakibatkan tutup untuk sementara waktu. Pemerintah kabupaten Pasuruan harus lebih sering melaksanakan kegiatan pengembangan pariwisata, penetapan daya tarik wisata, promosi dan peningkatan atau sertifikasi SDM pariwisata supaya dapat menarik banyak wisatawan ke Kabupaten Pasuruan. Perkembangan jumlah kunjungan wisatwan sebagai berikut:

Tabel 3.43
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	1.246.376	1.358.385	2.600.643	2.335.601	2.578.119

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan, 2025

Adapun jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara berdasarkan obyek wisata sebagai berikut:

NO	NAMA ODTW	2023			2024		
		JUMLAH KUNJUNGAN			JUMLAH KUNJUNGAN		
		WISMAN	WISNUS	TOTAL	WISMAN	WISNUS	TOTAL
1	TAMAN SAFARI	0	632.806	632.806	0	661.583	661.583
2	TNBTS (GUNUNG BROMO)	1.420	117.121	118.541	1.598	175.506	177.104
3	Kebun Raya Purwodadi	0	159.836	159.836	0	108.285	108.285
4	Pemandian Alam Banyubiru	0	82.296	82.296	0	61.870	61.870
5	Air Terjun Kakek Bodo	0	30.662	30.662	91	22.172	22.263
6	Air Terjun Putuk Truno	157	36.369	36.526	971	38.771	39.742
7	Taman Dayu Waterpark	0	29.238	29.238	0	23.281	23.281
8	Wisata Taman Edelwais	0	35.920	35.920	0	39.950	39.950
9	Danau Ranu Grati	0	7.213	7.213	0	4.944	4.944
10	Makam Mbah Segoropuro	0	21.012	21.012	0	32.075	32.075

NO	NAMA ODTW	2023			2024		
		JUMLAH KUNJUNGAN			JUMLAH KUNJUNGAN		
		WISMAN	WISNUS	TOTAL	WISMAN	WISNUS	TOTAL
11	Bukit Flora	0	3.107	3.107	0	11.288	11.288
12	Candi Jawi	0	7.704	7.704	0	7.846	7.846
13	Pintu Langit Prigen	0	90.779	90.779	6	44.047	44.053
14	Mbah Semendi	0	18.963	18.963	0	35.584	35.584
15	Candi Indrokilo	0	500	500	0	1.934	1.934
16	Candi Sepilar	0	413	413	0	1.867	1.867
17	Candi Laras	0	346	346	0	2.417	2.417
18	P.Cungrang	0	3.640	3.640	0	5.797	5.797
19	Candi Gunung Gangsir	0	4.915	4.915	0	10.431	10.431
20	Petirtaan Belahan	0	8.467	8.467	0	10.568	10.568
21	Makam Mbah Ratu Ayu	0	16.453	16.453	0	21.112	21.112
22	Wisata Edukasi Alam Batik	0	4.370	4.370	0	6.616	6.616
23	Wisata Tas Rajut Kaboki	6	8.603	8.609	0	2.223	2.223
24	Saygon Waterpark	0	74.158	74.158	0	86.356	86.356
25	Finna Golf	4.780	8.616	13.396	4854	7.833	12.687
26	Bhakti Alam	0	27.300	27.300	0	45.125	45.125
27	The Taman Dayu Club & Golf Resort	5.519	24.485	30.004	7037	22.127	29.164
28	Kebun Kurma	0	72.910	72.910	0	85.127	85.127
29	Kebun Pak Budi	0	13.634	13.634	0	6.484	6.484
30	Pemandian Telogo Sewu Pandaan	0	185.186	185.186	0	183.847	183.847
31	Pemandian Taman Ria Suropati	0	64.494	64.494	0	56.471	56.471
32	Museum Kabupaten Pasuruan	0	4.419	4.419	0	4.322	4.322
33	Bromo Fores Area	0	0	0	0	0	0
34	Red Flower	0	5.328	5.328	0	13.620	13.620
35	Wisata Cimory	0	249.958	249.958	0	169.087	169.087
36	Air Terjun Coban Baung	0	0	0	0	0	0
37	Taman Dayu City Of Festival	0	0	0	0	0	0
38	Kaliandra SEJATI	0	0	0	0	0	0
39	ICC (International Culture Center)	0	0	0	0	0	0
40	Tretes Tree Top	0	0	0	0	0	0
41	Gerojokan Limo	0	0	0	0	0	0
42	Wisata Masjid Cheng Hoo	0	0	0	0	0	0

NO	NAMA ODTW	2023			2024		
		JUMLAH KUNJUNGAN			JUMLAH KUNJUNGAN		
		WISMAN	WISNUS	TOTAL	WISMAN	WISNUS	TOTAL
43	Lembah Pandawa	0	0	0	0	275.335	275.335
44	Taman K Land	0	0	0	0	45.389	45.389
	JUMLAH	11.882	2.051.221	2.063.103	14.557	2.331.290	2.345.847

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan, 2025

AA. Pertanian

Kinerja penyeenggaraan urusan pertanian di Kabupaten Pasuruan tahun 2020 sampai dengan 2024 dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:

1. Alih fungsi lahan pertanian;
2. Peningkatan persentase produktivitas tanaman sayur belum memenuhi target dikarenakan adanya peningkatan luas panen yang tidak diimbangi oleh peningkatan produksi;
3. Kurangnya minat generasi muda untuk terjun di bidang pertanian dan peternakan;
4. Masih adanya ancaman penyakit hewan menular;
5. Belum optimalnya hasil IB dan pembibitan ternak di pedesaan;
6. Tingginya harga pakan ternak (konsentrat) dan sulitnya mendapatkan pakan ternak hijauan pada musim kemarau;
7. Kurangnya SDM aparatur khususnya juru sembelih halal (Juleha);
8. Belum adanya Rumah Potong Unggas (RPU) yang dikelola pemerintah, pemeliharaan RPH dan Puskesmas;
9. Masih terbatasnya kelompok ternak mandiri;
10. Akses petani terhadap informasi, teknologi, pasar dan permodalan masih lemah.

Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah mengidentifikasi beberapa alternatif strategi yang dapat ditempuh dalam mengatasi faktor penghambat capaian penyelenggaraan urusan pertanian di Kabupaten Pasuruan. Strategi yang dapat dilakukan tersebut antara lain:

1. Sudah adanya Keputusan Bupati no 521.4/1149/HK/424.013/2022 tentang Luasan dan sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di 24 Kecamatan untuk ditetapkan sebagai lahan sawah dilindungi serta

mengusahakan penyusunan Perda LP2B agar memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat;

2. Melakukan pelaksanaan sosialisasi dengan petani terkait dengan perkiraan cuaca selama satu tahun sebagai acuan musim tanam;
3. Pengembangan generasi muda dan regenerasi petani untuk berpartisipasi dalam pembangunan pertanian sehingga muncul petani milenial melalui program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS)
4. Melakukan bimtek dan pelatihan dengan sasaran ormas pemuda, ponpes dan melakukan pendampingan ke asosiasi peternak untuk bisa eksis
5. Melakukan Surveillance secara rutin, Vaksinasi dan melaksanakan pelayanan kesehatan terpadu pada hewan ternak di daerah yang beresiko berjangkit penyakit
6. Melakukan Pelatihan dan koordinasi secara rutin terhadap petugas, dan sosialisasi IB pada kelompok-kelompok tani ternak
7. Memberikan Bimtek dan peralatan pembuatan olahan bahan pakan hijauan ternak dan konsentrat
8. Pelatihan Juleha untuk masyarakat dan pedagang ternak
9. Melakukan Bimtek mulai budidaya hingga pemasaran dengan sasaran kelompok ternak yang belum mandiri
10. Melakukan bimtek dan pendampingan ke perbankan dan juga memfasilitasi pameran

Upaya pemerintah untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan menjaga kesedian pangan salah satunya yaitu dengan dikeluarkannya program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B). Program tersebut berdasarkan amanat dari UU No 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Tabel 3.44
Luasan dan Sebaran LP2B di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
		LP2B
1	Bangil	328,74
2	Beji	359,48
3	Gempol	967,24
4	Gondangwetan	1.458,03
5	Grati	920,41
6	Kejayan	3.099,30
7	Kraton	1.313,89
8	Lekok	460,41
9	Lumbang	3.914,78
10	Nguling	1.169,49
11	Pandaan	1.567,13
12	Pasrepan	902,23
13	Pohjentrek	634,03
14	Prigen	902,23
15	Purwodadi	1.065,20
16	Purwosari	1.857,67
17	Puspo	52,17
18	Rejoso	1.736,36
19	Rembang	2.324,20
20	Sukorejo	2.998,89
21	Tutur	947,28
22	Tutur	282,63
23	Winongan	1.573,28
24	Wonorejo	2.523,90
	Total	34.117,71

Sumber: Keputusan Bupati Pasuruan No. 521.4/1149.HK/424.013/2022 tentang Luasan dan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

BB. Perdagangan

Kinerja urusan perdagangan diukur dengan indikator Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku. Sampai dengan tahun 2024 sudah mencapai 100%.

CC. Perindustrian

Industri kecil dan menengah dalam periode 2020-2024 mengalami pertumbuhan positif meskipun berfluktuatif. Peningkatan tertinggi di tahun 2024 sebesar 95,83%. Sementara pencapaian

sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri hingga tahun 2024 telah mencapai 100%.

DD. Transmigrasi

Dalam rentang 2019-2023 terjadi penurunan jumlah calon transmigran yang diberikan penyuluhan. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggunakan indikator baru yaitu Persentase Kawasan Transmigrasi yang Termonitor yang telah mencapai 100% dari target yang ditentukan pada 5 (lima) kawasan. Selain itu, pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Ketenagakerjaan telah berhasil melaksanakan penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) Kepala Keluarga.

EE. Unsur Pendukung (Sekretariat Daerah)

Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa menunjukkan peningkatan sangat signifikan pada tahun 2022 dan mengalami penurunan yang sangat signifikan juga pada tahun 2023. Beberapa faktor utama yang menyebabkan naik turunnya penggunaan PDN dan produk UMKM/Koperasi antara lain: ketersediaan dan kapaistas Produksi Lokal, Kualitas dan Standarisasi Produk, Peraturan dan Kebijakan Terkait Prioritas PDN (Produk Dalam Negeri), Ketersediaan E-Katalog Lokal, Preferensi dan Kebiasaan Pelaku Pengadaan dan Dukungan dan Pendampingan kepada UMKM/Koperasi

FF. Unsur Pendukung (Sekretariat DPRD)

Sekretariat DPRD mempunyai posisi penting dalam menunjang dan memfasilitasi kinerja wakil rakyat, mulai dari perencanaan, proses administrasi pengaturan persiapan, sampai pelaksanaan seluruh agenda kegiatan anggota DPRD yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah daerah (eksekutif). Sekretariat DPRD menjadi bagian dari sistem pendukung

atau subsistem dalam menentukan sistem kinerja Sekretariat Dewan terintegrasi dengan wakil rakyat.

Tabel 3.45
Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
	2020	2021	2022	2023	2024
IKM/SKM layanan sekretariat DPRD	73	86	87	89,86	n/a
Persentase aspirasi masyarakat ke DPRD yang berhasil difasilitasi (%)	100	100	100	100	n/a
Indeks Kepuasan Anggota DPRD*	-	-	-	-	87,35
Persentase layanan kepada DPRD yang terpenuhi* (%)	-	-	-	-	109

Keterangan: *Indikator baru digunakan tahun 2024
Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan, 2025

Tabel di atas menunjukkan IKM/SKM Layanan Sekretariat DPRD mengalami peningkatan dari tahun 2020-2023. Sedangkan Persentase Keluhan Masyarakat ke DPRD yang berhasil difasilitasi telah mencapai hasil yang diharapkan yaitu konsisten mencapai 100%. Hambatan yang ditemukan dalam penyelenggaraan unsur pendukung Sekretariat Dewan banyak terkait dengan tugas dan fungsi dan sumber daya sarana dan prasarana.

GG. Unsur Penunjang (Perencanaan)

Salah satu ukuran melihat kualitas perencanaan adalah nilai Sakip pada komponen perencanaan. Hasil evaluasi sakip tahun 2024, nilai pada komponen perencanaan mengalami penurunan dari 24,18 menjadi 24,04. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain berkaitan dengan pohon kinerja, penentuan indikator yang kurang SMART, dan penetapan target yang kurang menantang.

HH. Unsur Penunjang (Keuangan)

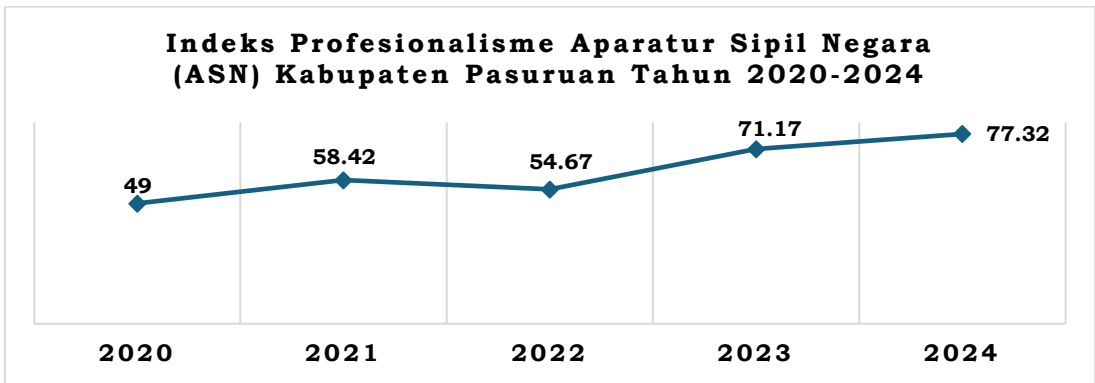
Opini BPK atas LKPD sampai dengan tahun 2024 mencapai penilaian yang maksimal yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini berarti LKPD yang telah disusun memenuhi kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal. Jumlah

peningkatan PAD setiap tahunnya juga menunjukkan tren yang positif. Dalam penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan asset daerah, Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu untuk memperhatikan permasalahan yang menjadi penghambat optimalnya penyelenggaraan urusan ini. Sertifikasi hasil pengamanan BMD yang tidak sesuai target adalah salah satu di antara faktor yang menghambat penyelenggaraan urusan keuangan dan manajemen asset Kabupaten Pasuruan.

Rasio PAD dalam periode tahun 2020-2024 secara perlahan mengalami peningkatan menjadi 23,84% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan kemandirian fiskal masih rendah.

II. Unsur Penunjang (Kepegawaian dan Diklat)
Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu cara untuk mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa indikator *output* yang bersifat independen. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Pasuruan selama tahun 2023-2024 masih berada pada kategori “Sedang” dikarenakan masih sedikitnya kompetensi melalui diklat, bimtek dan lain-lain yang merupakan poin pendongkrak Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.



Gambar 2.51 Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Kepegawaian Negara, 2025

Pada penilaian tahun 2024 rata-rata Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pasuruan dalam kategori “Sedang” dengan rincian sebagaimana berikut :

Tabel 3.46
Dimensi Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai IP ASN
22,84	24,56	24,93	5	77,32

Sumber: Badan Kepegawaian Negara, 2025

Berdasarkan penilaian sementara Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dengan rata-rata 77,32 yang tergolong “Sedang.” Hal ini dikarenakan pada 3 (tiga) dimensi Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu kualifikasi, kompetensi dan kinerja kondisi di Kabupaten Pasuruan masih belum maksimal (25,00) dikarenakan masih banyak kualifikasi pendidikan ASN Kabupaten Pasuruan yang belum sesuai Standar Kompetensi Jabatannya. Disamping itu belum meratanya pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pendidikan pelatihan (diklat) teknis jabatan yang diikuti oleh ASN menjadi salah satu penyebab Dimensi Kompetensi belum tercapai secara maksimal. Pada Dimensi Kinerja, capaiannya sebesar 24,93 yang menggambarkan bahwa sebagian besar ASN Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 kinerjanya berpredikat “Baik.”

Beberapa faktor yang memiliki pengaruh dalam pencapaian kinerja unsur penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kabuaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Masih ada Aparatur Sipil Negara yang belum memahami peraturan kepegawaian seperti pengajuan cuti luar negeri, akreditasi lembaga pendidikan untuk penyesuaian ijasah, displin, kode etik pegawai dan lain lain berkenaan dengan kepegawaian.
2. Masih ada dokumen yang belum terpenuhi dalam pemenuhan evaluasi NSPK manajemen ASN karena ada beberapa point evaluasi yang belum dipahami terkait dokumen yang diperlukan.

Sedangkan beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor-faktor tersebut adalah sebagai beriktut:

1. Telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan administrasi kepegawaian bagi pejabat yang menangani kepegawaian agar materi yang disampaikan berkenaan tentang peraturan kepegawaian bisa disosialisasikan dan diterapkan pada perangkat daerahnya masing-masing.
2. Telah dilakukan sharing session dalam pemenuhan dokumen evaluasi NSPK dari pemaparan materi olehh Direktur II WASDAL BKN dan asistensi oleh audiwan BKN sehingga dokumen yang diperlukan bisa dipenuhi.

Indeks BerAKHLAK

Indeks ini digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi penerapan nilai-nilai berAKHLAK (Berorientasi pada Hasil, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dalam lingkungan ASN (Aparatur Sipil Negara). Indeks berAKHLAK di Kabupaten Pasuruan tahun 2022-2024 berturut adalah 63,5 (cukup sehat), 63,3 (cukup sehat), dan 73,4 (cukup sehat). Nilai indeks BerAKHLAK tahun 2024, nilai terendah dari komponen-komponennya terdapat pada unsur “berorientasi pelayanan”.

JJ. Unsur Pengawasan

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara umum meningkat meskipun masih dalam tingkatan atau level 3. Demikian juga kapabilitas APIP juga telah mencapai level 3 sampai dengan tahun 2024.

KK. Unsur Kewilayahan

Kinerja pelayanan unsur kewilayahan, dalam hal ini Kecamatan, diukur dengan indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan persentase hasil penyelenggaraan kecamatan. IKM diperoleh berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat berdasarkan ketentuan Kementerian PAN-RB, PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Sedangkan indikator persentase hasil penyelenggaraan kecamatan diukur berdasarkan rata-rata capaian indikator program kewilayahan.

Kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan publik menjadi sangat strategis untuk meningkatkan pelayanannya, antara lain melalui penyelenggaraan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan). Capaian IKM Kecamatan tahun 2020-2024 disajikan di bawah ini.

Tabel 3.47
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	IKM					Rata-Rata
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tosari	87,89	87,89	87,89	87,89	84,88	87,29
2	Tutur	88,68	88,68	88,68	88,68	92,65	89,47
3	Puspo	92,04	92,04	92,04	92,04	93,94	92,42
4	Pasrepan	90,34	90,34	90,34	90,34	91,06	90,48
5	Lumbang	92,66	92,66	92,66	92,66	96,91	93,51
6	Winongan	96,36	96,36	96,36	96,36	94,67	96,02
7	Gondangwetan	91,54	91,54	91,54	91,54	94,85	92,20
8	Grati	95,05	95,05	95,05	95,05	99,23	95,89
9	Nguling	96,77	96,77	96,77	96,77	99,90	97,40
10	Rejoso	93,18	93,18	93,18	93,18	91,98	92,94
11	Purwodadi	94,44	94,44	94,44	94,44	89,57	93,47
12	Purwosari	96,70	96,70	96,70	96,70	98,39	97,04
13	Sukorejo	88,52	88,52	88,52	88,52	95,35	89,89
14	Wonorejo	92,71	92,71	92,71	92,71	91,86	92,54
15	Kejayan	93,63	93,63	93,63	93,63	93,94	93,69
16	Pohjentrek	69,77	69,77	69,77	69,77	94,35	74,69
17	Prigen	91,17	91,17	91,17	91,17	90,71	91,08
18	Pandaan	97,07	97,07	97,07	97,07	99,84	97,62
19	Lekok	89,84	89,84	89,84	89,84	91,55	90,18
20	Gempol	94,21	94,21	94,21	94,21	99,41	95,25
21	Bangil	96,26	96,26	96,26	96,26	95,27	96,06
22	Beji	92,28	92,28	92,28	92,28	94,68	92,76
23	Rembang	88,25	88,25	88,25	88,25	91,43	88,89
24	Kraton	89,98	89,98	89,98	89,98	91,86	90,36
	RATA-RATA	91,64	91,64	91,64	91,64	94,10	92,13

Sumber : 24 Kecamatan di Kabupaten Pasuruan, 2025

Rata-rata capaian IKM Kecamatan secara umum dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Rata-rata capaian IKM Kecamatan tahun 2024 berada pada interval 85 – 97 masuk dalam kategori sangat baik (berada di interval 81,26 - 100).

LL. Unsur Pemerintahan Umum

Kinerja pelayanan unsur pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) diukur dengan indikator kinerja terlihat pada tabel di bawah yang menggambarkan realisasi kinerja tahun 2020-2024.

Tabel 3.48
Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Kejadian konflik Ipoleksusbud yang ditindaklanjuti (%)	100	100	90,91	89,47	100
	Jumlah Kejadian Konflik Ipoleksosbud (Konflik)	1	9	22	19	17
	Jumlah Kejadian Konflik Ipoleksosbud ditindaklanjuti (Konflik)	1	9	20	17	17
2	Persentase Penurunan Kejadian Ipoleksosbud* (%)	-	-	-	-	58,44

Keterangan: *Indikator baru Renstra Tahun 2024-2026 dan mulai dihitung tahun 2024

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan, 2025

Tabel di atas menunjukkan persentase kejadian konflik Ipoleksusbud yang ditindaklanjuti tahun 2020-2024 mencapai 100% karena seluruh kejadian konflik Ipoleksosbud telah ditindaklanjuti. Akan tetapi pada tahun 2022 dan 2023 tidak mencapai 100%. Pada Tahun 2022 terdapat 2 permasalahan atau kasus yang belum terselesaikan dengan baik dari total 22 permasalahan atau kasus yang ada di Kabupaten Pasuruan, hal ini dikarenakan masih adanya kelompok masyarakat yang masih mengutamakan kepentingan kelompok maupun organisasinya seperti :

- a. Permasalahan Pengolahan Limbah Avalan yang bernilai ekonomis di PT. KINGJIM INDONESIA dan PT.CREASTEK PIER Rembang;
- b. Pelarangan Pemasangan Penerangan Jalan di Desa Pandean Kec. Rembang tanpa ijin karena berada di tanah yang berstatus Hak Milik TNI-AU.

Sedangkan pada tahun 2023 juga terdapat 2 permasalahan atau kasus yang belum terselesaikan dengan baik dari total 19

permasalahan atau kasus yang ada di Kabupaten Pasuruan. Hal ini dikarenakan masih adanya kelompok masyarakat yang masih mengutamakan kepentingan kelompok maupun organisasinya seperti

- a. Permasalahan Limbah yang bernilai Ekonomis di PT. CRESTEC dengan masyarakat Mojoparon;
- b. Permasalahan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) Tahun 2024 sebesar 15% tidak menggunakan seperti yang tercantum dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

2.1.4 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Komitmen dunia internasional, tidak terkecuali Indonesia dan seluruh daerah otonomnya, untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan antar generasi telah menetapkan *sustainable development goals (SDGs)* atau Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang harus dicapai dalam pembangunannya. Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 melaporkan evaluasi terhadap ketercapaian indikator TPB di Kabupaten Pasuruan. Jumlah indikator yang sesuai dengan tingkat Kabupaten adalah berjumlah 220 indikator. Sedangkan untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 7 (Akses Ke Energi Yang Terjangkau) dan 14 (Ekosistem laut) tidak dilakukan analisis dikarenakan sebagian besar indikator berada dalam lingkup kewenangan provinsi. Sehingga secara keseluruhan, total indikator TPB yang digunakan oleh Kabupaten Pasuruan berjumlah 197 indikator.

Hasil identifikasi indikator capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Pasuruan dapat disimpulkan bahwa, total indikator TPB yang digunakan oleh Kabupaten Pasuruan berjumlah 197 indikator. Dari keseluruhan indikator, sejumlah 106 indikator merupakan kategori SS, sebanyak 60 indikator merupakan kategori SB, sebanyak 4 indikator merupakan kategori BB, dan sebanyak 27 indikator (14%) merupakan kategori NA sebagaimana pada tabel 2.49.

Tabel 2.49
Ketercapaian TPB Kabupaten Pasuruan

KLASIFIKASI KETERCAPAIAN	JUMLAH INDIKATOR	%
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS)	106	53,8%
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB)	60	30,5%
Indikator TPB yang tidak/belum ada data (NA)	27	13,7%
Indikator TPB yang belum dilaksanakan tetapi belum mencapai target (BB)	4	2,0%
Total	197	100,0%

Sumber: KLHS Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029, 2024

Indikator TPB Kabupaten Pasuruan yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target sebesar 106 indikator (53,8%). Tujuan yang paling besar memiliki indikator sudah mencapai target yaitu Tujuan 3 “Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia” sebesar 21 indikator. Sedangkan capaian terendah terdapat pada Tujuan 15 “Melindungi, memulihkan dan mendorong pemanfaatan ekosistem darat secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati” yaitu sebesar 1 indikator.

Indikator TPB Kabupaten Pasuruan yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target sebesar 60 indikator (30%). Tujuan yang paling banyak belum mencapai target yaitu Tujuan 1 “Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimana pun” sebesar 9 indikator. Tidak terdapat indikator wewenang Kabupaten Pasuruan pada Tujuan 7 dan Tujuan 14, sehingga tidak terdapat indikator yang termasuk dalam kategori belum mencapai target. Berikut merupakan rincian capaian indikator sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target pada setiap tujuan TPB. Indikator yang termasuk dalam klasifikasi indikator sudah dilaksanakan dan belum mencapai target menjadi indikator prioritas yang harus segera diselesaikan, hal ini berarti sebanyak 58 indikator menjadi indikator prioritas.

Indikator TPB Kabupaten Pasuruan yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target sebesar 4 indikator (2,03%). Tujuan belum dilaksanakan yaitu Tujuan 3, Tujuan

10, Tujuan 11 dan Tujuan 16. Indikator TPB Kabupaten Pasuruan yang belum atau tidak ada data sebesar 26 indikator (13,20%). Tujuan yang paling banyak tidak ada data yaitu Tujuan 3, tujuan 11, dan tujuan 16 masing- masing sebesar 3 indikator. Ada beberapa faktor yang menyebabkan data tidak ada, selain di PD tidak tersedia juga data berada atau dimiliki oleh rovinsi sehingga secara tidak langsung tidak tersedia data tersebut Berikut merupakan rincian capaian indikator belum atau tidak ada data pada setiap tujuan TPB.

Adapun rekapitulasi capaian indikator TPB sebagai berikut:

TPB	Status Ketercapaian				Total	Persentase			
	SS	SB	NA	BB		SS	SB	NA	BB
1	12	9	3	-	24	50%	38%	13%	0%
2	4	6	1	-	11	36%	55%	9%	0%
3	21	6	3	1	31	68%	19%	10%	3%
4	9	3	1	-	13	69%	23%	8%	0%
5	6	6	2	-	14	43%	43%	14%	0%
6	7	5	2	-	14	50%	36%	14%	0%
8	11	5	3	-	19	58%	26%	16%	0%
9	3	4	2	-	9	33%	44%	22%	0%
10	2	3		1	6	33%	50%	0%	17%
11	5	4	2	1	12	42%	33%	17%	8%
12	4	-	1	-	5	80%	0%	20%	0%
13	1	-	1	-	2	50%	0%	50%	0%
15	1	-	1		2	50%	0%	50%	0%
16	11	6	3	1	21	52%	29%	14%	5%
17	9	3	2		14	64%	21%	14%	0%
Total	106	60	27	4	197	54%	30%	14%	2%

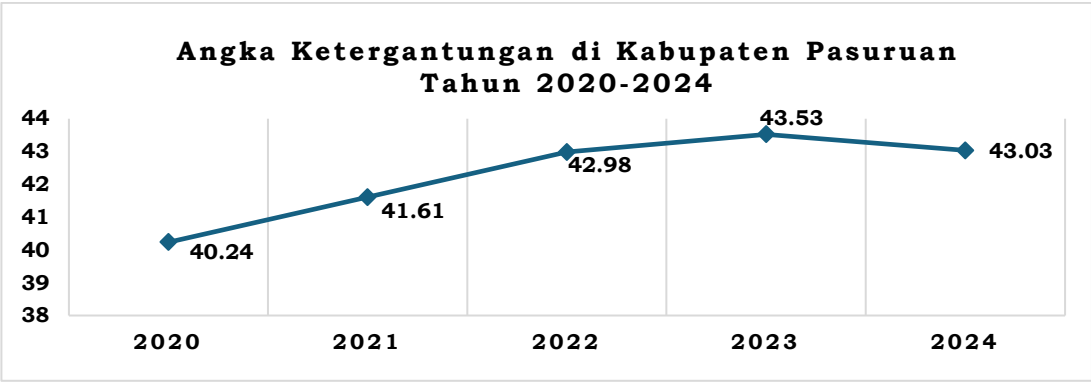
Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029
 Keterangan:
 SS :Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target Nasional
 SB :Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target Nasional
 BB :Indikator TPB Belum Dilaksanakan Dan Belum Mencapai Target Nasional
 NA :Indikator TPB Yang Tidak/Belum Ada Dat

2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah

1) Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan menggambarkan seberapa besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk lebih fokus meningkatkan kualitas/kompetensi penduduk usia produktif untuk menekan jumlah pengangguran, sehingga dapat meningkatkan taraf ekonominya, melalui lapangan kerja formal dan informal.



Gambar 2.52 Angka Ketergantungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

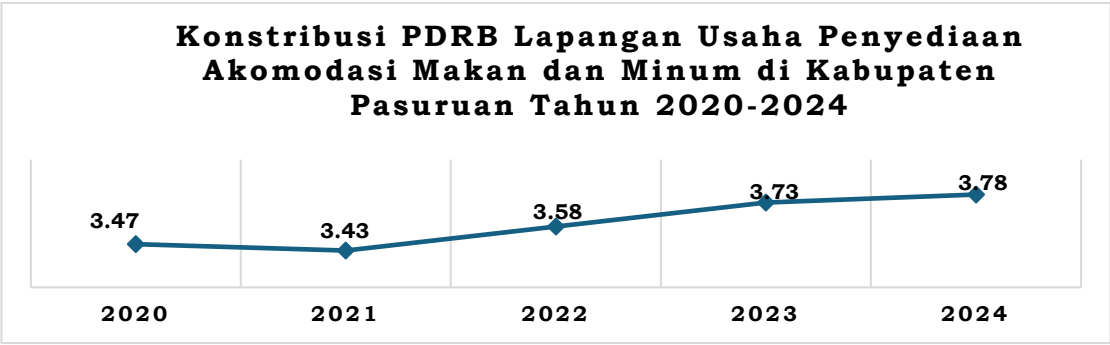
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025

Gambar 2.52 menunjukkan rasio ketergantungan tahun 2024 sebesar 43,03 menjelaskan bahwa dari setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 43-44 penduduk usia nonproduktif (usia muda dan usia tua). Rasio ketergantungan pada kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan, yang artinya semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif. Oleh karena itu upaya yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan penduduk usia produktif dengan menekan jumlah pengangguran sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi melalui lapangan kerja formal dan nonformal.

2) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

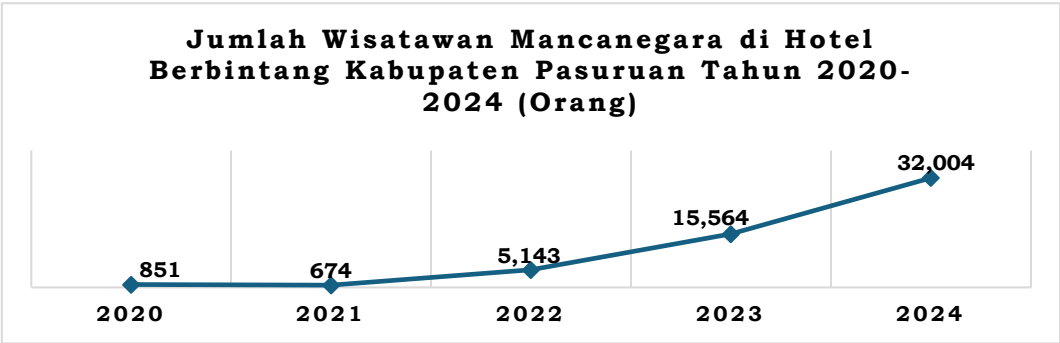
A. Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Sektor lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Nilai kontribusi sektor lapangan usaha penyedia akomodasi dan makanan minuman terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Pasuruan cenderung naik selama empat tahun terakhir. Pada Tahun 2024 sektor ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebagaimana pada gambar 2.53. Data kontribusi PDRB lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 2.53 Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

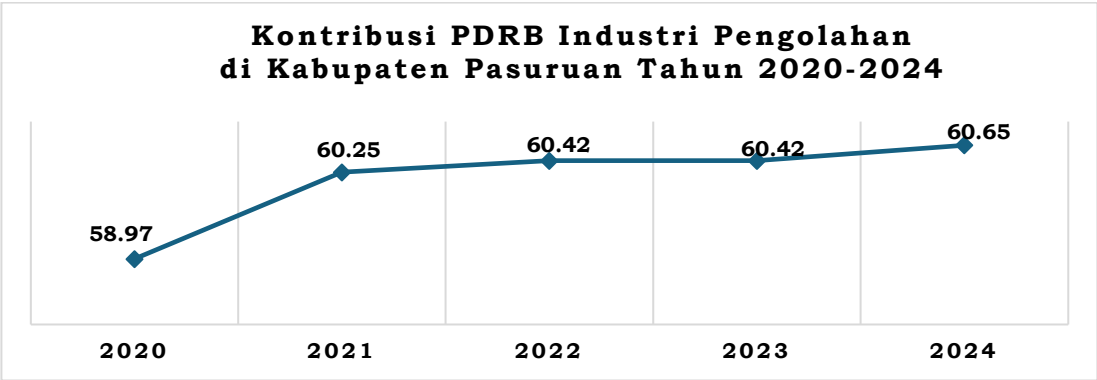
Peningkatan kontribusi PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum dapat didorong dengan mengembangkan sektor Pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata secara terpadu merupakan peluang strategis yang dapat menguntungkan daerah melalui penciptaan angkatan kerja berkualitas serta peningkatan produktivitas industri sektor pariwisata sebagai salah satu sumber penunjang PAD yang signifikan. Beberapa sektor yang dapat padukan yaitu sektor pariwisata, budaya dan kesenian yang berkontribusi sangat besar terhadap sektor perdagangan dan perhotelan yang nantinya di harapkan dapat berimbas pada meningkatnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa jumlah wisatawan secara langsung berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD, jumlah wisatawan secara langsung berpengaruh positif terhadap peningkatan pajak hotel, jumlah wisatawan secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap PAD melalui pajak hotel sebagai variabel intervening. Berikut data jumlah wisatawan mancanegara di hotel berbintang.



Gambar 2.54 Jumlah Wisatawan di Hotel Berbintang Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan, 2025

B. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan

Di Kabupaten Pasuruan salah satu sektor penggerak perekonomian atau pendapatan daerah adalah sektor industri. Perkembangan industri di Kabupaten Pasuruan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya adakah sektor industri pengolahan. Berdasarkan data Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pasuruan. Sektor ini secara konsisten memberikan kontribusi terbesar terhadap ekonomi Pasuruan, dengan angka di atas 60% dari total PDRB sejak 2021 dan menunjukkan tren peningkatan yang stabil sebagaimana pada tabel 2.55, yang menunjukkan betapa pentingnya sektor industri pengolahan sebagai tulang punggung perekonomian daerah yang perlu terus didukung dan dikembangkan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan peran strategis ini, pemerintah daerah perlu memperkuat infrastruktur industri, mendorong investasi, meningkatkan kualitas tenaga kerja, mempercepat hilirisasi produk, memberdayakan UMKM berbasis industri, serta memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat daya saing sektor industri pengolahan.

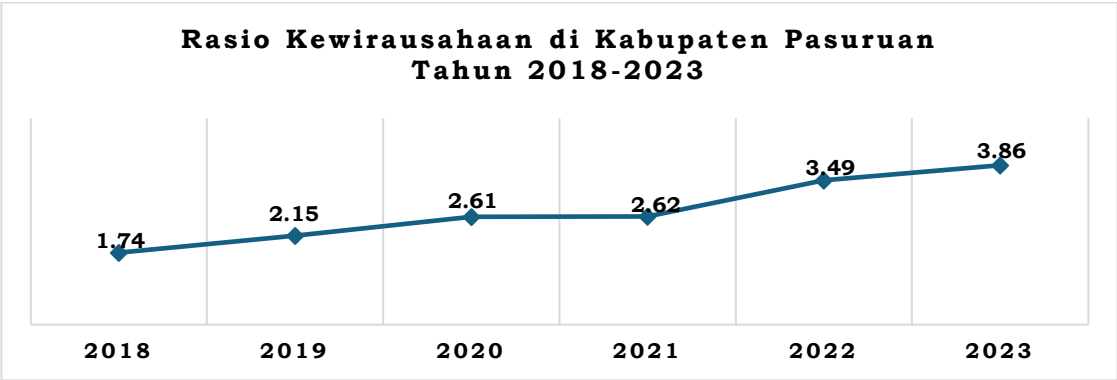


Gambar 2.55 Kontribusi Industri Pengolahan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

C. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu

buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Selanjutnya terkait penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Indikator ini penting untuk dihitung dalam 20 (duapuluh) tahun ke depan sejak tahun awal perencanaan yaitu tahun 2025, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus). Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan Agustus.



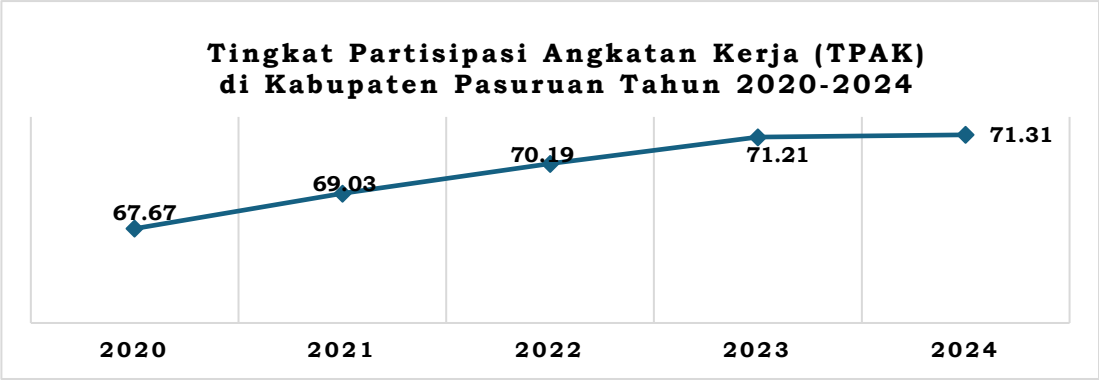
Gambar 2.56 Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Rasio kewirausahaan menjadi penting sebagai salah satu indikator kinerja daya saing ekonomi Kabupaten Pasuruan dikarenakan peningkatan nilainya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan penciptaan peluang bisnis baru, yang berkontribusi pada pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rasio Kewirausahaan Kabupaten Pasuruan terus meningkat setiap tahunnya sebagaimana pada gambar 2.56. Tingginya tingkat kewirausahaan juga meningkatkan daya saing ekonomi suatu daerah, mendorong diversifikasi ekonomi, dan meningkatkan ketahanan terhadap fluktuasi pasar. Selain itu, kewirausahaan dapat memperbaiki kualitas hidup dengan menyediakan barang dan jasa baru, meningkatkan akses terhadap teknologi, dan berkontribusi pada pembangunan sosial dan infrastruktur lokal. Dengan demikian, peningkatan rasio kewirausahaan adalah langkah strategis untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

D. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator ekonomi yang mengukur persentase populasi usia kerja yang aktif berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau secara aktif mencari pekerjaan, TPAK memberikan gambaran tentang tingkat keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi dan dapat memberikan wawasan penting tentang kesehatan ekonomi suatu negara atau wilayah. Adapun capaian TPAK Kabupaten Pasuruan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat melalui gambar 2.58.

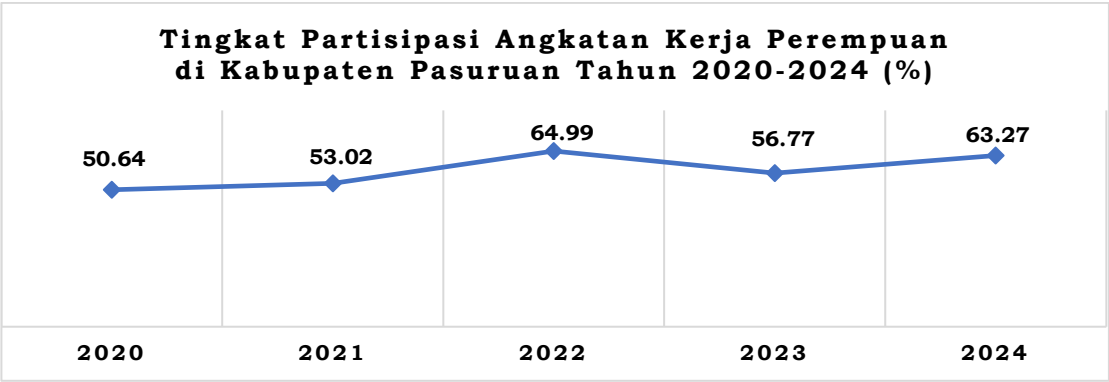


Gambar 2.57 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Gambar 2.57 menunjukkan capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2024 memiliki capaian yang selalu meningkat. Peningkatan partisipasi angkatan kerja ini mengindikasikan bahwa ada lebih banyak orang usia produktif yang aktif terlibat dalam pasar tenaga kerja. Peningkatan TPAK menunjukkan beberapa hal positif terkait kondisi ekonomi dan sosial di Kabupaten Pasuruan. Kondisi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena lebih banyak orang yang bekerja akan membuat tingkat produksi barang dan jasa cenderung meningkat juga.

Selanjutnya untuk mengetahui peluang perempuan berpartisipasi dalam dunia kerja diukur dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan, dinyatakan dalam satuan persen. Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.



Gambar 2.58 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa capaian TPAK Perempuan Kabupaten Pasuruan mengalami fluktuatif. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023. Capaian tersebut menginterpretasikan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan artinya semakin banyak jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 50 persen artinya 1 dari 2 orang penduduk usia kerja perempuan merupakan angkatan kerja.

E. Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro

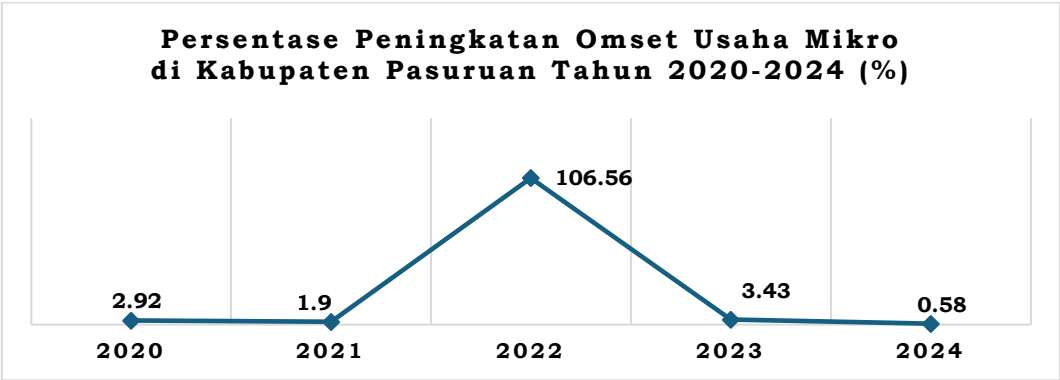
Sesuai dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), definisi dari usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah adalah sebagai berikut : Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki jumlah aset maksimal Rp.50.000.000 dan jumlah omset maksimal Rp.300.000.000.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan dan badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bikan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dan memiliki aset maksimal > Rp.50.000.000 sampai Rp.500.000.000 dan jumlah omset maksimal > Rp.300.000.000 sampai Rp.2.500.000.000.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang yang bukan merupakan anak perusahaan atau bikan cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dan memiliki aset maksimal > Rp.500.000.000 sampai Rp.10.000.000.000 dan jumlah omset maksimal > Rp.2.500.000.000 sampai Rp.50.000.000.000.

Faktor yang paling dominan dalam peningkatan usaha UMKM adalah pengembangan dibidang sumber daya manusia, kualitas produk, inovasi dan teknologi, serta keadaan ekonomi yang tidak stabil. Data peningkatan omset usaha mikro Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

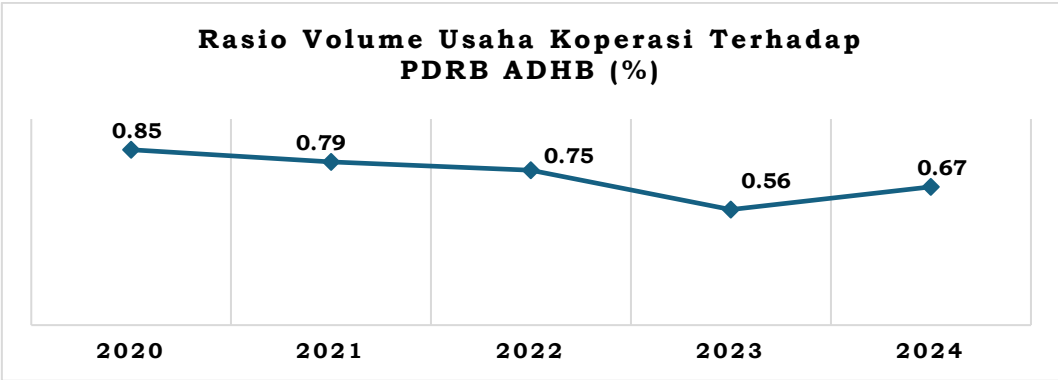


Gambar 2.59 Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2022. Jumlah omset usaha mikro dan koperasi di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 mencapai 1.022,10 Miliar Rupiah mengalami kenaikan dari tahun 2021 yang mencapai 494,83 Miliar Rupiah.

F. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap ADHB

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB ADHB mengalami penurunan secara berturut-turut dibandingkan dengan tahun 2019 sebagaimana pada gambar 2.60.



Gambar 2.60 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB ADHB di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan, 2025

G. Proporsi Jumlah Industri Menengah dan Industri Besar

Industri Menengah adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang. Sedangkan industri besar adalah modal sangat besar > Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah, teknologi canggih dan modern, organisasi teratur, tenaga kerja dalam jumlah banyak dan terampil (jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih), pemasarannya berskala nasional atau internasional. Sesuai dengan dokumen RTRW, Kabupaten Pasuruan mempunyai kawasan Industri PIER di kecamatan Rembang, Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Nguling dan memiliki Industri Kecil, Menengah dan Besar tersebar di beberapa kecamatan. Jumlah Industri Kecil, industri menengah dan industri besar pada tahun 2024 adalah sebanyak 10.710 unit.

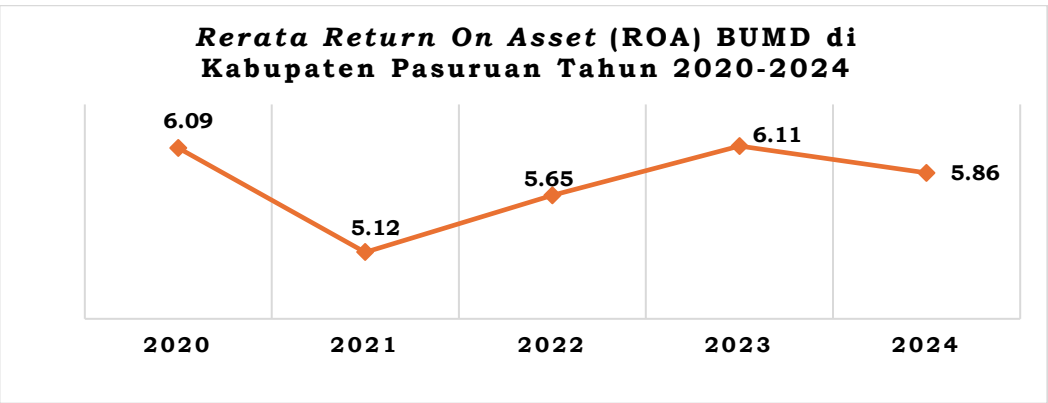
Proporsi industri menengah dan besar di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan dari 12,82% di 2021 menjadi 6,62% di 2023, yang mengindikasikan dominasi industri kecil dalam struktur industri daerah, yang dapat berdampak pada dinamika pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Penurunan proporsi industri menengah dan besar menunjukkan adanya perubahan struktur industri yang perlu diwaspadai. Melihat kondisi ini, perlu melakukan identifikasi faktor-faktor penyebab penurunan proporsi industri menengah dan besar, yang diimbangi dengan strategi penguatan industri skala menengah dan besar untuk menjaga pertumbuhan investasi, produktivitas, dan

penyerapan tenaga kerja formal ke depan. Untuk mengatasi potensi dampak negatif ini, Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu:

- Merumuskan kebijakan pro-investasi untuk industri menengah dan besar,
- Mengembangkan kawasan industri baru atau memperkuat kawasan industri yang ada,
- Meningkatkan ketersediaan tenaga kerja terampil melalui program pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri,
- Menyediakan insentif fiskal dan kemudahan perizinan bagi pengembangan industri skala menengah dan besar,
- Mendorong kolaborasi antara industri kecil dan industri besar dalam rantai pasok (supply chain) untuk memperkuat ekosistem industri lokal.

H. Return On Asset (ROA) BUMD

ROA merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan asset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan. Capaian ROA BUMD di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 2.61.



Gambar 2.61 Return On Asset BUMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, 2025

Pada gambar di atas capaian *Return On Asset (ROA)* BUMD di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Hal itu dikarenakan kenaikan laba bersih pada 2 (dua) BUMD (PDAM dan BPR Mina Mandiri) tahun 2024 yang mencapai Rp.5.559.153.379 tidak seimbang atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan total asetnya yang mencapai Rp.70.562.757.241.

I. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah mengevaluasi kinerja inovasi daerah. Indeks ini mengukur kemampuan suatu daerah untuk mendorong dan mempertahankan kegiatan inovatif yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, daya saing, dan pembangunan secara keseluruhan. Komponen-komponen utama termasuk sumber daya manusia dan penelitian, struktur ekonomi dan daya saing, hasil inovasi, infrastruktur dan konektivitas, keuangan dan investasi, dan kecanggihan pasar.

Tabel 2.50
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

Indeks Inovasi Daerah			
2021	2022	2023	2024
10,72 Kurang Inovatif	55,73 Inovatif	64,47 Sangat Inovatif	67,70 sangat inovatif

Sumber : Kemendagri/Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan, 2024

Inovasi daerah sangat penting untuk tolok ukur dan perbandingan, sehingga memungkinkan daerah untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Indeks inovasi daerah membantu dalam merancang intervensi yang ditargetkan untuk meningkatkan inovasi dengan meningkatkan pendidikan, mendorong penelitian dan pengembangan (litbang), dan meningkatkan infrastruktur. Selain itu, Indeks inovasi daerah juga menginformasikan keputusan investasi dengan menyoroti potensi inovatif suatu wilayah, sehingga menarik bisnis dan investor. Hasil pengukuran indeks inovasi daerah di Kabupaten Pasuruan dalam periode tahun 2021-2024 menunjukkan tren peningkatan dan mencapai kategori “sangat inovatif” sebagaimana pada tabel 2.50.

J. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Perhitungan IDSD dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) setiap tahunnya. Kekuatan utama dari konsep pengukuran daya saing IDSD terletak pada kemampuannya dalam mengombinasikan perspektif mikro di level perusahaan/industri dan perspektif makro di level institusi publik. Secara konseptual, kedua perspektif mikro-makro daya saing ini diklasifikasikan ke dalam tiga faktor penentu daya saing, yaitu faktor ketersediaan kebutuhan fundamental (*basic requirement factors*), faktor penguat efisiensi (*efficiency enhancers*), dan faktor inovasi dan kecanggihan (*innovation and sophistication factors*) yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Nilai IDSD Kabupaten Pasuruan tahun 2022-2023 disajikan dalam tabel 2.51.

Tabel 2.51
Nilai Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2022-2023

Tahun	Lingkungan Pendukung				SDM			Pasar			Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
2022	4,3	2,96	2,92	4,04	3,85	3	1,42	1,85	1,74	5	5	2,04	3,18
2023	4,37	2,97	4,01	3,32	3,88	3,58	1,43	2,07	1,96	5	2,67	2,43	3,14
2024	4,81	4,26	4,20	3,80	3,82	3,49	1,68	2,15	0,83	5	3,74	2,57	3,36

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

Pada periode 2024, skor daya saing Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa Pasuruan memiliki potensi besar untuk terus bersaing di tingkat regional maupun nasional. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 untuk pilar 2 (infrastruktur) ada kenaikan yang signifikan yang menggambarkan bahwa peningkatan ketersediaan infrastruktur serta kualitas layanan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi di Kabupaten Pasuruan.

Untuk dapat meningkatkan daya saing daerah perlu memperbaiki kinerja pada pilar-pilar yang lemah, Kabupaten Pasuruan akan mampu mengakselerasi perbaikan skor daya saing, menyamai bahkan melampaui rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional, serta

memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang yang lebih inklusif dan berdaya tahan tinggi.

3) Penerapan Ekonomi Hijau

A. Indeks Ekonomi Berkelanjutan

Indeks Ekonomi Berkelanjutan merupakan gagasan mandiri Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sebagai pengganti/pendekatan indeks ekonomi hijau, dikarenakan belum tersedia publikasi indeks ekonomi hijau pada level kabupaten/kota. Indeks ekonomi berkelanjutan berpedoman pada indeks ekonomi hijau dengan mempertimbangkan ketersediaan data indikator/variabel dan relevansi indikator/variabel pengganti. Indeks ekonomi berkelanjutan diukur dengan konstruksi sebagai berikut (table 2.52).

Tabel 2.52
Pengukuran Indeks Ekonomi Berkelanjutan

NO	PILAR/INDIKATOR	BOBOT PILAR	NILAI	
			MAX	MIN
I	PILAR LINGKUNGAN	0,5		
1	Persentase luas tutupan hutan dari luas daratan (%)		93,17	0,50
2	Konsentrasi BOD (mg/liter)		2,00	6,00
3	Konsentrasi NO2 (µg/m3)		0,19	40,00
II	PILAR EKONOMI	0,3		
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita (Juta Rp)		131,00	21,00
2	Produktivitas pertanian (rata-rata) (ton/hektar/tahun) untuk komoditi padi dan budidaya ikan			
	Padi		72,00	48,00
	Budidaya Ikan		19,00	3,00
3	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan (IDR juta/orang)		200,00	200,00
4	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Jasa (IDR juta/orang)		200,00	200,00
III	PILAR SOSIAL	0,2		
1	Rata-rata Lama Sekolah usia 25 th ke atas (tahun)		12,00	2,00
2	Angka Harapan Hidup (tahun)		75,50	55,00
3	Tingkat Kemiskinan (%)		-	13,00
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		3,00	15,00

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2025

Berikut tabel 2.53 hasil perhitungan indeks ekonomi berkelanjutan:

Tabel 2.53
Indeks Ekonomi Keberlanjutan Tahun 2023-2024

No	Uraian	2023	2024
I	PILAR LINGKUNGAN	52,72	69,52
II	PILAR EKONOMI	80,02	81,59
III	PILAR SOSIAL	64,33	66,76
	INDEKS EKONOMI BERKELANJUTAN	63,23 (baik tier 2)	72,59 (baik tier 2)

Sumber: BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2025

4) Transformasi Digital

A. Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Indeks TIK merupakan indaktor gagasan mandiri Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagai pengganti/pendekatan Indeks Pembangunan TIK, dikarenakan tidak tersedianya publikasi indeks TIK pada level kabupaten/kota. Indeks TIK diukur dengan konstruksi terlihat pada tabel 2.52.

Indeks TIK diukur dalam skala 10 dengan pembagian 4 kategori : (1) tinggi (7,51–10,00) ; (2) sedang (5,01–7,50); (3) rendah (2,51–5,00); dan (4) sangat rendah (0–2,50). Hasil perhitungan Indeks TIK tahun 2023-2024 sebagaimana Tabel 2.53, yang menunjukkan adanya sedikit peningkatan dan masih berada dalam kategori ‘rendah’. Komponen terendah terjadi pada subindeks ‘penerapan teknologi informasi dan komunikasi’ meskipun mengalami peningkatan. Sementara itu subindeks ‘keahlian TIK’ mengalami sedikit penurunan karena terdapat penurunan pada indikator angka partisipasi sekolah SMP. Kendala dalam perhitungan Indeks TIK tahun 2024 adalah beberapa data indikator yang bersumber dari BPS belum tersedia data terbaru.

Tabel 2.54
Perhitungan Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
di Kabupaten Pasuruan

INDEKS/ SUBINDEKS / INDIKATOR	SUMBER DATA	PENIMBANG
INDEKS TIK		
AKSES DAN INFRASTRUKTUR TIK		0,4
Persentase desa tersedia jaringan GSM (bukan blankspot)	DISKOMINFO	0,33
Persentase ruta dengan computer	Statistik Kesra Jatim	0,33

INDEKS/ SUBINDEKS / INDIKATOR	SUMBER DATA	PENIMBANG
Persentase ruta dengan akses internet	Statistik Kesra Jatim	0,33
PENGUNAAN TIK		0,4
Persentase penduduk (usia di atas 5 th) menggunakan internet	Statistik Kesra Jatim	0,5
Persentase penduduk (usia di atas 5 th) menggunakan telepon seluler	Statistik Kesra Jatim	0,5
KEAHLIAN TIK		0,2
Rata-rata lama sekolah penduduk di atas 25 th		0,33
Rata-rata APK SMP-SMA		0,33
APK SMP	BPS	
APK SMA	BPS	
APK Perguruan Tinggi		0,33
Jumlah mahasiswa	BPS JATIM	
Jumlah penduduk 19-24 th	Statistik Kesra Jatim	

Sumber: BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2024

Tabel 2.55
 Hasil Perhitungan Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
 di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023-2024

INDEKS / SUBINDEKS / INDIKATOR	2023	2024*
INDEKS TIK	3,97	4,14
Akses dan Infrastruktur TIK	5,41	5,48
Penggunaan TIK	2,67	3,02
Keahlian TIK	3,71	3,69

Sumber: BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2025

Keterangan : * data sementara

5) Integrasi Ekonomi Lokal dan Regional

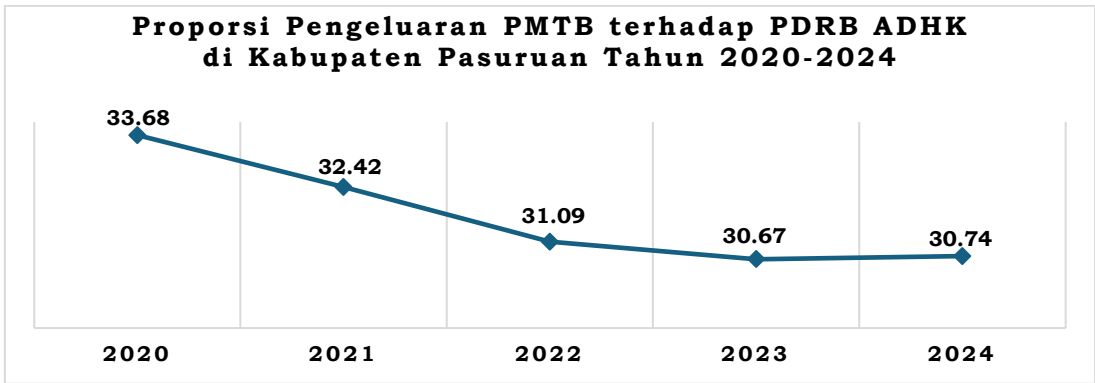
A. Proporsi Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB ADHK

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB ADHK didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai

pengurangan. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah “bruto” mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

Cakupan PMTB terdiri dari : (1) Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagai-nya; (2) Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan; (3) Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan investasi fisik salah satu instrumen penggerak perekonomian. Investasi telah menjadi tumpuan ekonomi wilayah disamping konsumsi rumah tangga. Dengan tersedianya data PMTB akan membantu pemerintah mengambil kebijakan dalam meningkatkan iklim investasi dan mempermudah investor untuk berusaha, serta membantu dunia usaha dalam menentukan arah kebijakan usahanya.

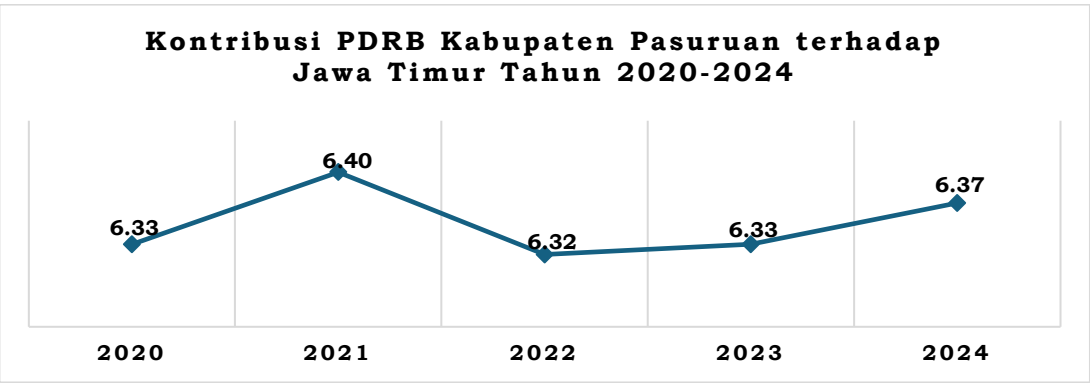


Gambar 2.62 Proporsi Pengeluaran PMTB terhadap PDRB ADHK di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Jika dilihat dari gambar di atas, terjadi penurunan proporsi PMTB terhadap PDRB ADHK Kabupaten Pasuruan selama periode 2020–2024, meskipun sempat menunjukkan sedikit peningkatan di tahun 2024, mengindikasikan adanya potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu segera mengidentifikasi hambatan investasi dan merumuskan kebijakan yang lebih menarik serta kondusif untuk meningkatkan PMTB, guna memastikan keberlanjutan dan percepatan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Adapun kebijakan yang dapat dilakukan guna meningkatkan PMBT antara lain: mempermudah perizinan, memberikan insentif fiskal dan meningkatkan infrastruktur industri.

B. Kontribusi PDRB Kabupaten Pasuruan Terhadap Jawa Timur

Kontribusi PDRB Kabupaten Pasuruan terhadap total ekonomi Jawa Timur cenderung stabil di kisaran 6%, dengan sedikit peningkatan di tahun 2024 menjadi 6,37% setelah sempat menurun sebagaimana pada gambar 2.63, dan ini menunjukkan peran penting Pasuruan dalam perekonomian provinsi, terutama didukung oleh sektor industrinya yang kuat. Hal ini menjadi pendukung Kabupaten Pasuruan sebagai kabupaten/kota dengan nilai PDRB tiga terbesar kategori industri pengolahan di Jawa Timur seperti Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.

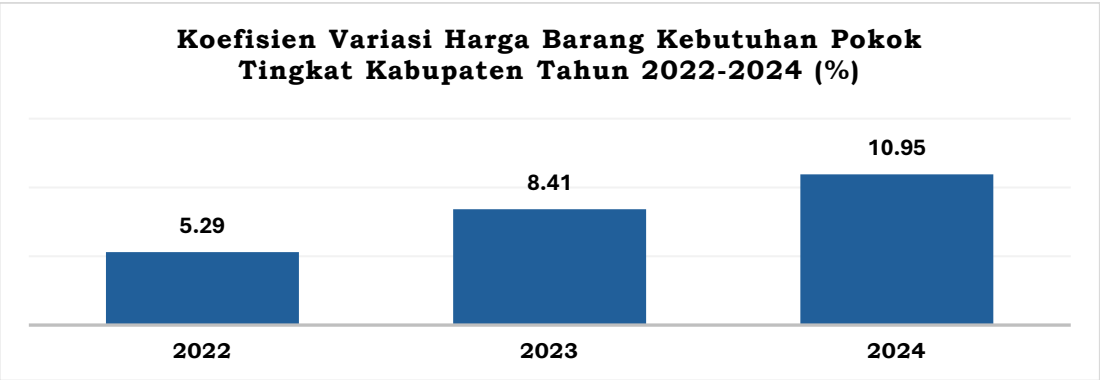


Gambar 2.63 Kontribusi PDRB Kabupaten Pasuruan terhadap Jawa Timur Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

C. Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Tingkat Kabupaten

Koefisien Variasi Harga adalah perbandingan simpangan baku (standar deviasi) harga dengan rata-rata harga dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Tujuan perhitungan koefisien harga adalah untuk melihat sebaran/distribusi data dari rata-rata hitungannya. Semakin kecil koefisien variasi maka data semakin seragam yang artinya menunjukkan bahwa harga komoditas kebutuhan pokok pada satu tahun terakhir berada dalam keadaan stabil, sedangkan semakin besar koefisien variasi maka data semakin heterogen atau bervariasi.

Terjadi peningkatan variasi harga kebutuhan pokok dari 5,29% pada tahun 2022 menjadi 10,95% pada tahun 2024 sebagaimana pada gambar 2.64, yang mengindikasikan harga barang kebutuhan pokok di Kabupaten Pasuruan menjadi kurang stabil atau lebih beragam di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Variasi harga yang melebar dapat menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen, berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, serta menimbulkan tekanan tambahan terhadap kelompok berpendapatan rendah. Oleh karena itu, peningkatan variasi harga ini dapat dikategorikan sebagai kondisi yang kurang baik bagi stabilitas ekonomi daerah, khususnya dalam aspek kesejahteraan masyarakat dan pengendalian inflasi. Peningkatan variasi harga kebutuhan pokok merupakan indikator yang perlu diwaspadai. Pemerintah daerah perlu mengambil tindakan cepat dan terkoordinasi untuk menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, serta memastikan ketersediaan barang secara berkelanjutan.

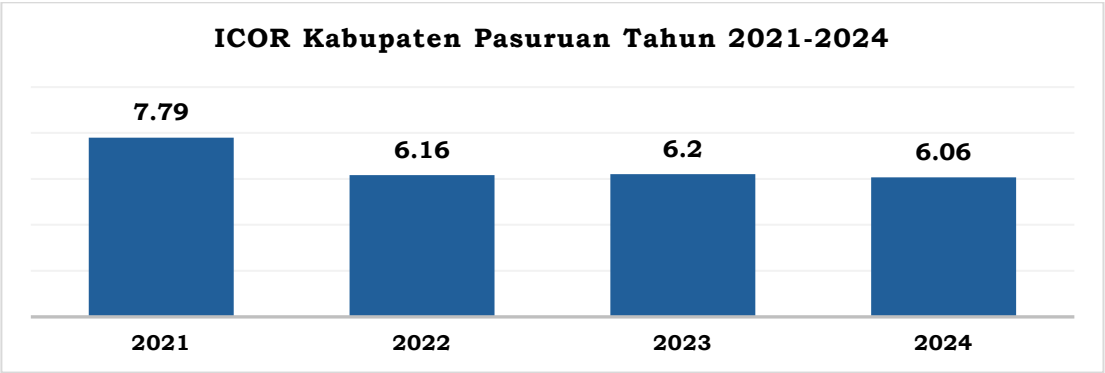


Gambar 2.64 Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Tingkat Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2024
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan, 2025

D. ICOR (*Incremental Capital Out Ratio*)

ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output), dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). ICOR ini perlu dikendalikan untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dimana ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output. Setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Jika suatu daerah mempunyai angka (koefisien) ICOR, maka daerah tidak akan menemui kesulitan dalam menentukan berapa besarnya investasi yang diperlukan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Semakin kecil nilai koefisien ICOR, semakin efisien perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu.

ICOR Pasuruan tahun 2024 sebesar 6,06 sebagaimana pada gambar 2.65 yang artinya butuh investasi 6,06 kali lipat untuk setiap 1% pertumbuhan ekonomi sehingga Pemerintah daerah perlu upaya agar investasi lebih efisien yang ditunjukkan dengan penurunan ICOR. Semakin kecil angka ICOR, semakin efisien penggunaan investasi, artinya dengan investasi sedikit saja sudah bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar. Upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi investasi, antara lain melalui perbaikan iklim investasi, penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi produktif.



Gambar 2.65 ICOR (*Incremental Capital Out Ratio*) Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

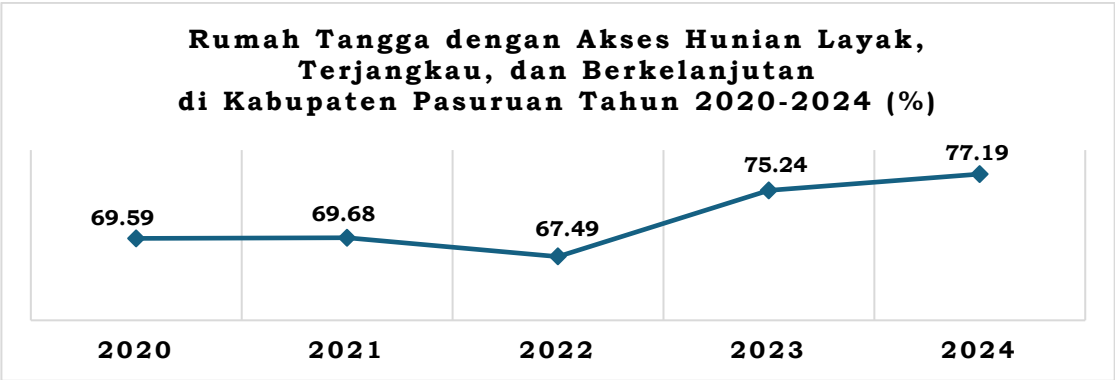
6) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

A. Indeks Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur memiliki peran strategis membangun konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik, serta komunikasi dan informasi dalam rangka membuka akses daerah seluas-luasnya. Indeks infrastruktur wilayah untuk menilai kualitas dan ketersediaan infrastruktur di suatu wilayah, yang dihitung dari rerata indeks aksesibilitas, indeks infrastruktur SDA-cipta karya, indeks infrastruktur perhubungan dan indeks kinerja pengelolaan sampah. Indeks infrastruktur memiliki manfaat dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan infrastruktur yang lebih efektif. Indikator ini merupakan indikator baru dalam perhitungan infrastruktur Kabupaten Pasuruan untuk 20 tahun kedepan yang dimulai dari 2022. Indeks Infrastruktur Wilayah Kabupaten Pasuruan terus meningkat dimulai dari tahun 2022 dengan nilai 31,06, pada tahun 2023 mencapai 40,18 dan tahun 2024 sebesar 68,73. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur wilayah semakin merata dan layak, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat. Kabupaten Pasuruan mulai keluar dari kondisi ketimpangan infrastruktur antarwilayah

B. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

Capaian rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami kecenderungan meningkat sebagaimana pada gambar 2.66. Artinya masyarakat semakin mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Peningkatan akses ini mencerminkan adanya kebijakan pemerintah yang lebih baik dalam menyediakan perumahan, seperti program subsidi, pengembangan perumahan terjangkau, dan regulasi yang mendukung pembangunan hunian berkelanjutan.

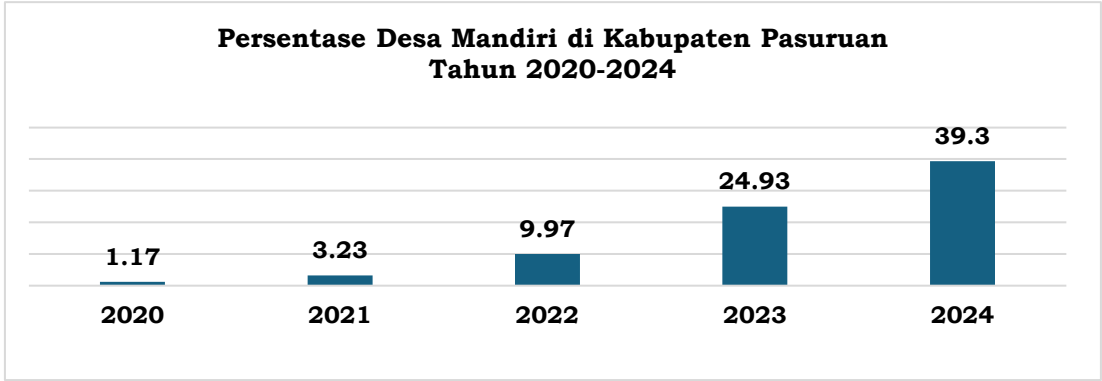


Gambar 2.66 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

C. Persentase Desa Mandiri

Capaian indikator Persentase Desa Mandiri yang ada di Kabupaten Pasuruan setiap tahunnya mengalami kenaikan sebagaimana pada gambar 2.67. Perhitungan status desa mandiri tahun 2020-2024 masih menggunakan indeks desa membangun, selanjutnya untuk perhitungan capaian dan target tahun 2025 dan seterusnya menggunakan indeks desa.



Gambar 2.67 Persentase Desa Mandiri Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan, 2025

2) Indeks Aksesibilitas Wilayah

Aksesibilitas wilayah adalah kemampuan atau keadaan suatu wilayah untuk dapat diakses oleh pihak luar baik secara langsung atau tidak langsung. Aksesibilitas tersebut terdiri dari prasarana (sistem jaringan jalan) yang dan beserta ketersediaan sarana untuk melakukan pergerakannya. Formula perhitungan Indeks Aksesibilitas Wilayah adalah panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap dibagi luas wilayah Kabupaten Pasuruan.

Tabel 2.56
Kondisi Jalan di Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

No.	Kondisi Jalan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Baik	Km	1.276,650	1.308,240	1.252,111	1.279,880	1.448,33
2	Sedang	Km	604,480	653,950	597,821	570,280	403,68
3	Rusak	Km	235,780	204,780	260,909	208,150	292,88
4	Rusak Berat	Km	198,980	148,920	205,049	257,570	171

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan, 2025

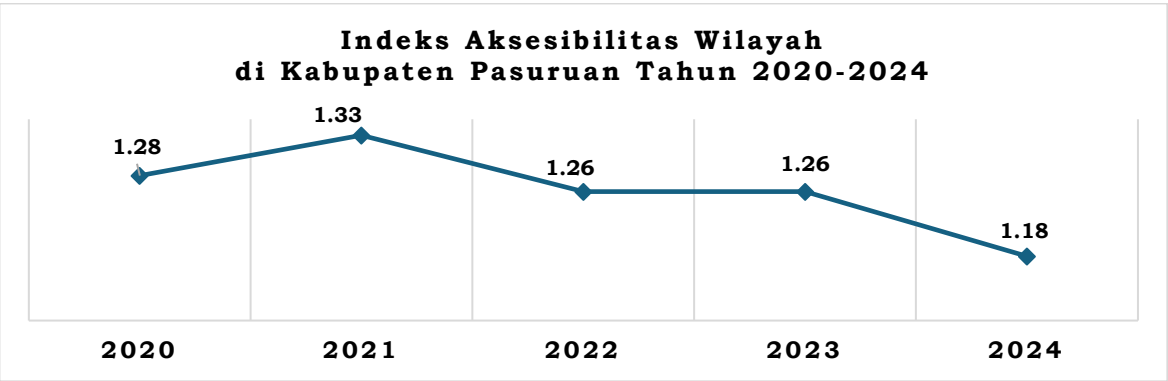
Nilai Indeks Aksesibilitas Wilayah Kabupaten Pasuruan tergolong rendah karena kepadatan penduduknya tergolong tinggi (diatas 1.000 jiwa/km²), sehingga minimal Indeks Aksesibilitas Wilayah minimal sebesar 1,5 sebagaimana pada tabel 2.56.

Tabel 2.57
Standar Pelayanan Minimal Bidang Jalan di Indonesia

No.	Kepadatan Penduduk/Jiwa	Indeks Aksesibilitas	Keterangan
1	Sangat Tinggi > 5.000	>5	Panjang jalan/luas (km/km ²)
2	Tinggi > 1.000	>1,5	
3	Sedang > 500	>0,5	
4	Rendah > 100	>0,5	

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan, 2025

Capaian indikator indeks aksesibilitas wilayah dan indikator persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap Kabupaten Pasuruan sebagaimana pada tabel 2.57 tidak mencapai target dikarenakan bertambahnya volume kerusakan jaringan jalan yang diakibatkan kendaraan berat yang melebihi tonase kelas jalan, cuaca ekstrem dan umur rencana jalan.



Gambar 2.68 Indeks Aksesibilitas Wilayah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

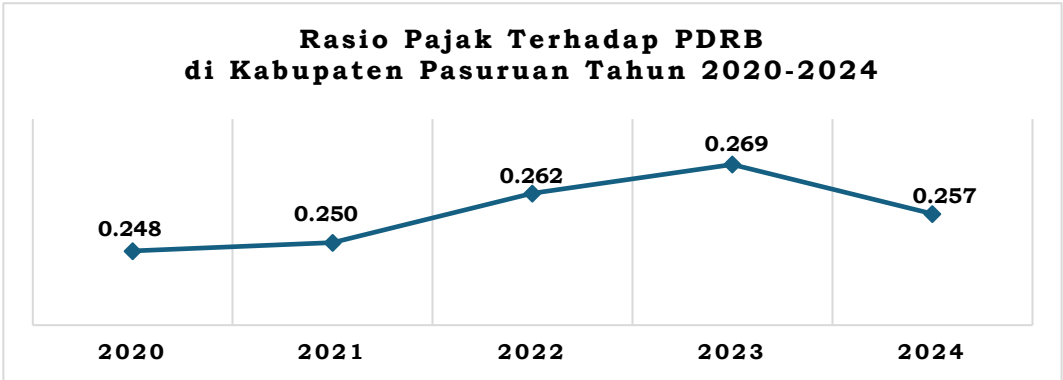
Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan, 2025

7) **Stabilitas Ekonomi Makro**

A. **Rasio Pajak Daerah dalam PDRB**

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan PAD yang paling potensial dalam memperbesar porsi PAD. Pajak memainkan peran yang penting dalam proses untuk menghasilkan penerimaan dan untuk menjalankan berbagai aktivitas dalam perekonomian. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan di wilayah tersebut kepada pemerintah daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan aturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan pemerintah daerah dalam hal mengumpulkan pajak seharusnya menjadi modal utama dalam upaya meningkatkan PAD untuk membiayai kegiatan pembangunan.

Definisi sederhana rasio pajak adalah perbandingan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dimasa yang sama. Produk Domestik Regional Bruto adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu daerah, dikurangi nilai barang dan jasa yang digunakan dalam produksi. Semakin tinggi rasio pajak suatu daerah, maka mengindikasikan baiknya kondisi perekonomian seiring besarnya penghasilan masyarakat yang masuk ke penerimaan pajak.



Gambar 2.69 Rasio Pajak terhadap PDRB di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2025 (Diolah)

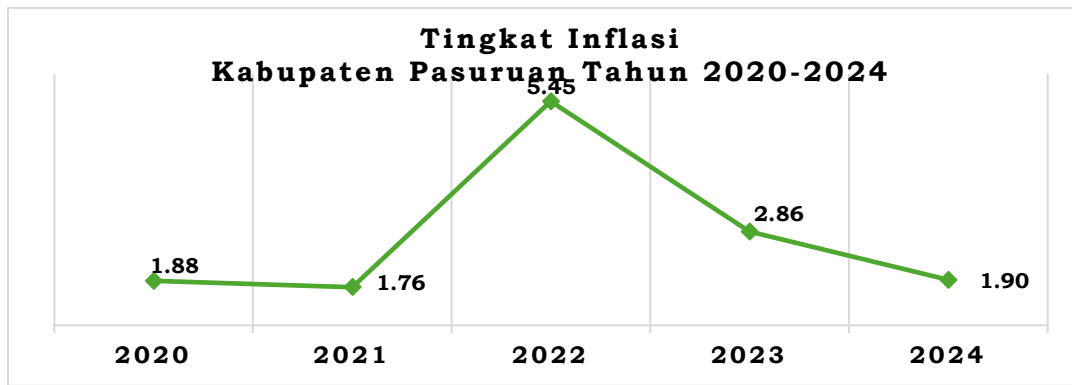
Pada gambar di atas rasio pajak terhadap PDRB di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Hal itu dikarenakan kenaikan penerimaan pajak daerah tahun 2024 yang mencapai 518.527 juta rupiah tidak

seimbang atau lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan PDRB ADHB sebesar 201.665.140 juta rupiah.

B. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya. Laju Inflasi perlu dilakukan pengendalian karena berdampak pada tingkat daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Survey BPS di Jawa Timur hanya dilakukan di 8 (delapan) Kabupaten/Kota, yaitu: (1) Kabupaten Jember; (2) Kabupaten Banyuwangi; (3) Kabupaten Sumenep; (4) Kota Kediri; (5) Kota Malang; (6) Kota Probolinggo ; (7) Kota Madiun; dan Kota (8) Kota Surabaya. Berdasarkan hal tersebut maka dalam menggambarkan inflasi di Kabupaten Pasuruan mengacu pada daerah yang memiliki kemiripan pola konsumsi masyarakat, yaitu Kota Probolinggo.

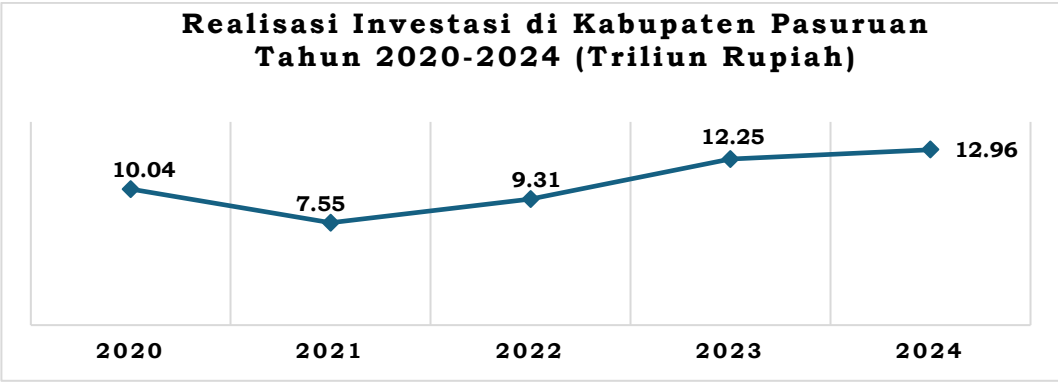
Perkembangan inflasi di Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada inflasi di Kota Probolinggo tahun 2020-2024 secara umum inflasi dapat dikendalikan dan menunjukkan adanya penurunan namun terjadi lompatan yang tinggi secara menyeluruh terjadi di tahun 2022 sebagaimana pada gambar 2.70. Kondisi tersebut dipengaruhi situasi ekonomi global khususnya dampak perang Rusia-Ukraina. Dalam rangka menjaga kestabilan inflasi, menjaga harga tetap stabil menjadi sangat penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus melakukan pemantauan harga secara rutin serta memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, guna memastikan inflasi tetap dalam batas yang aman dan perekonomian daerah tetap tumbuh dengan baik.



Gambar 2.70 Tingkat Inflasi Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
 Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

C. Realisasi Investasi

Realisasi investasi merupakan indikator penting dari keberhasilan ekonomi suatu wilayah atau negara, karena mencerminkan kemampuan wilayah tersebut untuk menarik, menampung, dan mengelola investasi dengan efektif. Gambar di bawah menunjukkan realisasi investasi di Kabupaten Pasuruan mengalami perkembangan fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Kendala di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 dan berdampak hingga masa pemulihan di tahun 2021. Fase *rebound* capaian realisasi investasi di Kabupaten Pasuruan didorong oleh banyaknya program dan kegiatan yang dilakukan agar investor tertarik berbisnis di Kabupaten Pasuruan, mulai dari kajian *Investment Project Ready to Offer*, pelayanan perijinan yang optimal melalui OSS dan Aplikasi Siap Maslahat, hingga berbagai kegiatan promosi seperti pameran tunggal, *investment gathering*, *one on one meeting*, promosi publikasi melalui media nasional dan yang lainnya. Keberhasilan target realisasi investasi menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan mampu menarik dan mempertahankan investasi serta memberikan sinyal positif kepada investor potensial bahwa wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki kondisi yang mendukung bisnis, seperti infrastruktur yang baik, kebijakan yang stabil, dan lingkungan bisnis yang kondusif.



Gambar 2.71 Realisasi Investasi (Triliun Rupiah) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: DPMPTSP Kabupaten Pasuruan, 2025

Nilai realisasi investasi didapatkan dari komposit Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dapat dilihat, Nilai PMDN lebih banyak berkontribusi dalam realiasi investasi di Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan, hingga tahun 2023 terdapat jumlah perusahaan dari dalam negeri (PMDN) sebanyak 55.160 perusahaan dan PMA mencapai 456 perusahaan.

Tabel 2.58
Nilai PMA dan PMDN di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020-2024

Jenis Investasi	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
Nilai Penanaman Modal Asing (PMA)	5.370.738.859.347	4.297.931.600.062	3.545.171.761.421	5.503.245.000.000	7.537.090.500.000
Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	4.664.503.542.322	3.255.137.950.845	5.767.363.600.000	6.743.933.649.713	5.427.657.625.701

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan, 2025

Meski jumlah perusahaan PMDN jauh lebih banyak, nilai investasi PMDN sedikit unggul dari PMA selama 2020-2024 namun selisih nilai investasi tidaklah terlalu signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa PMDN di Kabupaten Pasuran mencakup banyak usaha kecil dan menengah, sementara PMA terdiri dari perusahaan dengan investasi besar per perusahaan. PMDN berkontribusi pada diversifikasi dan ketahanan ekonomi lokal, sedangkan PMA membawa investasi besar dan potensi global. Kombinasi keduanya memberikan keseimbangan dalam strategi pembangunan ekonomi di Kabupaten Pasuruan. Keduanya harus terus didukung untuk pertumbuhan ekonomi daerah yang kuat, modern, dan inklusif.

D. PDRB

Berdasarkan data PDRB yang ada, lapangan usaha yang menjadi basis pembentuk struktur ekonomi Kabupaten Pasuruan, secara konsisten memberikan kontribusi tertinggi terhadap volume PDRB ADHK 5 (lima) terbesar yaitu: (1) Industri Pengolahan; (2) Konstruksi; (3) Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (4) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan (5) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Namun demikian, kelima lapangan usaha tersebut tidak secara konsisten pula memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.59
Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha
Tahun 2022-2024

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan			Kontribusi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,41%	1,46%	0,72%	5,12%	4,94%	4,72%
2	Pertambangan dan Penggalian	4,19%	3,99%	3,19%	0,44%	0,44%	0,43%
3	Industri Pengolahan	5,41%	4,98%	5,47%	60,59%	60,47%	60,54%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,26%	28,81%	9,35%	0,74%	0,90%	0,94%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,05%	5,15%	6,72%	0,04%	0,04%	0,04%
6	Konstruksi	4,89%	4,57%	5,15%	11,04%	10,97%	10,95%
7	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,98%	5,76%	4,51%	10,02%	10,07%	9,99%
8	Transportasi dan Pergudangan	14,19%	10,41%	10,12%	0,68%	0,72%	0,75%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,40%	8,73%	6,99%	3,30%	3,41%	3,46%
10	Informasi dan Komunikasi	4,34%	6,97%	7,87%	3,81%	3,87%	3,96%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,17%	3,49%	4,5%	0,71%	0,70%	0,69%
12	Real Estate	4,18%	3,23%	3,26%	0,73%	0,72%	0,70%
13	Jasa Perusahaan	2,61%	6,46%	6,15%	0,09%	0,09%	0,09%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,83%	0,85%	7,53%	0,93%	0,89%	0,91%

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan			Kontribusi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
15	Jasa Pendidikan	-0,96%	3,10%	5,37%	0,64%	0,63%	0,63%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,45%	4,00%	5,45%	0,18%	0,18%	0,18%
17	Jasa Lainnya	11,78%	8,94%	9,75%	0,94%	0,98%	1,02%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terus mengalami penurunan persentase kontribusi seiring nilai pertumbuhan setiap tahunnya sebagaimana pada tabel 2.59. Hal ini dipengaruhi oleh lemahnya program-program pemerintah yang berfokus di subsektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, misalnya perbaikan dalam sistem agribisnis, perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dan fasilitas yang memadai serta pembatasan dalam pengalihan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Salah satu karakteristik penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan umumnya bekerja di sektor pertanian dan nelayan hal ini dibuktikan dengan data penduduk miskin lebih banyak di daerah pesisir. Pertumbuhan pada sektor ini di tahun 2024 akan berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasuruan untuk itu upaya khusus untuk memajukannya sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang terintegrasi ke dalam sektor tersebut.

Pada kategori kontruksi yang mengalami pertumbuhan yang fluktuatif sehingga menyebabkan persentase kontribusi terhadap PDRB semakin menurun. Hal berkebalikan terjadi pada kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang semakin menurun, akan tetapi kontribusi terhadap struktur PDRB ADHK semakin bertambah yang berarti meskipun pertumbuhan melambat, ukuran sektor ini relatif besar dibanding sektor lainnya. Hal ini menunjukkan dominasi sektor tersebut akibat pertumbuhan sektor lain yang relatif lebih lambat. Untuk menjaga keseimbangan struktur ekonomi, pemerintah perlu mendorong inovasi di sektor perdagangan sekaligus mempercepat pertumbuhan sektor-sektor potensial lainnya melalui diversifikasi ekonomi, penguatan produktivitas, dan peningkatan daya beli masyarakat.

E. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) dibangun sebagai proksi indikator inklusi keuangan pada level Kabupaten/Kota, yang bertujuan untuk memberi gambaran secara lebih terukur mengenai kondisi akses keuangan masyarakat. IKAD memanfaatkan data dari sisi penawaran dan permintaan untuk menilai kinerja akses, penggunaan layanan, serta kedalaman keuangan. IKAD berfungsi sebagai alat pemantauan untuk menganalisis capaian program inklusi keuangan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) serta sebagai masukan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif.

Berdasarkan surat Bappenas Nomor: 07727/D.03/PP.02.01/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 Hal: Penyampaian Informasi Mengenai Indikator Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) 2025-2030, disebutkan nilai IKAD Kabupaten Pasuruan tahun 2024 sebesar 2,90 atau dengan kategori ‘berkembang’. Terdapat 5 kategori IKAD, yaitu dasar, mulai berkembang, berkembang, hampir unggul, dan unggul. Dengan demikian kondisi 2024 menunjukkan adanya gap yang cukup besar, sehingga diperlukan upaya percepatan bagi TPAKD untuk menjadi unggul.

8) Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Produk Unggulan Daerah (PUD)

Kondisi ekosistem riset dan inovasi PUD berdasarkan dokumen Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah Kabupaten Pasuruan berdasarkan 6 elemen beserta subelemennya, teridentifikasi dan terangkum sebagai berikut:

Tabel 2.60		
Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Produk Unggulan Daerah (PUD)		
Elemen/Sub elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Produk Unggulan Daerah Saat Ini	
	Padi	Usaha Pariwisata Kuliner
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	- Peraturan Daerah (Nomor 4 Tahun 2016 Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro - Perda No. 1 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah - Peraturan Bupati No. 67 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah	- Peraturan Daerah (Nomor 4 Tahun 2016 Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro - Perda No. 1 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah - Peraturan Bupati No. 67 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah

Elemen/Sub elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Produk Unggulan Daerah Saat Ini	
	Padi	Usaha Pariwisata Kuliner
	Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah, - Belum memiliki SiDA (sistem inovasi daerah)	Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah, - Belum memiliki SiDA (sistem inovasi daerah)
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menerbitkan nominasi Produk Unggulan Daerah, terutama pada klaster Pertanian yaitu dalam nominasi tersebut terdiri dari Pertanian Padi.	Satu data pasuruan sudah memuat beberapa informasi pemerintahan terkait Usaha Pariwisata Kuliner.
Pengelolaan Kebun Raya Daerah	Tidak tersedia kebun raya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.	Keterkaitan pengelolaan kebun raya tidak memiliki keterkaitan dengan produk unggulan daerah sektor usaha pariwisata, sehingga pada sub elemen ini tidak ada kesinambungan yang tepat.
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Belum tersedia PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) bagi KUKM	Belum tersedia PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) bagi KUKM
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	-	-
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Kegiatan layanan (Hak Kekayaan Intelektual) HaKI maupun Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) telah tersedia sejak tahun 2017 namun masih minim partisipasi dari UMKM. Dari 14.000 – 17.000 UMKM baru sekitar 40 UMKM yang mendaftarkan HaKI di tahun 2017.	-
Elemen 2 : Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Pada tahun 2023 telah terjalin kerjasama dengan PT. Riset Perkebunan Nusantara. selain itu juga bekerjasama dengan Balai Besar Perbenihan dan proyeksi tanaman perkebunan (BBPPTP) Surabaya serta kerjasama dengan Politeknik Pembangunan Pertanian Malang.	Masih belum ada kerjasama terkait pengembangan usaha kuliner.
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Belum ada kegiatan atau <i>Website</i> sebagai sarana melakukan kolaborasi riset dan inovasi.	Belum ada kegiatan atau website sebagai sarana melakukan pengembangan usaha kuliner.
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi		

Elemen/Sub elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Produk Unggulan Daerah Saat Ini	
	Padi	Usaha Pariwisata Kuliner
Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Bermitra dengan PTPN dan BBPPTP Surabaya. Kemitraan sudah dijalin namun belum spesifik pada pengembangan PUD terkait Pertanian Padi.	
Peningkatan difusi inovasi	- Belum ada model dan strategi transfer teknologi ke pelaku usaha Usaha Pertanian Padi. - Belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.	- Belum ada model dan strategi transfer teknologi ke pelaku usaha Usaha Pariwisata Kuliner - Belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	- Belum ada sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan ke pelaku usaha Usaha Pertanian Padi - Belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima sosialisasi tersebut.	- Belum ada sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan ke pelaku usaha Usaha Pariwisata Kuliner. - Belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima sosialisasi tersebut
Elemen 4 : Budaya Riset dan Inovasi		
Promosi dan kampanye inovasi	- Mengadakan beberapa kegiatan pameran. Salah satu nya adalah Pasuruan Always Fresh pada 2023 di Rest Area Tosari yang bertujuan untuk mendorong pelaku usaha dalam berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing. - Pernah ada kegiatan YUK NONGGO yang merupakan akronim dari gerakan "Ayo Belonjo Nang Tonggo", SATRYA EMAS atau "Pusat Strategi Ekonomi Maslahat", PERWIRA "Perempuan Wira Usaha". - Peresmian Gedung Sentra Produk Unggulan Kabupaten Pasuruan sebagai ruang pameran penjualan produk. - Pameran produk di luar daerah seperti AEO2022 dan PIATTEX V. - Partisipasi industri kecil menengah unggulan mewakili Kabupaten Pasuruan pada pameran Inacraft 2023 di Jakarta.	-

Elemen/Sub elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Produk Unggulan Daerah Saat Ini	
	Padi	Usaha Pariwisata Kuliner
Apresiasi prestasi inovasi	- Terkait perlombaan untuk meningkatkan kompetisi yang bermanfaat, yaitu INOPAMAS perlompaaan internal Pemerintah Kabupaten Pasuruan. - Mendapat penghargaan dari Kementerian Pertanian tahun 2024 sebagai penerima Tanda Daftar Varietas Lokal Terbanyak se-Indonesia.	Terkait perlombaan untuk meningkatkan kompetisi yang bermanfaat, yaitu INOPAMAS perlombaan internal Pemkab Pasuruan. Namun belum ada keikutsertaan usaha pariwisata kuliner.
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Pengukuhan DPD Tani Merdeka di tahun 2025	Sudah tersedia namun perlu berbasis riset
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Belum ada inventarisasi teknologi masyarakat/kearifan lokal yang telah berlaku turun-temurun. Pencatatan kemungkinan masih tersebar secara acak belum disatukan ke dalam bentuk data yang mudah diakses.	Belum ada inventarisasi teknologi masyarakat/kearifan lokal yang berkaitan dengan Usaha Pariwisata Kuliner, secara turun-temurun. Pencatatan kemungkinan masih tersebar secara acak belum disatukan ke dalam bentuk data yang mudah diakses.
Elemen 5 : Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah		
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Belum ada.	Belum ada
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Belum ada.	Belum ada
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Belum ada.	Belum ada
Elemen 6 : Penyelarasan Dengan Perkembangan Global		
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Nota Kesepahaman dengan Badan Standarisasi Instrumen Pertanian pada tahun 2023 sehingga potensi keunggulan pertanian Kabupaten Pasuruan mampu memenuhi standart kualitas yang disyaratkan oleh pasar global.	Belum ada

Elemen/Sub elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Produk Unggulan Daerah Saat Ini	
	Padi	Usaha Pariwisata Kuliner
Penguatan kerjasama internasional	Belum terdapat dokumen kerjasama internasional bidang pertanian antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan lembaga atau mitra internasional.	Belum terdapat dokumen kerjasama internasional bidang Usaha Pariwisata Kuliner antara Pemkab Pasuruan dengan lembaga atau mitra internasional.

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2025

2.1.6 Kerja Sama Daerah

Kabupaten Pasuruan telah menjalin berbagai kerja sama daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Beberapa di antaranya meliputi:

1. Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan untuk *Universal Health Coverage (UHC)*

Pemerintah Kabupaten Pasuruan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk mencapai cakupan kesehatan semesta (UHC) 100% pada tahun 2025. Melalui kerja sama ini, seluruh warga, termasuk yang kurang mampu, dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Hingga Desember 2024, sekitar 384.000 warga telah terdaftar dalam program ini.

2. Kerja Sama dengan Civitas Akademika se-Pasuruan Raya

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemerintah Kabupaten Pasuruan menjalin kerja sama dengan universitas dan institusi pendidikan di wilayah Pasuruan Raya. Kerja sama ini fokus pada pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pembangunan daerah.

3. Kerja Sama dengan Muhammadiyah

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menandatangani nota kesepahaman dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan untuk program penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Kerja sama ini juga mencakup bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan, kemanusiaan, dan sosial dakwah.

4. Kerja Sama dengan Pemerintah Kota Pasuruan

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Pasuruan dalam bidang pembangunan daerah dan pelayanan publik, termasuk kesehatan, pendidikan, penanganan kebencanaan, serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban.

5. Kerja Sama dalam Pengelolaan Mata Air Umbulan

Kabupaten Pasuruan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan beberapa daerah lain dalam pengelolaan sumber daya air Umbulan. Kerja sama ini bertujuan untuk pengelolaan dan pemanfaatan mata air Umbulan secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

6. Kerja Sama di Bidang Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan menjalin kerja sama dengan rumah sakit untuk pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta dengan organisasi non-pemerintah untuk program edukasi lingkungan dan kegiatan penghijauan.

2.1.7 BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda

BUMD di Kabupaten Pasuruan memiliki peran vital dalam mendukung pelayanan publik, khususnya dalam penyediaan air bersih, yaitu PDAM Giri Nawa Tirta. PDAM Giri Nawa Tirta bertanggung jawab atas penyediaan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan. Perusahaan ini telah menunjukkan kinerja yang baik, terbukti dengan penghargaan TOP BUMD Awards 2023 kategori Perumda Air Minum dengan label "Bintang 5" . Penghargaan ini mencerminkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dan profesionalitas dalam pengelolaan manajemen perusahaan.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Pada sub bab ini dijelaskan hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Rekapitulasi evaluasi berupa

capaian kinerja dengan status ‘tidak mencapai target’, ‘mencapai target’, dan ‘melebihi target’ disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.61
Rekapitulasi Status Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2024

No	Urusan Pemerintahan	Jumlah Program				Jumlah Kegiatan			
		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target	Mencapai dan Melebihi Target (%)	Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target	Mencapai dan Melebihi Target (%)
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
1.1	UP Bidang Pendidikan	0	2	1	100%	4	2	0	33%
1.2	UP Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan	1	2	4	86%	3	12	5	85%
	RSUD Bangil	0	1	1	100%	1	0	1	50%
	RSUD Grati	0	1	1	100%	0	0	2	100%
1.3	UP Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	4	2	55%	6	18	3	78%
	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang	2	2	0	50%	4	11	3	78%
	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	3	2	2	57%	2	7	0	78%
1.4	UP Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2	2	0	50%	0	5	7	100%
1.5	UP Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0	5	0	100%	1	20	0	95%
	Satuan Polisi Pamong Praja	0	2	0	100%	1	9	0	90%
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	3	0	100%	0	11	0	100%
1.6	UP Bidang Sosial	3	3	0	50%	5	12	1	72%
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								

No	Urusan Pemerintahan	Jumlah Program				Jumlah Kegiatan			
		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target	Mencapai dan Melebihi Target (%)	Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target	Mencapai dan Melebihi Target (%)
2.1	UP Bidang Tenaga Kerja	0	1	3	100%	1	11	4	94%
2.2	UP Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	5	0	100%	0	14	0	100%
2.3	UP Bidang Pangan	2		3	60%	3	1	3	57%
2.4	UP Bidang Pertanahan	0	3	1	100%		3	1	100%
2.5	UP Bidang Lingkungan Hidup	0	9	2	100%	1	17	4	95%
2.6	UP Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	4	1	100%	0	12	2	100%
2.7	UP Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	2	2	100%	2	6	1	78%
2.8	UP Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	3	0	100%	0	8	0	100%
2.9	UP Bidang Perhubungan	0	1	1	100%	2	18	4	92%
2.10	UP Bidang Komunikasi dan Informatika	1	2	1	75%	3	6	0	67%
2.11	UP Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	1	5	86%	2	7	4	85%
2.12	UP Bidang Penanaman Modal	0	5	1	100%		11	1	100%
2.13	UP Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2	1	1	0%	9	5	2	44%
2.14	UP Bidang Statistik	0	1	0	100%	0	1	0	100%
2.15	UP Bidang Persandian	1		0	0%	0		1	100%
2.16	UP Bidang Kebudayaan	0	5	0	100%	0	7	0	100%
2.17	UP Bidang Perpustakaan	0	1	0	100%	0	2	0	100%
2.18	UP Bidang Kearsipan	0	3	0	100%	0	12	1	100%
3	Urusan Pemerintahan Pilihan								
3.1	UP Bidang Perikanan	0	3	0	100%	0	14	0	100%
3.2	UP Bidang Pariwisata	1	3	0	75%	2	7	2	82%
3.3	UP Bidang Pertanian	1	1	3	80%	5	2	5	58%

No	Urusan Pemerintahan	Jumlah Program				Jumlah Kegiatan			
		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target	Mencapai dan Melebihi Target (%)	Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target	Mencapai dan Melebihi Target (%)
3.4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1	1	3	80%	5	4	3	58%
3.5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3	1	3	57%	2	10	3	87%
3.6	UP Bidang Perdagangan	0	0	3	100%	0	0	3	100%
3.7	UP Bidang Perindustrian	0	1	0	100%	0	1	0	100%
3.8	UP Bidang Transmigrasi	0	3	0	100%	0	14	0	100%
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan								
4.1	Sekretariat Daerah	0	3	0	100%	3	15	1	84%
4.2	Sekretariat DPRD	1	0	1	50%	6	10	0	63%
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan								
5.1	Perencanaan	0	3	0	100%	0	14	0	100%
5.2	Keuangan	0	2	2	100%	0	7	6	100%
5.3	Kepegawaian	2	0	1	33%	4	5	2	64%
5.4	Pendidikan dan Pelatihan	2	0	1	33%	4	5	2	64%
5.5	Penelitian dan Pengembangan	1	0	0	0%	0	3	0	100%
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan								
6.1	Inspektorat Daerah	0	3	0	100%	0	9	1	100%
7	Unsur Kewilayahan								
7.1	Kecamatan Bangil	0	2	3	100%	3	10	0	77%
7.2	Kecamatan Beji	0	5	0	100%	1	9	0	90%
7.3	Kecamatan Gempol	1	3	0	75%	0	8	0	100%
7.4	Kecamatan Gondangwetan	0	4	0	100%	0	11	0	100%
7.5	Kecamatan Grati	0	7	0	100%	0	11	1	100%
7.6	Kecamatan Kejayan	0	5	0	100%	1	15	0	94%
7.7	Kecamatan Kraton	0	6	0	100%	0	11	0	100%
7.8	Kecamatan Lekok	0	3	1	100%	0	7	0	100%
7.9	Kecamatan Lumbang	0	5	1	100%	0	17	0	100%
7.10	Kecamatan Nguling	1	3	0	75%	2	6	0	75%
7.11	Kecamatan Pandaan	0	3	3	100%	0	12	1	100%

No	Urusan Pemerintahan	Jumlah Program				Jumlah Kegiatan			
		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target	Mencapai dan Melebihi Target (%)	Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target	Mencapai dan Melebihi Target (%)
7.12	Kecamatan Pasrepan	0	6	0	100%	0	15	0	100%
7.13	Kecamatan Pohjentrek	0	6	0	100%	1	14	1	94%
7.14	Kecamatan Prigen	1	3	0	75%	0	10	0	100%
7.15	Kecamatan Purwodadi	0	6	0	100%	0	11	0	100%
7.16	Kecamatan Purwosari	1	3	0	75%	1	9	0	90%
7.17	Kecamatan Puspo	1	5	0	83%	2	9	0	82%
7.18	Kecamatan Rejoso	0	5	0	100%	0	8	0	100%
7.19	Kecamatan Rembang	0	5	0	100%	0	10	0	100%
7.20	Kecamatan Sukorejo	0	3	2	100%	0	11	0	100%
7.21	Kecamatan Tosari	1	5	0	83%	5	9	0	64%
7.22	Kecamatan Tutur	0	5	0	100%	0	8	0	100%
7.23	Kecamatan Winongan	1	5	0	83%	0	12	0	100%
7.24	Kecamatan Wonorejo	0	6	0	100%	0	12	0	100%
8	Unsur Pemerintahan Umum								
8.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	1	0	17%	7	7	0	50%
	Total	47	206	58	85%	104	616	81	87%

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2025

Terdapat beberapa Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program atau Kegiatan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana berikut:

1. Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program atau Kegiatan:
 - Kecenderungan keterlambatan dalam proses verifikasi/reviu program/kegiatan, penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan dengan provinsi maupun pusat, kebijakan rasionalisasi, kelengkapan laporan pertanggungjawaban kegiatan serta pergeseran anggaran untuk kegiatan yang lebih prioritas.
 - Keterbatasan sumber daya Pembangunan utamanya pada program/kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan fisik

- Belum optimalnya perencanaan serta realisasi keuangan akibat lemahnya administrasi proyek disertai kurang tepatnya dalam estimasi kebutuhan anggaran kegiatan
2. Faktor Penyebab Tercapai dan Melebihinya Target Kinerja Program atau Kegiatan
- Peningkatan pemahaman ASN atas kinerja yang diperjanjikan
 - Adanya komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan capaian kinerja
 - Koordinasi dan kerjasama antar Bidang yang mendorong keberhasilan kinerja pada setiap target yang telah ditentukan
 - Adanya percepatan kegiatan fisik di lapangan untuk pencapaian target

Ketidaktercapaian maupun tercapainya Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 menimbulkan Implikasi terhadap Kinerja Pembangunan Daerah sebagaimana berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan dalam lima tahun terakhir cenderung lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur maupun nasional, namun sangat mudah berubah-ubah karena masalah mendasar seperti infrastruktur yang belum maksimal, ketidakseimbangan antar sektor, kurangnya inovasi dan teknologi, promosi produk unggulan yang minim, serta lemahnya kerjasama dan peran BUMD, sehingga penanganan masalah-masalah ini menjadi kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan kuat.
2. Ketimpangan pendapatan Kabupaten Pasuruan yang diukur melalui indeks gini cenderung lebih rendah dari indeks gini Provinsi Jawa Timur maupun nasional, namun masih berada di kategori sedang cenderung meningkat. Tahun 2019, indeks gini sebesar 0.308, sementara di tahun 2024 berada di angka 0.331. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ketimpangan pendapatan antar masyarakat yang juga semakin meningkat dan perlu diturunkan/diselesaikan di masa mendatang
3. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasuruan juga cenderung lebih rendah dari tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Tingkat kemiskinan cenderung berfluktuasi dan kondisinya cenderung turun, di tahun 2024 lebih rendah

dibandingkan tahun 2020. Namun hal ini tentu harus menjadi perhatian dalam pembangunan di masa mendatang agar tingkat kemiskinan dapat ditekan lagi.

4. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pasuruan cenderung berada di atas angka Provinsi Jawa Timur dan di beberapa tahun lebih rendah dari angka nasional. Meskipun terjadi kecenderungan penurunan dalam 2 tahun terakhir, namun penurunannya tidak setinggi Jawa Timur dan Nasional, sehingga tingkat pengangguran Kabupaten Pasuruan pada tahun terakhir justru lebih tinggi. Hal ini menunjukkan belum optimalnya lapangan kerja dan/atau penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pasuruan. Di masa mendatang, pembangunan daerah harus mampu menekan tingkat pengangguran terbuka ini.
5. Indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Pasuruan selama lima tahun terakhir cenderung cukup jauh berada di bawah IPM Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Ini berarti percepatan pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik di aspek kesehatan, pendidikan maupun ekonomi, menjadi keharusan atau prioritas di masa mendatang.
6. Capaian pembangunan bidang lingkungan hidup yang diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pasuruan cenderung lebih rendah daripada angka Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Capaian pada tahun 2024 sebesar 65,06 berada di bawah capaian Jawa Timur sebesar 71,24. Hal ini menunjukkan bahwa secara empiris terdapat permasalahan dalam kualitas lingkungan Kabupaten Pasuruan yang harus diselesaikan di masa mendatang.
7. Pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana wilayah Kabupaten Pasuruan juga harus ditingkatkan di masa mendatang. Pada tahun 2024, Indeks Infrastruktur Wilayah Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan cukup pesat dengan capaian 68,73, dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 11,57. Walaupun demikian, indeks ini masih perlu terus ditingkatkan agar infrastruktur wilayah dapat lebih merata secara optimal mendukung pembangunan aspek lainnya di Kabupaten Pasuruan.

8. Indeks reformasi birokrasi yang mencerminkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Pasuruan memperlihatkan kecenderungan yang meningkat, namun masih relatif rendah, yaitu di angka 68,68. Jika dibandingkan dengan capaian indeks reformasi birokrasi Provinsi Jawa TImur yang sebesar 85, maka capaian IRB Kabupaten Pasuruan masih relatif jauh lebih rendah.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah adalah sebuah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta yang ingin dicapai di masa datang sesuai dengan peraturan perundangan atau harapan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah terjadi karena adanya kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, peluang yang belum dimanfaatkan, ancaman yang diantisipasi, serta kelemahan yang tidak diatasi.

2.3.1 Permasalahan yang Berhubungan dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan tahun 2025 -2029, pemerintah Kabupaten Pasuruan menetapkan sasaran pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan kondisi yang ingin diwujudkan dalam pembangunan sebagai penjabaran rumusan tujuan pembangunan daerah yang tersebut dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah. Adapun permasalahan dalam fokus sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 meliputi:

Tabel 2.62
Permasalahan Strategis Daerah Menurut Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Permasalahan
1	Meningkatnya kehidupan Masyarakat yang toleran berlandaskan budaya dan kearifan lokal	Kurangnya pendidikan atau sosialisasi tentang nilai-nilai lokal yang mengandung semangat toleransi; Minimnya ruang dialog atau komunikasi antar kelompok masyarakat

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Permasalahan
2	Meningkatnya kesetaraan dalam Masyarakat	Belum optimalnya fasilitas ramah disabilitas di ruang publik; Perempuan masih mengalami keterbatasan dalam partisipasi ekonomi, pendidikan tinggi, dan jabatan publik
3	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi strategis	Belum optimalnya sentra-sentra ekonomi kreatif dan jejaring pemasaran; Masih rendahnya daya saing produk unggulan
4	Meningkatnya daya saing investasi	Belum optimalnya pengelolaan potensi investasi
		Belum optimalnya cakupan infrastruktur dasar
5	Meningkatnya kualitas lingkungan	Masih perlunya peningkatan kesadaran dunia usaha, masyarakat maupun pengambil kebijakan dalam meningkatkan kualitas lingkungan
6	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan jaminan sosial masyarakat	Masih terdapat kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, khususnya antara pedesaan dan perkotaan; Akses terhadap pekerjaan layak belum merata, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas
		Rendahnya kualitas ketrampilan angkatan kerja dalam menghadapi tuntutan dunia usaha
		Sistem data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan data kepesertaan BPJS belum sepenuhnya sinkron
7	Meningkatnya SDM yang unggul dan berkelanjutan	Masih rendahnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah; Masih tingginya AKI, AKB, Stunting, TBC dan kasus HIV/AIDS
		Masih keterbatasan akses terhadap permodalan, pasar, teknologi, serta rendahnya kapasitas manajerial dan inovasi pelaku usaha.
8	Meningkatnya inovasi daerah dan penguasaan teknologi informasi	Adanya kelemahan dalam inovasi dan adaptasi teknologi, terutama di tingkat desa dan kecamatan

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Permasalahan
9	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa	Belum optimalnya penyelenggaraan SAKIP dan satu data
10	Meningkatnya partisipasi stakeholder dan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah	Partisipasi stakeholder dan masyarakat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Kabupaten Pasuruan masih belum optimal
11	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik yang humanis	Belum optimalnya pemanfaatan mal pelayanan publik
		Masih kurangnya profesionalitas ASN

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2025

2.3.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Berdasarkan kondisi kinerja pemerintah Kabupaten Pasuruan di seluruh urusan pemerintahan tahun 2020-2024, dapat diketahui permasalahan pembangunan yang harus diberikan solusi di tahun 2026 dan periode pembangunan lima tahun mendatang (2025-2029). Permasalahan pembangunan daerah di setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

Tabel 2.63
Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan

No	URUSAN	PERMASALAHAN
1.	PENDIDIKAN	Masih rendahnya rata-rata lama sekolah (7,84 tahun) dan harapan lama sekolah (12,77 tahun)
		Belum semua tenaga pendidik berpendidikan S1
		Angka tidak sekolah masih tinggi (17.888 anak terdiri dari: DO/putus sekolah = 2.884 anak; tidak melanjutkan = 7.968 anak; belum pernah bersekolah = 7.076 anak)
		Ketidakmerataan fasilitas dan distribusi tenaga pendidik ditingkat SMP dan SMA
		Capaian SPM Pendidikan 81,15 % (peringkat 34 dari 38 kab/kota)

No	URUSAN	PERMASALAHAN
2.	KESEHATAN	Penurunan angka kematian ibu dan bayi melambat yang menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan khususnya bagi bayi dan ibu hamil
		Penurunan prevalensi balita stunting melambat yang juga menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan khususnya bagi bayi dan ibu hamil
		Masih tingginya prevalensi TBC dan HIV/AIDS
		Kurangnya fasilitas kesehatan rujukan di wilayah selatan
		Meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular (degeneratif, kanker, jantung, gagal ginjal dan sebagainya) dari kelompok usia tua ke usia muda
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Minimnya akses air siap minum perpipaan dan akses sanitasi aman (limbah domestik)
		Penurunan kualitas air baku dan debit sumber air
		Ketidaksesuaian kelas jalan yang dibangun dengan beban kendaraan
		Masih adanya penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukan ruang
		Belum terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang memadai
		Belum optimalnya pengembangan infrastruktur pada pusat pertumbuhan dan kawasan perkotaan pada PKL (pusat kegiatan lokal)
4.	PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Masih adanya kawasan permukiman kumuh, termasuk di dalamnya adanya keterbatasan akses ke sanitasi layak dan berkelanjutan
		Belum terpenuhinya rencana mitigasi bencana di daerah permukiman rawan bencana
		Belum tersedianya lahan relokasi untuk program normalisasi kali Bangil Tak
5.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	Masih banyaknya kasus pelanggaran Perda dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

No	URUSAN	PERMASALAHAN
	PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Belum optimalnya penanganan bencana alam dan non alam
		Meningkatnya kejadian bencana alam akibat kerusakan lingkungan
6.	SOSIAL	Belum optimalnya rehabilitasi sosial diluar panti
		Belum optimalnya pengentasan kemiskinan
		Tata kelola data sosial yang tidak valid
7.	KETENAGAKERJAAN	Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kualifikasi kerja yang tersedia sehingga penyerapan tenaga kerja belum optimal
		Keterbatasan kesempatan/lapangan kerja formal
		Masih kurangnya kepatuhan pengusaha dalam menjalankan/ mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan
		Rendahnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan
8.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Indeks ketimpangan gender dan perlindungan anak di bawah rata - rata Jatim
		Belum optimalnya pemberdayaan Perempuan serta perlindungan anak dan Perempuan
		Masih minimnya fasilitas umum ramah anak
9.	PANGAN	Masih adanya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan/kerawanan pangan (9,05%)
		Fungsi tata niaga pangan belum berjalan efektif
		Potensi keanekaragaman produk komoditas pangan dan inovasi teknologi pengolahan pangan belum dimaksimalkan
10	PERTANAHAN	Belum adanya kepastian penyelesaian konflik tanah di kawasan hankam dan kawasan hutan
		Masih adanya potensi konflik agraria di masyarakat

No	URUSAN	PERMASALAHAN
11	LINGKUNGAN HIDUP	Masih tingginya pencemaran lingkungan akibat limbah domestik dan industri yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup
		Degradasi lingkungan (lahan dan air)
		Semakin berkurangnya tutupan lahan dan belum terpenuhinya RTH perkotaan yang juga menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup
		Belum optimalnya pengelolaan persampahan
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Keterbatasan sarana dan prasarana untuk pelayanan administrasi kependudukan
		Masih rendahnya capaian kepemilikan dokumen kependudukan (KIA dan akta kelahiran)
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	BUMDes belum berperan optimal dalam pengembangan potensi ekonomi desa
		Masih adanya tanah kas desa yang digunakan sebagai sumber penghasilan Perangkat Desa
		Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan asset desa
14.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Masih tingginya angka usia pernikahan dini dan rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi
		Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan ber KB
15	PERHUBUNGAN	Belum terpenuhinya layanan transportasi antar wilayah
		Belum terpenuhinya keamanan dan keselamatan lalu lintas jalan
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Capaian SPBE meningkat cukup signifikan (2024 =3,88), namun masih perlu ditingkatkan karena relatif di bawah angka Jatim (2024 = 4,43)
		Indeks TIK mencapai 3,97 tergolong dalam kategori rendah (2,51 - 5,00) dan masih ada (11%) desa blankspot (tidak tersedia jaringan GSM)
17		Penambahan koperasi tidak diiringi peningkatan percepatan koperasi berkualitas

No	URUSAN	PERMASALAHAN
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Rendahnya keberlanjutan usaha mikro (belum optimalnya pemberdayaan Usaha mikro)
		Kurangnya dukungan lembaga keuangan untuk pembiayaan usaha mikro
18	PENANAMAN MODAL	Nilai ICOR tidak berada pada angka ideal (3-4) yang mengindikasikan tidak terjadinya efisiensi dalam penggunaan investasi
		Penawaran peluang investasi masih belum optimal
		Belum ada kebijakan insentif yang mendorong investasi
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kebijakan kepemudaan dan olahraga belum mampu meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan.
		Kurangnya sarana prasarana olahraga untuk publik di ruang terbuka
20	STATISTIK	Belum terwujudnya Satu Data
21	PERSANDIAN	Tingkat keamanan data pemerintah daerah masih rendah
22	KEBUDAYAAN	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian nilai budaya lokal
		Belum adanya penetapan warisan budaya
		Belum adanya integrasi kurikulum warisan budaya pada dunia pendidikan
23	PERPUSTAKAAN	Belum meratanya jangkauan layanan perpustakaan daerah
		Rendahnya minat baca masyarakat
24	KEARSIPAN	Belum terpenuhinya infrastruktur dan tenaga kearsipan.
		Pengelolaan arsip secara baik belum diterapkan pada semua OPD
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Belum terpenuhinya ketersediaan benih berkualitas
		Belum tersedianya sarana prasarana pengelolaan ikan yang memadai
		Masih lemahnya daya tawar nelayan dan/atau petani ikan

No	URUSAN	PERMASALAHAN
26	PARIWISATA	Belum optimalnya pengelolaan pariwisata
27	PERTANIAN	Penurunan luas lahan pertanian dan kualitas lahan pertanian
		Masih adanya produk pertanian yang belum memenuhi syarat ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)
		Masih adanya ancaman penyakit hewan menular (penyakit mulut dan kuku, dan lainnya)
		Masih ada desa rawan pangan (Desa Ngantungan Kec Pasrepan dan Desa Karanglo Kecamatan Grati.
28	PERDAGANGAN	Pengelolaan pasar daerah/tradisional masih belum sepenuhnya efektif
29	PERINDUSTRIAN	Hilirisasi industri belum menjadi kekuatan utama
		Kualitas barang industri belum sepenuhnya tinggi
		Pengembangan industri kecil masih belum optimal
		Tidak banyak industri di Kabupaten Pasuruan yang berbasis potensi lokal
30	Pendukung	
	Sekretariat Daerah	Reformasi Birokrasi masih belum optimal
		Belum optimalnya pengelolaan BUMD
		Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama antar daerah
		Masih adanya ketidakpastian batas desa
		Nilai pemanfaatan sistem pengadaan masih belum optimal sebesar 23,40 dari nilai maksimal 30
		Masih adanya tumpang tindih kewenangan di beberapa perangkat daerah
31	Penunjang	
	Perencanaan	Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
	Keuangan	Belum optimalnya pengelolaan aset daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah
		Rendahnya kemandirian keuangan daerah
	Kepegawaian	Belum optimalnya implementasi Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (ABK)

No	URUSAN	PERMASALAHAN
		Belum adanya pendampingan dan bantuan hukum bagi ASN
	Pendidikan dan Pelatihan	Nilai Indeks Profesionalitas ASN belum optimal masih dalam kategori sedang
	Penelitian dan Pengembangan	Indeks daya saing daerah (3,14) masih di bawah nilai Jatim (3,78).
		Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
32	Unsur Pengawasan	
	Inspektorat	Belum optimalnya peran dan kualitas APIP dalam perencanaan, pemantauan hingga evaluasi dan pengendalian
		Integritas dalam pencegahan korupsi masih perlu ditingkatkan (survey KPK menunjukkan pada kategori ‘waspada’)
33	Kewilayahan	
	Kecamatan	Belum optimalnya fungsi peran kecamatan dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan kebijakan daerah
34	Pemerintahan Umum	
	Bakesbangpol	Adanya potensi konflik akibat isu SARA
		Adanya potensi konflik di kawasan pertahanan dan keamanan (HANKAM)
		Tingginya penyalahgunaan narkoba

Sumber: BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2025

BAB 3

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

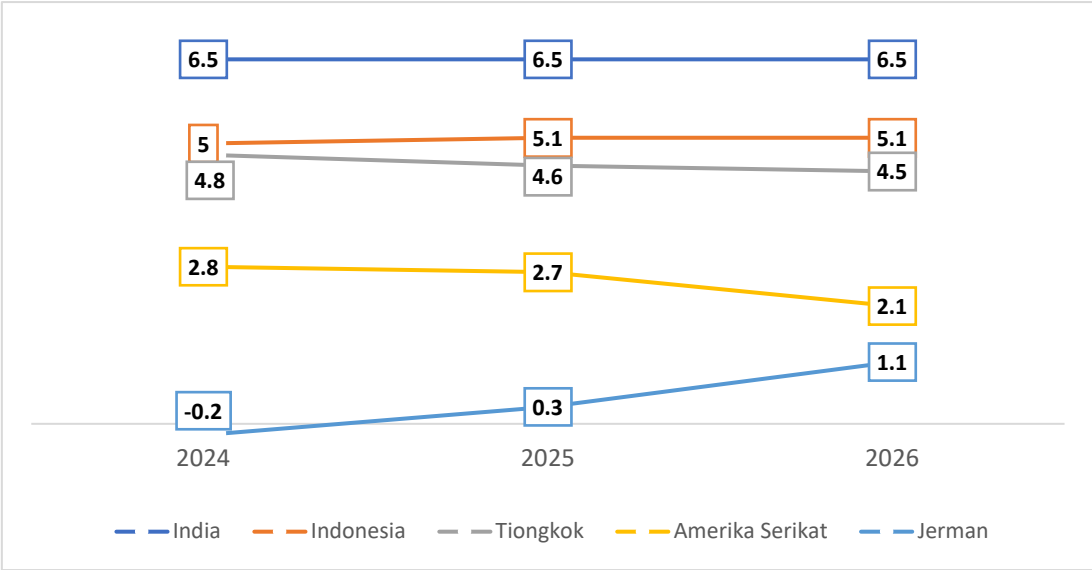
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Telaah Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Perekonomian global tahun 2025 diperkirakan lebih sulit dan kompleks jika dibandingkan dengan tahun 2024. Ketidakpastian global pada tahun 2025 terlihat dari proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh *International Monetary Funding* (IMF) dan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). IMF pada bulan Oktober Tahun 2024 menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari semula 3,3 persen menjadi 3,2 persen. Sedangkan OECD sebaliknya, menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,2 persen menjadi 3,3 persen. Perbedaan proyeksi ini menggambarkan tingginya ketidakpastian ekonomi global pada tahun 2025. Ketidakpastian global terjadi karena diakibatkan beberapa hal diantaranya: 1) perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan Amerika Serikat; 2) ketidakpastian konflik timur Tengah antara Iran-Israel yang sewaktu-waktu dapat memicu instabilitas pasar energi dan investasi global; 3) Kebijakan ekonomi Presiden AS (Donald Trump) yang memicu inflasi di AS dan Dunia; dan 4) kemungkinan adanya tekanan ekonomi dan inflasi global yang meningkatkan suku bunga acuan terus meningkat.

Berdasarkan data rilis IMF, ekonomi Jerman pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh sebesar 0,3 persen dan 1,1 persen pada tahun 2026. Sementara itu perlambatan ekonomi global yang terjadi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok yang diproyeksikan terus menurun. Sedangkan India diprediksi cukup resilien atas dinamika ekonomi global dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen per tahun.

Gambar 3.1
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara



Sumber: IMF, data diolah

Indonesia sukses melewati tahun 2024 dengan kinerja ekonomi yang solid, didorong oleh keberlanjutan reformasi struktural serta stabilitas di sektor keuangan. Data dari World Bank menunjukkan bahwa pada kuartal pertama 2024, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 5,1%, mencerminkan ketahanan ekonomi yang lebih baik dibandingkan rata-rata negara berpendapatan menengah. Sepanjang tahun 2024, perekonomian Indonesia tumbuh 5,0% (yoy), melampaui rata-rata pertumbuhan global. Stabilitas sektor keuangan tercermin dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang mencetak rekor tertinggi di level 7.905,39 pada 19 September 2024. Sementara itu, inflasi mengalami kenaikan menjadi 2,8% pada Mei 2024, dan defisit anggaran diperkirakan meningkat menjadi 2,5% dari PDB. Meski menghadapi tantangan tersebut, pemerintah tetap optimistis dengan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2% pada tahun 2025.

Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,03% pada triwulan IV dan mencapai 4,61% sepanjang tahun 2024. Tren penguatan investasi ini terus berlanjut dalam empat tahun terakhir, didukung oleh stabilitas ekonomi-politik serta kebijakan fiskal dan moneter yang mendorong kepercayaan investor. Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami kenaikan

signifikan sebesar 20,82%, dengan total nilai mencapai Rp1.714 triliun, melampaui target yang ditetapkan. Selain itu, peningkatan impor barang modal dan bahan baku mencerminkan kinerja sektor manufaktur yang tetap terjaga. Pemerintah juga memperkuat investasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan meningkatkan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur konektivitas, kawasan industri, bendungan, serta sektor pariwisata.

Di sisi ekspor, kinerja pada triwulan IV tumbuh 7,63%, sementara secara tahunan mencapai pertumbuhan 6,51%. Peningkatan ekspor tahun 2024 ditopang oleh kenaikan ekspor barang dan jasa. Ekspor barang meningkat berkat pertumbuhan volume ekspor besi baja sebesar 17,8% dan bahan bakar mineral sebesar 7,8%. Sementara itu, ekspor jasa mengalami pertumbuhan yang didukung oleh meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara, yang naik 19,05% sepanjang tahun. Di sisi lain, impor barang masih mengalami kontraksi sebesar 10,36% pada triwulan IV dan turun 7,95% secara tahunan.

Sektor manufaktur tumbuh 4,89% pada triwulan IV dan mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 4,43%. Permintaan domestik dan global yang tetap kuat menjadi faktor utama yang menopang pertumbuhan, khususnya di subsektor industri logam dasar, elektronik, serta makanan dan minuman. Sejalan dengan itu, sektor perdagangan mencatat pertumbuhan 5,19% pada triwulan IV dan 4,86% sepanjang tahun 2024, yang didorong oleh peningkatan aktivitas produksi.

Sektor-sektor yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat mengalami pertumbuhan pesat sepanjang tahun. Sektor transportasi mencatat pertumbuhan 7,92% pada triwulan IV dan mencapai 8,69% secara tahunan. Sementara itu, sektor akomodasi serta makanan dan minuman tumbuh masing-masing sebesar 6,61% dan 8,56% sepanjang tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh berbagai acara nasional dan internasional, serta perbaikan infrastruktur pendukung pariwisata yang meningkatkan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara.

Sektor primer mengalami perlambatan, baik di sektor pertanian maupun pertambangan. Sektor pertanian hanya tumbuh 0,71% pada triwulan IV dan 0,67% sepanjang tahun 2024, yang dipengaruhi oleh penurunan produksi padi dan kelapa sawit. Meski demikian, sektor pertanian diperkirakan akan mengalami peningkatan dengan adanya kebijakan swasembada pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, sektor pertambangan tumbuh moderat dengan angka 3,95% pada triwulan IV dan 4,90% sepanjang tahun, dipengaruhi oleh stabilisasi harga komoditas.

Secara regional, seluruh wilayah mencatat pertumbuhan positif selama tahun 2024. Jawa dan Sumatera tetap menjadi motor utama perekonomian nasional dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,92% dan 4,45%, yang ditopang oleh aktivitas manufaktur, perdagangan, dan pembangunan. Sementara itu, hilirisasi industri menjadi pendorong utama pertumbuhan di wilayah timur Indonesia, di mana Maluku-Papua tumbuh 7,81% dan Sulawesi mencatat pertumbuhan 6,18%. Pembangunan infrastruktur di Kalimantan juga berdampak positif pada sektor konstruksi, dengan pertumbuhan sebesar 5,52%. Di sisi lain, sektor pariwisata yang terus berkembang turut menopang pertumbuhan ekonomi di Bali dan Nusa Tenggara, yang mencapai 5,04% sepanjang tahun 2024.

Memasuki tahun 2025, World Bank memprediksi ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5,1%. Prospek ekonomi Indonesia tetap menjanjikan, didukung oleh kebijakan reformasi, percepatan digitalisasi, serta investasi di sektor-sektor strategis. Namun, ekonomi global masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk perlambatan pertumbuhan. Berdasarkan laporan World Economic Outlook (WEO) yang diterbitkan IMF pada Oktober 2024, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mencapai 3,2% pada 2025, sedikit meningkat dibandingkan proyeksi 3,1% pada 2024. Beberapa risiko utama yang dapat memengaruhi kondisi ekonomi global meliputi pelemahan ekonomi di China dan Amerika Serikat, ketegangan geopolitik yang terus berlanjut, dampak perubahan iklim, serta ketidakpastian terkait kebijakan suku bunga global.

Pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 2025-2029 menargetkan pertumbuhan ekonomi yang cukup optimis, yaitu sebesar 8 persen. Pada tahun 2026 melalui kebijakan hilirisasi industri berkelanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan sebesar 5,2%-5,8%. Beberapa kerangka ekonomi makro lainnya yang menjadi asumsi tahun 2026 sesuai dengan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2026 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, yaitu:

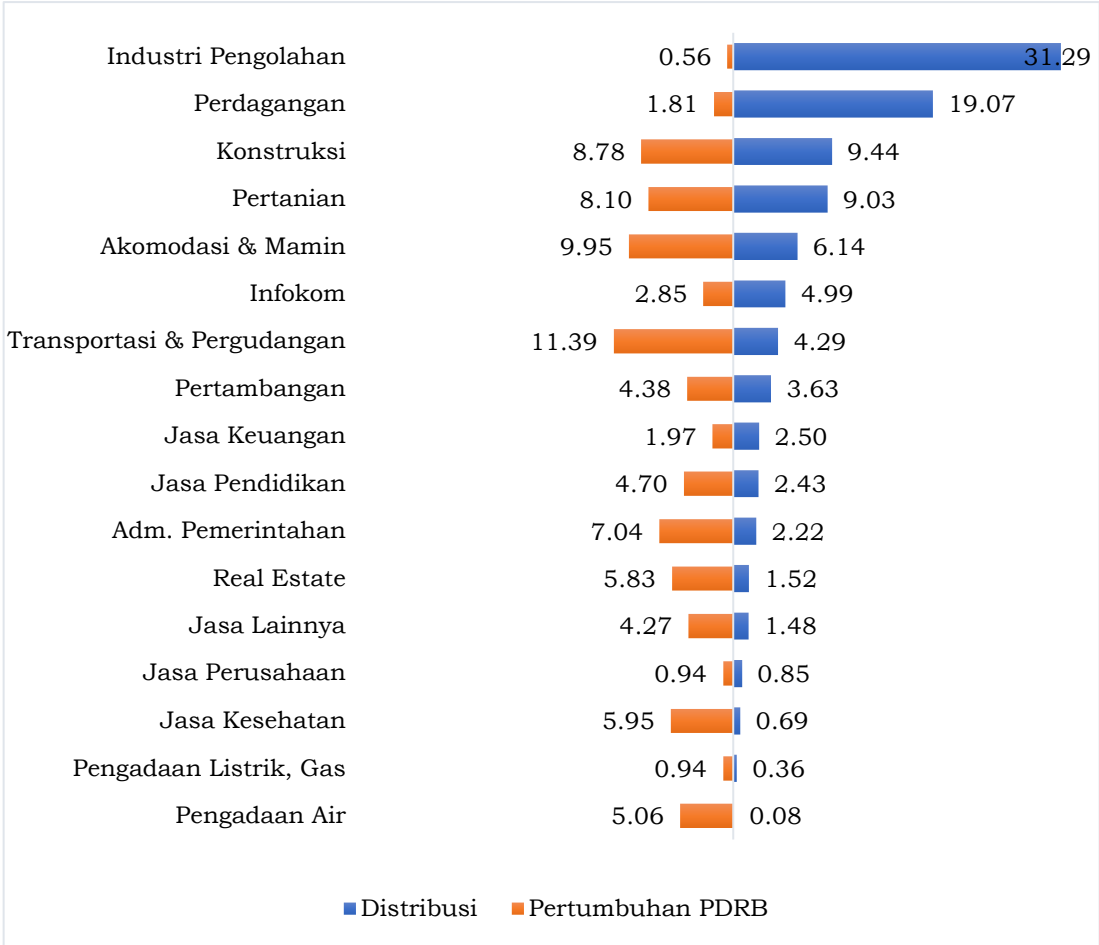
1. Nilai tukar rupiah rata-rata pada tahun 2026 berpotensi bergerak dalam kisaran Rp16.500 - Rp16.900 per USD.
2. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun akan bergerak pada kisaran 6,6 – 7,2 persen.
3. Tingkat inflasi diupayakan bergerak pada sasaran inflasi 1,5-3,5 persen.
4. Harga minyak mentah dunia berada dalam kisaran USD60 - USD80 per barel.
5. Lifting (volume produksi migas yang siap dijual) migas diproyeksikan untuk minyak sebesar 600-605 ribu barel per hari (rbph) dan untuk gas sebesar 953-1.017 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph).

3.1.2 Telaah Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur

Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2024, yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, mencapai Rp3.168,29 triliun. Sementara itu, PDRB per kapita tercatat sebesar Rp75,77 juta.

Secara tahunan, ekonomi Jawa Timur tumbuh sebesar 4,93% (c-to-c). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 9,50%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,49%.

Gambar 3.2
Distribusi dan Pertumbuhan PDRB Jawa Timur 2024



Sumber: BPS Jawa Timur, 2024

Secara y-on-y semua kategori mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Administrasi Pemerintahan seiring meningkatnya belanja pegawai baik APBN maupun APBD. Aktivitas Masyarakat yang meningkat di akhir tahun mendorong meningkatnya kinerja Jasa Lainnya, Jasa Perusahaan, serta Transportasi dan Pergudangan. Secara struktural, sektor Industri Pengolahan masih menjadi kontributor utama dalam perekonomian Jawa Timur pada Triwulan IV-2024 dengan kontribusi sebesar 31,29%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, ekonomi Jawa Timur didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT), yang berkontribusi sebesar 60,96%.

Pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh 5,27% sampai 5,63%. Sektor penopang perekonomian Jawa Timur diproyeksikan masih didominasi oleh tiga sektor utama yaitu industri pengolahan, perdagangan dan pertanian. Sedangkan Tahun 2026, pertumbuhan

ekonomi Jawa Timur ditargetkan sebesar 5,15%-5,30%. Beberapa upaya penguatan ekonomi Jawa Timur yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan untuk mendukung aktivitas ekonomi, pertumbuhan pusat ekonomi baru serta kawasan ekonomi khusus;
2. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah untuk mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat;
3. Mendorong ekspor dan optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan baik agro maupun non agro;
4. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui standardisasi dan desain produk;
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan;
6. Penguatan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, serta perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi;
7. Penguatan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan;
8. Menjaga iklim investasi melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi;
9. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/*green economy* yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan ramah lingkungan serta inklusif secara sosial;
10. Penguatan ekonomi lokal melalui upaya kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru di pedesaan.

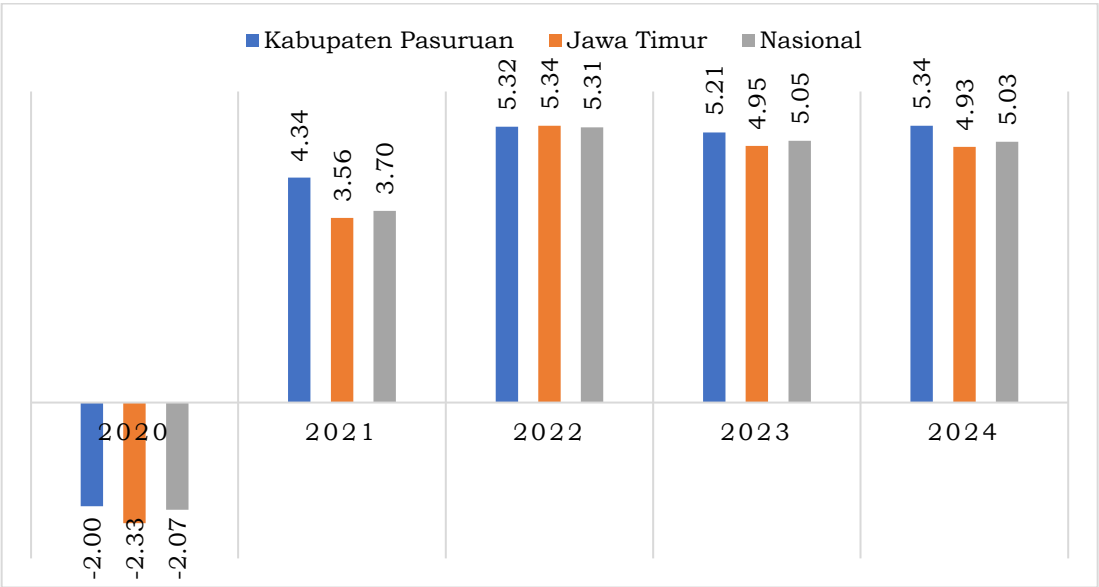
3.1.3 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Tahun 2026

Prakiraan ekonomi tahun 2025 tidak akan terlepas dari kondisi ekonomi tahun 2024 dan kebijakan ekonomi daerah pada tahun 2026. Beberapa hal yang termasuk dalam indikator makro ekonomi diantaranya, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, Tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan dan indeks gini.

3.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 tercatat sebesar 5,34 persen. Dari sisi produksi, sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan, dengan kenaikan sebesar 10,12 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terbesar terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga NonProfit yang Melayani Rumah Tangga, dengan kenaikan sebesar 13,34 persen.

Gambar 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Timur, dan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kab. Pasuruan, 2025

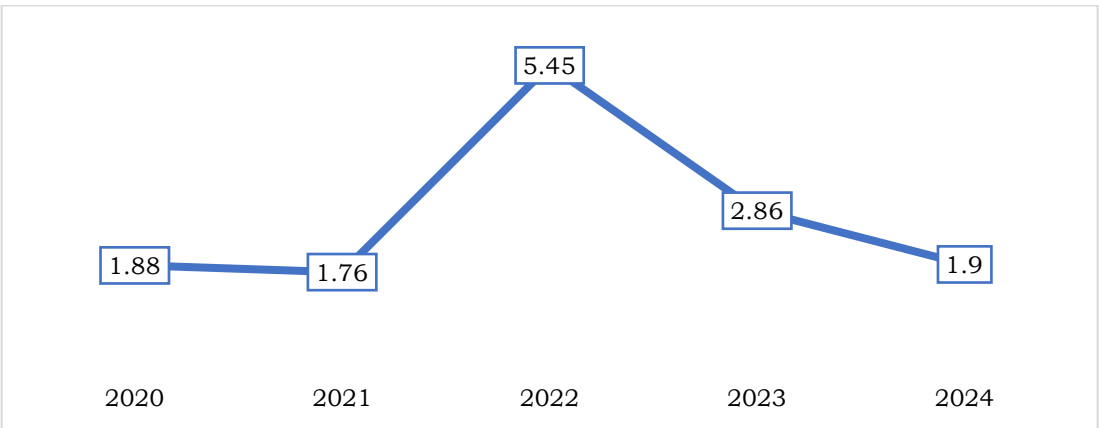
Struktur perekonomian Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 masih didominasi oleh sektor Industri Pengolahan, yang memberikan kontribusi sebesar 60,65 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran, dominasi terdapat pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), dengan kontribusi sebesar 60,56 persen.

Kontribusi terbesar sektor Industri Pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 3,30 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, penyumbang terbesar Komponen PK-RT, memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 3,04 persen.

3.1.3.2 Laju Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara.

Gambar 3.4 Laju Inflasi Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kab. Pasuruan, 2025
Ket : Inflasi Kabupaten Pasuruan menggunakan pendekatan Inflasi Kota Probolinggo

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, inflasi Kabupaten Pasuruan cukup stabil. Peningkatan inflasi yang cukup tajam pada tahun 2022, berhasil diturunkan pada tahun 2023. Inflasi Kabupaten Pasuruan tahun 2022 sebesar 5,45 persen turun menjadi 2.86 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2022 dan 2023, inflasi Kabupaten Pasuruan dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti fluktuasi harga energi global dan ketegangan pasar internasional yang berdampak pada harga barang-barang impor. Inflasi pada tahun-tahun ini cenderung meningkat, terutama dipicu oleh harga pangan dan energi yang semakin tinggi. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya untuk mengimplementasikan kebijakan pengendalian inflasi melalui stabilisasi harga pangan dan peningkatan pasokan barang.

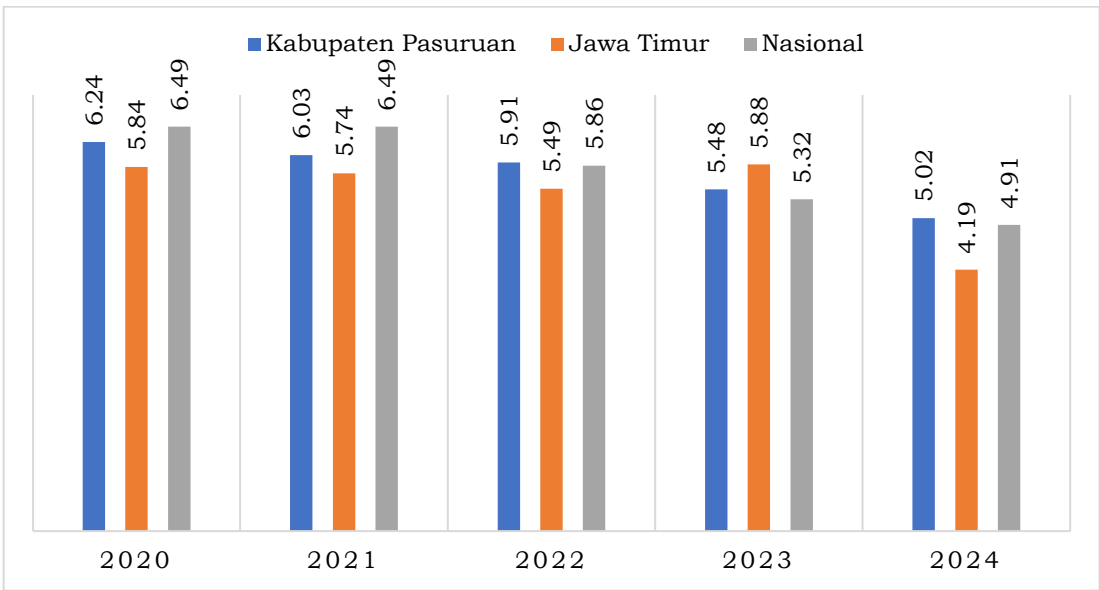
Pada tahun 2024, inflasi Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan setelah berbagai kebijakan untuk menanggulangi

ketidakstabilan harga mulai membuahkan hasil. Upaya diversifikasi sumber pasokan barang lokal, peningkatan kapasitas produksi sektor pertanian dan industri pengolahan, serta penguatan program ketahanan pangan di tingkat daerah berhasil menjaga inflasi dalam kisaran yang terkendali. Meskipun ada kenaikan harga barang-barang tertentu, sektor-sektor ekonomi utama di Kabupaten Pasuruan mulai beradaptasi dengan kondisi pasar global. Tingkat inflasi pada tahun 2024 sebesar 1,90 persen.

3.1.3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah penduduk yang bekerja mencapai 929,47 ribu orang. Sektor jasa merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak, yakni 40,97 persen, diikuti oleh sektor manufaktur yang menyerap 33,89 persen tenaga kerja. Sektor pertanian memiliki porsi tenaga kerja terkecil, yaitu sebesar 25,13 persen. Selain itu, sebanyak 43,13 persen penduduk bekerja di sektor formal.

Gambar 3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2025

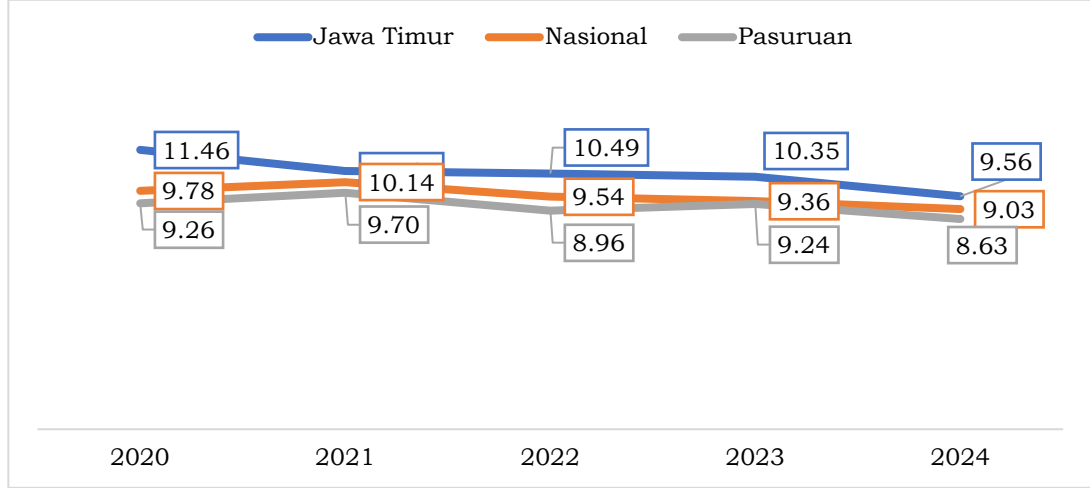
Secara keseluruhan, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan secara bertahap antara tahun 2020 hingga 2024. Faktor-faktor pemulihan ekonomi pasca-pandemi, kebijakan pemerintah yang mendukung penciptaan lapangan kerja, dan program pengembangan keterampilan menjadi kunci utama dalam mengatasi permasalahan pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2024 berkurang menjadi 5,02 persen atau turun 0,46 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini berarti hanya terdapat sekitar 5 orang penganggur dari setiap 100 orang angkatan kerja. Pada Agustus 2024, sebanyak 56,87 persen penduduk Kabupaten Pasuruan bekerja di sektor informal, sementara 43,13 persen bekerja di sektor formal. Persentase penduduk yang bekerja di sektor informal pada Agustus 2024 mengalami kenaikan sebesar 3,91 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023. Peningkatan jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal ini sejalan dengan bertambahnya jumlah pekerja dengan status pekerja bebas.

3.1.3.4 Kemiskinan

Pada Maret 2024, Garis Kemiskinan Kabupaten Pasuruan tercatat sebesar Rp450.088,00 per kapita per bulan. Jika dibandingkan dengan Maret 2023, angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp20.464,00 per kapita per bulan, dari sebelumnya Rp429.624,00 per kapita per bulan, yang berarti meningkat sebesar 4,76 persen. Garis kemiskinan ini menggambarkan jumlah uang minimum yang dibutuhkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar agar tidak dikategorikan sebagai miskin.

Gambar 3.6 Angka Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2025

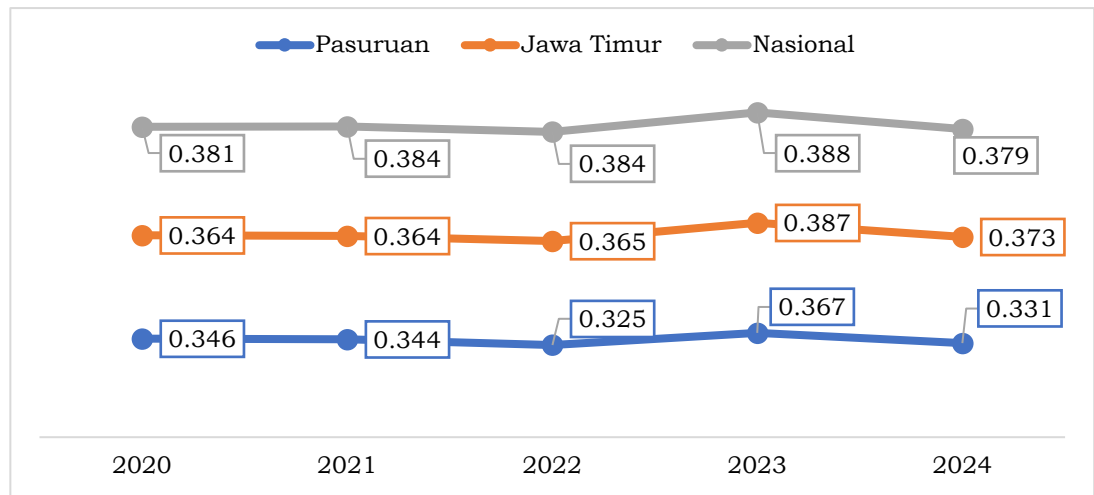
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan pada Maret 2024 sebesar 8,63 persen, turun 0,61 persen poin terhadap Maret 2023 yang sebesar 9,24 persen. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan pada Maret 2024 sebesar 144,84 ribu orang,

berkurang 9,25 ribu orang terhadap Maret 2023 yang sebesar 154,09 ribu orang. Masalah kemiskinan sebetulnya tidak hanya berkaitan dengan jumlah dan persentase penduduk miskin. Namun, aspek lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang terjadi. Kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin diharapkan juga dapat menurunkan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada periode 2023-2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan sebesar 0,13 poin, dari 1,22 pada tahun 2023 menjadi 1,09 pada tahun 2024. Hal yang sama juga terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), yang turun dari 0,26 pada tahun 2023 menjadi 0,21 pada tahun 2024, atau berkurang sebesar 0,05 poin.

3.1.3.4 Indeks Gini

Indeks Gini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan atau distribusi kekayaan dalam suatu wilayah. Angka Rasio Gini yang semakin tinggi menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin besar, sementara angka yang lebih rendah mengindikasikan distribusi pendapatan yang lebih merata. Di Kabupaten Pasuruan, perkembangan Rasio Gini dari tahun 2020 hingga 2024 mencerminkan dinamika dalam distribusi pendapatan masyarakat dan upaya pemerintah daerah dalam mengurangi ketimpangan ekonomi.

Gambar 3.7 Indeks Gini Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2025

Secara keseluruhan, meskipun Indeks Gini Kabupaten Pasuruan mengalami fluktuasi dalam periode 2020-2024, terdapat tren penurunan ketimpangan yang menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki distribusi kekayaan dan pendapatan. Dengan langkah-langkah yang terus diperkuat di sektor-sektor kritis, diharapkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Pasuruan dapat terus berkurang di masa depan. Pada tahun 2024, Kabupaten Pasuruan berhasil menunjukkan penurunan yang signifikan, yang mencerminkan kemajuan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan merata, serta keberhasilan dalam mendiversifikasi sumber pendapatan masyarakat, turut berkontribusi pada pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi. Program-program pemberdayaan masyarakat, seperti peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penguatan ekonomi lokal, mulai menunjukkan hasil yang positif dalam hal pemerataan pendapatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, maka indeks gini tahun 2024 berhasil diturunkan menjadi sebesar 0,331. Indeks gini kabupaten Pasuruan tahun 2024 lebih baik dari indeks gini Nasional (0,379) dan Provinsi Jawa Timur (0,372).

Berdasarkan uraian kondisi ekonomi makro daerah melalui beberapa indikator kinerja makro di atas, dapat disampaikan asumsi/prakiraan kondisi ekonomi makro untuk tahun 2025 dan 2026 sebagai berikut:

No	Indikator Ekonomi Makro	Proyeksi 2025	Prakiraan 2026
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,35-5,85	5,20-5,85
2	Inflasi (%)	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,00-4,70	5,37-4,60
4	Tingkat Kemiskinan (%)	8,63-8,25	8,12-7,87
5	Rasio Gini	0,331-0,315	0,313-0,353

Prakiraan indikator ekonomi makro tahun 2026 mengikuti arahan dan diselaraskan oleh Provinsi Jawa Timur melalui rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan dan berdasarkan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026. Keselarasan target indikator

ekonomi makro dimaksudkan agar target ekonomi makro yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dapat tercapai.

3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Pasuruan

Kebijakan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2026 diarahkan untuk mendukung kebijakan/program prioritas Nasional/Pemerintah Pusat.

1. **Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan** (sebagai bentuk dukungan terhadap arahan pengembangan wilayah dalam RPJMN tahun 2025-2029, yaitu sebagai bagian dari Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Tapal Kuda).

- Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi sesuai dengan amanat Inpres Nomor 2 tahun 2025.
- Penetapan perkada tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) sebagai strategi pencapaian stabilitas pangan dan kecukupan gizi.
- Pemutakhiran data pada lahan baku sawah (LBS)/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai bahan masukan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Pemutakhiran ketersediaan, distribusi, dan pemanfaatan pangan serta peta ketahanan dan kerentanan pangan sebagai masukan dalam penyusunan regulasi pangan dan regulasi cadangan pangan pemerintah yang belum ditetapkan.
- Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan melalui pemanfaatan pekarangan di Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 100.3.3.2/550/HK/424.013/2025.
- Peningkatan produktivitas pangan terutama jenis pangan pokok tertentu (beras, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula, minyak goreng dan ikan) melalui perencanaan pendekatan berbasis kawasan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan modern.
- Pengembangan varietas padi jelita sebagai varietas padi unggul khas Kabupaten Pasuruan.

- Penguatan transportasi (jalan dan sarana transportasi) untuk meningkatkan konektivitas menuju/dari kawasan dan sentra produksi komoditas pangan.

2. **Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.**

- Fasilitasi pendampingan pengisian kelengkapan berkas ke notaris untuk pembentukan badan hukum sejumlah 365 koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- Sosialisasi pendampingan perizinan di 24 (dua puluh empat) kecamatan.

3. **Program Makan Bergizi Gratis**

- Pengoperasian 1 (satu) SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) Yayasan Anak Sekolah Indonesia Makmur yang berlokasi Kecamatan Pandaan dengan pola mitra mandiri (bangunan dan alat-alat dapur disediakan oleh mitra, sedangkan ketua SPPG, ahli gizi, operasional, dan bahan disiapkan oleh BGN).
- Pengusulan lahan untuk pendirian SPPG berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor: 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

4. **Penurunan Stunting**

- Percepatan penurunan stunting dengan Perbup Nomor 130 Tahun 2021).
- Gerakan Keluarga Bersih Bersama Sadar Stunting Menuju Masyarakat Sejahtera dengan Perbup Nomor 2 Tahun 2022).
- Penurunan stunting dilaksanakan secara integratif dan holistik mulai hulu sampai hilir, yaitu: peningkatan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; pemenuhan asupan gizi; perbaikan pola asuh keluarga; peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; peningkatan akses air minum dan sanitasi; serta peningkatan kesadaran publik dan perubahan perilaku kunci yang berpengaruh pada faktor risiko stunting.

5. **Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** (sebagai bentuk dukungan terhadap arahan kewilayahan dalam RPJMN 2025-2029, yaitu bagian dari Kawasan Pariwisata dan Ekonomi kreatif unggulan Bromo – Tengger – Semeru)

- Pengembangan sistem pendidikan, pelatihan dan ketenagakerjaan yang mendukung penciptaan dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif.
- Penciptaan ekosistem pengembangan kota kreatif yang kondusif, antara lain dengan membentuk Pasuruan Creative Network (Pancene) sebagai sebuah lembaga yang menjadi wadah para pelaku ekonomi kreatif untuk berjejaring saling bersinergi dan berkolaborasi dengan unsur stakeholder.
- Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual untuk memberikan jaminan/perlindungan bagi para pelaku kreatif yang didukung program dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pendukung pengembangan kreatifitas masyarakat dengan menyediakan jaringan WiFi di area publik.
- Sinergitas antar penta helix untuk sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan persyaratan standardisasi dan praktik usaha yang baik (best practice) dari usaha ekonomi kreatif.
- Penguatan transportasi (jalan dan sarana transportasi) untuk meningkatkan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
- Peningkatan SDM pengelola dan pelaku kepariwisataan dan ekonomi kreatif untuk menciptakan daya saing yang lebih kuat.

Selain selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat, kebijakan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2026 juga diarahkan untuk mendukung tema pembangunan RKPD tahun 2026, yaitu “Hilirisasi dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah melalui Integrasi dan Kolaborasi Lintas Sektoral untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”. Tema tersebut didukung dengan 4 (empat) Prioritas Pembangunan Daerah (PPD):

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing.
2. Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri/usaha pengolahan dan ketahanan pangan dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas
3. Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil.
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dalam struktur APBD dibagi menjadi tiga kategori yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Jenis pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal pajak daerah untuk lingkup pemerintah kabupaten/kota terdiri 11 jenis penerimaan, yang meliputi: Pajak hotel; Pajak restoran; Pajak hiburan; Pajak reklame; Pajak penerangan jalan; Pajak mineral bukan logam dan batuan; Pajak parkir; Pajak air tanah; Pajak sarang burung walet; Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan Pajak bea

perolehan atas tanah dan bangunan. Jenis retribusi daerah yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, dan masih memungkinkan lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Obyek retribusi daerah tersebut meliputi: Retribusi jasa umum; Retribusi jasa usaha; dan Retribusi perizinan tertentu.

Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023-2027

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi 2023	Realisasi 2024	APBD 2025	Proyeksi 2026	Proyeksi 2027
4	PENDAPATAN	3.658.922.547.419,46	3.796.899.263.556,28	3.976.990.626.695,00	3.499.607.689.203,58	3.540.930.158.552,42
4.1	Pendapatan Asli Daerah	825.315.022.145,46	905.138.895.757,28	1.075.982.805.145,00	1.129.742.018.703,58	1.187.322.753.552,42
4.1.01	Pajak daerah	503.302.286.143,93	518.528.935.676,74	630.044.228.203,00	653.283.255.372,58	675.184.347.689,74
4.1.02	Retribusi daerah	39.386.573.646,61	372.584.126.012,22	336.254.392.311,00	463.060.277.229,00	412.324.915.010,68
4.1.03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	4.982.159.407,00	5.137.050.127,00	4.750.000.000,00	4.934.775.000,00	5.126.737.748,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	277.644.002.947,92	8.888.783.941,32	104.934.184.631,00	8.463.711.102,00	94.686.753.104,00
4.2	Pendapatan Transfer	2.762.461.968.553,00	2.813.236.382.551,00	2.901.007.821.550,00	2.369.865.670.500,00	2.353.607.405.000,00
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	2.453.704.926.353,00	2.589.747.556.066,00	2.741.964.792.000,00	2.212.225.861.000,00	2.213.776.111.000,00
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	308.757.042.200,00	223.488.826.485,00	159.043.029.550,00	157.639.809.500,00	352.583.801.000,00
4.2.03	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	71.145.556.721,00	78.523.985.248,00	0.00	0.00	0.00

Sumber: BPKPD Kabupaten Pasuruan, data diolah

Realisasi dan Proyeksi pendapatan daerah Tahun 2025 dan Tahun 2026 mengalami penurunan, Rata-rata penurunan tertinggi berasal dari Pendapatan Transfer sebesar Rp. 2.369.865.670.500,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0.00, Sedangkan kontribusi terbesar terhadap total Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Transfer Pusat yang pada tahun 2025 sebesar Rp.2.741.964.792.000,00 pada Tahun 2026 di proyeksi Rp.2.212.225.861.000,00 turun Rp. 529.738.931.000,00 dikarenakan Proyeksi Pendapatan dari Dana Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dimasukkan.

Pendapatan daerah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2026 direncanakan/diproyeksikan sebesar Rp. 3.499.607.689.203,58 Proyeksi tersebut berdasarkan asumsi kondisi makro daerah yang disajikan pada subbab 3.1.3. Asumsi tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi tahun 2026 bergerak antara 5,20-5,85% dan inflasi dikendalikan pada rentang 1,5-3,5%. Kondisi daerah di tahun 2026 tidak terlepas dari kondisi nasional sesuai dengan asumsi-asumsi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam dokumen KEM-PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal).

Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk memastikan ketersediaan dana pembangunan yang berasal dari berbagai sumber yang berkelanjutan dan mencukupi. Oleh karena itu, kebijakan umum pendapatan daerah difokuskan pada peningkatan penerimaan melalui beberapa langkah, yaitu:

1. Mengoptimalkan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kondisi setempat;
2. Memperkuat basis data dan sistem informasi pendapatan daerah, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) pengelola pendapatan daerah;
3. Meningkatkan intensitas hubungan antara perimbangan keuangan Pusat dan Daerah secara adil dan proporsional, berdasarkan potensi dan pemerataan;

4. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap akan menjadi sumber utama pendapatan, sehingga dalam kondisi normal, kebijakan Pendapatan Daerah akan difokuskan pada upaya untuk meningkatkan setiap komponen PAD. Oleh karena itu, perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, seperti pajak hotel dan restoran, peningkatan kinerja retribusi rumah sakit umum daerah dan pasar, pajak reklame, serta pengelolaan aset daerah yang lebih baik.

3.2.1.1 Sumber Pendanaan Alternatif/Kreatif

Berdasarkan rincian sumber pendapatan daerah yang diuraikan sebelumnya menggambarkan bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Pasuruan masih rendah. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah berada pada kisaran 24% di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan belanja untuk pendanaan pelaksanaan program pembangunan daerah masih sangat terbatas dan masih bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat. Selain itu sebagian besar jenis pendapatan daerah yang diterima dalam penggunaannya sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu pendanaan alternatif/kreatif perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah di Kabupaten Pasuruan. Pemilihan sumber pendanaan alternatif/kreatif tersebut tentu saja didasari dengan analisis yang mendalam dan perencanaan yang matang. Beberapa sumber pendanaan alternatif/kreatif yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1. Kemitraan dengan Sektor Swasta
 - a. Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPBU).
Skema ini memungkinkan swasta/badan usaha untuk berkontribusi dalam pembiayaan, pembangunan, dan pengelolaan infrastruktur publik. Melalui KPBU, kegiatan pembangunan skala besar seperti jalan, sistem air bersih, dan fasilitas kesehatan dapat terwujud tanpa sepenuhnya membebani APBD.

- b. Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha.

Dunia usaha diberikan peran yang lebih besar dalam pembangunan di daerah khususnya dalam pendanaan kegiatan sosial dan pembangunan infrastruktur skala kecil hingga menengah. Hal ini dapat dilaksanakan dengan mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang TJSL yang telah ditetapkan tahun 2025.

- c. Sponsorship dan Branding.

Kerja sama sponsor pada kegiatan daerah seperti festival budaya, promosi pariwisata, atau event olahraga yang dapat memberikan nilai tambah bagi dunia usaha sekaligus memperkuat identitas daerah.

- 2. Pendanaan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Non-Pemerintah.

Kerja sama dengan NGO, yayasan lokal dan internasional untuk pembiayaan program sosial, lingkungan, pemberdayaan perempuan, dan penguatan komunitas.

- 3. Dukungan Lembaga Donor Internasional.

Mengakses hibah, bantuan teknis, dan pembiayaan dari lembaga seperti UNDP, World Bank, ADB, JICA, GIZ, serta negara-negara mitra pembangunan untuk mendukung program yang relevan dengan prioritas pembangunan daerah.

- 4. Partisipasi Masyarakat.

- a. Gotong Royong dan Swadaya Lokal.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dasar melalui kontribusi tenaga, material, atau dana swadaya.

- b. Donasi Publik.

Penggalangan dana masyarakat melalui platform daring untuk program sosial, pendidikan, atau tanggap bencana berbasis komunitas.

- 5. Pemanfaatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Mendorong kinerja BUMD agar mampu menghasilkan laba dan berkontribusi pada pendanaan program pembangunan strategis, serta mengembangkan unit usaha berbasis potensi lokal.

Agar sumber pendanaan alternatif dapat memberikan dampak nyata terhadap percepatan pembangunan daerah, maka diperlukan strategi optimalisasi dan tata kelola yang komprehensif. Strategi tersebut meliputi:

- Pembentukan Unit Khusus Pengelola Kemitraan dan Pendanaan Alternatif, yang bertugas menjalin jejaring, menyusun proposal, mengelola kontrak, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana.
- Penyusunan Pedoman Teknis dan SOP, yang menjelaskan alur perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi program yang bersumber dari pendanaan non-APBN dan non-APBD.
- Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah, khususnya dalam penulisan proposal hibah, manajemen proyek berbasis hasil (result-based management), serta komunikasi dengan mitra donor dan swasta.
- Penciptaan Forum Kolaborasi Multipihak (Pentahelix), melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media untuk membangun sinergi dan inovasi program pembangunan.
- Pemetaan Potensi Proyek Kolaboratif, yang menarik bagi sektor swasta dan donor, khususnya pada sektor ekonomi hijau, digitalisasi pelayanan publik, pengelolaan sampah, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan.

Keberhasilan implementasi strategi pemanfaatan sumber pendanaan alternatif/kreatif dapat diukur melalui beberapa indikator berikut:

- Jumlah dan nilai pendanaan pembangunan yang bersumber dari pendanaan alternatif setiap tahunnya.
- Jumlah kerja sama aktif yang terjalin dengan sektor swasta, NGO, dan lembaga donor.
- Kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah dan pelaksanaan program strategis.

- Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembiayaan berbasis gotong royong atau crowdfunding.
- Tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendanaan alternatif/kreatif berdasarkan hasil evaluasi program.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian layanan umum. Otonomi daerah menuntut daerah untuk bisa mengelola secara efisien dan efektif belanja daerah untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Saat ini pemerintah mulai menerapkan program anggaran berbasis kinerja, sebagai upaya efektivitas kinerja pemerintah dan mengalokasikan belanja secara efisien serta merencanakan anggaran secara transparan dan akuntabilitas. Pendekatan anggaran kinerja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023-2027

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi 2023	Realisasi 2024	APBD 2025	Proyeksi 2026	Proyeksi 2027
5	BELANJA	3.733.513.101.278,00	3.746.327.695.687,55	4.346.062.666.981,00	3.948.837.091.813,90	3.537.430.158.552,42
5.1	Belanja Operasi	2.674.895.675.790,00	2.766.874.460.869,55	3.272.747.352.671,05	2.713.430.329.615,56	2.420.018.390.630,44
5.1.01	Belanja Pegawai	1.229.526.411.903,00	1.327.586.999.496,00	1.822.952.221.477,63	1.674.430.683.267,51	1.503.963.916.062,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.219.035.071.080,00	1.217.142.324.381,55	1.309.039.242.716,42	946.612.582.972,05	888.272.354.568,44
5.1.05	Belanja Hibah	208.154.192.807,00	212.732.536.992,00	138.665.288.477,00	90.467.063.376,00	25.782.120.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	18.180.000.000,00	9.412.600.000,00	2.090.600.000,00	1.920.000.000,00	2.000.000.000,00
5.2	Belanja Modal	437.513.395.687,00	331.147.189.110,00	385.656.047.224,95	478.427.202.058,48	410.637.012.500,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	0	0	14.945.931.200,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.502.945.421,00	128.780.587.363,00	208.527.449.727,81	125.614.832.117,91	194.667.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	133.147.504.812,00	61.282.725.362,00	67.424.024.134,65	220.772.037.139,00	112.639.625.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	160.878.740.804,00	139.527.507.686,00	107.828.254.312,49	116.774.801.601,57	101.643.510.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.984.204.650,00	1.243.368.699,00	1.695.319.050,00	119.600.000,00	1.583.377.500,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya		313.000.000,00	181.000.000,00	200.000.000,00	103.500.000,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	3.411.447.525,00	6.874.196.287,00	40.000.000.000,00	30.000.000.000,00	35.000.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	617.692.582.276,00	641.431.849.421,00	647.659.267.085,00	726.979.560.139,86	671.774.755.421,97
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	47.007.207.368,00	57.651.190.042,00	54.674.419.405,00	68.827.488.699,86	71.198.570.801,97
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	570.685.374.908,00	583.780.659.379,00	592.984.847.680,00	658.152.071.440,00	600.576.184.620

Sumber: BPKPD Kabupaten Pasuruan, data diolah

Berdasarkan Proyeksi belanja tahun 2026 mengalami kenaikan pada belanja operasi sebesar Rp.559.317.023.055,49 dari tahun 2025, belanja Tidak terduga sebesar Rp. 10.000.000.000,00, dari tahun 2025.

Perhitungan proyeksi belanja Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun 2026 diperkirakan mencapai angka Rp. 3.948.837.091.813,90 Beberapa asumsi yang mendasari proyeksi tersebut antara lain: (1) tidak memperhitungkan belanja yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK); (2) memperhatikan kebutuhan belanja untuk 33 (tiga puluh tiga) program prioritas Bupati/Wakil Bupati; (3) kemampuan/potensi perolehan pendapatan daerah, khususnya PAD; dan (4) asumsi kondisi makro daerah tahun 2026.

Dalam rangka memenuhi implementasi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang memberikan amanat “*mandatory spending*” pada beberapa jenis belanja dan arahan Pemerintah Pusat terkait penggunaan anggaran yang tidak bersifat seremonial maka beberapa kebijakan penganggaran belanja daerah adalah sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan efisiensi belanja daerah dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan;
- (2) Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja (*performance based*), sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama Kabupaten Pasuruan pada tahun 2026;
- (3) Belanja daerah difokuskan dapat memenuhi *mandatory spending* seperti pendidikan 20% dan kesehatan 10%, proporsi belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja daerah, dan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40%;
- (4) Belanja daerah diarahkan untuk menyelenggarakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM);

- (5) Belanja daerah perlu diarahkan untuk prioritas penanganan stunting, makan bergizi gratis, dan program asta cita, serta kebijakan Pemerintah Pusat lainnya;
- (6) Belanja daerah diarahkan untuk membiayai program prioritas Bupati dan Wakil Bupati (33 program prioritas).

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah pada intinya adalah bagaimana menyeimbangkan antara pendapatan daerah dan belanja daerah, apakah anggaran surplus atau defisit. Pada Tahun 2026, APBD Kabupaten Pasuruan diproyeksikan mengalami defisit. Untuk menutup defisit anggaran ini digunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan sumber pembiayaan lainnya. SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, karena SiLPA sebagai salah satu tolok ukur tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Semakin kecil SiLPA menunjukkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik. Namun demikian, nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan tanpa meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah.

Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023-2027

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi 2023	Realisasi 2024	APBD 2025	Proyeksi 2026	Proyeksi 2027
3	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	274.574.278.565,18	199.983.724.706,64	370.772.040.286,00	452.729.402.610,32	0
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	274.574.278.565,18	199.983.724.706,64	370.772.040.286,00	452.729.402.610,32	0
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya	0	0	0	0	0
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	1.700.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
3.2.1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0	0	0
3.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	0	0	1.700.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
3.2.3.	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
3.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	0	0	0	0	0

Sumber: BPKPD Kabupaten Pasuruan, diolah

Dalam rangka mewujudkan pembiayaan daerah lebih terarah, maka arah kebijakan pembiayaan yang diambil untuk tahun 2026, yaitu:

- (1) Pengelolaan pembiayaan daerah diarahkan untuk menutupi belanja defisit yang dianggarkan.
- (2) Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk pengelolaan SiLPA dan diharapkan SiLPA akan menjadi bagian dari pendapatan pada periode anggaran berikutnya;
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk penyertaan modal daerah.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029. Sasaran dan prioritas pembangunan pada RKPD harus selaras dengan penahapan RPJMD pada tahun berkenaan. Oleh karena itu sebelum membahas sasaran dan prioritas pembangunan daerah maka disajikan terlebih dahulu tentang tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, maka terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2045 yang diemban Kabupaten Pasuruan dalam jangka waktu 20 tahun sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 4 tahun 2024. Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasuruan adalah: **“Kabupaten Pasuruan Cemerlang 2045: Maju, Mandiri, Berkeadilan, dan Berkelanjutan”**.

Visi jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045 tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal Kabupaten Pasuruan yang sangat dinamis dan dapat mengalami pergeseran-pergeseran pada periode jangka menengah (lima tahunan)-nya. Oleh karena itu, penyusunan Visi Jangka Menengah, dalam hal ini periode 2025-2029, didasarkan pada Visi Jangka Panjang dan tetap mencerminkan kondisi daerah dan masyarakat terkini.

Mengacu pada hasil telaah pada Visi RPJPD Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2045, permasalahan pembangunan, dan isu strategis pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029, maka disusun sebuah visi Pembangunan jangka menengah. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 adalah :

Gambar 4.1 Visi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan 2025-2029



Visi tersebut mengandung tiga pokok visi yang merupakan gambaran atas kondisi Kabupaten Pasuruan yang diharapkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD, yaitu “**Maju**”, “**Sejahtera**”, dan “**Berkeadilan**”. Secara substansi, penjelasan dari ketiga pokok visi antara lain sebagai berikut:

Gambar 4.2
Pokok Visi RPJMD Kabupaten Pasuruan 2025-2029



Sumber: RPJMD Kab. Pasuruan 2025-2029

Pokok visi “Maju”, mengandung makna dan sekaligus spirit bahwa Kabupaten Pasuruan ke depan harus mengalami “Kemajuan di Segala Bidang”. Kemajuan tersebut dicerminkan dengan semakin maju dan tingginya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, kesempatan kerja yang merata dan layanan publik lainnya yang berkualitas, sehingga terbentuk sumber daya manusia yang unggul, beriman, dan berbudaya. Berbagai kemajuan tersebut didukung dengan layanan infrastruktur dan pondasi tata kelola pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan

pembangunan (*Good Governance*). Kondisi ini juga didukung dengan terjalinnya kemitraan **Hexahelix**, yaitu konsep kolaborasi yang melibatkan enam pihak, yang terdiri atas pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, lingkungan hidup, dan media massa. Konsep ini akan menjadi stimulus berbagai sektor, seperti inovasi pelayanan publik, pengembangan pariwisata, dan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan. Implementasi konsep ini juga mendorong adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi guna mengoptimalkan kolaborasi dalam membangun daerah. Pelayanan publik pun telah berbasis teknologi informasi (Digital) yang didukung oleh aparatur pemerintahan yang lebih adaptif, profesional dan humanis dalam menghadapi kondisi/kebutuhan masyarakat dan daerah yang berubah cepat (*Volatile*), tidak pasti (*Uncertain*), semakin kompleks (*Complex*), dan tidak jelas (*Ambigüe*). Pada sisi lain, pokok visi “maju” juga bermakna bahwa pondasi cara berpikir dan berperilaku sumberdaya manusia Kabupaten Pasuruan yang maju, yaitu sumberdaya manusia yang beriman dan berbudaya serta masyarakat yang saleh yang tercermin dari kondisi masyarakat yang tertib, tentram dan harmonis.

Pokok visi **“Sejahtera”** menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari perekonomian daerah yang kuat dengan tingkat pendapatan perkapita masyarakat terus meningkat, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan dan kesehatan yang memadai. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam pokok visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (*growth*) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (*equality*). Hal ini tercermin dari peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pembangunan yang merata dan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Perekonomian Kabupaten Pasuruan pun mulai kuat dengan produk asli Pasuruan yang kompetitif dan situasi yang kondusif untuk berusaha maupun berinvestasi. Dukungan kuantitas

dan kualitas infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan pendukung pembangunan ekonomi dan sosial pun telah cukup tinggi.

Pokok visi **“Berkeadilan”** bermakna kondisi Kabupaten Pasuruan dengan ketimpangan sosial, ekonomi dan wilayah yang semakin mengecil. Pembangunan yang berpihak kepada kelompok masyarakat atau wilayah marginal terlihat jelas, sehingga kesetaraan gender dan perekonomian yang inklusif juga meningkat signifikan. Keadilan pembangunan antar generasi pun terlihat dengan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan. Pokok visi ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun juga dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan tanpa terkecuali (*No One Left Behind*).

Untuk menunjang tercapainya Visi Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029, maka Misi pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029 juga harus disusun sebagai satu kesatuan tindakan pembangunan. Pada periode RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029 terdapat 5 (lima) misi pembangunan yaitu sebagai berikut:



Misi 1: Mendukung dan Mendorong Kualitas Keimanan dan Kesalehan Masyarakat.

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “maju” dan “berkeadilan”. Pembangunan ketahanan sosial, khususnya pada penciptaan masyarakat yang rukun, tertib, tentram dan terlindungi menjadi fokus dalam penyelenggaraan misi ini. Pembangunan budaya dan kesetaraan gender juga merupakan fokus lainnya dari misi ini.

Misi 2: Memperkecil Ketimpangan dan Kesenjangan Sosial Ekonomi melalui Program Tepat Guna dan Tepat Sasaran.

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “berkeadilan” dan “sejahtera”. Penyelenggaraannya dilakukan melalui pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta keberpihakan pada kelompok masyarakat dan wilayah yang marginal sehingga mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dan daerah. Untuk mendukungnya, pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan, serta penciptaan suasana yang kondusif untuk berusaha dan berinvestasi juga menjadi fokus pada penyelenggaraan misi kedua ini.

Misi 3: Membangun Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Produk Asli Pasuruan yang Kompetitif.

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “sejahtera” dan “maju”. Fokus dari penyelenggaraan misi ini adalah pada pembangunan kualitas sumberdaya manusia, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun produktivitas (ekonomi) individu dan masyarakat. Produktivitas kegiatan/sektor ekonomi yang dimaksud khususnya difokuskan pada sektor atau produk asli daerah yang unggul atau potensial. Dengan penyelenggaraan misi ini diharapkan kualitas sumberdaya manusia maupun produk asli Kabupaten Pasuruan meningkat dan mampu bersaing/kompetitif (unggul). Dalam penyelenggaraan misi ini, optimalisasi peningkatan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (termasuk TIK) serta inovasi daerah menjadi keharusan.

Misi 4: Memperkuat Sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha dan Masyarakat sebagai Pilar Membangun Daerah.

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “**maju**” dan dilakukan melalui peningkatan kolaborasi dan partisipasi seluruh *stakeholders* dalam proses pembangunan, baik dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan, maupun pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa juga menjadi fokus

dalam penyelenggaraan misi ini sehingga kepercayaan masyarakat dan *stakeholders* lainnya pun meningkat serta mendorong mereka berpartisipasi aktif dalam pembangunan di seluruh sektor.

Misi 5: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi serta Aparatur Pemerintah yang Lebih Profesional dan Humanis.

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “maju”. Fokus penyelenggaraan dari misi adalah pada perluasan akses dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi atau optimalisasi pemanfaatan TIK di dalamnya. Selain itu, penciptaan aparatur yang profesional, melayani dan *agile* (memiliki kemampuan beradaptasi dengan cepat dan efektif terhadap perubahan serta mampu menjalankan tugasnya dengan fleksibilitas, kecepatan, dan kolaborasi yang tinggi), khususnya dalam pemberian pelayanan publik juga menjadi fokus dalam penyelenggaraan misi ini.

Gambar 4.4
Tujuan 1 RPJMD Kabupaten Pasuruan 2025-2029



Sumber: RPJMD Kab. Pasuruan 2025-2029

Tujuan 1:
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjunjung nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan

Keberhasilan tujuan pembangunan ini diukur melalui indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang semakin meningkat. Untuk mencapai tujuan ini, dua sasaran telah dirumuskan, yaitu: (1) meningkatnya kehidupan masyarakat yang toleran berlandaskan budaya dan kearifan lokal, dengan ukuran keberhasilan meningkatnya Indeks Kebudayaan Daerah (IKD) dan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga); dan (2) Meningkatnya kesetaraan dalam masyarakat, dengan ukuran Indeks Ketimpangan Gender yang semakin mengecil. Tujuan pertama dengan dua sasaran ini diharapkan

tercapai utamanya melalui penyelenggaraan misi pertama pembangunan, yaitu **Mendukung dan Mendorong Kualitas Keimanan dan Kesalehan Masyarakat.**



Sumber: RPJMD Kab. Pasuruan 2025-2029

Tujuan 2:

Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Indikator kinerja tujuan kedua ini adalah Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Ekonomi Berkelanjutan yang semakin meningkat dan/atau stabil, serta Rasio Gini dan Tingkat Kemiskinan yang semakin menurun. Untuk mencapai tujuan ini, empat sasaran telah dirumuskan, yaitu: (1) Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi strategis yang diukur melalui kontribusi atau rasio sektor-sektor tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pasuruan. Sektor-sektor strategis yang dimaksud meliputi sektor industri pengolahan, penyediaan akomodasi-makanan-minuman, dan pertanian-perikanan; (2) Meningkatnya daya saing investasi daerah yang diukur melalui ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB ADHK, dan Indeks Infrastruktur Wilayah yang meningkat setiap tahunnya; (3) Meningkatnya kualitas lingkungan yang diukur melalui peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), serta menurunnya Indeks Risiko Bencana; dan (4) Meningkatnya pendapatan dan jaminan sosial masyarakat yang diukur melalui Pendapatan per kapita dan Rasio Kewirausahaan yang meningkat serta persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang semakin menurun. Tujuan kedua dengan empat sasaran ini diharapkan tercapai utamanya melalui penyelenggaraan misi kedua pembangunan, yaitu **Memperkecil Ketimpangan dan Kesenjangan Sosial Ekonomi melalui Program Tepat Guna dan Tepat Sasaran.**

Gambar 4.6
Tujuan 3 RPJMD Kabupaten Pasuruan 2025-2029



Sumber: RPJMD Kab. Pasuruan 2025-2029

Tujuan 3:
Meningkatnya Daya Saing Daerah

Tujuan pembangunan ketiga ini tercapai manakala indikator kinerjanya, yaitu Indeks Daya Saing Daerah meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mencapai tujuan ini, dua sasaran telah dirumuskan, yaitu: (1) Meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) yang unggul dan berkelanjutan, tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat dan disertai dengan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka serta Prevalensi Ketidacukupan Pangan; dan (2) Meningkatnya inovasi daerah penguasaan teknologi informasi yang diukur dengan meningkatnya Indeks Inovasi Daerah maupun Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tujuan ketiga dengan dua sasarannya ini diharapkan tercapai utamanya melalui penyelenggaraan misi ketiga pembangunan, yaitu **Membangun Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Produk Asli Pasuruan yang Kompetitif**.

Gambar 4.7
Tujuan 4 RPJMD Kabupaten Pasuruan 2025-2029



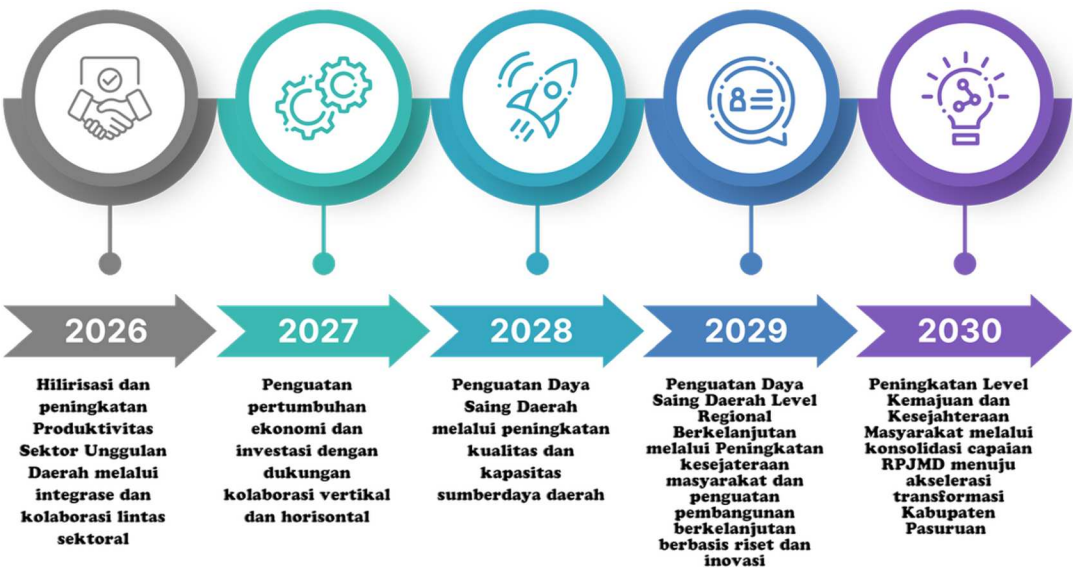
Sumber: RPJMD Kab. Pasuruan 2025-2029

Tujuan 4:

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Ketercapaian tujuan pembangunan keempat ini terukur melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi serta Indeks Integritas yang semakin meningkat. Untuk mencapai tujuan ini, tiga sasaran telah dirumuskan, yaitu: (1) Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa yang diukur melalui peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah; (2) meningkatnya partisipasi *stakeholders* dan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang diukur melalui indikator Indeks Kualitas Kebijakan yang naik dari tahun ke tahun; dan (3) Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Publik yang humanis, diukur melalui indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP), Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang naik dari tahun ke tahun. Tujuan keempat dengan tiga sasarannya ini diharapkan tercapai melalui penyelenggaraan misi keempat dan kelima pembangunan, yaitu ***Memperkuat Sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha dan Masyarakat sebagai Pilar Membangun Daerah*** dan ***Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi serta Aparatur Pemerintah yang Lebih Profesional dan Humanis.***

Gambar 4.8
Penahapan RPJMD
Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan, 2025 (diolah)

Berdasarkan penjelasan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD, maka dengan melihat proses konsistensi penjabaran Visi dan

Misi dalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut ke dalam matriks/tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Pasuruan

VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	REALISASI 2024	PROYEKSI 2025	TARGET 2026
VISI : “KABUPATEN PASURUAN YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN” Misi 1: Mendukung dan Mendorong Kualitas Keimanan dan Kesalehan Masyarakat Misi 2 : Memperkecil Ketimpangan Kesenjangan Sosial ekonomi melalui Program Tepat	1	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjunjung nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan			1 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (Indeks)	81,44	81,82	82,19
			1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang toleran berlandaskan budaya dan kearifan lokal	1 Indeks Kebudayaan Daerah (IKD) (Indeks)	55,12	59,61	61,07
					2 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	62,17	62,75	63,25
			2	Meningkatnya kesetaraan dalam masyarakat	1 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,346	0,335	0,324
	2	Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan			1 Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5,34	4,15-5,34	4,23-5,45
					2 Rasio Gini (Rasio)	0,331	0,318-0,358	0,317-0,357
					3 Indeks Ekonomi Berkelanjutan (Indeks)	72,59	72,60	72,61
					4 Tingkat Kemiskinan (Persen)	8,63	7,14-8,39	7,1-8,12
			1	Meningkatnya kontribusi sektor	1 Rasio PDRB Industri Pengolahan (Persen)	60,65	60,66	60,68

VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		REALISASI 2024	PROYEKSI 2025	TARGET 2026
Guna dan Tepat sasaran Misi 3 : Membangun Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Produk Asli Pasuruan yang Kompetitif Misi 4 : Memperkuat Sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha dan Masyarakat sebagai Pilar Membangun Daerah Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi				ekonomi strategis daerah	2	Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (Persen)	3,78	3,38-4,23	3,43-4,42
					3	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Persen)	0,72	0,48-1,54	0,57-1,82
			2	Meningkatnya daya saing investasi daerah	1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persentase PDRB ADHK) (Persen)	30,74	27,62-31,15	27,80-30,16
					2	Incremental Capital Output Ratio (ICOR) (Rasio)	6,06	6,03	6,01
					3	Indeks Infrastruktur Wilayah (Indeks)	68,73	68,76	68,79
			3	Meningkatnya kualitas lingkungan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)	65,06	71,68	71,76
					2	Penurunan Emisi GRK kumulatif (ton CO2 eq)	4.062,02	4.143,26	4.226,12
					3	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	109,38	108,88	108,38
			4	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan	1	PDRB Perkapita (Juta Rp)	121,69	121,89-128,16	122,23-130,33
					2	Rasio Kewirausahaan (Persen)	1,57	1,81	2,05

VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		REALISASI 2024	PROYEKSI 2025	TARGET 2026
Informasi serta Aparatur Pemerintah yang lebih Profesional dan Humanis				jaminan sosial masyarakat	3	Persentase PPKS (Persen)	3,59	2,50	2,39
	3	Meningkatnya Daya Saing Daerah			1	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) (Indeks)	3,36	3,42	3,48
			1	Meningkatnya SDM yang unggul dan Berkelanjutan	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Indeks)	72,36	72,21-72,56	72,28-72,88
					2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)	5,02	5,38-4,67	5,37 – 4,43
					3	Prevalensi Ketidacukupan pangan (Persen)	10,370	7,48	7,18
			2	Meningkatnya inovasi daerah dan penguasaan teknologi informasi	1	Indeks Inovasi Daerah (IID) (Indeks)	67,70	68,32	68,93
					2	Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi (Indeks)	4,14	5,00	5,13
	4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			1	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	83,35	84,80	86,20
					2	Indeks Integritas (Indeks)	69,34	70,60	71,90
			1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggara-an Pemerintah Daerah dan Desa	1	Nilai AKIP (Nilai)	76,74	77,66	78,67
					2	Opini BPK (Opini)	WTP	WTP	WTP
			2	Meningkatnya partisipasi stakeholder dan	1	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) (Indeks)	56,55	58.79	61.03

VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		REALISASI 2024	PROYEKSI 2025	TARGET 2026
				masyara-kat dalam peru musan dan pelaksanaan kebijakan daerah					
			3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Publik yang humanis	1	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,52	4.55	4.58
					2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	93,41	93,68	93,94
					3	Indeks SPBE (Indeks (**))	3,88	4,18	-
					4	indeks Pemerintah Digital (Indeks)	-	-	1,6-1,92

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan, 2025
Ket : * target tahun 2026 ditentukan oleh Prov. Jatim sesuai Rakortekrenbang untuk indikator makro :
Perumbuhan ekonomi, Rasio Gini, Kemiskinan, TPT, Potensi Penurunan GRK.
** instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi indeks Pemerintah Digital mulai tahun 2026 sehingga target disesuaikan

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, meliputi hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan pada periode RKPD sebelumnya, kondisi ekonomi makro nasional dan daerah, serta telaah tematik prioritas pembangunan nasional dan provinsi untuk periode pembangunan tahun 2026.

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2026

Dalam konteks pembangunan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan baik global maupun domestik. Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan eksternal yang bersifat kompleks dan saling terkait. Ketidakpastian ekonomi global akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi negara maju, disrupti rantai pasok, serta dinamika suku bunga dan inflasi internasional dapat berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional, khususnya melalui jalur ekspor, investasi, dan nilai tukar. Selain itu, tensi geopolitik yang meningkat, seperti konflik antarnegara dan fragmentasi geoekonomi, memperbesar risiko terhadap ketahanan energi dan pangan global.

Di tingkat domestik, Indonesia masih menghadapi permasalahan struktural yang menghambat transformasi ekonomi. Rendahnya produktivitas tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia, khususnya di sektor informal dan wilayah tertinggal, menjadi tantangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ketimpangan akses terhadap layanan dasar, infrastruktur, serta peluang ekonomi antarwilayah juga memerlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah, khususnya dalam memperkuat daya saing daerah dan pemerataan pembangunan.

Tema **RKP 2026**, yaitu "**Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**", mencerminkan arah kebijakan pembangunan nasional yang fokus pada penguatan ketahanan strategis dan peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi. Arah pembangunan tahun 2026 difokuskan untuk memperkuat ketahanan nasional di sektor-sektor strategis sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Gambar 4.9
Strategi Jangka Pendek Menuju Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomu yang Produktif dan Inklusif



Sumber: Bappenas RI, 2025

Dalam kerangka ini, ketahanan terhadap gejolak pangan dan energi menjadi fondasi utama dengan fokus pada upaya swasembada pangan, energi, dan air. Strategi konkret meliputi optimalisasi peran BULOG, pengembangan kawasan food estate, serta peningkatan bauran energi melalui pemanfaatan bioetanol dan biodiesel. Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang terintegrasi dari hulu ke hilir juga diutamakan sebagai pilar penting ketahanan air nasional.

Pada dimensi ekonomi produktif, RKP 2026 memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini mencakup penyediaan ekosistem makan bergizi gratis, percepatan renovasi sekolah, serta pengembangan sekolah unggulan. Di sektor kesehatan, perhatian diarahkan pada peningkatan akses layanan seperti cek kesehatan rutin dan pengembangan rumah sakit daerah. Selain itu, deregulasi dan kepastian hukum ditingkatkan melalui reformasi birokrasi, kemudahan berbisnis, serta penguatan iklim investasi, sebagai langkah proaktif menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan kompetitif.

Transformasi ekonomi juga diarahkan melalui adopsi teknologi dan inovasi. Fokus pada digitalisasi dan hasil riset yang aplikatif menjadi motor penggerak produktivitas sektor riil. Pertahanan semesta turut menjadi bagian dari penguatan ketahanan nasional, dengan peningkatan kapasitas cadangan komando, pemenuhan kebutuhan

alutsista (alat utama sistem senjata), dan penguatan kemampuan teritorial. Di sisi lain, kebijakan fiskal diarahkan agar tetap adaptif, menjaga stabilitas makroekonomi, dan memastikan ruang fiskal yang cukup untuk pembiayaan pembangunan prioritas.

Pendekatan inklusif diwujudkan melalui percepatan pertumbuhan ekonomi yang merata dan pengentasan kemiskinan secara sistematis. Strategi inklusi ekonomi mencakup percepatan hilirisasi sumber daya alam oleh entitas milik Indonesia, serta optimalisasi peran Lembaga Pengelola Dana Investasi (SWF) Danantara. Dalam upaya mengurangi kemiskinan, kebijakan difokuskan pada pendataan tunggal kemiskinan, digitalisasi bantuan sosial, serta program pembangunan 3 juta rumah dan pembentukan 70.000 Koperasi Merah Putih. Seluruh strategi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan yang berkualitas, adil, dan berkelanjutan.

Sasaran Pembangunan tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan tinggi berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan sumberdaya manusia berkualitas. Secara detail target pembangunan nasional tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

No	Uraian	Tahun		
		2024	2025	2026
A	Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan			
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	5,3	5,8 – 6,3
2	GNI Per Capita (US\$)	5.000	5.410	5.870
3	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	34,09	35,53	37,14
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,07	76,49	76,67
B	Penurunan Kemiskinan			
1	Tingkat Kemiskinan (%)	8,57	7,0 – 8,0	6,5 – 7,5
2	Kemiskinan Ekstrem (%)	0,83	0	0
3	Rasio Gini	0,373	0,379 – 0,382	0,377 – 0,380
C	Sumber Daya Manusia			
1	Indeks Modal Manusia	0,54	0,56	0,57

Sumber: Bappenas RI, 2025

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2026 menitikberatkan pada "**Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi**". Sebagai daerah yang memiliki potensi besar di sektor

pertanian, Jawa Timur berkomitmen mendukung program strategis pemerintah pusat dalam upaya mewujudkan swasembada pangan secara nasional.

Untuk merealisasikan komitmen tersebut, Jawa Timur akan memaksimalkan potensi sektor agro yang selama ini menjadi kontributor utama produksi pangan nasional. Dengan kekayaan lahan pertanian yang subur dan luas, fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan produktivitas berbagai komoditas unggulan seperti padi, jagung, tebu, kedelai, dan kopi. Peningkatan ini akan dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian modern, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta inovasi dalam sistem budidaya dan pengelolaan hasil pertanian.

Selaras dengan kebijakan nasional yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas melalui industrialisasi ekspor dan program padat karya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memperkuat hilirisasi produk pertanian. Pengembangan agroindustri yang terintegrasi dengan sektor pertanian primer menjadi strategi utama dalam menambah nilai produk, meningkatkan daya saing, membuka peluang kerja baru, dan mendongkrak pendapatan petani. Di samping itu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi, gudang penyimpanan, serta sistem distribusi yang efisien akan terus ditingkatkan untuk menjamin kelancaran produksi dan pasokan pangan.

Dalam mendukung kemandirian pangan nasional, Jawa Timur juga akan mengambil peran strategis dalam program lumbung pangan nasional serta pengembangan sistem penyediaan pangan yang berkelanjutan. Langkah ini mencakup peningkatan produksi komoditas strategis dan diversifikasi pangan berbasis potensi lokal. Melalui upaya tersebut, Jawa Timur diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan daerah, mendukung pencapaian swasembada pangan nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam menjaga pencapaian prioritas Pembangunan pada tahun 2026, Provinsi Jawa Timur telah menyusun langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Tabel 4.3
Langkah Strategis Arah Kebijakan Jawa Timur Tahun 2026

No	Misi	Langkah Strategis	Lokasi Prioritas
1	Jatim Sejahtera	1. Perluasan program pengentasan kemiskinan berbasis evaluasi 2025 2. Penguatan perlindungan sosial untuk masyarakat hampir miskin 3. Pengembangan kewirausahaan perempuan melalui inkubasi bisnis 4. Penyempurnaan penargetan bantuan sosial berbasis data 5. Pengembangan program pemberdayaan masyarakat berorientasi kemandirian 6. Peningkatan kualitas lembaga ekonomi di wilayah perdesaan 7. Pembangunan pusat layanan terpadu untuk kelompok rentan 8. Perluasan program ekonomi produktif bagi masyarakat miskin 9. Implementasi program perbaikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah 10. Penguatan inklusi sosial untuk kelompok marjinal 11. Pengembangan sistem pengukuran dampak program kemiskinan	Melanjutkan fokus di Pulau Madura dan memperluas ke kawasan pesisir selatan serta wilayah lain dengan kemiskinan persisten
2	Jatim Kerja	1. Perluasan ekosistem inovasi ke kota-kota sekunder 2. Pengembangan program peningkatan keterampilan untuk industri berkembang 3. Penguatan promosi investasi untuk sektor dengan potensi penciptaan lapangan kerja tinggi 4. Pengembangan klaster UMKM dan integrasi rantai nilai 5. Penguatan infrastruktur ekonomi digital dan pengembangan keterampilan digital 6. Implementasi program pengembangan ekonomi lokal berbasis spesialisasi regional 7. Penguatan kemitraan industri-akademisi untuk inovasi dan riset 8. Pengembangan program promosi ekspor untuk UMKM 9. Penguatan layanan dukungan bisnis dan reformasi regulasi 10. Implementasi penciptaan lapangan kerja hijau	Kota-kota sekunder (Malang, Kediri, Madiun, Jember), koridor ekonomi berkembang (sumbu Probolinggo-Banyuwangi), dan daerah dengan pengangguran tinggi
3	Jatim Akses	1. Pengembangan konektivitas antar wilayah melalui proyek infrastruktur strategis 2. Pembangunan jaringan transportasi sekunder menghubungkan pusat ekonomi 3. Perluasan infrastruktur digital ke daerah terlayani rendah 4. Implementasi sistem mobilitas perkotaan terintegrasi di kota-kota besar 5. Penguatan infrastruktur pedesaan mendukung pengembangan pertanian	Koridor antar wilayah, kota-kota sekunder, dan daerah pedesaan dengan potensi ekonomi namun terkendala infrastruktur

No	Misi	Langkah Strategis	Lokasi Prioritas
		6. Pengembangan infrastruktur dan layanan logistik untuk menurunkan biaya perdagangan 7. Implementasi program pengembangan perumahan dengan infrastruktur memadai 8. Penguatan sistem pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur 9. Pengembangan infrastruktur pariwisata di lokasi strategis 10. Implementasi inisiatif kota cerdas di pusat perkotaan	
4	Jatim Cerdas	1. Perluasan akses pendidikan berkualitas melalui metode penyampaian inovatif 2. Implementasi sistem kurikulum dan penilaian berbasis kompetensi 3. Penguatan program pendidikan STEM 4. Pengembangan program keterkaitan pendidikan dan industri 5. Penguatan kapasitas riset dan inovasi pendidikan tinggi 6. Implementasi program literasi dan numerasi komprehensif 7. Penguatan program pendidikan inklusif untuk kelompok marjinal 8. Pengembangan fasilitas pendidikan sebagai pusat belajar masyarakat 9. Implementasi program teknologi pendidikan skala luas 10. Penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan	Perluasan dari wilayah prioritas 2025 untuk mencakup daerah berkembang dengan tantangan kualitas pendidikan
5	Jatim Sehat	1. Pengembangan layanan kesehatan spesialisasi di rumah sakit regional 2. Penguatan sistem surveilans dan respons penyakit 3. Perluasan program kesehatan ibu dan anak ke daerah terpencil 4. Implementasi solusi teknologi kesehatan untuk layanan jarak jauh 5. Penguatan program gizi untuk anak dan kelompok rentan 6. Penguatan implementasi dan pemantauan jaminan kesehatan 7. Pengembangan kapasitas tenaga kesehatan di daerah kurang terlayani 8. Penguatan program kesehatan preventif dan promosi kesehatan 9. Implementasi sistem informasi kesehatan terintegrasi 10. Penguatan inisiatif kesehatan berbasis masyarakat	Melanjutkan fokus pada daerah dengan stunting tinggi sambil memperluas ke wilayah dengan tantangan kesehatan berkembang
6	Jatim Berkah Amanah	1. Perluasan sistem e-government dan layanan publik digital 2. Penguatan kualitas regulasi dan inisiatif penyederhanaan 3. Peningkatan pengelolaan keuangan publik dan transparansi 4. Implementasi manajemen berbasis kinerja di institusi publik 5. Pengembangan mekanisme umpan balik warga dan partisipasi publik	Seluruh kabupaten/kota dengan penekanan khusus pada daerah dengan tantangan tata kelola

No	Misi	Langkah Strategis	Lokasi Prioritas
		6. Penguatan kapasitas pemerintahan lokal dan desentralisasi 7. Peningkatan mekanisme koordinasi antar pemerintah 8. Implementasi inisiatif data terbuka dan tata kelola data 9. Penguatan program kerukunan beragama dan toleransi 10. Pengembangan ketahanan masyarakat melalui modal sosial	
7	Jatim Agro	1. Perluasan program modernisasi pertanian dan adopsi teknologi 2. Penguatan rantai nilai pertanian dan akses pasar 3. Peningkatan kapasitas organisasi petani dan pemasaran kolektif 4. Implementasi pertanian cerdas iklim skala luas 5. Pengembangan pengolahan hasil pertanian dan nilai tambah 6. Penguatan program pengembangan perikanan dan budidaya 7. Implementasi praktik pengelolaan lahan berkelanjutan 8. Penguatan sistem asuransi pertanian dan manajemen risiko 9. Pengembangan program penelitian dan penyuluhan pertanian 10. Penguatan pengembangan agribisnis dan kewirausahaan	Melanjutkan fokus pada daerah pertanian utama sambil memperluas ke wilayah dengan potensi pertanian namun produktivitas rendah
8	Jatim Harmoni	1. Pengembangan pusat budaya regional dan hub kreatif 2. Penguatan program kesetaraan gender lintas sektor 3. Penguatan mekanisme resolusi konflik berbasis masyarakat 4. Implementasi program pengembangan olahraga komprehensif 5. Pengembangan destinasi wisata budaya dan rute 6. Penguatan pengembangan ruang publik inklusif 7. Penguatan organisasi masyarakat sipil dan pembangunan komunitas 8. Implementasi program pengembangan dan kepemimpinan pemuda 9. Penguatan program dukungan untuk penyandang disabilitas 10. Pengembangan pendidikan seni dan apresiasi budaya	Situs warisan budaya, pusat kota untuk pengembangan industri kreatif, dan daerah dengan latar belakang budaya beragam
9	Jatim Lestari	1. Perluasan program pengelolaan dan konservasi daerah aliran sungai 2. Implementasi inisiatif ekonomi sirkular di perkotaan dan kawasan industri 3. Penguatan pengembangan dan adopsi energi terbarukan 4. Penguatan sistem pemantauan dan penegakan lingkungan 5. Implementasi program adaptasi perubahan iklim komprehensif	Kawasan sensitif lingkungan, zona industri, pusat perkotaan dengan tantangan lingkungan, dan daerah rawan bencana

No	Misi	Langkah Strategis	Lokasi Prioritas
		6. Penguatan sistem kesiapsiagaan dan respons bencana 7. Pengembangan perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan berkelanjutan 8. Implementasi program peningkatan kualitas udara dan air 9. Penguatan konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan lindung 10. Pengembangan industri hijau dan eco-industrial park	

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2025

Untuk menjaga target pencapaian pembangunan pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan target kinerja Indikator Utama tahun 2026 seperti tertera pada gambar berikut:

Gambar 4.10
Target Indikator Kinerja Utama Jawa Timur 2026



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2025

Sebagai upaya mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Jawa Timur tahun 2026, beberapa arahan pengembangan wilayah untuk Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (industri pengolahan serta pengadaan listrik dan gas) berdaya saing tinggi dan mendorong investasi pada sektor potensial (konstruksi);
2. Pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan kerjasama antar daerah untuk mendorong pengembangan kawasan strategis Bromo – Tengger – Semeru;
3. Peningkatan kualitas sistem layanan transportasi publik di internal kawasan perkotaan dalam mendukung mobilitas masyarakat dan akses ke simpul transportasi lainnya;

4. Peningkatan konektivitas jalan menuju/dari kawasan strategis pariwisata, kawasan industri dan ekonomi kreatif melalui penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa;
5. Pemenuhan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman melalui peningkatan akses rumah tangga terhadap rumah layak huni terjangkau dan berkelanjutan, akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, akses rumah tangga terhadap sanitasi aman, akses rumah tangga terhadap layanan penuh pengumpulan sampah dan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah, serta tetap memastikan pemenuhan akses air minum dan sanitasi layak terhadap masyarakat, dan penanganan terhadap kawasan kumuh;
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan;
7. Peningkatan aksi pembangunan rendah karbon dalam rangka mendukung penurunan emisi gas rumah kaca. Pembangunan rendah karbon merupakan strategi kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan nasional dan provinsi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca serta meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Sektor-sektor prioritas yang berkontribusi terhadap emisi GRK yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota diantaranya adalah pertanian, transportasi, serta pengelolaan sampah dan air limbah. Pelaksanaan aksi pembangunan karbon perlu diiringi dengan penguatan kerja sama pentahelix sebagai bentuk kolaborasi berbagai sektor dalam rangka mendukung penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
8. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang, cuaca ekstrem, gempa bumi, kekeringan, tsunami, epidemi dan wabah, kegagalan teknologi, lekuefaksi, dan gunung api.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2026

Tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan tahap 1 (2025-2029) RPJPD Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2045 dan strategi penahapan RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029. Selain itu, juga memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2026.

Gambar 4.11
Perumusan Tema RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026



Tema RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2026 adalah **Hilirisasi dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah melalui Integrasi dan Kolaborasi Lintas Sektoral untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**. Tema ini disusun dengan memperhatikan keselarasan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Hilirisasi potensi unggulan daerah dilakukan dengan memperkuat *supporting system* hulu-hilir. Hal ini akan mendorong peningkatan nilai tambah (*Value Added*) pada tingkat masyarakat, yang difokuskan pada peningkatan kompetensi dan daya saing sdm tenaga kerja, peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas bahan baku, pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif, peningkatan tatakelola pemerintahan yang responsif, kolabotratif dan berbasis digital.

Gambar 4.12
Keselarasan Tema RKPD Kabupaten Pasuruan dengan Tema RKP
dan Tema RKPD Provinsi Jawa Timur



Untuk mendukung tema pembangunan tahun 2026 dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, maka dirumuskan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2026 sebagai berikut:

1. **(PPD-1)** Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing.
2. **(PPD-2)** Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri/usaha pengolahan dan ketahanan pangan dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas.
3. **(PPD-3)** Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil.
4. **(PPD-4)** Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2026, berikut adalah linieritas prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Pasuruan tahun 2026.

Tabel 4.5
Linieritas Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur,
dan Kabupaten Pasuruan Tahun 2026

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. PASURUAN
PN1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi , dan Hak Asasi Manusia	PP6: Jatim Berkah Amanah , Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna, dan anti korupsi serta memperkuat kesalehan sosial masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan, budi pekerti luhur, dan berjiwa Pancasila	PP-4: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital
PN2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan , Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau , dan Ekonomi Biru	PP7:Jatim Agro , Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dengan tata niaga berkeadilan, akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan nasional ; PP9: Jatim Lestari , Menjaga kelestarian lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan daya dukung alam dan lingkungan, serta mendorong pengembangan ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan lintas sektoral.	PPD-2: Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku/ sumber daya alam /agro untuk pasokan industri/usaha pengolahan dan ketahanan pangan dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas
PN3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan , Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PP2: Jatim Kerja , Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (start-up), pengembangan ekonomi kreatif , iklim investasi, stabilitas ekonomi serta pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penguasaan keterampilan abad 21 (21st century skills) yang berdaya saing; PP3: Jatim Akses , Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur lintas sektor serta transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan.	PPD-2: Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri/usaha pengolahan dan ketahanan pangan dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas PPD-3: Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil
PN4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) , Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	PP4: Jatim Cerdas , Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan untuk semua (education for all) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan; PP5: Jatim Sehat , Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (health for all) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan Universal Health Coverage (UHC);	PPD-1: Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing

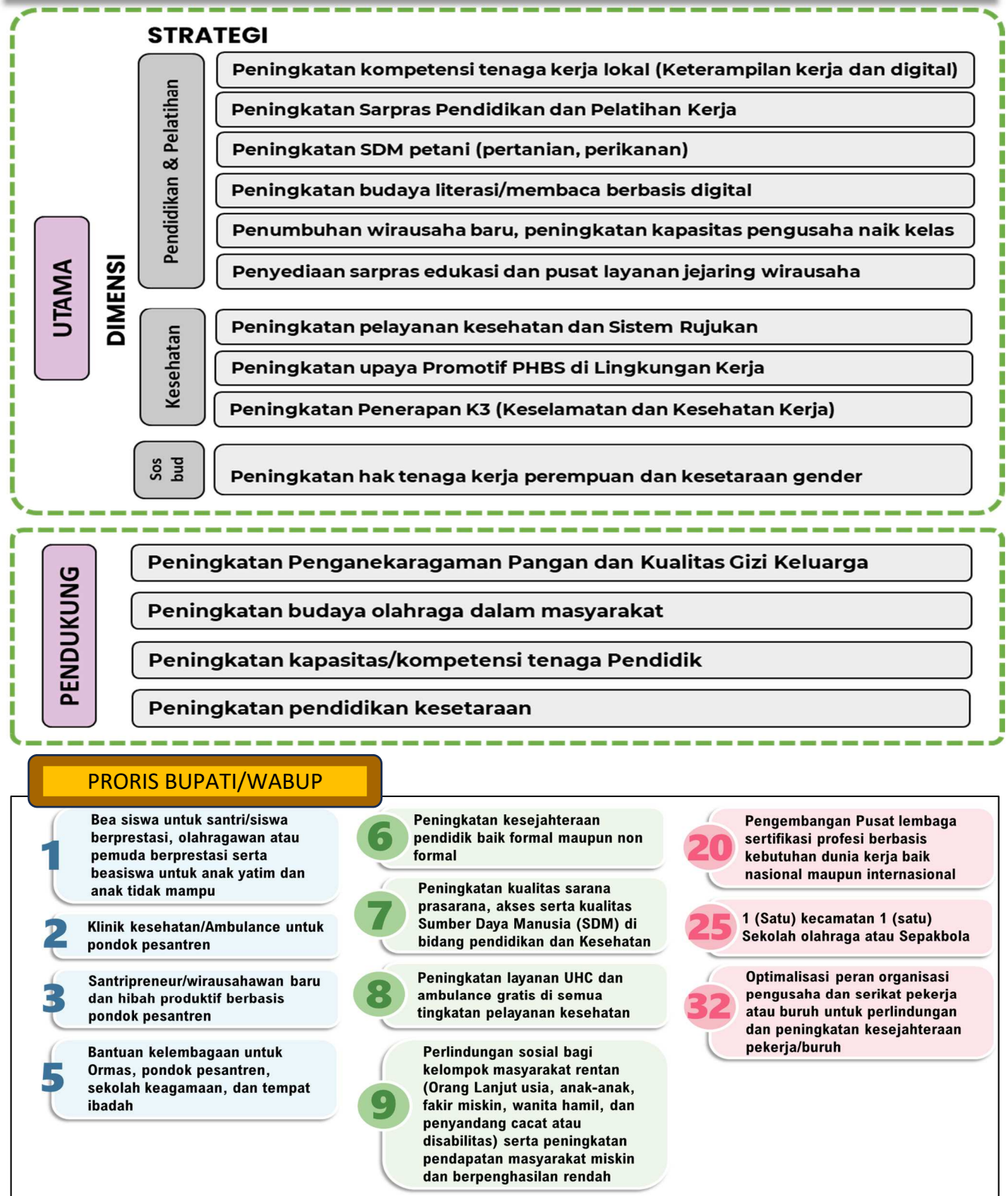
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. PASURUAN
PN5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PP7: Jatim Agro , Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dengan tata niaga yang berkeadilan, akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan nasional;	PPD-3: Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil
PN6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi , Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PP1: Jatim Sejahtera , Mempercepat pengentasan kemiskinan di desa dan kota melalui pendekatan lintas sektoral-spasial terpadu dengan memperkuat peran kaum perempuan dalam program pemberdayaan serta memprioritaskan warga miskin di kelompok rentan di antaranya difabel dan lansia melalui program bantuan dan perlindungan sosial berbasis data terpadu;	PPD-3: Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil
PN7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi , Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	PP6: Jatim Berkah Amanah , Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif , berdaya guna, dan anti korupsi serta memperkuat kesalehan sosial masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan, budi pekerti luhur, dan berjiwa Pancasila	PP-4: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif , kolaboratif dan berbasis digital
PN8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PP8: Jatim Harmoni , Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis melalui pengembangan nilai-nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, pengarusutamaan gender, serta memajukan seni budaya dan prestasi olahraga;	PP-4: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif , kolaboratif dan berbasis digital

Gambar 4.13
Grand Design Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026, serta Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati

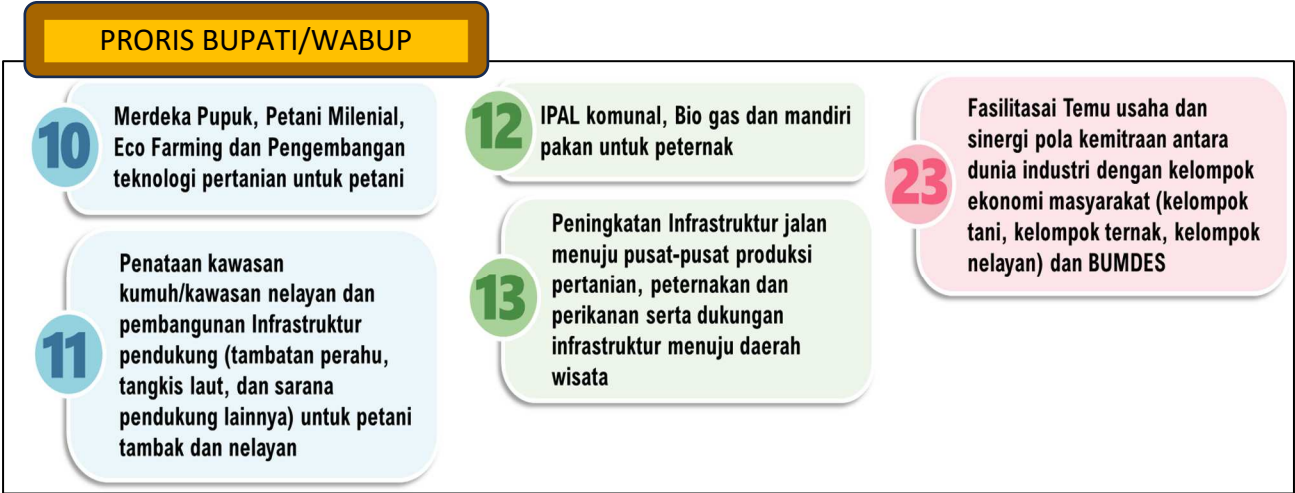
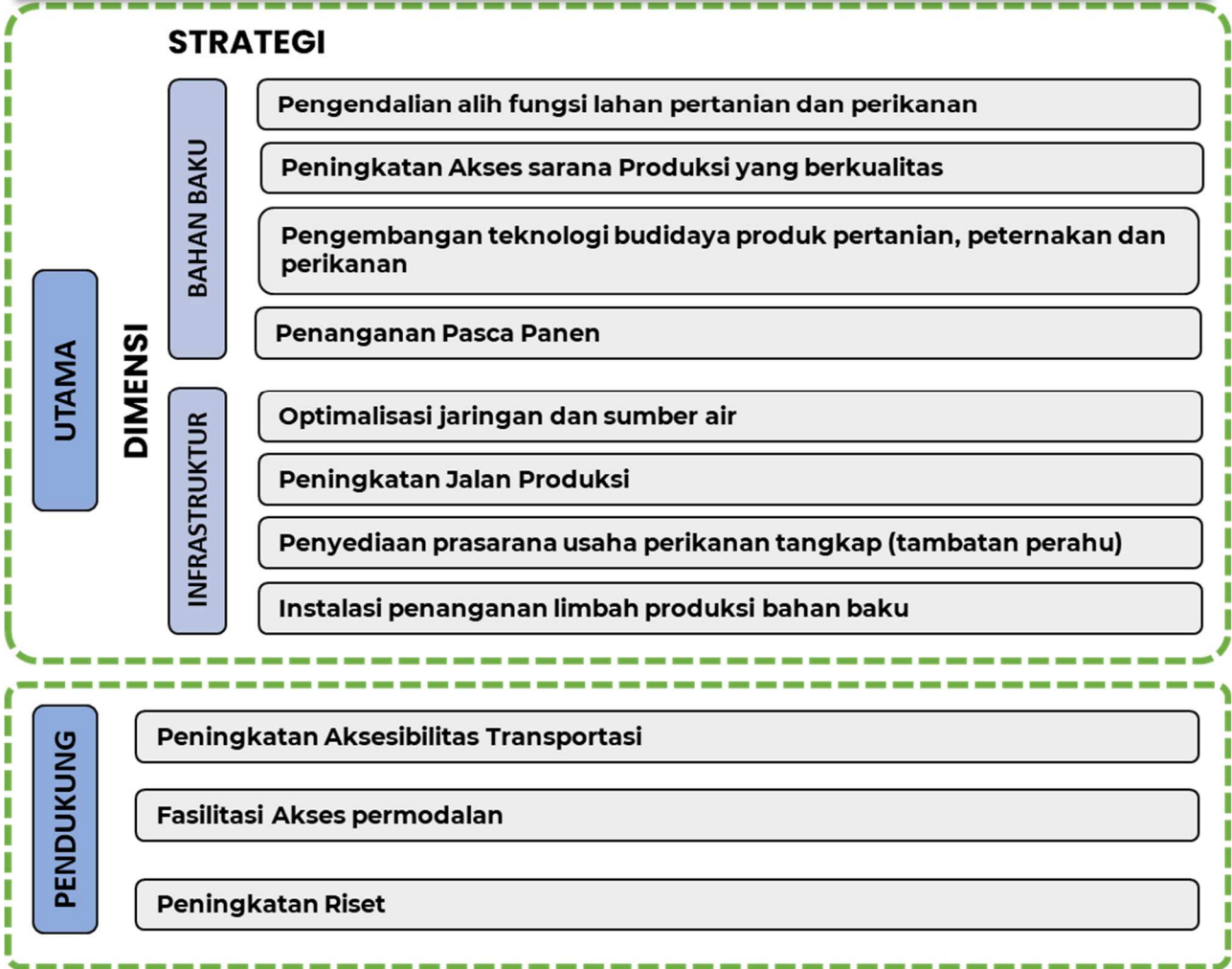


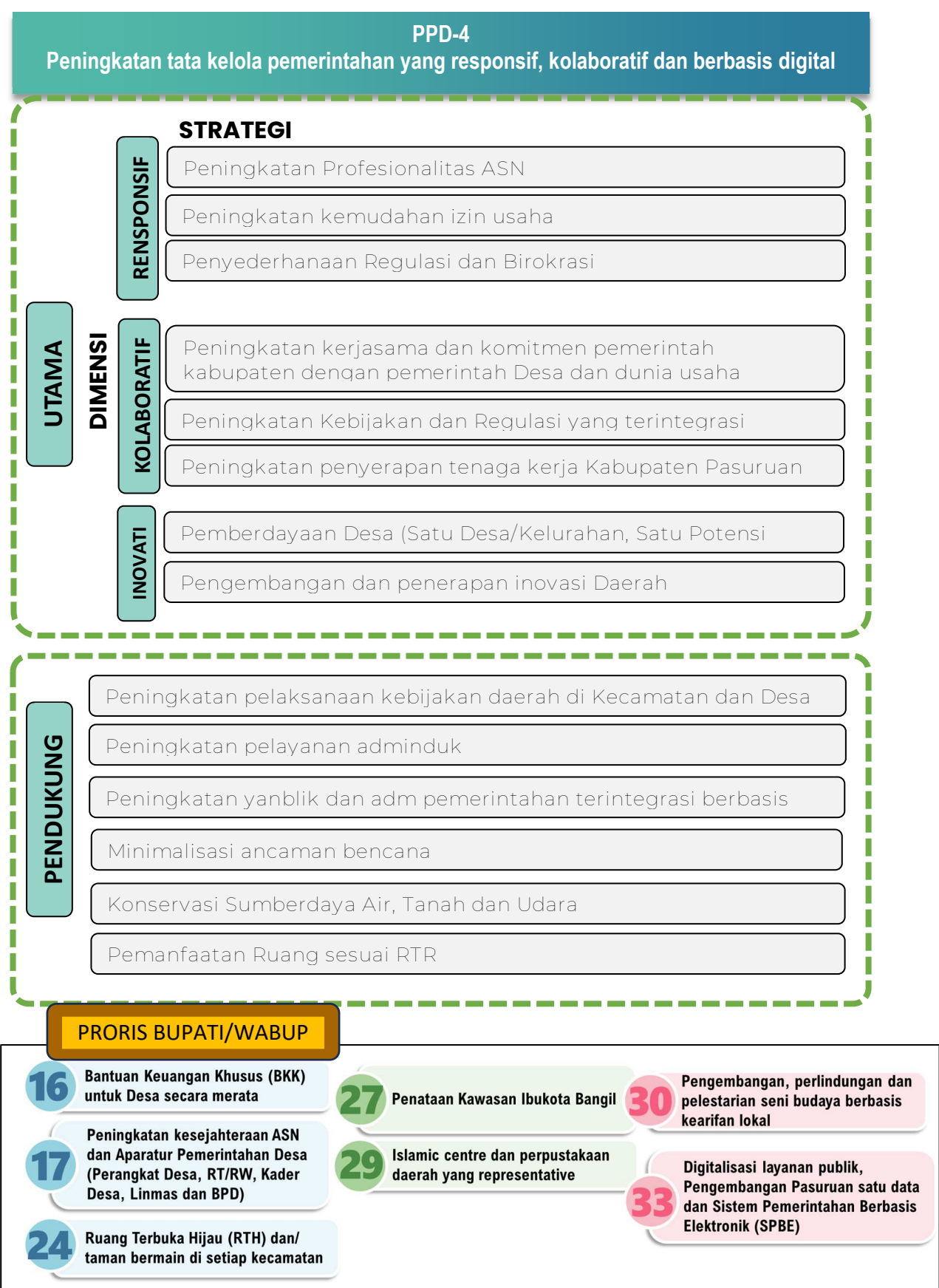
PPD - 1

Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing



PPD - 2
Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri/usaha pengolahan dan ketahanan pangan dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas





4.3 Penelaahan Pokok Pikiran DPRD

Pokok pikiran DPRD diperlukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pasuruan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunan RKPD

memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses atau penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran. Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.3.1 Penelaahan Pokok Pikiran DPRD untuk RKPD Tahun 2026

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	VALIDASI/KETERANGAN	
				MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	MENDUKUNG 33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI
1	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	Peningkatan kualitas sarana/prasarana akses serta kualitas sumberdaya manusia (SDM) dibidang pendidikan dan kesehatan
2	Pembanguna, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri/usaha pengolahan dan ketahanan pangan dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Peningkatan infrastruktur jalan menuju pusat-pusat produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta dukungan infrastruktur menuju daerah wisata
3	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital	Penataan Kawasan Ibukota Bangil
4	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri/usaha	Merdeka pupuk, petani milenial, Eco farming dan pengembangan teknologi pertanian untuk petani

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	VALIDASI/KETERANGAN	
				MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	MENDUKUNG 33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI
	Teknologi dan Spesifik Lokasi	Teknologi dan Spesifik Lokasi		pengolahan dan ketahanan pangan dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	
5	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil	Pencarian sumber mata air baru dan pipanisasi air bersih (PPAB) untuk mengatasi kebutuhan air bersih di daerah kekurangan air
6	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinyuitas bahan baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri/usaha pengolahan dan ketahanan pangan dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Peningkatan infrastruktur jalan menuju pusat-pusat produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta dukungan infrastruktur menuju daerah wisata
7	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Pencegahan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Pencegahan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa Dan Politik)	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital	Pengembangan, perlindungan dan pelestarian seni budaya berbasis kearifan lokal
8	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kab/kota lain	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil	Usaha mikro kecil naik kelas berbasis potensi keunggulan daerah

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	VALIDASI/KETERANGAN	
				MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	MENDUKUNG 33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI
9	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil	-
10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	Peningkatan kualitas sarana/prasarana akses serta kualitas sumberdaya manusia (SDM) dibidang pendidikan dan kesehatan
11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha taniyang direhabilitasi	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinyuitas bahan baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri/usaha pengolahan dan ketahanan pangan dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Peningkatan infrastruktur jalan menuju pusat-pusat produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta dukungan infrastruktur menuju daerah wisata
12	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil	-
13	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil	Penciptaan Lapangan Kerja baru dengan memprioritaskan tenaga kerja asli pasuruan
14	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan	Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil	Pencarian sumber mata air baru dan pipanisasi air bersih (PPAB) untuk mengatasi kebutuhan air bersih di daerah kekurangan air

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	VALIDASI/KETERANGAN	
				MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	MENDUKUNG 33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI
			Penataan Ruang		
15	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital	Pengembangan, perlindungan dan pelestarian seni budaya berbasis kearifan lokal
16	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota yang Tersedia	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri/usaha pengolahan dan ketahanan pangan dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Peningkatan infrastruktur jalan menuju pusat-pusat produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta dukungan infrastruktur menuju daerah wisata
17	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kab/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	Bantuan Kelembagaan untuk ormas, pondok pesantren, sekolah keagamaan, dan tempat ibadah
18	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa Dan Politik)	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital	-

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	VALIDASI/KETERANGAN	
				MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	MENDUKUNG 33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI
		Situasi Politik di Daerah			
19	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil	
20	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	Peningkatan kualitas sarana/prasarana akses serta kualitas sumberdaya manusia (SDM) dibidang pendidikan dan kesehatan
21	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya a Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil	-
22	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa Dan Politik)	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital	-

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	VALIDASI/KETERANGAN	
				MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	MENDUKUNG 33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI
23	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dlm Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	-
24	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinyuitas bahan baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri/usaha pengolahan dan ketahanan pangan dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Peningkatan infrastruktur jalan menuju pusat-pusat produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta dukungan infrastruktur menuju daerah wisata
25	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kab/kota yang haknya terpenuhi	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil	Pembangunan Pasuruan Coaching and Creativity (Pusat pelatihan dan kreatifitas) dalam rangka pengembangan kreatifitas anak muda, optimalisasi ekonomi kreatif dan sertifikasi produk Unggulan/produk UMKM
26	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital	Pengembangan, perlindungan dan pelestarian seni budaya berbasis kearifan lokal
27	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	-

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	VALIDASI/KETERANGAN	
				MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	MENDUKUNG 33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI
		Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
28	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kab/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil	Pembangunan Pasuruan Coaching and Creativity (Pusat pelatihan dan kreatifitas) dalam rangka pengembangan kreatifitas anak muda, optimalisasi ekonomi kreatif dan sertifikasi produk Unggulan/produk UMKM
29	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital	-
30	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	Peningkatan kualitas sarana/prasarana akses serta kualitas sumberdaya manusia (SDM) dibidang pendidikan dan kesehatan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	VALIDASI/KETERANGAN	
				MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	MENDUKUNG 33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI
31	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	--
32	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	-
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri/usaha pengolahan dan ketahanan pangan dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Merdeka pupuk, petani milenial, Eco farming dan pengembangan teknologi pertanian untuk petani
34	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	-
35	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kab/Kota	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	-

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	VALIDASI/KETERANGAN	
				MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	MENDUKUNG 33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI
36	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	-
37	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri/usaha pengolahan dan ketahanan pangan dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	IPAL komunal, Bio Gas dan mandiri pupuk untuk peternak
38	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	Perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan (orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas) serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah
39	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil	-
40	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kab/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital	-

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	VALIDASI/KETERANGAN	
				MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	MENDUKUNG 33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI
		dan mitigasi bencana			
41	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang TelahDirehabilitasi Sedang/Berat	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	Peningkatan kualitas sarana/prasarana akses serta kualitas sumberdaya manusia (SDM) dibidang pendidikan dan kesehatan
42	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa Dan Politik)	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital	-
43	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta advokasi dan sosialisasi PUG	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	-
44	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil	-

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	VALIDASI/KETERANGAN	
				MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	MENDUKUNG 33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI
45	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	Santripeneur/wirausahawan baru dan hibah produktif berbasis pondok pesantren
46	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil	Pembangunan Pasuruan Coaching and Creativity (Pusat pelatihan dan kreatifitas) dalam rangka pengembangan kreatifitas anak muda, optimalisasi ekonomi kreatif dan sertifikasi produk Unggulan/produk UMKM
47	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil	Pencarian sumber mata air baru dan pipanisasi air bersih (PPAB) untuk mengatasi kebutuhan air bersih di daerah kekurangan air
48	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil	-
49	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinyuitas bahan baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri/usaha pengolahan dan ketahanan pangan dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	-

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	VALIDASI/KETERANGAN	
				MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	MENDUKUNG 33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI
50	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri/usaha pengolahan dan ketahanan pangan dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	-
51	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	-
52	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital	Islamic Centre dan perpustakaan daerah yang representatif
53	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri/usaha pengolahan dan ketahanan pangan dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Peningkatan infrastruktur jalan menuju pusat-pusat produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta dukungan infrastruktur menuju daerah wisata
54	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil	Pencarian sumber mata air baru dan pipanisasi air bersih (PPAB) untuk mengatasi kebutuhan air bersih di daerah kekurangan air

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	VALIDASI/KETERANGAN	
				MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	MENDUKUNG 33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI
55	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital	-
56	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital	Pembangunan/pengadaan sarana pendukung dalam rangka mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir
57	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	Santripeneur/wirausahawan baru dan hibah produktif berbasis pondok pesantren
58	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	Peningkatan kualitas sarana/prasarana akses serta kualitas sumberdaya manusia (SDM) dibidang pendidikan dan kesehatan
59	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital	-
60	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan	Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif	-

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	VALIDASI/KETERANGAN	
				MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	MENDUKUNG 33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI
		an Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Bidang Pariwisata	berbasis usaha mikro kecil	
61	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital	
62	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kab/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital	Pembangunan/pengadaan sarana pendukung dalam rangka mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir
63	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	Peningkatan kualitas sarana/prasarana akses serta kualitas sumberdaya manusia (SDM) dibidang pendidikan dan kesehatan
64	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri/usaha pengolahan dan ketahanan pangan dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	-

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	VALIDASI/KETERANGAN	
				MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	MENDUKUNG 33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI
65	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil	-
66	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kab/Kota yg Dikembangkan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil	Pembangunan Pasuruan Coaching and Creativity (Pusat pelatihan dan kreatifitas) dalam rangka pengembangan kreatifitas anak muda, optimalisasi ekonomi kreatif dan sertifikasi produk Unggulan/produk UMKM
67	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinyuitas bahan baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri/usaha pengolahan dan ketahanan pangan dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	-
68	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kab/Kota	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil	-
69	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinyuitas bahan baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri/usaha pengolahan dan ketahanan pangan dengan	-

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	VALIDASI/KETERANGAN	
				MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	MENDUKUNG 33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI
				penyediaan infrastruktur yang berkualitas	
70	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil	-
71	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	-
72	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPO L kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimpleme ntasi pengelolaan arsip dinamis	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	-
73	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil	
74	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	Peningkatan kualitas sarana/prasarana akses serta kualitas sumberdaya manusia (SDM) dibidang pendidikan dan kesehatan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	VALIDASI/KETERANGAN	
				MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	MENDUKUNG 33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI
75	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kab/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital	Pembangunan/pengadaan sarana pendukung dalam rangka mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir
76	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	-
77	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	-
78	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	-

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	VALIDASI/KETERANGAN	
				MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	MENDUKUNG 33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI
79	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kab/kota yg Tersedia dan Termanfaatkan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	Persekabpas Naik Kelas
80	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	-
81	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil	Pencarian sumber mata air baru dan pipanisasi air bersih (PPAB) untuk mengatasi kebutuhan air bersih di daerah kekurangan air
82	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri/usaha pengolahan dan ketahanan pangan dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	-
83	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	-

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	VALIDASI/KETERANGAN	
				MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	MENDUKUNG 33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI
84	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri/usaha pengolahan dan ketahanan pangan dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	-
85	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	-
86	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	-
87	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan , Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri/usaha pengolahan dan ketahanan pangan dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	-
88	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil	Pencarian sumber mata air baru dan pipanisasi air bersih (PPAB) untuk mengatasi kebutuhan air bersih di daerah kekurangan air

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	VALIDASI/KETERANGAN	
				MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	MENDUKUNG 33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI
89	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	Bantuan Kelembagaan untuk ormas, pondok pesantren, sekolah keagamaan, dan tempat ibadah
90	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	Perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan (orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas) serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah
91	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil	-
92	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital	Pembangunan/pengadaan sarana pendukung dalam rangka mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir
93	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinyuitas bahan baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri/usaha pengolahan dan ketahanan pangan dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Merdeka pupuk, petani milenial, Eco farming dan pengembangan teknologi pertanian untuk petani

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	VALIDASI/KETERANGAN	
				MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	MENDUKUNG 33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI
94	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital	Pembangunan/penda- daan sarana pendukung dalam rangka mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir
95	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil	Pencarian sumber mata air baru dan pipanisasi air bersih (PPAB) untuk mengatasi kebutuhan air bersih di daerah kekurangan air
96	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil	Pencarian sumber mata air baru dan pipanisasi air bersih (PPAB) untuk mengatasi kebutuhan air bersih di daerah kekurangan air
97	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpaparinformasi publik	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil	-
98	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	-
99	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalamPenganekaragaman KonsumsiPangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinyuitas bahan baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri/usaha pengolahan dan ketahanan pangan	Merdeka pupuk, petani milenial, Eco farming dan pengembangan teknologi pertanian untuk petani

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	VALIDASI/KETERANGAN	
				MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	MENDUKUNG 33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI
				dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	
100	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	-
101	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kab/Kota	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri/usaha pengolahan dan ketahanan pangan dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	-
102	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	-

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	VALIDASI/KETERANGAN	
				MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	MENDUKUNG 33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI
103	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota yang Terfasilitasi	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	Perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan (orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas) serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah
104	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil	-
105	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	Santripeneur/wirausahawan baru dan hibah produktif berbasis pondok pesantren
106	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri/usaha pengolahan dan ketahanan pangan dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	-

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	VALIDASI/KETERANGAN	
				MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	MENDUKUNG 33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI
107	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	-
108	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil	Usaha mikro kecil naik kelas berbasis potensi keunggulan daerah
109	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing	-

Sumber: SIPD, 2025, diolah

4.4. Subkegiatan Prioritas Pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 menetapkan program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program prioritas pembangunan tersebut merupakan program nomenklatur yang terpilih berdasarkan proses *cascading* atau penjenjangan kinerja. Tabel berikut merupakan identifikasi subkegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Tabel 4.4.1
Subkegiatan Prioritas Pendukung Program Prioritas Pembangunan
Daerah untuk Pencapaian Tujuan/Sasaran
RPJMD Tahun 2025-2029

TUJUAN RPJMD		SASARAN RPJMD / PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR		SUBKEGIATAN PRIORITAS
1	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjunjung nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan.			
		1.1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang toleran berlandaskan budaya dan kearifan lokal.	
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
			Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini,

TUJUAN RPJMD		SASARAN RPJMD / PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR		SUBKEGIATAN PRIORITAS
				Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan
				Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
				Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
		Program Pengembangan Kebudayaan		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
				Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
				Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		Pemanfaatan Cagar Budaya
				Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
				Penetapan Cagar Budaya
		Program Pengelolaan Permuseuman		Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
		1.2 Meningkatnya kesetaraan dalam masyarakat.		
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
				Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Perlindungan Khusus Anak		Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
				Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

TUJUAN RPJMD		SASARAN RPJMD / PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR		SUBKEGIATAN PRIORITAS
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Peningkatan Kesertaan Pengunnnan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
2	Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang inklusi dan berkelanjutan	2.1.	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi strategis daerah	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		Program Pemasaran Pariwisata		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
				Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		Pengembangan Sistem Pemasaran
				Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
				Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
				Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota
				Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

TUJUAN RPJMD		SASARAN RPJMD / PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR		SUBKEGIATAN PRIORITAS
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
				Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
				Peningkatan Kualitas SDG hewan/Tanaman
				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
				Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
			Program Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
				Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya
				Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
				Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
				Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
				Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
			Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	Pembangunan Prasarana Pengawasan
				Pengawasan Usaha pembudidayaan Ikan Sesuai Kewenangan Kab/Kota
				Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan / atau Usaha pengangkutan Ikan Sesuai kewenangan Kab/Kota
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

TUJUAN RPJMD		SASARAN RPJMD / PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR		SUBKEGIATAN PRIORITAS
				Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
				Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
				Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
		2.2	Meningkatnya daya saing investasi daerah	
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
				Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota
			Program Promosi Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dan Strategi Promosi Penanaman Modal
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik

TUJUAN RPJMD		SASARAN RPJMD / PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR		SUBKEGIATAN PRIORITAS
				Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko
				Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
				Pengawasan Penanaman Modal
				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota
				Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
				Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
				Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
				Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
				Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
				Normalisasi/Restorasi Sungai
				Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
				Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
		Program Penyelenggaraan Jalan		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis
				Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
				Pembangunan Jalan
				Rekonstruksi Jalan
				Pemeliharaan Berkala Jalan
				Pemeliharaan Rutin Jembatan
				Rehabilitasi Jembatan
				Pembangunan Jembatan
				Pemeliharaan Berkala Jembatan
				Pelebaran Jembatan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

TUJUAN RPJMD		SASARAN RPJMD / PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR		SUBKEGIATAN PRIORITAS
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
				Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
				Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan
				Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
				Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
		2.3	Meningkatnya kualitas lingkungan	
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
				Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Terhadap Kumuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh Baru
			Program Kawasan Permukiman	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
				Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
				Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
				Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

TUJUAN RPJMD		SASARAN RPJMD / PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR		SUBKEGIATAN PRIORITAS
				Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
				Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
				Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
				Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
				Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
				Pemberian Informasi Peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota
			Program Pengelolaan Persampahan	Pelaksanaan remediasi
				Pelaksanaan rehabilitasi
				Penanganan sampah melalui pengangkutan
				Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
				Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah diinstalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
				Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

TUJUAN RPJMD		SASARAN RPJMD / PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR		SUBKEGIATAN PRIORITAS
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
			Program Penanggulangan Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
		2.4	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan jaminan social masyarakat	
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan dan Penyediaan informasi pasar kerja Online
				Job fair/Bursa kerja
			Program Pelatihan Kerja dan produktivitas tenaga kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Keterampilan bagi pekerja berdasarkan kluster
			Program Hubungan Industrial	Pengembangan Pelaksanaan jaminan social tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan Pekerja
			Program Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
				Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

TUJUAN RPJMD		SASARAN RPJMD / PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR		SUBKEGIATAN PRIORITAS
				Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro
				Penyusunan basis data usaha mikro
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi Kewirausahaan melalui pendidikan dan Pelatihan
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
				Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi
			Program Pengembangan Ekspor	Pameran Dagang Nasional
				Pameran Dagang Lokal
				Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
				Peningkatan Citra Produk Ekspor
			Program Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penyediaan Sandang dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penyediaan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota
			Program Penanganan Bencana	Penyediaan Makanan
				Penyediaan Sandang
				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
			Program Pemberdayaan Sosial	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko

TUJUAN RPJMD		SASARAN RPJMD / PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR		SUBKEGIATAN PRIORITAS
				Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
				Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
3	Meningkatnya Daya Saing Daerah.	3.1	Meningkatnya SDM yang unggul dan berkelanjutan	
			Program Pengelolaan Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembangunan Ruang Kelas Baru Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD

TUJUAN RPJMD		SASARAN RPJMD / PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR		SUBKEGIATAN PRIORITAS
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda
				Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten_Kota dengan Lembaga Terkait
				Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
				Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota
				Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
				Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
				Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
				Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga

TUJUAN RPJMD		SASARAN RPJMD / PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR		SUBKEGIATAN PRIORITAS
				Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
				Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
				Pengembangan Rumah Sakit
				Pengembangan Puskesmas
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
			Program Pembinaan Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
				Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan
				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
				Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat
				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

TUJUAN RPJMD		SASARAN RPJMD / PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR		SUBKEGIATAN PRIORITAS
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, pasokan dan Harga Pangan pokok Strategis
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
				Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
				Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
				Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL
				Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
				Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
		3.2	Meningkatnya inovasi daerah dan penguasaan teknologi informasi.	
			Program Riset dan Inovasi Daerah	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
				Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah
			Program Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
				Penelitian dan Pengembangan bidang asopek-aspek sosial
				Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan dibidang teknologi dan informasi
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
				Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta

TUJUAN RPJMD		SASARAN RPJMD / PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR		SUBKEGIATAN PRIORITAS
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.			rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
				Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
				Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
		4.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Desa	
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
				Reviu Laporan Kinerja
				Reviu Laporan Keuangan
				Pengawasan Desa
				Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Konsultasi Publik
				Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

TUJUAN RPJMD		SASARAN RPJMD / PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR		SUBKEGIATAN PRIORITAS
\			Program Perekonomian dan Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
		Program Administrasi Pemerintahan Desa		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
				Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
				Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
				Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
		Program Penataan Desa		Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
				Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
				Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
				Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
		4.2	Meningkatnya Partisipasi stakeholder dan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah	

TUJUAN RPJMD		SASARAN RPJMD / PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR		SUBKEGIATAN PRIORITAS
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan sosial
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
		4.3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Publik yang humanis	
			Program Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
				Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan
				Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
				Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
			Program Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
				Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil
				Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
				Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan PrajabatanTinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi/ Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan

TUJUAN RPJMD		SASARAN RPJMD / PROGRAM PRIORITAS NOMENKLATUR		SUBKEGIATAN PRIORITAS
				dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pelayanan Informasi Publik
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
				Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada rencana kerja dan pendanaan daerah berisikan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 untuk menunjang arah pembangunan daerah. Rencana kerja berupa daftar rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung tema pembangunan daerah tahun 2026 dan 33 Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati. Adapun kerangka pendanaan pada RKPD tahun 2026 telah memperhitungkan kemampuan kapasitas riil daerah. Anggaran belanja daerah tahun 2026 diperkirakan total sebesar Rp. 3.629.730.879.127,71. Total belanja daerah tersebut dijabarkan dengan rencana kerja berupa rincian program, kegiatan, dan subkegiatan, sebagaimana tabel 5.1.

Beberapa bentuk kegiatan dan arahan lokasi yang menjadi prioritas Bupati dan Wakil Bupati untuk dilaksanakan di tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 5.2
Kegiatan dan Arahan Lokasi Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan
Tahun 2026

No	Bentuk Kegiatan	Lokasi			33 Program Prioritas
		Dusun	Desa	Kecamatan	
1	Jalan Poros Desa	Krikilan	Kedung-pengaron	Kejayan	33PP-31. Pembangunan jalan poros Kabupaten dengan standart Hotmix/Cor
2	Perbaikan Jalan	Krajan dan Sidowayah	Lorokan	Kejayan	
3	Jalan Hotmix	Ranggeh	Ranggeh	Gondang-wetan	
4	Jalan Poros Desa		Pelinggisian	Kraton	
5	Jalan Poros Desa		Watuprapat	Nguling	
6	Pembangunan TPT Jalan Patuguran Lekok		Patuguran	Rejoso	
7	Jalan Poros Desa	Mlokolegi	Watu-lumbung	Lumbang	
8	Jalan Poros Desa (Lumbang - Pancur)		Lumbang	Lumbang	
9	Normalisasi Sungai Rejoso		Patuguran	Rejoso	33PP-14. Pembangunan/ pengadaan sarana pendukung dalam rangka mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir
10	Pembangunan Pintu Air Sungai Lingkung	Bandaran	Jarangan	Rejoso	

No	Bentuk Kegiatan	Lokasi			33 Program Prioritas
		Dusun	Desa	Kecamatan	
11	Hotmix Jalan Kabupaten	Karang-pandan	Karang-pandan	Rejoso	33PP-31. Pembangunan jalan poros Kabupaten dengan standart Hotmix/Cor
12	Pipanisasi Air Bersih	Krikilan	Kedung-pengaron	Kejayan	
13	PPAB untuk Air Minum	Krajan dan Sidowayah	Lorokan	Kejayan	
14	Air bersih		Watuprapat	Nguling	
15	Pipanisasi dari sumber mata air ke pemukiman		Watu-lumbung	Lumbang	
16	Pipanisasi		Bulukanda ng	Lumbang	
17	Sumur Bor	Banyak-putih	Lecari	Sukorejo	
18	IPAL Komunal		Balung-anyar	Lekok	33PP-12. IPAL komunal, Bio gas dan mandiri pakan untuk peternak
19	Teknologi Pertanian	Krajan dan Sidowayah	Lorokan	Kejayan	33PP-10. Merdeka Pupuk, Petani Milenial, Eco Farming dan Pengembangan teknologi pertanian untuk petani
20	Merdeka Pupuk		Sumber-anyar	Nguling	
21	Alat Tangkap Nelayan		Watuprapat	Nguling	
22	Pengeboran Air untuk Pertanian	Bandrek	Mojotengah	Sukorejo	
23	Pembangunan Tambatan Perahu	Gumeng dan Kebonsawah	Kalirejo	Kraton	33PP-11. Penataan kawasan kumuh/kawasan nelayan dan pembangunan Infrastruktur pendukung (tambatan perahu, tangkis laut, dan sarana pendukung lainnya) untuk petani tambak dan nelayan
24	Pembangunan Tanggul Laut		Watuprapat	Nguling	
25	Bantuan Alat Perlengkapan Ikan Asin		Pulokerto	Kraton	33PP-22. Usaha mikro kecil naik kelas berbasis potensi keunggulan daerah
26	Bantuan Permodalan untuk UMKM Ikan Asin Gulama		Pulokerto	Kraton	
27	Bantuan Permodalan untuk UMKM		Sumber-anyar	Nguling	

No	Bentuk Kegiatan	Lokasi			33 Program Prioritas
		Dusun	Desa	Kecamatan	
28	Jalan Usaha Tani	Bandrek	Mojotengah	Sukorejo	33PP-13. Peningkatan Infrastruktur jalan menuju pusat-pusat produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta dukungan infrastruktur menuju daerah wisata
29	TPT Jalan Usaha Tani (alternatif Jalan Keluar Peziarah)	Krajan	Segoropuro	Rejoso	
30	TPT Jalan Desa		Lumbang	Lumbang	33PP-31. Pembangunan jalan poros Kabupaten dengan standart Hotmix/Cor
31	Pagar Makam Pesarean Segoropuro	Krajan	Segoropuro	Rejoso	33PP-30. Pengembangan, perlindungan dan pelestarian seni budaya berbasis kearifan lokal
32	Menaikkan Insentif Guru RA			Lekok, Wonorejo	33PP-06. Peningkatan kesejahteraan pendidik baik formal maupun non formal
33	Tanah Makam	Bandrek	Mojotengah	Sukorejo	33PP-16. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Desa secara merata
34	Rehab Fisik Lembaga Secara Merata			Lekok, Wonorejo	33PP-05. Bantuan kelembagaan untuk Ormas, pondok pesantren, sekolah keagamaan, dan tempat ibadah
35	Bantuan Laptop di masing-masing lembaga			Lekok, Wonorejo	
36	Kajian (feasibility study) pembangunan islamic center			-	33PP-29. Islamic Centre dan perpustakaan daerah yang representative
37	Pengolahan kotoran hewan untuk pupuk organik			Lekok	33PP-10. Merdeka Pupuk, Petani Milenial, Eco Farming dan Pengembangan teknologi pertanian untuk petani

Berdasarkan pertimbangan kemampuan pendapatan daerah yang terbatas dan percepatan pencapaian target pembangunan daerah melalui 33 program prioritas, telah diupayakan **pengajuan usulan berupa proposal kepada Pemerintah Pusat** untuk memperoleh pendanaan terhadap beberapa kegiatan prioritas/strategis, yaitu:

- Peningkatan sarana parasarana pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar (TK, SD, dan SMP).
- Peningkatan sarana prasarana kesehatan, yaitu pembangunan Rumah Sakit di Wilayah Selatan, penambahan rawat inap kelas standar di RSUD Bangil, dan perluasan ruang tunggu klinik rawat jalan dan ruang tunggu pasien di RSUD Grati.

- Peningkatan insfrastruktur sektor sanitasi berupa penanganan kawasan kumuh terintegrasi.
- Penataan Ibukota Bangil, yaitu pembangunan jalan lingkaran Utara dan Selatan.
- Revitalisasi sarana perdagangan, yaitu Pasar Wisata Chengho dan Pasar Bangil.
- Penanganan bencana banjir.
- Penanganan persampahan.
- Pengembangan obyek wisata Banyubiru.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah yang didukung oleh Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3
 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Pelaksanaan
 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026

NO	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD

NO	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				Pembangunan Ruang Kelas Baru
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
				Pembangunan Ruang Kelas Baru
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

NO	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

NO	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				Pembangunan Ruang Kelas Baru
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
				Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

NO	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
2	KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
3	PEKERJAAN UMUM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

NO	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
				Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab / Kota
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
4	PERUMAHAN RAKYAT	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
				Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
				Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

NO	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota
5	KETERTIBAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
				Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

NO	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
				Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

NO	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
				Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
				Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

NO	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
				Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
6	SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
				Penyediaan Alat Bantu
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
				Pemberian Layanan Rujukan
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan
				Penyediaan Sandang
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, layanan umum dan daya saing daerah. Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil dari indikator sasaran dan indikator tujuan. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dasarnya merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan.

6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pada sub bab ini dipaparkan capaian tahun 2024, proyeksi tahun 2025 dan target indikator kinerja utama Kabupaten Pasuruan tahun 2026. Target yang digunakan sebagai acuan dalam RKPD tahun 2026 adalah target indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Berikut merupakan capaian, proyeksi dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

Tabel 6.1
Capaian, Proyeksi, dan Target Indikator Kinerja Utama
Tahun 2024 – 2026

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
A.	INDIKATOR TUJUAN				
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	81,44	81,82	82,19
2	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,34	4,15-5,40	4,23-5,45
3	Rasio Gini	Rasio	0,331	0,318-0,358	0,317-0,357
4	Indeks Ekonomi Berkelanjutan	Indeks	72,59	72,60	72,61
5	Tingkat Kemiskinan	Persen	8,63	7,14-8,39	7,1-8,12
6	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	3,36	3,42	3,48
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	83,35	84,80	86,20
8	Indeks Integritas	Indeks	69,34 (Rentan)	70,60	71,90
B.	INDIKATOR SASARAN				

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
9	Indeks Kebudayaan Daerah (IKD)	Indeks	55,12	59,61	61,07
10	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	62,17	62,75	63,25
11	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,346	0,335	0,324
12	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	60,65	60,66	60,68
13	Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	3,78	3,38-4,23	3,43-4,42
14	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	0,72	0,48-1,54	0,57-1,82
15	Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persentase PDRB ADHK)	Persen	30,74	27,62-31,15	27,80-30,16
16	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Rasio	6,06	6,03	6,01
17	Indeks Infrastruktur Wilayah	Indeks	68,73	68,76	68,79
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	65,06	71,68	71,76
19	Penurunan Emisi GRK kumulatif	Ton CO2 eq	4.062,02	4.143,26	4.226,12
20	Indeks Risiko Bencana	Indeks	109,38	108,88	108,38
21	PDRB Perkapita	Juta Rp	121,69	121,89-128,16	122,23-130,33
22	Rasio Kewirausahaan	Persen	1,57	1,81	2,05
23	Persentase PPKS	Persen	3,59	2,50	2,39
24	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,36	72,21-72,56	72,28-72,88
25	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,02	5,38-4,67	5,37-4,43
26	Prevalensi Ketidacukupan Pangan	Persen	10,37	7,48	7,18
27	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Indeks	67,70 (sangat inovatif)	68,32	68,93
28	Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	4,14	5,00	5,13
29	Nilai AKIP	Nilai	76,74	77,66	78,67
30	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
31	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Indeks	56,55 (cukup)	58,79	61,03
32	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,52 (A)	4,55	4,58
33	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	93,41	93,68	93,94
34	Indeks SPBE*	Indeks	3,88	4,18	-
	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	-	-	1,6-1,92

Keterangan: *Instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital mulai tahun 2026 sehingga target disesuaikan

6.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Pada sub bab ini dipaparkan capaian tahun 2024, proyeksi tahun 2025 dan target indikator kinerja daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2026. Target yang digunakan sebagai acuan dalam RKPD tahun 2026 adalah target indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Berikut merupakan capaian, proyeksi dan target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

Tabel 6.2
Capaian, Proyeksi, dan Target Indikator Kinerja Daerah
Tahun 2024 – 2026

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
A.	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,06	71,68	71,76
2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	5,18	5,99	6,8
3	Timbulan sampah terolah difasilitas pengolahan sampah	Persen	14,89	15,54	16,19
4	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	11	20	25
5	Jumlah Sampah Terproses di TPA	Ton	-	50.101,60	0
6	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2 eq	4.062,02	4.143,26	4.226,12
7	Indeks Risiko Bencana	Indeks	109,38	108,88	108,38
8	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	Persen	10,37	7,48	7,18
9	Konsumsi Listrik perKapita	kWh/kapita	6.828,28	7.126,77	7.438,30
10	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	7,53	18,43	23,05
11	Rasio Kebutuhan Air baku dan Ketersediaan Air Baku				
	Irigasi	Persen	73,23	73,31	73,39
	Air Minum	Persen	15,47	15,56	15,65
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,93	0,73	0,70

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
II.1	Kesejahteraan Ekonomi				
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,34	4,15-5,40	4,23-5,45
14	Rasio Gini	Rasio	0,331	0,318-0,358	0,317-0,357
15	Tingkat Kemiskinan	Persen	8,63	7,14-8,39	7,1-8,12
16	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,02	5,38-4,67	5,37-4,43
17	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,36	72,21-72,56	72,28-72,88
18	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,61	74,74	74,99
19	PDRB perkapita	Juta Rupiah	121,69	121,89-128,16	122,23- 130,33
20	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	77,40	76,41-86,81	74,41-85,81
21	Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	26,1	20,46	19,73
22	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis (Treatment Coverage)	Persen	90	90	90
23	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (Treatment Succes Rate)	Persen	90	90	90
24	Cakupan Kepesertaan JKN	Persen	100	100	100
25	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum asesmen literasi (Angka literasi)				
	SD/MI	Persen	80	83	83,85
	SMP/MTs	Persen	79,50	83	83,85
26	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum asesmen numerasi (Angka Numerasi)				
	SD/MI	Persen	77	84	84,80
	SMP/MTs	Persen	78,09	84	84,80
27	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	Tahun	7,94	8,05	8,16
28	Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 7 Tahun	Tahun	12,78	12,79	12,81
29	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas	Persen	5,36	8,9	8,99

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
	yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi				
30	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	12,93	31,97	33,51
31	Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	Persen	33,27	37,59	47
32	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	81,44	81,82	82,19
33	Indeks Kebudayaan Daerah	Indeks	55,12	59,61	61,07
34	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	62,17	62,75	63,25
35	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,346	0,335	0,324
36	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,17	91,34	91,52
37	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	63,64 (2023)	64,62	65,11
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
38	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	60,65	60,66	60,68
39	Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	3,78	3,38-4,23	3,43-4,42
40	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Orang	32.004	32.106	33.069
41	Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro	Persen	3,50	3,51	3,52
42	Proporsi Jumlah Industri Menengah dan Besar	Persen	4,98	8,79	9,39
43	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB ADHB	Persen	0,70	0,71	0,72
44	Return on Asset (ROA) BUMD	Persen	5,86	7,31	8,14
45	Rasio Pajak Daerah dalam PDRB	Persen	0,26	0,27	0,28
46	Realisasi Investasi	Triliun (Rp)	12,85	16,50	16,51
47	Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Pertanian-Perikanan	Persen	5,73	5,75	5,83
48	Indeks Ekonomi Berkelanjutan	Indeks	72,59	72,60	72,61
49	Kontribusi PDRB Kabupaten Pasuruan terhadap Jawa Timur	Persen	6,37	6,38	6,39
50	Rasio kewirausahaan	Persen	1,57	1,81	2,05

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
51	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	63,27	63,80	64,32
52	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Indeks	67,70 (sangat inovatif)	68,32	68,93
53	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,36	3,42	3,48
54	Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	4,14	5,00	5,12
55	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB ADHK	Persen	30,74	27,62-30,15	27,80-30,16
56	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persen	10,95	10,79	10,63
57	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Rasio	6,06	6,03	6,01
58	Indeks Infrastruktur Wilayah	Indeks	68,73	68,76	68,79
59	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persen	77,19	78,00	79,28
60	Persentase Desa Mandiri*	Persen	39,30	9,97	12,32
61	Tingkat Inflasi**	Persen	1,90	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5
62	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	2,90	3,01	3,06
63	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	0,72	0,48-1,54	0,57-1,82
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM				
64	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	83,35	84,80	86,20
65	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,52 (A)	4,55	4,58
66	Indeks Integritas	Indeks	69,34 (Rentan)	70,60	71,90
67	Indeks SPBE***	Indeks	3,88	4,18	-
	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	-	-	1,6-1,92
68	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	93,41	93,68	93,94
69	Persentase pelanggaran perda dan gangguan trantibum yang diselesaikan	Persen	100	100	100

Keterangan : *Capaian Persentase Desa Mandiri tahun 2024 menggunakan IDM sedangkan target mulai 2025 menggunakan indeks desa

**Tingkat Inflasi di Kabupaten Pasuruan tidak dihitung oleh BPS sehingga menggunakan data inflasi Kabupaten/Kota terdekat yaitu Kota Probolinggo

***Instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital mulai tahun 2026 sehingga target disesuaikan

V	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	81,83	84,26	86,69
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	98,75	98,85	98,95
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	97,39	97,74	98,10
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	35,47	43,68	51,88
2	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Rasio	0,7730	0,07876	0,08022
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	86,66	100	100
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	94,11	100	100
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	97,49	100	100
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	100	100

V	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	98,24	100	100
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	97,96	100	100
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	100
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100	100
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	100	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	100	100	100
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	Persen	73,83	73,84	73,85

V	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
		terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota				
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	69,48	69,49	69,5
		Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	Persen	68,85	68,87	68,89
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	75,19	81,83	82,37
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	34,88	36,17	37,46
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	100
4	Perumahan Rakyat					
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Persen	100	100	100
		Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	0	0	0
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	Persen	18,39	24,87	24,89
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	2,57	2,56	3,50
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	29,73	29,83	29,93
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan					
		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100

V	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
	Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	68,75	68,80	68,90
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	65.732	65.732	65.732
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	2.365	3.320	3.320
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	103.100	1.000	1.000
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	9,15	15	15
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	77,84	100	100
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Persen	77,69	100	100
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	77	77,10	77,20
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	23,34	25	26

V	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/ Tahun	137.856.913	139.235.482,13	140.627.837
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB. LKS Bipartit. Struktur Skala Upah. dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	9,70	9,80	9,89
		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Persen	44,27	44,70	45,23
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	23,18	23,23	23,28
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	Persen	100	100	100
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	6,02	5,82	5,62
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	49,30	51,77	54,36
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	100	100	100
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	0	0	0
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Persen	48,79	48,82	48,84

V	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	0	0	0
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	0	0	0
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100	100	100
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Indeks	65,06	71,68	71,76
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	Persen	17,36	30	32,30
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	20	19,73	19,71
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik	Persen	100	100	100
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	45,63	50	55
		Kepemilikan akta kelahiran	Persen	91,72	92	93
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	6,45	19,36	25,80
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persen	100	100	100
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	1,72	3,57	3,70
14	Pengendalian Penduduk dan	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	1,88	1,90	1,92

V	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
	Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	76,72	77,27	77,82
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	3,38	3,28	3,18
15	Perhubungan	Rasio Konektivitas	Persen	48,48	51,52	77,27
		Kinerja Lalu lintas Kabupaten/kota	Persen	0,37	0,36	0,36
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	11,36	13,64	15,91
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik. Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	250,16	74,97	75,09
17	Kopertasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	100	100	100
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	66,27	67,04	68,02
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Pasuruan	Persen	5,30	5,31	5,32
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0,66	0,67	0,67
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	23,14	23,37	23,61

V	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
		Peningkatan prestasi olahraga	Medali	96	110	100
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi Pemerintah	Persen	49,92	49,92	54,26
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100	100	100
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	74,33	74,50	75
		Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	59,56	60,69	62,79
24	Kearsipan	Tingkat Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja. alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	Persen	100	100	100
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara. pemerintahan. pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	45,53	46	46,50
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap	Ton	47.666,34	47.857,01	48.058

V	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
		dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)				
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	69,09	69,15	70,38
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Persen	13,01	13,05	13,59
		Tingkat hunian akomodasi	Persen	0,6377	0,6696	0,7031
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	16,61	16,78	16,94
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	1,80	1,769	2,072
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	621,65	622,27	622,96
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	-8,50	-9	-9,25
28	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	0,430	0,435	0,440
		Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	64,7365	64,7386	64,7407
		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	100	100	100
29	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persen	95,83	36,09	10,51

V	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)	Persen	100	100	100
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	100	100	100
30	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	0
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	98,230	98,235	98,236
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	22,54	25	26
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Pada Pelaksanaan	Persen	-10,40	40	41

V	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
		Pengadaan Barang/Jasa				
31	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				
		a. Pendidikan Tinggi	Persen	56,06	56,08	56,10
		b. Menengah	Persen	39,26	39,24	39,22
		c. Dasar	Persen	4,72	4,70	4,68
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehat)	Persen	14,87	14,90	14,92
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	58,16	58,20	58,22
32	Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	-7,17	-9,95	-9
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	17,25	16	15,50
		Manajemen Aset :		4	4	4
		1. Apakah ada daftar asset tetap?		Ya	Ya	Ya
		2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap?		Ya	Ya	Ya
		3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan?		Ya	Ya	Ya
		4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran?		Ya	Ya	Ya
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	5,36	8,32	8,27
33	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3 (3,244)	Level 3 (3,245)	Level 3 (3,250)

V	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3 (3,00)	Level 3 (3,02)	Level 3 (3,03)
		Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	6,64	35,39	33,04
		Rasio PAD	Persen	23,84	27,06	32,25
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	67,92	68,46	69,03
		Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP
34	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	71,98	75,30	70,56
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	100	100	100
		Persentase realisasi belanja urusan pelayanan dasar	Persen	92,70	92,89	93,07
		Persentase penurunan SILPA	Persen	25,29	-0,55	-0,75
		Pertambahan nilai asset tetap	Persen	4,80	5 - 6	5 - 6

BAB VII

PENUTUP

RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan visi-misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029. Bab ini menjelaskan beberapa hal yaitu Kesimpulan penting, kaidah pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi.

7.1. Kesimpulan Penting

Kesimpulan penting RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Asumsi/target indikator makro tahun 2026 berdasarkan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yaitu: laju pertumbuhan ekonomi 5,20 – 5,85%, TPT 5,37 – 4,60%, angka kemiskinan 8,12 – 7,87%, rasio gini 0,353 – 0,313, dan potensi penurunan GRK 4.143,66 ton CO₂ eq.
2. Tema pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2026 telah selaras dengan tema pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur, yaitu “Hilirisasi dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah melalui Integrasi dan Kolaborasi Lintas Sektoral untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”.
3. Prioritas pembangunan daerah (PPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2026 yaitu:
 - 1) **(PPD-1)** Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan angkatan kerja yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing.
 - 2) **(PPD-2)** Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri/usaha pengolahan dan ketahanan pangan dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas.
 - 3) **(PPD-3)** Pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif berbasis usaha mikro kecil.
 - 4) **(PPD-4)** Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital.

Prioritas pembangunan daerah dilaksanakan melalui **33 Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati** untuk mewujudkan visi-misi RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029.

7.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yang harus diperhatikan:

1. RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan APBD Tahun 2026.
2. RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.
3. Selama pelaksanaan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian akibat perubahan kondisi atau asumsi yang melandasi prioritas pembangunan, kerangka ekonomi, keuangan daerah, serta rencana program, kegiatan, dan subkegiatan, maka akan dilakukan penyesuaian dalam bentuk Perubahan RKPD Tahun 2026 dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 disampaikan kepada Gubernur melalui BAPPEDA Provinsi Jawa Timur paling lambat tujuh hari setelah ditetapkan.

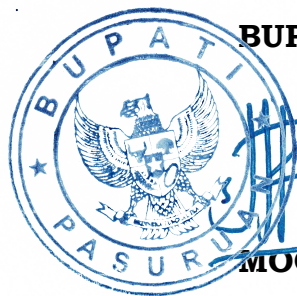
7.3. Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dilakukan pengendalian dan evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengendalian RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2026 meliputi pemantauan atau monitoring pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang telah dianggarkan dan ditetapkan dalam APBD Tahun 2026.
2. Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan sesuai dengan tugas

dan fungsi, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala setiap triwulan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang perencanaan.

3. Laporan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada nomor 2, meliputi perkembangan capaian kinerja dan anggaran, faktor pendorong, dan faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan melalui aplikasi atau sistem informasi yang tersedia paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya triwulan.
4. Evaluasi dilakukan secara terukur melalui pencapaian target indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah, sebagai bahan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah dan dasar penentuan target tahun berikutnya
5. Hasil pengendalian dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dalam pelaksanaan triwulan berikutnya dan penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya.



BUPATI PASURUAN,

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

